

The Fed Tunjuk Tim Ahli untuk Tinjau Strategi Kebijakan Moneter

Jumat, 10 Juli 2026 07:10 WIB

Enda Curran dan Maya Prakash

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114527/the-fed-tunjuk-tim-ahli-untuk-tinjau-strategi-kebijakan-moneter/2>

Bloomberg, Gubernur Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh mengumumkan pembentukan kepemimpinan lima gugus tugas (task force) yang akan mengkaji pendekatan bank sentral AS terhadap berbagai aspek utama dalam perumusan kebijakan, dengan tujuan membuka peluang dilakukannya perubahan besar.

Para pemimpin gugus tugas tersebut terdiri dari akademisi terkemuka, mantan bankir sentral, dan eksekutif perusahaan. Mereka diminta mengkaji strategi komunikasi The Fed, pengelolaan neraca senilai US\$6,7 triliun, penggunaan dan ketergantungan terhadap sumber data yang ada, produktivitas dan lapangan kerja, serta kerangka kebijakan inflasi. Warsh, yang mulai menjabat sebagai Gubernur The Fed pada Mei, sebelumnya menyerukan adanya "perubahan rezim" di bank sentral dan perombakan terhadap cara lembaga itu menjalankan kebijakan moneter.

"Setiap gugus tugas akan mempertimbangkan secara saksama apakah metode, perangkat analisis, dan pendekatan kebijakan yang digunakan para pembuat kebijakan dapat ditingkatkan," kata Warsh dalam pernyataannya pada Kamis.

"Tujuannya sederhana, yaitu memastikan The Fed berada pada posisi terbaik untuk mencapai mandatnya di masa yang sangat penting ini," ujarnya.

Warsh menunjuk sejumlah mantan pembuat kebijakan untuk memimpin gugus tugas tersebut, termasuk mantan Gubernur Bank of England Mervyn King, yang memimpin bank sentral Inggris saat krisis keuangan global 2008–2009, serta mantan Presiden Bank Sentral Brasil Arminio Fraga, yang dikenal karena mempertahankan independensi bank sentral negaranya dari campur tangan politik. Raghuram Rajan, mantan Gubernur Reserve Bank of India yang dikenal karena peringatannya jauh sebelum krisis keuangan global terjadi, juga akan menjadi salah satu ketua bersama dalam salah satu gugus tugas.

Nama lain yang terlibat antara lain Karen Dynan dari Universitas Harvard, yang sebelumnya pernah menduduki jabatan senior di Departemen Keuangan AS pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, serta mantan Chief Executive Officer (CEO) Walmart Inc., Doug McMillon.

Kepala Ekonom RSM US, Joe Brusuelas, mengatakan daftar pemimpin gugus tugas tersebut menghadirkan pengalaman yang sangat kuat, meski ia mengingatkan bahwa mereka juga akan menghadapi tantangan.

"Ini adalah daftar yang sangat mengesankan yang disusun oleh Ketua Warsh dan saya yakin akan memperkaya diskusi mengenai berbagai isu penting," kata Brusuelas.

"Namun, The Fed sudah memiliki banyak ekonom bergelar doktor (Ph.D.) yang telah meneliti bidang-bidang tersebut. Jadi saya belum sepenuhnya yakin bahwa gugus tugas ini akan memberikan pemahaman baru mengenai produktivitas dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)," tambahnya, merujuk pada salah satu gugus tugas.

Warsh sebelumnya mengatakan pada Juni bahwa kelima gugus tugas tersebut diharapkan menyampaikan kesimpulannya sebelum akhir tahun. Para ahli dari luar yang terlibat juga akan didukung oleh staf Federal Reserve dalam menjalankan pekerjaannya.

Jepang Dorong Dana Pensiun Pulang Kampung, Pasar Global Waspadai Arus Modal Berbalik

Jumat, 10 Juli 2026 22:58 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-dorong-dana-pensiun-pulang-kampung-pasar-global-waspadai-arus-modal-berbalik>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang mulai mendorong dana pensiun raksasa negara itu untuk meningkatkan investasi di aset domestik.

Langkah ini dinilai berpotensi membalik arus modal yang selama bertahun-tahun mengalir ke luar negeri pada era mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, sekaligus menguatkan yen dan menopang pembiayaan sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI).

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama pada Jumat (10/7/2026) mengusulkan agar Government Pension Investment Fund (GPIF) senilai US\$ 1,8 triliun, bersama dana pensiun lainnya, memperbesar kepemilikan aset di dalam negeri.

Pernyataan tersebut langsung memicu lonjakan harga obligasi pemerintah Jepang (Japanese Government Bonds/JGB) terbesar dalam hampir dua tahun terakhir.

Nilai tukar yen juga menguat dari posisi terendahnya dalam beberapa dekade setelah pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan dana investasi yang selama ini mengalir ke luar negeri akan kembali ke Jepang.

Meski belum ada rincian kebijakan yang diumumkan, pelaku pasar menilai langkah tersebut berpotensi menjadi salah satu perubahan terbesar dalam arus modal global dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Perdagangan Valuta Asing Asia Pasifik Citi Nathan Swami mengatakan, jika kebijakan itu benar-benar dijalankan, dampaknya terhadap pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap yen akan sangat signifikan, meski suku bunga Amerika Serikat tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar.

Selama bertahun-tahun, perusahaan asuransi jiwa Jepang menjadi pembeli dolar AS yang agresif setelah pemerintahan Shinzo Abe mendorong GPIF meningkatkan investasi di luar negeri demi mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Pada 2025, Jepang tercatat memiliki aset luar negeri senilai 561,75 triliun yen atau sekitar US\$ 3,53 triliun, terbesar ketiga di dunia setelah Jerman dan China. Dari jumlah tersebut, sekitar US\$ 930 miliar dikelola oleh GPIF yang merupakan dana pensiun terbesar di dunia.

Juru bicara GPIF menolak memberikan komentar terkait pernyataan Menteri Keuangan tersebut.

Setelah kabar itu muncul, yen menguat sekitar 0,4% ke level 161,76 per dolar AS, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun turun 17,5 basis poin menjadi 2,7%.

Di sisi lain, pasar obligasi di Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia relatif stabil. Investor masih menunggu kepastian apakah Jepang benar-benar akan mengalihkan porsi investasi dana pensiunnya ke aset domestik.

Kepala Suku Bunga Internasional Vanguard Ales Koutny mengatakan Jepang selama ini merupakan pembeli utama obligasi global, terutama obligasi jangka panjang.

Menurutnya, jika alokasi investasi ke obligasi pemerintah Jepang benar-benar meningkat secara signifikan, premi risiko obligasi di berbagai negara dapat ikut terdorong naik.

Kemungkinan kembalinya dana investasi ke Jepang telah lama menjadi salah satu skenario yang diperhitungkan pelaku pasar.

Selama ini, arus modal keluar menjadi salah satu penyebab yen terus melemah sejak 2014, ketika Shinzo Abe mendorong GPIF mengurangi kepemilikan obligasi domestik dan meningkatkan investasi pada saham serta aset luar negeri karena rendahnya imbal hasil di Jepang dan tekanan populasi yang menua.

Kini, Perdana Menteri Sanae Takaichi dikabarkan mempertimbangkan memanfaatkan dana pensiun tersebut untuk membalik tren tersebut.

Selain membantu memperkuat yen, dana yang kembali ke Jepang diharapkan dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek pertumbuhan seperti AI, semikonduktor, dan pertahanan.

Momentum tersebut dinilai cukup mendukung karena pasar saham Jepang tengah menguat, sementara imbal hasil obligasi domestik menjadi semakin menarik. Indeks Nikkei telah naik 36% sepanjang tahun ini hingga mencetak rekor baru secara berturut-turut.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun sempat menyentuh level tertinggi sejak 1996. Kepala Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga OCBC Frances Cheung menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali komposisi investasi antara aset domestik dan luar negeri.

Menurutnya, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang kini sudah setara bahkan lebih menarik dibandingkan obligasi pemerintah AS setelah memperhitungkan lindung nilai mata uang.

Meski demikian, kenaikan imbal hasil obligasi Jepang juga mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal negara tersebut.

Yen pun tetap berada di level lemah meski Bank of Japan telah menaikkan suku bunga dan pemerintah melakukan intervensi valuta asing dalam jumlah terbesar sepanjang tahun ini.

Ekonom Jepang Oxford Economics Norihiro Yamaguchi menilai gagasan tersebut mengingatkan pada upaya Korea Selatan yang pernah mendorong dana pensiunnya menopang nilai tukar won pada Desember lalu, tetapi belum menunjukkan hasil berarti.

Ia meragukan kebijakan itu cukup kuat mengubah tren pelemahan yen yang masih dipengaruhi fundamental ekonomi.

Meski begitu, kuatnya reli obligasi pemerintah Jepang pada Jumat menunjukkan pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan besar arus dana investasi kembali ke pasar domestik.

Ekonom Kepala Asia HSBC Fred Neumann mengatakan repatriasi aset dalam skala besar menjadi bagian yang selama ini belum terwujud dalam proses pemulihan ekonomi Jepang.

Menurutnya, meski suku bunga domestik meningkat dan pasar saham mencetak kinerja kuat, investor Jepang sejauh ini masih belum menunjukkan minat besar untuk mengurangi kepemilikan aset luar negeri dan mengalihkan dana kembali ke pasar domestik.

Pemasok Nvidia, KYEC Siapkan Investasi US\$1,4 Miliar Untuk Bangun Fasilitas di AS

Jumat, 10 Juli 2026 19:58 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/pemasok-nvidia-kyec-siapkan-investasi-us14-miliar-untuk-bangun-fasilitas-di-as>

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Perusahaan pengujian chip Taiwan, King Yuan Electronics (KYEC), berencana untuk menginvestasikan hingga US\$1,4 miliar untuk membangun fasilitas di Amerika Serikat, demikian kata pemasok untuk pembuat chip Nvidia pada hari Jumat (10/7).

King Yuan Electronics mengatakan investasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan operasional dan memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global.

Perusahaan semikonduktor dan elektronik Taiwan telah memperluas manufaktur di Amerika Serikat sejak investasi miliaran dolar TSMC di Arizona.

Asal tahu saja, Foxconn dan Wistron sedang membangun kapasitas manufaktur server AI di Texas untuk Nvidia.

King Yuan Electronics tidak menyebutkan pelanggan mana yang akan dilayani oleh fasilitas AS yang direncanakan tersebut dan tidak mengungkapkan lokasinya atau memberikan jadwal konstruksi.

Xi dan Korea Utara Perkuat Kolaborasi, Sepakat Percepat Kerja Sama Strategis

Jumat, 10 Juli 2026 19:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/xi-dan-korea-utara-perkuat-kolaborasi-sepakat-percepat-kerja-sama-strategis>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Presiden China Xi Jinping mendorong China dan Korea Utara mempercepat implementasi berbagai kesepakatan kerja sama yang telah dicapai bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Langkah ini dilakukan di tengah situasi geopolitik global yang dinilai semakin bergejolak.

Seruan tersebut disampaikan Xi saat menerima Perdana Menteri Korea Utara Pak Thae Song di Beijing, Jumat (10/7/2026).

Pak melakukan kunjungan selama tiga hari untuk menghadiri peringatan 65 tahun Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Bantuan Timbal Balik antara kedua negara.

Xi menegaskan China dan Korea Utara perlu menjaga keteguhan strategis serta memperkuat kepercayaan satu sama lain agar hubungan bilateral terus berkembang.

"Kedua negara harus menjaga keteguhan strategis, memperkuat kepercayaan diri, serta mempercepat pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai agar hubungan kedua negara terus mengikuti perkembangan zaman," ujar Xi, seperti dikutip media pemerintah China, CCTV.

Selain itu, Xi menekankan pentingnya kedua negara menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan masing-masing di tengah dinamika internasional yang terus berubah.

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari kunjungan Xi ke Pyongyang pada bulan lalu, yang merupakan kunjungan pertamanya ke Korea Utara dalam tujuh tahun terakhir. Dalam pertemuan dengan Kim Jong Un, kedua pemimpin sepakat memperluas kolaborasi di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Hubungan Beijing dan Pyongyang memang terus menunjukkan tren membaik sejak akhir 2025. Kedua negara meningkatkan intensitas komunikasi diplomatik serta kembali membuka layanan kereta penumpang dan penerbangan langsung yang sempat terhenti selama pandemi Covid-19.

Peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan juga menjadi simbol eratnya hubungan kedua negara. Perjanjian yang ditandatangani pada 11 Juli 1961 itu hingga kini masih menjadi satu-satunya pakta pertahanan bersama yang masih aktif dimiliki China.

Beijing juga terus berupaya memperkuat kembali hubungan dengan Pyongyang setelah pandemi membatasi interaksi kedua negara. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin eratnya hubungan Korea Utara dengan Rusia, termasuk melalui dukungan militer dan persenjataan kepada Moskow dalam perang di Ukraina.

Meski demikian, sejumlah analis menilai ruang penguatan hubungan China dan Korea Utara tetap memiliki batas, mengingat Pyongyang telah memperoleh dukungan ekonomi yang signifikan dari Rusia dalam beberapa tahun terakhir.

Pak Thae Song sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri Korea Utara sejak Desember 2024.

Tokoh yang dikenal sebagai bagian dari lingkaran dekat Kim Jong Un itu telah lama berkarier di Partai Buruh Korea dan menangani berbagai bidang, mulai dari propaganda hingga kebijakan industri, sains, dan pendidikan. Ia juga tercatat hanya beberapa kali melakukan kunjungan luar negeri, terutama ke China dan Rusia.

Kerjasama Regional Mendukung Pembayaran Lintas Negara di ASEAN

Jumat, 10 Juli 2026 14:55 WIB

Sumber: Tech in Asia, Editor: Ahmad Febrian

<https://internasional.kontan.co.id/news/kerjasama-regional-mendukung-pembayaran-lintas-negara-di-asean>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seiring semakin eratnya hubungan ekonomi antarnegara ASEAN, perdagangan dan transaksi digital lintas negara di kawasan Asia Tenggara terus bertumbuh.

Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi untuk mendukung aktivitas pelaku usaha.

Melihat peluang tersebut, grup financial technology (fintech) asal Singapura, M-DAQ Global memperkuat infrastruktur pembayaran regional dengan menggandeng METech, pemegang saham mayoritas PayME, penyelenggara layanan pembayaran berlisensi di Vietnam.

M-DAQ yang beroperasi di Indonesia melalui PT MDAQ Indonesia Technologies (Wallex) menilai langkah ini akan memperkuat konektivitas pembayaran lintas negara di Asia Tenggara. Termasuk mendukung pelaku usaha Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis di Vietnam.

Integrasi tersebut bagian dari upaya M-DAQ membangun ASEAN Payments Hub yang menghubungkan layanan penerimaan pembayaran, konversi valuta asing dan pembayaran lintas negara dalam satu ekosistem regional.

Dikutip dari Tech in Asia, melalui integrasi ini, M-DAQ memperoleh infrastruktur pembayaran berlisensi di Vietnam sehingga dapat memproses penerimaan maupun pembayaran lokal dalam mata uang Vietnamese Dong (VND).

Akses langsung terhadap jaringan pembayaran lokal tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan pada mitra pihak ketiga, mempercepat proses transaksi, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bagi pelaku usaha yang bertransaksi antara Indonesia dan Vietnam.

Vietnam dipandang sebagai salah satu pasar strategis di ASEAN karena memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Keahlian METech di bidang teknologi, regulasi, serta hubungan dengan industri perbankan di Vietnam diharapkan dapat melengkapi jaringan regional yang telah dibangun M-DAQ melalui ekspansinya di Malaysia dan Indonesia.

Menurut Stripe, nilai transaksi pembayaran digital di Vietnam mencapai hampir US\$ 24 miliar pada 2024. Menjadikannya pasar pembayaran digital terbesar keempat di Asia Tenggara.

Dengan bergabungnya METech, M-DAQ kini memiliki lima lisensi yang teregulasi, termasuk di empat pasar utama ASEAN. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan pembayaran lintas negara, baik untuk transaksi intra-ASEAN maupun antara kawasan ASEAN dengan pasar global.

Bagi Indonesia, langkah ini seiring pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat. Nilai gross merchandise value (GMV) Indonesia diperkirakan mendekati US\$ 100 miliar pada tahun 2025. Didukung oleh ekosistem pembayaran digital yang menjadi salah satu yang terbesar dan bertumbuh paling cepat di Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia dan Vietnam telah menargetkan nilai hubungan ekonomi bilateral mencapai US\$ 18 miliar pada tahun 2028. Termasuk melalui penguatan kerja sama di sektor ekonomi digital, industri berteknologi tinggi, serta konektivitas sistem pembayaran antarbank sentral.

Group CEO M-DAQ Global, Tan Choon Seng mengatakan, Vietnam merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di ASEAN dan menjadi bagian penting dari strategi ekspansi perusahaan di kawasan.

"Vietnam merupakan salah satu pasar pertumbuhan paling dinamis di ASEAN dan menjadi pilar penting dalam transformasi digital di Asia Tenggara," ujar Tan Choon Seng, Jumat (10/7).

Langkah tersebut diharapkan membuka peluang baru di kawasan, memperkuat konektivitas antarpasar, serta mendukung pengembangan layanan pembayaran lintas negara yang mampu mengikuti kebutuhan bisnis di Asia Tenggara.

Permintaan Lesu, Diskon Harga Emas di India Makin Dalam, China Terus Tambah Cadangan

Jumat, 10 Juli 2026 13:48 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/permintaan-lesu-diskon-harga-emas-di-india-makin-dalam-china-terus-tambah-cadangan>

KONTAN.CO.ID - Diskon harga emas di India semakin melebar pada pekan ini seiring melemahnya permintaan akibat tingginya volatilitas harga. Di sisi lain, permintaan emas di China tetap stabil, didukung pembelian besar-besaran oleh bank sentral negara tersebut.

Mengutip Reuters, Jumat (10/7/2026), harga emas spot dunia turun ke level terendah dalam dua pekan setelah sempat melonjak lebih dari 2% pada pekan lalu.

Di India, harga emas domestik diperdagangkan di kisaran 144.800 rupee per 10 gram pada Jumat, turun dari rekor 148.069 rupee yang tercapai pekan lalu.

"Pembeli kini memilih menunggu penurunan harga yang lebih besar sebelum kembali membeli emas," ujar pemilik pedagang grosir emas Chenaji Narsinghi di Mumbai, Ashok Jain.

Kondisi tersebut membuat para dealer di India menawarkan emas dengan diskon hingga US\$19 per ons dibandingkan harga resmi domestik, termasuk bea masuk 15% dan pajak penjualan 3%.

Pada pekan sebelumnya, emas masih diperdagangkan dengan premi hingga US\$5 per ons atau diskon maksimal US\$7 per ons.

Seorang dealer logam mulia dari bank swasta di Mumbai mengatakan pembelian ritel melambat dan sebagian besar transaksi saat ini berupa tukar tambah perhiasan lama dengan yang baru.

"Akibatnya, para peritel perhiasan tidak banyak membeli emas dari bank untuk mengisi kembali persediaan mereka," katanya.

Sementara itu, pasar emas China menunjukkan permintaan yang relatif stabil. Emas batangan diperdagangkan mulai dari diskon US\$1 hingga premi US\$5 per ons terhadap harga spot global. Pada pekan sebelumnya, emas diperdagangkan pada harga setara hingga diskon US\$2 per ons.

Direktur Regional Greater China MKS PAMP Bernard Sin mengatakan, Bank Sentral China menambah cadangan emas sebanyak 480.000 ons pada Juni 2026.

Tambahan tersebut menjadi kenaikan bulanan terbesar dalam lebih dari dua setengah tahun sekaligus memperpanjang tren pembelian selama 20 bulan berturut-turut.

Dengan penambahan tersebut, total cadangan emas China mencapai 75,44 juta ons.

"Pembelian yang bersifat kontra-siklus ini membantu menjaga stabilitas harga emas," ujar Sin.

Di Hong Kong, emas diperdagangkan pada kisaran diskon US\$1 hingga premi US\$1,70 per ons.

Pekan ini, Hong Kong juga meluncurkan sistem kliring terpusat untuk perdagangan emas dan kembali mengaktifkan kontrak berjangka emas berbasis dolar AS sebagai bagian dari upaya menjadi pusat cadangan emas regional.

Sementara itu, di Singapura emas diperdagangkan pada kisaran diskon US\$1 hingga premi US\$2 per ons, sedangkan di Jepang diperdagangkan dengan diskon sekitar US\$0,40 per ons.

Ringgit Rebound Jumat (10/7), Rupiah Bertahan di Atas Level Rp 18.000 per Dolar AS

Jumat, 10 Juli 2026 09:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ringgit-rebound-jumat-107-rupiah-bertahan-di-atas-level-rp-18000-per-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung bervariasi pada perdagangan Jumat (10/7/2026).

Ringgit Malaysia memimpin penguatan di tengah pergerakan yang relatif terbatas pada mata uang utama kawasan.

Berdasarkan data Reuters hingga pukul 02.10 GMT, ringgit Malaysia menguat 0,25% ke level 4,064 per dolar AS, menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia pada sesi tersebut.

Yen Jepang juga menguat 0,41% ke level 161,710 per dolar AS, sementara dolar Singapura naik 0,09% menjadi 1,291 per dolar AS.

Mata uang lainnya juga mencatat penguatan tipis. Yuan China menguat 0,13% ke level 6,782 per dolar AS, peso Filipina naik 0,16% menjadi 61,525 per dolar AS, sedangkan baht Thailand menguat tipis 0,01% ke posisi 33,335 per dolar AS.

Di sisi lain, rupiah Indonesia melemah tipis 0,03% ke level Rp 18.075 per dolar AS, sementara won Korea Selatan turun 0,04% ke posisi 1.510,10 per dolar AS. Adapun rupee India relatif tidak berubah di level 95,388 per dolar AS.

Kinerja sepanjang 2026

Secara tahunan (year-to-date), mayoritas mata uang Asia masih berada dalam tren pelemahan terhadap dolar AS.

Rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan, yakni sekitar 7,77% sejak akhir 2025.

Posisi rupiah melemah dari Rp 16.670 per dolar AS pada akhir tahun lalu menjadi Rp 18.075 per dolar AS.

Pelemahan juga dialami rupee India sebesar 5,78%, baht Thailand 5,65%, won Korea Selatan 4,68%, peso Filipina 4,43%, serta yen Jepang yang melemah 3,13% sepanjang tahun ini.

Sementara itu, dolar Taiwan turun 2,30%, dolar Singapura melemah 0,40%, dan ringgit Malaysia terkoreksi tipis 0,20% dibandingkan posisi akhir 2025.

Berbeda dengan mata uang lainnya, yuan China justru menguat sekitar 3,04% terhadap dolar AS sepanjang 2026, menjadikannya salah satu mata uang Asia dengan kinerja terbaik terhadap greenback tahun ini.

Yen Tertekan Dekati Level Terendah 40 Tahun Jumat (10/7), Waspadai Intervensi Jepang

Jumat, 10 Juli 2026 08:06 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-tertekan-dekati-level-terendah-40-tahun-jumat-107-waspadai-intervensi-jepang>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang bertahan di dekat level terlemahnya dalam 40 tahun pada Jumat (10/7/2026) dan bersiap mencatat pelemahan mingguan.

Kondisi ini membuat pelaku pasar semakin mewaspadai potensi intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing, di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Meski ketegangan geopolitik meningkat, pasar keuangan global pada perdagangan semalam cenderung tenang. Harga minyak turun dan bursa saham menguat, sementara pergerakan mata uang utama relatif terbatas.

Namun, retaknya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali memunculkan kekhawatiran terhadap prospek harga energi dan inflasi global.

"Bayang-bayang perang masih membebani sentimen pasar," ujar Thierry Wizman, analis strategi valuta asing dan suku bunga di Macquarie Group.

"Pertanyaan yang dihadapi pelaku pasar adalah apakah Iran bersedia kembali ke perang berskala besar melawan Amerika Serikat dan sekutunya untuk memperkuat klaim penguasaannya atas Selat Hormuz," tambahnya.

Dolar AS melemah tipis pada Jumat, tetapi secara mingguan diperkirakan bergerak relatif stabil. Permintaan terhadap aset aman akibat konflik geopolitik mengimbangi berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Terhadap yen, dolar diperdagangkan di level 162,36 yen, tidak jauh dari posisi tertinggi dalam empat dekade yang dicapai pekan lalu. Secara mingguan, dolar diperkirakan menguat lebih dari 0,5% terhadap mata uang Jepang tersebut.

Pelaku pasar telah mengantisipasi kemungkinan intervensi pemerintah Jepang selama beberapa pekan terakhir karena yen terus bertahan di atas level 160 per dolar.

Namun, perubahan pendekatan pemerintah Jepang dalam melakukan intervensi membuat waktu pelaksanaannya semakin sulit diprediksi.

Analisis Goldman Sachs menilai risiko intervensi tetap menjadi perhatian utama dalam jangka pendek.

Meski demikian, tanpa perubahan fundamental seperti penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, meningkatnya risiko resesi, atau membaiknya kondisi fiskal Jepang, yen diperkirakan masih akan terus melemah dalam beberapa bulan mendatang.

Goldman Sachs juga menilai yen tetap menjadi salah satu mata uang utama yang digunakan sebagai sumber pendanaan (funding currency) dalam transaksi global.

Sementara itu, poundsterling bertahan di dekat level tertinggi terhadap yen sejak 2007. Mata uang Inggris tersebut sempat menyentuh 218 yen pada perdagangan semalam.

Euro diperdagangkan di US\$ 1,1433, naik tipis 0,02%, sedangkan poundsterling menguat 0,03% menjadi US\$ 1,3413 dan diperkirakan mencatat kenaikan sekitar 0,45% sepanjang pekan ini.

Dolar Australia diperdagangkan di US\$ 0,6939, sementara dolar Selandia Baru (kiwi) naik 0,08% menjadi US\$ 0,5759.

Kiwi menuju kenaikan mingguan lebih dari 0,9% setelah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menaikkan suku bunga pekan ini sekaligus memberi sinyal pengetatan kebijakan moneter masih akan berlanjut.

Westpac memperkirakan RBNZ akan kembali menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada September dan Desember.

Bank tersebut juga memproyeksikan suku bunga acuan Selandia Baru akan mencapai puncak di 4% pada September 2027.

Meski demikian, Kepala Ekonom Westpac Kelly Eckhold menilai waktu pengetatan kebijakan moneter masih sangat bergantung pada perkembangan ekonomi ke depan sehingga belum dapat dipastikan.

Harga Grosir Jepang Melonjak 7,1%, Lonjakan Biaya Energi Picu Tekanan Inflasi

Jumat, 10 Juli 2026 07:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/harga-grosir-jepang-melonjak-71-lonjakan-biaya-energi-picu-tekanan-inflasi>

KONTAN.CO.ID - Harga grosir di Jepang meningkat tajam pada Juni 2026, mencerminkan semakin besarnya tekanan inflasi akibat lonjakan biaya energi yang dipicu konflik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar yen.

Data Bank of Japan (BOJ) yang dirilis Jumat (10/7/2026) menunjukkan, Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) naik 7,1% pada Juni dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi median pasar yang memperkirakan kenaikan 6,8%. Angka tersebut juga lebih cepat dibandingkan kenaikan 6,6% pada Mei, setelah direvisi.

Peningkatan harga grosir ini mengindikasikan tekanan biaya yang dihadapi produsen Jepang semakin besar, terutama akibat lonjakan harga energi setelah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Selain itu, pelemahan yen turut memperbesar biaya impor.

BOJ mencatat indeks harga impor berbasis yen melonjak 29,7% secara tahunan pada Juni. Angka tersebut meningkat dari kenaikan 26,1% pada Mei yang juga telah direvisi.

Lonjakan harga impor menunjukkan biaya bahan baku dan energi yang dibeli dari luar negeri semakin mahal ketika dikonversi ke yen, sehingga berpotensi memperkuat tekanan inflasi di Jepang dalam beberapa bulan mendatang.

IMF Proyeksikan Ekonomi RI Stabil di 5% pada 2026

Jumat, 10 Juli 2026 17:10 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114640/imf-proyeksikan-ekonomi-ri-stabil-di-5-pada-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - International Monetary Fund (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,0% pada 2026 dan 5,1% pada 2027, di tengah perlambatan yang dialami sejumlah negara di kawasan Asia maupun ekonomi besar dunia.

Berdasarkan laporan terbaru bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology edisi Juli 2026, proyeksi ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan estimasi pada laporan WEO edisi April 2026.

Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang proyeksinya tetap, ketika sejumlah negara lain mengalami perlambatan pertumbuhan.

Secara terperinci IMF memaparkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yakni Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7% pada 2026, melambat dari realisasi 5,2% pada 2025.

Sementara Filipina diperkirakan hanya tumbuh 3,9%, turun cukup tajam dibandingkan 4,4% pada 2025. Thailand juga diproyeksikan melambat menjadi 1,9% dari 2,4% pada tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara besar Asia, perlambatan juga terjadi di China yang diproyeksikan tumbuh 4,6% pada 2026, turun dari 5,0% pada 2025. India masih menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, tetapi lajunya diperkirakan melambat dari 7,7% menjadi 6,4%.

Fenomena serupa juga terlihat di negara maju. Amerika Serikat diperkirakan tumbuh 2,3%, relatif membaik dari 2025 sebesar 2,1%, namun masih jauh di bawah laju pertumbuhan Indonesia.

Selain mempertahankan proyeksi Indonesia, IMF juga tidak mengubah perkiraan pertumbuhan untuk Malaysia, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, Rusia, dan Italia dibandingkan proyeksi April 2026.

Sebaliknya, IMF memangkas proyeksi sejumlah negara, seperti Filipina, India, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Turki, dan Arab Saudi.

IMF: Pertumbuhan Ekonomi Dunia Diperkirakan Melambat

Jumat, 10 Juli 2026 13:00 WIB

Oleh : Wilda Arifati, Editor : Mosita

<https://rri.co.id/internasional/2558506/imf-pertumbuhan-ekonomi-dunia-diperkirakan-melambat>

RRI.CO.ID, Washington — Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa perekonomian global berada di jalur perlambatan tajam. Peringatan tersebut disampaikan dalam pembaruan Juli Laporan Prospek Ekonomi Dunia, dilansir dari The Hill, Jumat, 10 Juli 2026.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026. Setelah itu, pertumbuhan diperkirakan kembali naik menjadi 3,4 persen pada 2027.

Laporan IMF menyebut tekanan keuangan pada negara-negara pengekspor energi sebagai salah satu penyebab utama memburuknya prospek ekonomi global. Selain itu, peningkatan inflasi akibat perang Iran juga dinilai memperburuk kondisi ekonomi dunia.

IMF menilai meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan energi terbarukan membantu mengurangi dampak negatif konflik terhadap ekonomi dunia. Para peneliti IMF menyatakan bahwa ekonomi global sejauh ini mampu menghadapi guncangan perang lebih baik daripada yang dikhawatirkan sebelumnya.

Mereka menilai dampak terhadap harga komoditas, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan global masih relatif terbatas. Meskipun prospek ekonomi dunia dinilai lebih seimbang dibandingkan kondisi pada April, IMF tetap mengingatkan adanya risiko yang perlu diwaspadai.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa dimulainya kembali operasi militer di Timur Tengah dapat memperburuk kondisi ekonomi global. Risiko eskalasi konflik di kawasan tersebut masih dianggap tinggi.

IMF juga mendesak para pembuat kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, mempertahankan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan keuangan. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi global di tengah ketidakpastian geopolitik.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran disebut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi prospek ekonomi. Harga minyak melonjak pada Rabu, 8 Juli 2026 setelah Amerika Serikat mencabut pengecualian sanksi terhadap minyak Iran.

Kenaikan tersebut juga dipicu oleh pernyataan Presiden Donald Trump bahwa perjanjian gencatan senjata “telah berakhir.” Kenaikan harga minyak ini menambah tekanan terhadap biaya energi global.

Airlangga Respons Proyeksi Ekonomi RI 2026 Versi Lembaga Asing

Jumat, 10 Juli 2026 18:20 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114646/airlangga-respons-proyeksi-ekonomi-ri-2026-versi-lembaga-asing/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi domestik masih berada dalam tren positif. Meski demikian pemerintah tetap menjalankan sejumlah program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai target 5,4% di akhir 2026.

Dalam laporan terbaru, lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya akan mencapai 5% di tahun 2026 dan naik tipis menjadi 5,1% pada tahun 2027. Sementara itu perekonomian global diperkirakan sebesar 3% di tahun 2026 dan naik menjadi 3,4% di tahun 2027.

“Dari berbagai lembaga baik itu IMF, bank dunia, maupun OECD [Organization for Economic Cooperation and Development] memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita masih dalam range sekitar 5%. Jadi relatif semua menilai perekonomian kita relatif aman dan solid,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (10/7/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% pada kuartal I-2026. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun pada kuartal I-2026.

Sementara neraca perdagangan mengalami defisit US\$1,61 miliar pada Mei 2026. Neraca perdagangan minyak dan gas (migas) mengalami defisit sebesar US\$3,76 miliar sedangkan neraca perdagangan komoditas nonmigas tercatat surplus US\$2,15 miliar. Defisit ini menjadi yang pertama setelah 6 tahun mengalami surplus beruntun.

“Kemarin memang negatif karena memang dari segi impor BBM itu memang harganya spike [menanjak], harganya naik. Sedangkan ekspor daripada kelapa sawit, kemudian batu bara, dan juga ferro alloy sebetulnya angkanya relatif sama kemarin sehingga tentu ini kita akan jaga juga beberapa bulan ke depan,” tutur Airlangga.

Menurut dia, pemerintah telah menjalankan sejumlah program stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Salah satunya adalah memberikan insentif bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat guna menekan biaya produksi serta meningkatkan daya saing industri.

“Pemerintah mendorong beberapa insentif termasuk insentif untuk industri chemicals di mana impor bahan baku plastik akan dinolkan dan ini PMK-nya sedang dibuat. Demikian pula untuk petrochemical yang kesulitan bahan baku untuk impor LPG juga kita berikan bea masuk nol untuk periode enam bulan ke depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat sisi penawaran (supply) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga KUR untuk perumahan. Program-program tersebut dilakukan demi menggerakkan sektor riil.

“Dari segi perbankan relatif aman, memang dana pihak ketiga juga di perbankan sudah double digit dan kita melihat kredit juga sudah mulai berjalan, sudah meningkat dibandingkan kuartal yang lalu,” imbuhnya.

Pakar: Penerimaan Negara Idealnya Ditopang Pajak, Bukan PNBP

Jumat, 10 Juli 2026 19:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114621/pakar-penerimaan-negara-idealnya-ditopang-pajak-bukan-pnbp/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menyampaikan outlook terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2026. Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan realisasi pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.

Penerimaan yang berasal dari perpajakan diproyeksi mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,7% dari target, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun atau 98% dari target dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp320,6 triliun atau 95,4% dari target.

Di tengah potensi tak tercapainya target perpajakan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan diproyeksi akan ditopang oleh lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diproyeksikan mencapai Rp575,1 triliun atau 125,2% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun.

Dosen UNIKA Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko menilai meski pajak masih menjadi tumpuan penerimaan, namun pemerintah tak cukup percaya diri dan memperkirakan penerimaan pajak hanya sekitar Rp 2310.8 Triliun atau 98% dari target APBN. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 575,1 T atau 125,2% dari target.

“Ini artinya memang ada kesulitan untuk menggenjot pajak dan ada ruang peningkatan PNB,” kata Suhartoko kepada Bloomberg Technoz, Kamis (9/7/2026).

Sebagai informasi, komponen utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN/Bank Indonesia), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP Lainnya dari layanan Kementerian/Lembaga (seperti pembuatan paspor atau SIM). Ruang PNBP berasal dari penerimaan SDA dan BUMN.

“Gambaran kondisi outlook ini seharusnya hanya terjadi sementara saja karena secara ideal penerimaan negara yg harus ditingkatkan berasal dari pajak, bea masuk dan cukai,” katanya.

Suhartoko bilang PNBP terutama yang berasal dari APBN bukan suatu yang patut diandalkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengurangan BUMN lantaran keberadaannya membuat pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha berpeluang menjadi wasit yg tidak adil.

Maka, Ia berpendapat bahwa penyatuan BUMN dan penutupan BUMN perlu dilakukan dan dalam koordinasi suatu lembaga.

Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga telah dikembangkan institusi Sovereign Wealth Fund (atau Dana Kekayaan Negara), yang fungsinya menyediakan dana besar untuk proyek pembangunan berskala besar seharusnya tidak boleh memberatkan APBN dan bukan menjadi kompetitor bisnis swasta.

“[SWF] berfungsi sebagai bantalan keuangan pemerintah di masa krisis, meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang dan mengembangkan kekayaan negara dengan diversifikasi aset,” kata Hartoko.

Sebagai informasi, Purbaya memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Kenaikan defisit tahun ini terjadi seiring meningkatnya proyeksi belanja negara yang melampaui pagu anggaran. Dalam outlook APBN 2026 yang dipaparkan, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN.

Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pembiayaan anggaran juga diperkirakan meningkat menjadi Rp734,3 triliun untuk menutup defisit yang melebar.

Mendag Sebut Defisit Neraca Dagang Dipicu Lonjakan Harga Minyak

Jumat, 10 Juli 2026 08:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114530/mendag-sebut-defisit-neraca-dagang-dipicu-lonjakan-harga-minyak/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut defisit neraca dagang RI pada Mei 2026 dipengaruhi oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia.

"Maret April Harga minyak itu kan lagi di puncaknya. Jadi sebenarnya Karena faktor Harga minyak yang sangat tinggi," kata Budi kepada awak media, dikutip Jumat (10/7/2026).

Di samping itu, ia menambahkan, jika dilihat secara kumulatif, kinerja perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih membukukan surplus US\$4,03 miliar.

"Jadi hanya bulan Mei saja [yang defisit], tapi Januari-Mei ya secara kumulatif tetap surplus, dan ekspornya tetap naik," jelasnya.

Oleh karena itu, menteri yang juga kerap kali disapa Busan ini meyakini kondisi tersebut hanya bersifat sementara, dan neraca perdagangan akan kembali membaik seiring terjadinya normalisasi harga minyak.

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertama kalinya neraca dagang defisit setelah mengalami surplus dagang selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Terakhir, neraca dagang Indonesia mengalami surplus US\$89,1 juta pada April 2026.

Selain itu, pada Mei 2026 nilai ekspor RI tercatat sebesar US\$23,2 miliar atau turun 5,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama akibat melemahnya ekspor nonmigas. Sementara itu, nilai impor Indonesia mencapai US\$24,81 miliar atau meningkat 22,16% secara tahunan.

Kenaikan impor terutama berasal dari impor bahan baku dan penolong yang mencapai US\$17,58 miliar atau tumbuh 25,17% dibandingkan Mei 2025. Adapun impor barang modal tercatat sebesar US\$5 miliar atau meningkat 12,7% secara tahunan.

Harga Pangan Hari ini: Seluruhnya Kompak Turun

Jumat, 10 Juli 2026 10:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114573/harga-pangan-hari-ini-seluruhnya-kompak-turun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Harga bahan pangan terpantau kompak turun pada hari ini, Jumat (10/7/2026) setelah beberapa hari sebelumnya sempat fluktuatif.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia per pukul 08.30 WIB diketahui dari data yang disajikan, seluruh harga pangan terpantau turun.

Seperti pada rata-rata harga beras kualitas bawah II kini menjadi Rp13.700 per kilogram (Kg) atau turun 5,52%. Disusul rata-rata harga beras kualitas medium II yang secara nasional juga mengalami penurunan Rp14.700 per Kg atau turun 8,98%

Lalu harga beras kualitas bawah I kini turun 1,36% Rp14.500 per Kg. Beras kualitas medium I di Rp15.800 per Kg atau turun 3,36%. Hingga beras kualitas super I dan super II yang juga tetap berada di masing-masing harga Rp16.500 per Kg atau turun 6,25% dan Rp16.00 per Kg, turun 6,71%.

Begitupun pada harga pangan hortikultura seperti bawang putih ukuran sedang dan cabai rawit hijau mengalami yang kini turun harga masing-masing sebesar Rp35.000 per Kg dan Rp30.000 per Kg atau naik 20,45% serta 39,64%.

Bawang merah ukuran sedang juga turun hingga 20,5% menjadi Rp38.000 per Kg. Disusul cabai merah besar turun sebesar 50,84% menjadi Rp25.000 per Kg. Harga cabai merah keriting juga turun 2,68% menjadi Rp49.300 per Kg. Lalu, cabai rawit merah turun 19,42% menjadi Rp50.000 per Kg.

Adapun pada komoditas pangan protein hewani, daging ayam ras segar kini mengalami penurunan 5,48% menjadi Rp34.500 per Kg, begitupun penurunan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar yang terpantau turun 18,66% menjadi Rp23.750 per Kg.

Sementara daging sapi kualitas I turun 13,45% menjadi Rp130.000 per Kg, dan daging sapi kualitas II juga kini menjadi Rp120.000 per Kg atau turun 15,16%.

Tak hanya itu, produk pangan lainnya seperti gula pasir lokal juga mengalami penurunan harga hingga 10,76% menjadi Rp17.000 per Kg. Lalu gula pasir kualitas premium juga turun harga berada dikisaran Rp19.000 per Kg atau turun 6,4%.

Tak hanya gula, seluruh golongan minyak goreng juga terpantau turun harga. Minyak goreng curah turun diharga Rp20.000 per Kg atau turun 2,68%, minyak goreng kemasan bermerk I turun 9,28% menjadi Rp22.000 per Kg hingga minyak goreng kemasan bermerk II yang juga turun diharga Rp20.500 per Kg atau turun 12,39%.

Rupiah Ditutup Menguat di Rp18.055/US\$

Jumat, 10 Juli 2026 15:49 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114635/rupiah-ditutup-menguat-di-rp18-055-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pekan ini dengan penguatan 0,16% ke Rp18.055/US\$, bersama mayoritas mata uang Asia yang kompak berada di zona hijau, Jumat (10/7/2026).

Penguatan rupiah dan mata uang kawasan sejalan dengan meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, sehingga harga minyak mentah kembali terpangkas ke level US\$76 per barel. Meski begitu, secara mingguan sebenarnya rupiah telah melemah 0,56%, bersama baht Thailand (-0,56%) dan dolar Taiwan (-0,76%).

Sehingga, bisa dikatakan penguatan rupiah pada akhir pekan ini lebih mencerminkan membaiknya sentimen eksternal dibandingkan perubahan fundamental domestik. Apresiasi tersebut juga sepertinya masih bersifat rapuh karena investor tetap mencermati arah kebijakan moneter global dan kondisi perekonomian domestik.

Dari sisi global, perhatian pelaku pasar akan kembali pada prospek suku bunga AS. Ekspektasi bahwa The Fed masih akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama membuat dolar AS berpotensi tetap kuat dalam beberapa waktu ke depan. Situasi ini dapat membatasi ruang penguatan mata uang di pasar negara berkembang, termasuk rupiah, meski tensi geopolitik mulai mereda.

Dalam pandangan UBS, sikap The Fed yang diprediksi akan kembali hawkish serta memburuknya defisit transaksi berjalan hingga 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) meningkatkan kebutuhan Indonesia akan arus modal yang lebih besar demi menjaga rupiah tetap stabil.

Di dalam negeri, tantangan dan sentimen yang dihadapi rupiah juga belum sepenuhnya mereda. Sejumlah indikator ekonomi bahkan menunjukkan bahwa permintaan domestik masih belum pulih.

Penjualan ritel terkontraksi, optimisme konsumen memudar, sementara aktivitas manufaktur berada di fase kontraksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi yang saat ini sedang melambat dan belum diimbangi oleh lonjakan investasi sektor swasta maupun adanya pertumbuhan ekspor.

Belum lagi, tekanan yang menimpa aset keuangan domestik masih membuat pelaku pasar khawatir. Peringatan dari MSCI dan S&P Dow Jones Indices terkait potensi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia masih menjadi faktor yang membayangi aliran modal asing.

Meski dampaknya belum terjadi saat ini, risiko keluarnya dana asing apabila isu tersebut tidak segera direspons tetap menjadi perhatian investor. Sentimen ini turut menjelaskan mengapa penguatan rupiah cenderung tertahan meski kondisi eksternal relatif lebih kondusif.

Sebagai catatan, sore ini rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) juga cenderung stagnan dengan perubahan tipis 0,02% di level Rp18.116/US\$ pada pukul 15.15 WIB. Dengan begitu, penguatan yang terjadi pada sore ini bisa dikatakan sebagai jeda dari tekanan daripada disebut titik balik tren.

UBS dalam catatannya bahkan memperkirakan pelemahan rupiah yang terjadi secara bertahap akan terus berlanjut, dengan pergerakan menuju rentang Rp18.500-19.000/US\$ pada semester kedua tahun ini.

Lima Bendungan Diresmikan, Pemerintah Bidik Tambahan Produksi Padi 720.000 Ton/Tahun

Jumat, 10 Juli 2026 14:06 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/lima-bendungan-diresmikan-pemerintah-bidik-tambahan-produksi-padi-720000-tontahun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meresmikan lima bendungan yang dilengkapi jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mengairi sekitar 40.000 hektare lahan pertanian dan meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton per tahun.

Kelima bendungan yang dimaksud ialah Bendungan Meninting di Lombok NTB, Keureuto dan Rukoh di Aceh, Jlantah di Jateng, dan Sidan di Bali. Bendungan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan, bendungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan air, tetapi harus mampu memastikan pasokan air irigasi sampai ke lahan pertanian sehingga memberikan manfaat langsung bagi petani.

"Air yang tertampung di bendungan harus menjadi air untuk irigasi bagi sawah, sesuai arahan Bapak Presiden. Bendungan adalah hulu dari layanan itu, manfaatnya baru lengkap ketika air tersebut benar-

benar bisa diterima oleh para petani, keluarga, dan masyarakat sekitar," ujar Dody saat peresmian bendungan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Dody, lima bendungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Pembangunan bendungan dilakukan pada periode 2015 hingga 2025 dan kini mulai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, jaringan irigasi masih terus diselesaikan agar distribusi air ke lahan pertanian berjalan optimal. Hal itu dilakukan untuk memastikan petani memperoleh kepastian pasokan air saat musim tanam.

"Yang paling menentukan bagi petani adalah kepastian bahwa air datang ke lahan mereka pada saat musim tanam atau ketika dibutuhkan," katanya.

Secara keseluruhan, lima bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung mencapai sekitar 371 juta meter kubik. Selain mengairi sekitar 40.000 hektare sawah, bendungan juga didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang diperkirakan mampu meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton setiap tahun.

Selain mendukung ketahanan pangan, bendungan juga menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, melindungi sekitar 932 hektare wilayah dari potensi banjir, serta memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 9,6 megawatt (MW) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung sebesar 346 MW.

Secara khusus, Dody menyoroti manfaat Bendungan Meninting di Lombok Barat. Menurutnya, bendungan tersebut mampu mengakhiri konflik perebutan air yang selama ini kerap terjadi antarkelompok petani saat musim tanam.

Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampung sekitar 10 juta meter kubik dan mengairi sekitar 1.600 hektare sawah melalui jaringan irigasi sepanjang sekitar 26 kilometer. Dengan ketersediaan air sepanjang tahun, frekuensi tanam yang sebelumnya hanya satu kali kini meningkat menjadi tiga kali dalam setahun.

Produktivitas padi di wilayah tersebut juga meningkat menjadi sekitar 6,3 ton per hektare. Selain itu, bendungan memasok air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik yang melayani sekitar 100.000 jiwa serta membantu mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram.

"Bendungan wajib berfungsi memberikan manfaat maksimal untuk petani dan seluruh masyarakat. Air harus mengalir, sawah wajib terairi, dan manfaat harus dijaga," tegas Dody.

Prabowo Bertemu Tiga Mantan PM Thailand, Bahas Investasi dan Kerja Sama

Jumat, 10 Juli 2026 10:23 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-bertemu-tiga-mantan-pm-thailand-bahas-investasi-dan-kerja-sama>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand, yakni Thaksin Shinawatra yang menjabat pada periode 2001–2006, Yingluck Shinawatra pada 2011–2014, serta Paetongtarn Shinawatra yang memimpin pada 2024–2025.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Danantara, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Agenda tersebut menjadi bagian dari langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat jejaring persahabatan internasional sekaligus membuka peluang kerja sama melalui komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Menurutnya, hubungan baik yang telah terjalin selama ini menjadi fondasi penting dalam membangun kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

“Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai wujud eratnya persahabatan yang telah terjalin sejak lama,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Thaksin Shinawatra yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara turut berbagi pandangan dan memberikan berbagai masukan kepada Presiden Prabowo serta jajaran pimpinan Danantara.

Teddy mengungkapkan, diskusi yang berlangsung mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, hingga pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Adapun Thaksin Shinawatra yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara memberikan sejumlah masukan serta bertukar pikiran dengan Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan Danantara mengenai berbagai peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan dengan para pemimpin dan tokoh dunia melalui komunikasi yang intensif. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman yang saling menguntungkan di tengah dinamika global.

"Melalui komunikasi yang erat dengan para pemimpin dan tokoh dunia, Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan sekaligus membuka ruang bagi pertukaran gagasan dan pengalaman sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional serta memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang," tutur Teddy.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Danantara, yakni Group CEO Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, serta Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

Kawasan Industri Indonesia Bidik Investor Eurasia lewat INNOPROM 2026

Jumat, 10 Juli 2026 07:40 WIB

Oleh : Eliana Zahra Devina, Editor : Allan

<https://rri.co.id/ekonomi/bisnis/2557509/kawasan-industri-indonesia-bidik-investor-eurasia-lewat-innoprom-2026>

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia menawarkan kawasan industri kepada investor Eurasia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Partisipasi tersebut menghadirkan berbagai lokasi investasi siap bangun untuk memperluas peluang investasi dan kerja sama industri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keikutsertaan Indonesia memperluas kerja sama industri sekaligus mendukung Asta Cita melalui industrialisasi. Menurutnya, Indonesia menghadirkan lokasi investasi didukung infrastruktur, regulasi, dan layanan kompetitif bagi pembangunan basis produksi nasional.

"Kami ingin investor Eurasia melihat Indonesia bukan hanya pasar besar, tetapi juga mitra produksi yang siap tumbuh bersama. Kami menghadirkan lokasi investasi didukung infrastruktur, regulasi, dan layanan kompetitif sehingga perusahaan segera membangun basis produksi Indonesia," ujar Agus dalam keterangan, Kamis, 9 Juli 2026.

Menperin mengatakan pengembangan kawasan industri mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Menurutnya, kawasan industri menyediakan lokasi perusahaan, mendorong pusat ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi.

Hingga triwulan II 2026, Indonesia memiliki 180 kawasan industri yang menampung hampir 12 ribu tenan. Sepanjang tahun lalu, kawasan industri tersebut menarik investasi Rp6.744,58 triliun dan menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja.

Direktur Jenderal KPAII Tri Supondy mengatakan keikutsertaan lima pengelola kawasan industri mempercepat komunikasi bisnis dengan investor Eurasia. Menurutnya, investor dapat berdiskusi langsung memahami fasilitas, insentif, dan peluang kerja sama sesuai kebutuhan usahanya.

"Kami ingin mempermudah investor memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Di INNOPROM, mereka dapat berdiskusi dengan pengelola kawasan industri, memahami fasilitas, insentif, serta peluang kerja sama usahanya," ujarnya.

Lima pengelola kawasan industri yang menjadi co-exhibitor pada INNOPROM 2026 meliputi KI Wiraraja Indonesia, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Persero), Bintang Industrial Estate, Kendal Industrial Park, dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Kelima pengelola tersebut mewakili berbagai keunggulan kawasan industri Indonesia.

Executive Director PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Persero) Juliani Sari Kusumaningrum mengatakan investor mempertimbangkan kesiapan fasilitas pendukung operasional. Menurutnya, kawasan menyediakan lahan siap bangun, utilitas, insentif KEK, serta akses pelabuhan internasional bagi percepatan operasional perusahaan.

Indonesia dan Armenia Perkuat Kemitraan Industri di INNOPROM 2026

Jumat, 10 Juli 2026 06:50 WIB

Oleh : Eliana Zahra Devina, Editor : Allan

<https://rri.co.id/ekonomi/bisnis/2557423/indonesia-dan-armenia-perkuat-kemitraan-industri-di-innoprom-2026>

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia dan Armenia memperkuat kemitraan industri melalui pertemuan bilateral pada ajang INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperluas kerja sama industri sekaligus membuka peluang kolaborasi baru antara kedua negara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan 2026 menandai 34 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Armenia. Menurutnya, hubungan telah terjalin lebih tiga dekade mencerminkan komitmen kedua negara terus memperkuat kerja sama ekonomi dan industri.

"Pada 2026, Indonesia dan Armenia menandai 34 tahun hubungan diplomatik sejak 22 September 1992 sebagai tonggak kerja sama. Saya meyakini semangat kemitraan lebih tiga dekade terus berkembang, membuka peluang kolaborasi lebih luas bagi kedua negara," ujar Agus dalam keterangan yang dikutip RRI, Kamis, 9 Juli 2026.

Hubungan perdagangan Indonesia dan Armenia terus menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 26,7 juta dolar AS, sementara ekspor Indonesia ke Armenia mencapai 26,2 juta dolar AS.

Menperin mengatakan Indonesia memandang Armenia sebagai mitra bilateral sekaligus pintu strategis menuju kawasan CIS melalui keanggotaan EAEU. Menurutnya, posisi tersebut memberikan nilai tambah bagi pengembangan kerja sama industri kedua negara.

"Indonesia memandang Armenia bukan hanya sebagai mitra bilateral, melainkan juga pintu strategis menuju kawasan CIS melalui keanggotaan EAEU. Keanggotaan tersebut memberikan nilai tambah signifikan bagi pengembangan kerja sama industri kedua negara ke depan," katanya.

Momentum kerja sama didukung Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang ditandatangani 21 Desember 2025. Perjanjian tersebut membuka akses pasar Eurasia berpenduduk hampir 180 juta jiwa serta preferensi tarif lebih 85 persen perdagangan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perindustrian menyampaikan rancangan Memorandum of Understanding kerja sama industri kepada Pemerintah Armenia melalui diplomatik. Rancangan tersebut mencakup standar teknis, regulasi industri, alih teknologi, rantai pasok, dialog bisnis, kawasan industri, serta SDM.

Butuh Rp 2 Triliun, Pemprov Jateng Cari Investor Asing demi Revitalisasi PRPP

Jumat, 10 Juli 2026 08:20 WIB

Titis Anis Fauziyah, Irfan Maullana

<https://regional.kompas.com/read/2026/07/10/082017878/butuh-rp-2-triliun-pemprov-jateng-cari-investor-asing-demi-revitalisasi>

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai bergerak cepat menggenjot upaya pencarian investor kakap guna merevitalisasi kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang. Langkah strategis ini diambil agar aset daerah yang bernilai tinggi tersebut tidak terus-menerus didera kerugian finansial.

Nilai investasi yang dibutuhkan untuk memoles kembali wajah PRPP diperkirakan menembus angka sekitar Rp 2 triliun. Suntikan modal jumbo ini diperlukan untuk mengembalikan kejayaan kawasan tersebut menjadi destinasi bisnis serta pariwisata unggulan di Jawa Tengah.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jawa Tengah, Agus Prasutiyo, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran yang masif itu muncul lantaran proyek revitalisasi PRPP tidak sekadar menyentuh perbaikan fasilitas fisik yang rusak, melainkan menyangkut pengembangan kawasan secara makro dan menyeluruh.

"Kalau yang besar memang butuh investasi yang besar. Pak Gubernur menyampaikan mungkin bisa sampai Rp 2 triliun untuk pengembangan kawasan itu," kata Agus saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (9/7/2026).

Agus menjelaskan, cetak biru konsep pengembangan yang tengah dimatangkan oleh jajaran pemerintah provinsi mencakup pembangunan fasilitas terpadu Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE), hotel berbintang, hingga penataan kawasan hijau yang terintegrasi langsung dengan destinasi wisata Grand Maerakaca.

Terlebih, posisi PRPP dinilai sangat premium lantaran berdiri kokoh di dekat Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ke depan, kawasan ini juga bakal dihubungkan dengan akses jalan pintas menuju Pelabuhan Tanjung Emas guna memosisikannya sebagai episentrum kegiatan bisnis sekaligus magnet wisata baru.

"Lokasi PRPP itu sangat strategis, dekat bandara. Konsepnya nanti ada MICE, hotel, dan berbagai fasilitas lain sehingga bisa menjadi kawasan yang lebih hidup," ujarnya memerinci.

Investor Asal Brunei, China, hingga Australia Mulai Melirik

Agus menambahkan, setelah konflik sengketa lahan seluas 40 hektar resmi dinyatakan inkrah dan selesai pada 2023 lalu—dengan status kepemilikan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PRPP—kini pemerintah bisa fokus penuh memasarkan kawasan tersebut ke pasar investasi global.

Hingga saat ini, sejumlah delegasi investor luar negeri dilaporkan sudah turun langsung ke lapangan untuk menakar potensi bisnis di PRPP.

"Brunei sudah datang, investor dari China sudah ada, Australia juga sudah. Pak Gubernur sendiri yang memaparkan peluang investasinya. Tinggal memang masing-masing investor masih memiliki pertimbangan bisnisnya sendiri," katanya.

Kendati demikian, Agus tidak menampik bahwa misi menjaring investor di tengah situasi dinamika ekonomi global saat ini bukanlah perkara yang instan dan mudah.

"Investor itu perspektifnya sangat luas. Ada banyak pertimbangan sebelum mereka memutuskan masuk," ucapnya realistis.

Gandeng BUMD dan Kampus demi Cegah PHK Karyawan

Guna menyiasati waktu tunggu investor besar, Pemprov Jateng berinisiatif memulai akselerasi dari sektor Grand Maerakaca. Klaster ini dinilai membutuhkan modal yang relatif lebih mini namun memiliki perputaran omzet yang cepat untuk mendongkrak pendapatan korporasi.

"Kami fokus dulu bagaimana Grand Maerakaca bisa berkembang karena itu lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau pengembangan keseluruhan PRPP memang membutuhkan investasi yang jauh lebih besar," tutur Agus.

Di samping berburu mitra eksternal, Pemprov Jateng turut menginstruksikan seluruh jajaran BUMD untuk memindahkan pusat keramaian dan agenda kegiatan korporasi mereka ke dalam kawasan PRPP agar denyut nadi perekonomian di sana tetap berputar.

Entitas keuangan seperti Bank Jateng, BPRS BKK, hingga lini BUMD lainnya kini didorong untuk menyelenggarakan berbagai acara berkala di PRPP maupun Grand Maerakaca. Selain itu, pemerintah daerah tengah mengkaji opsi optimalisasi anjungan kabupaten/kota untuk disulap menjadi ruang kerja bersama (coworking space) dengan menggandeng perguruan tinggi lokal.

"Kami ingin PRPP tetap bertahan sambil menunggu investor masuk. Yang penting operasional tetap berjalan, tidak ada PHK, dan perlahan kawasan ini kembali ramai," kata Agus menekankan aspek kesejahteraan pekerja.

Ia mengaku tetap optimistis bahwa PRPP memiliki prospek bisnis yang cerah di masa depan apabila seluruh rencana masterplan revitalisasi ini berhasil dieksekusi dengan mulus.

"Kalau konsep besarnya terwujud, kawasan ini akan menjadi lokasi yang sangat strategis untuk kegiatan pemerintahan, bisnis, maupun pariwisata karena posisinya dekat bandara dan memiliki aset yang sangat besar," pungkasnya.

Bendungan Jlantah Diresmikam, Perkuat Ketahanan Pangan Jawa Tengah

Jumat, 10 Juli 2026 12:30 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11440

KARANGANYAR – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah mendapat dukungan baru dengan beroperasinya Bendungan Jlantah di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Bendungan tersebut menjadi salah satu infrastruktur sumber daya air yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara daring, Jumat 10 Juli 2026.

Dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, hadir langsung di lokasi Bendungan Jlantah.

Sekda mengatakan, pembangunan Bendungan Jlantah menjadi wujud nyata dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air di Jawa Tengah. Keberadaan bendungan tersebut memiliki peran strategis untuk mendukung sektor pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Bendungan ini tentu akan meningkatkan kapasitas produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya," ujar Sekda.

Ia menjelaskan, Bendungan Jlantah mampu mengairi sekitar 1.500 hektare lahan pertanian eksisting serta mendukung pengembangan sekitar 229 hektare lahan sawah baru.

Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, lahan pertanian di kawasan tersebut berpotensi memasuki tiga kali musim tanam dalam setahun. Dengan rata-rata produksi 6 ton gabah per hektare setiap musim tanam, Bendungan Jlantah diperkirakan mampu menopang produksi hingga sekitar 27 ribu ton padi setiap tahun.

Selain mendukung pertanian, Bendungan Jlantah juga akan menyediakan air baku bagi masyarakat dengan kapasitas sekitar 125 liter per detik. Ketersediaan tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan layanan air bersih.

Sebagai infrastruktur multifungsi, Bendungan Jlantah juga dirancang untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Meski telah diresmikan, Sekda menyebut masih terdapat pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan, terutama pembangunan jaringan irigasi agar manfaat bendungan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengusulkan pembangunan jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Sementara itu, keberadaan Bendungan Jlantah mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani di Desa Tlobo. Pasokan air yang lebih stabil membuat petani kini dapat melakukan tiga kali musim tanam dalam setahun.

Koordinator Kelompok Petani Pemakai Air Desa Tlobo, Sugeng, mengatakan sebelum bendungan tersebut beroperasi, keterbatasan air menjadi kendala utama petani, terutama saat memasuki musim kemarau.

"Kalau dulu sebelum ada bendung, petani hanya bisa dua musim tanam. Musim tanam ketiga tidak bisa panen karena kekurangan air. Setelah ada bendung ini, sekarang sudah bisa tiga musim tanam," katanya.

Sugeng menceritakan, sebelumnya petani harus bergiliran mendapatkan pasokan air irigasi agar seluruh lahan tetap teraliri. Namun, upaya tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan air saat musim kemarau.

Kondisi berbeda kini mulai dirasakan. Pada Juni hingga Juli, yang sebelumnya menjadi periode rawan kekeringan, pasokan air untuk pertanian tetap tersedia.

Sugeng menyampaikan apresiasi kepada pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang telah membangun Bendungan Jlantah dan menjawab kebutuhan para petani.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar, karena apa yang menjadi harapan masyarakat akhirnya bisa terpenuhi," tuturnya.

Meski demikian, Sugeng berharap dukungan pemerintah terus berlanjut melalui penyempurnaan jaringan irigasi di wilayah hilir. Sebab, masih terdapat dua bendung kecil yang membutuhkan perbaikan agar distribusi air semakin optimal.

Dengan penyempurnaan jaringan irigasi tersebut, manfaat Bendungan Jlantah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lahan pertanian serta semakin memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar dan Jawa Tengah.

Perkuat Konektivitas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Sarif Kakung Minta Kemantapan Jalan di Jateng Terus Ditingkatkan

Jumat, 10 Juli 2026 17:26 WIB

Akhmad Taufik

<https://jatengpos.co.id/advetorial/2026/07/10/perkuat-konektivitas-dan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-sarif-kakung-minta-kemantapan-jalan-di-jateng-terus-ditingkatkan>

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kemantapan jalan di Jawa Tengah menjadi kunci memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Kondisi yang ada perlu terus ditingkatkan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, data awal 2026, tingkat kemantapan jalan provinsi sebesar 94% dari total panjang 2.200 kilometer (km). Adapun kemantapan jalan nasional yang ada di provinsi ini tercatat mencapai 93,47%.

“Tentu kita ingin pemerintah bisa terus melakukan peningkatan kualitas jalan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Kakung, sapaan akrab Sarif, juga secara khusus menyoroti pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi.

“Adanya Inpres Jalan Daerah (IJD) ini menjadi harapan besar bagi masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Bantuan IJD TA 2025 di Jawa Tengah terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah. Total pekerjaan jalan sepanjang 132,62 kilometer, dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar. Adapun pada 2026 ini, Provinsi Jawa Tengah sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer, dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter.

“IJD ini juga sangat menjadi harapan masyarakat maupun daerah untuk memperoleh kemantapan jalan sehingga konektivitas kita lancar,” kata Kakung.

Kemantapan jalan, kata Kakung, juga akan berimbas pada lancarnya distribusi berbagai hasil produksi, seperti pertanian, perikanan, sehingga ekonomi bergerak.

“Pada akhirnya juga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat yang ujungnya ada kesejahteraan,” beber legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Atas dasar itu, Kakung menginginkan kemantapan jalan daerah ini bisa terus ditingkatkan, guna memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena kalau kemantapan jalan ini tidak diperhatikan, misalnya ada jalan berlubang, maka tentunya bisa meningkatkan angka kecelakaan,” tandasnya. (ADV)

Investasi Rembang Triwulan I 2026 Tembus Rp234 Miliar, Serap 5.377 Tenaga Kerja

Jumat, 10 Juli 2026

Penulis: Mifta Rembang, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/investasi-rembang-triwulan-i-2026-tembus-rp234-miliar-serap-5-377-tenaga-kerja/>

REMBANG – Kinerja investasi di Kabupaten Rembang pada triwulan I 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Selain mencatat realisasi investasi sebesar Rp234,58 miliar, sektor ini juga mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah, melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Dwi Martopo menyampaikan, penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2026 mencapai 5.377 orang. Angka tersebut meningkat 14,62 persen, dibandingkan triwulan IV 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan investasi yang masuk ke Kabupaten Rembang tetap produktif, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Penurunan nilai investasi tidak berdampak pada tenaga kerja. Justru penyerapan tenaga kerja meningkat. Ini menunjukkan investasi yang ada tetap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (9/7/2026).

Disampaikan, realisasi investasi triwulan I 2026 telah mencapai 16,76 persen, dari target investasi dalam RPJMD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,484 triliun.

Dari total investasi yang terealisasi, lanjutnya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai Rp207,35 miliar atau 88,39 persen, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp27,22 miliar atau 11,61 persen. Dominasi PMDN dinilai menjadi indikator positif, karena manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat lebih banyak berputar di dalam negeri dan memperkuat perekonomian lokal.

Berdasarkan sektor usaha, industri mineral nonlogam menjadi kontributor investasi terbesar dengan nilai Rp54,21 miliar. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp47,95 miliar serta sektor jasa lainnya sebesar Rp26,32 miliar.

Dwi menjelaskan, sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyerap terbesar dengan 1.601 tenaga kerja. Disusul industri makanan sebanyak 1.349 tenaga kerja, dan sektor jasa lainnya sebanyak 1.054 tenaga kerja.

Adapun berdasarkan wilayah, imbuhnya, Kecamatan Rembang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti Kecamatan Gunem dan Sluke. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan industri di wilayah tersebut, terus berkembang dan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja. Selain investasi skala besar, aktivitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada Triwulan I 2026, tercatat sebanyak 1.763 proyek UMK melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp116,87 miliar.

Dwi menuturkan, capaian investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi sistem OSS berbasis risiko, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

“Orientasi kami adalah memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan agar kepercayaan investor terus meningkat,” tegasnya.

Ditambahkan, secara kumulatif, hingga akhir 2025, total realisasi investasi di Kabupaten Rembang telah mencapai Rp15,47 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 139.372 orang.

Pihaknya berkomitmen, untuk terus mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Rembang, Arifin menilai prospek investasi di Kabupaten Rembang ke depan cukup menjanjikan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan pelayanan perizinan yang terus membaik menjadi modal penting dalam menarik minat investor.

“Dari sisi kami sebagai pengusaha, tentu berharap pelayanan perizinan bisa terus ditingkatkan. Karena pemerintah merupakan mitra penting dalam mendukung dunia usaha,” ujarnya.

Arifin juga optimistis terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Rembang. Ia menilai komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengawal investasi menjadi sinyal positif, bagi para pelaku usaha.

“Saya optimistis investasi di Rembang ke depan akan semakin baik. Pemerintah daerah sangat mendukung dan memiliki komitmen kuat, dalam mengawal investasi yang masuk,” pungkasnya.

15 Kelompok Usaha Bersama di Kudus Terima Bantuan Modal Usaha

Jumat, 10 Juli 2026

Penulis: Kontributor Kab Kudus, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/15-kelompok-usaha-bersama-di-kudus-terima-bantuan-modal-usaha/>

KUDUS – Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan stimulant kepada 15 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), di Kantor Dinsos P3AP2KB kabupaten setempat, Jumat (10/7/2026).

Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno menjelaskan, program tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atas usulan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinsos P3AP2KB.

“Sebanyak 15 kelompok menerima bantuan, masing-masing sebesar Rp20 juta. Bantuan ini diperuntukkan bagi pengembangan usaha sesuai proposal yang diajukan, termasuk kelompok penyandang disabilitas,” jelas Putut.

Pihaknya berharap, seluruh penerima memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya, serta menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan baik.

“LPJ harus disusun dengan benar, kemudian kelompok akan terus didampingi oleh pendamping PKH,” tambahnya.

Senada, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengingatkan, agar bantuan yang diterima dimanfaatkan secara optimal, sebagai langkah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami, panjenengan semua bisa naik kelas. Jangan selamanya menjadi penerima bantuan, tetapi suatu saat menjadi orang yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Milikilah jiwa yang inovatif dan terus maju, sehingga menjadi pelaku UMKM yang mampu berkontribusi bagi masyarakat,” ujar bupati.

Selain bantuan usaha, pihaknya juga terus memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor PIRT, sertifikasi halal, BPOM, hingga berbagai perizinan lainnya agar produk semakin berdaya saing.

Pada kesempatan itu, bupati turut meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk terus mengawal perkembangan setiap kelompok penerima manfaat, agar usaha yang dijalankan berkembang sesuai harapan.

“Teman-teman pendamping PKH saya titip untuk terus mendampingi dan mengawal mereka, agar benar-benar naik kelas dan menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi,” tambahnya.

Melalui bantuan ini, pihaknya berharap, semakin banyak kelompok usaha masyarakat yang tumbuh mandiri, naik kelas, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua KUBE Wanita Sekar Melati Desa Mlati Lor, Nanik Hariyanti yang bergerak di bidang produksi minuman herbal, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi kelompok kami untuk mengembangkan usaha produksi minuman herbal. Semoga usaha kami semakin maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujarnya.

Imbas Belanja Pegawai Defisit Rp100 Miliar, Pemkab Blora Diminta Laporkan Kemendagri

Jumat, 10 Juli 2026

Jurnalis: Eko Wicaksono, Editor: Rosyid

<https://harianmuria.com/blora/imbas-belanja-pegawai-defisit-rp100-miliar-pemkab-blora-diminta-lapor-kemendagri/>

BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melaporkan kekurangan anggaran belanja pegawai sekitar Rp100 miliar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Laporan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas permintaan Kemendagri kepada seluruh pemerintah daerah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2026.

Pendataan dilakukan berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 900.1/5044/SJ tertanggal 5 Juli 2026 tentang permintaan data pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN. Surat itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.

Melalui pendataan tersebut, Kemendagri melakukan analisis terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah, khususnya terkait kemampuan membiayai gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Daerah diminta melaporkan jumlah ASN, kebutuhan belanja pegawai, serta besaran kekurangan anggaran melalui sistem yang telah disediakan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono, mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), jumlah ASN di lingkungan Pemkab Blora mencapai 12.355 orang.

“PNS ada 5.195 orang atau 42 persen,” singkat Heru, Jumat (10/7/2026).

Selain itu, terdapat satu calon pegawai negeri sipil (CPNS), sedangkan jumlah PPPK mencapai 7.097 orang atau sekitar 57,4 persen dari total ASN di Kabupaten Blora.

Sementara itu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora telah menyampaikan laporan kepada Kemendagri sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dalam laporan tersebut, Pemkab Blora menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran belanja pegawai pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.

Kekurangan anggaran tersebut menjadi bagian dari data yang dihimpun pemerintah pusat untuk memetakan kondisi keuangan daerah terkait pembiayaan belanja pegawai ASN.

Uni Eropa Peringatkan Diversifikasi dari China Butuh Dana Besar

Sabtu, 11 Juli 2026 19:30 WIB

Alberto Nardelli dan Jenny Leonard

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114715/uni-eropa-peringatan-diversifikasi-dari-china-butuh-dana-besar/2>

Bloomberg, Uni Eropa sedang mengembangkan sebuah "instrumen solidaritas" untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi pasokan barang-barang strategis agar tidak lagi bergantung pada China, sekaligus meredam dampak pembalasan dari Beijing jika terjadi konflik dagang.

Namun, instrumen tersebut akan membutuhkan biaya dan memerlukan pendanaan, di saat negara-negara anggota masih bernegosiasi mengenai anggaran jangka panjang Uni Eropa berikutnya, menurut orang-orang yang mengetahui pembahasan tersebut.

Belum jelas berapa besar dana yang harus dialokasikan karena hal itu akan bergantung, antara lain, pada skala respons China. Namun, jumlahnya berpotensi sangat besar mengingat besarnya nilai industri dan perdagangan yang terlibat. Pembahasan di Uni Eropa ini berlangsung ketika sejumlah negara anggota justru mendorong pengurangan belanja.

Instrumen yang tengah dikembangkan oleh badan eksekutif Uni Eropa tersebut merupakan bagian dari upaya blok itu untuk mengatasi defisit perdagangan yang sangat besar dengan China, yang kini telah melampaui 360 miliar euro (US\$411 miliar) dan memengaruhi seluruh negara anggota Uni Eropa.

Para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa telah menerima pengarahan mengenai upaya tersebut pada pekan ini, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan itu. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas perundingan yang bersifat tertutup.

Juru bicara Komisi Eropa, yang menangani urusan perdagangan bagi Uni Eropa, menolak memberikan komentar.

Strategi Uni Eropa untuk menyeimbangkan kembali hubungan dagang dengan Beijing mencakup beberapa jalur yang dijalankan secara paralel, yakni melalui dialog, pengembangan instrumen baru untuk mendiversifikasi pasokan, serta pemanfaatan yang lebih optimal terhadap instrumen yang sudah ada, seperti penyelidikan anti-subsidi, langkah-langkah perlindungan perdagangan (safeguard measures), dan kemungkinan penggunaan instrumen anti-pemaksaan (anti-coercion instrument). Instrumen tersebut memungkinkan Uni Eropa menerapkan berbagai respons berupa tarif maupun kebijakan non-tarif terhadap praktik yang dianggap sebagai bentuk pemaksaan ekonomi.

Badan eksekutif Uni Eropa juga berupaya menegaskan bahwa tidak satu pun dari instrumen tersebut secara khusus ditujukan kepada China, kata sumber-sumber tersebut.

Dalam perundingan sejauh ini, Beijing disebut terbuka untuk membahas cara meningkatkan impor dari Uni Eropa, tetapi kurang antusias mencari cara untuk membatasi ekspornya sendiri, menurut sumber-sumber tersebut. Keduanya dinilai penting bagi Uni Eropa mengingat besarnya defisit perdagangan dengan China, serta masih adanya hambatan akses pasar di China dan tingkat konsumsi domestik yang relatif moderat.

Uni Eropa juga mendorong pemberian izin impor yang berlaku lebih lama serta penyederhanaan prosedur untuk memasukkan pasokan barang-barang strategis. Selain itu, blok tersebut meminta Beijing mengurangi hambatan akses pasar dan menekan ekspornya. Di sisi lain, China menginginkan Uni Eropa memberikan timbal balik atas setiap konsesi yang disepakati Beijing dengan melonggarkan pembatasan yang diterapkan oleh blok tersebut, menurut sumber-sumber itu.

Kedua belah pihak telah menetapkan tenggat waktu hingga Oktober untuk mencapai kemajuan dalam perundingan tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Juni lalu mengatakan bahwa Uni Eropa akan mengambil langkah tegas apabila dialog tidak membuahkan hasil.

Kepala Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič dijadwalkan berkunjung ke China pada Oktober untuk mengevaluasi perkembangan pembicaraan tersebut, menjelang pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussel, di mana isu itu akan menjadi salah satu agenda utama.

Namun, sejumlah pejabat di Brussel dan beberapa ibu kota negara anggota meragukan bahwa para pemimpin Uni Eropa memiliki kemauan politik untuk mengambil tindakan terhadap Beijing jika jalur diplomasi gagal, menurut sumber-sumber tersebut. Mereka menambahkan, China hampir pasti akan melakukan pembalasan secara agresif apabila Uni Eropa benar-benar mengambil langkah tersebut.

Beijing memiliki kendali yang sangat besar atas pasokan mineral dan chip yang sangat penting bagi sejumlah industri utama di Eropa, seperti sektor pertahanan dan otomotif. Kondisi ini mempersulit upaya Uni Eropa untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap China karena Beijing berpotensi menggunakan pembatasan ekspor sebagai alat untuk melumpuhkan perusahaan-perusahaan Eropa. China juga telah memperingatkan bahwa mereka akan melawan setiap langkah Uni Eropa untuk melindungi industrinya dan memperluas perangkat kebijakan perdagangannya.

Pada 2025, China menunjukkan besarnya dampak yang dapat ditimbulkannya ketika memberlakukan pembatasan ekspor unsur tanah jarang (rare earth), yang memicu kepanikan global atas potensi kelangkaan pasokan dan penghentian aktivitas manufaktur.

Sebagai gambaran betapa rentannya Uni Eropa terhadap gangguan rantai pasok, produsen mobil Eropa tahun ini berhasil melobi Komisi Eropa agar sementara waktu menangguhkan sanksi terhadap salah satu pemasok semikonduktor utama asal China. Tanpa pengecualian tersebut, perusahaan-perusahaan otomotif memperingatkan bahwa persediaan mereka akan habis hanya dalam hitungan minggu.

Bank Sentral Thailand Prediksi Inflasi 2026 di Bawah 2,8%, Suku Bunga Dipertahankan

Sabtu, 11 Juli 2026 18:09 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-thailand-prediksi-inflasi-2026-di-bawah-28-suku-bunga-dipertahankan>

KONTAN.CO.ID - Bank of Thailand (BoT) memperkirakan inflasi Thailand pada 2026 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar 2,8%, sehingga memberi ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Melansir Reuters Sabtu (11/7/2026), Gubernur Bank of Thailand Vitai Ratanakorn mengatakan, tekanan inflasi diperkirakan akan terus mereda hingga tahun depan.

Dengan kondisi tersebut, bank sentral dapat mengabaikan tekanan harga yang bersifat sementara dan tetap berfokus mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, inflasi bulanan pada kuartal IV diperkirakan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar 4,5%.

Data terbaru menunjukkan inflasi umum (headline inflation) Thailand pada Juni melambat menjadi 2,42%, masih berada dalam kisaran target bank sentral sebesar 1%–3% dan lebih rendah dari ekspektasi pasar.

Vitai sebelumnya juga menyatakan belum ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga acuan setelah BoT mempertahankan suku bunga kebijakan di level 1,00% pada rapat terakhir.

Keputusan kebijakan moneter berikutnya dijadwalkan diumumkan pada 26 Agustus.

Meski demikian, ia menilai ruang untuk kembali memangkas suku bunga semakin terbatas.

Menurutnya, suku bunga saat ini sudah berada pada level yang sangat rendah. Penurunan lebih lanjut berpotensi merugikan penabung dan memunculkan dampak negatif yang lebih luas terhadap sistem keuangan.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, Vitai menilai perekonomian Thailand masih cukup tangguh. Bank sentral memperkirakan ekonomi negara tersebut tumbuh 2,3% pada 2026, setelah mencatat pertumbuhan 2,4% pada tahun sebelumnya, meski masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Selain kebijakan moneter, Bank of Thailand juga tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan.

Mulai sekitar Oktober–November 2026, bank sentral berencana mewajibkan nasabah menunjukkan sumber dana untuk setiap setoran tunai yang melebihi 5 juta baht atau sekitar US\$150.000, sebagai upaya menekan peredaran dana ilegal.

Larangan Ekspor Solar Rusia Picu Gejolak Pasar Energi Global

Sabtu, 11 Juli 2026 17:14 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/internasional/3009946/larangan-ekspor-solar-rusia-picu-gejolak-pasar-energi-global>

Moskwa, Beritasatu.com – Keputusan Rusia menghentikan ekspor solar (diesel) pekan ini memicu gejolak di pasar energi global. Kebijakan tersebut memperparah ketatnya pasokan bahan bakar industri dan mendorong lonjakan harga, bahkan di negara-negara yang sudah tidak lagi mengimpor solar dari Rusia.

Solar merupakan produk minyak dengan porsi konsumsi terbesar di dunia. Kenaikan harganya berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari industri, pertanian, transportasi berat, hingga pembangkit listrik.

Pasokan solar global telah berada dalam kondisi ketat selama beberapa tahun terakhir akibat tingginya permintaan seusai pandemi serta berkurangnya kapasitas pengilangan di negara-negara Barat. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Rusia merupakan eksportir solar terbesar kedua di dunia setelah AS. Karena itu, gangguan operasional kilang di negara tersebut dapat berdampak besar terhadap pasokan bahan bakar global. Bahkan sebelum larangan ekspor diberlakukan, pengiriman solar Rusia sudah menurun akibat terganggunya pasokan domestik setelah serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap fasilitas pengilangan.

Dilansir dari Reuters, berdasarkan data Kpler, ekspor solar dan gasoil Rusia hanya mencapai sekitar 234.000 barel per hari (barrels per day/bpd) selama 1-10 Juli 2026. Angka itu turun dari sekitar 400.000 bpd pada Juni dan jauh di bawah rata-rata 2025 yang mencapai sekitar 817.000 bpd.

Tekanan terhadap pasokan solar juga meningkat setelah AS kembali meluncurkan serangan ke Iran beberapa jam usai Rusia mengumumkan larangan ekspor. Perkembangan tersebut memunculkan kembali kekhawatiran terhadap kelancaran pelayaran di Selat Hormuz dan dampaknya terhadap ekspor energi dari Timur Tengah.

Di saat yang sama, data pemerintah AS menunjukkan persediaan solar turun lebih dari 4,5 juta barel menjadi 97,8 juta barel per 3 Juli 2026 atau sekitar 6% di bawah rata-rata lima tahun terakhir.

Penasihat Gulf Oil Tom Kloza mengatakan kombinasi ketegangan di Teluk Persia, penghentian ekspor Rusia, dan penurunan stok solar AS telah mendorong harga bahan bakar tersebut naik tajam.

Dampaknya terlihat di Amerika Serikat dan Eropa yang meski tidak lagi mengimpor bahan bakar dari Rusia akibat perang Ukraina, tetap mengalami lonjakan harga karena berkurangnya pasokan di pasar global.

Kontrak berjangka solar sulfur ultra rendah di AS melonjak 11% pada Rabu (8/7/2026) menjadi sekitar US\$ 154 per barel atau memiliki premi sekitar US\$ 80 per barel dibandingkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI).

Di Eropa, kontrak berjangka gasoil sulfur rendah mencatat premi tertinggi sepanjang sejarah terhadap minyak mentah Brent, yakni mencapai US\$ 60,77 per barel.

Berkurangnya ekspor Rusia membuat negara-negara pengimpor seperti Brasil dan Turki harus bersaing dengan negara-negara Eropa untuk memperoleh pasokan dari AS. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak terhadap sektor kelistrikan dan pertanian.

Analisis Vortexa Mick Strautmann mengatakan apabila Turki memprioritaskan produksi dalam negeri untuk kebutuhan domestik, pasokan solar bagi pembangkit listrik di kawasan Mediterania pada musim panas akan semakin terbatas.

Sementara itu, Kepala Pengilangan FGE NexantECA Qilin Tam mengatakan pengalihan pasokan solar AS ke Amerika Latin berarti volume yang tersedia untuk Eropa akan semakin berkurang, padahal persediaan solar di AS dan kawasan Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) sudah berada di bawah kisaran normal untuk periode ini.

Menurut Tam, kembali meningkatnya ketegangan di Timur Tengah juga membuat pelanggaran pembatasan ekspor bahan bakar oleh China pada Juli belum tentu berlanjut pada Agustus sehingga potensi tambahan pasokan dari Asia masih belum pasti.

Ketegangan AS-Iran Ancam Surplus Pasokan Minyak Dunia

Sabtu, 11 Juli 2026 15:07 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/internasional/3009915/ketegangan-as-iran-ancam-surplus-pasokan-minyak-dunia>

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi menggagalkan proyeksi surplus pasokan minyak global pada 2027.

Menurut IEA, normalisasi pasar minyak sangat bergantung pada kelancaran pelayaran di Selat Hormuz dan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam laporan bulanan yang dirilis Sabtu (11/7/2026), IEA menyebut pasokan minyak dunia meningkat 4,1 juta barel per hari (barrels per day/bpd) pada Juni seiring dibukanya kembali Selat Hormuz. Meski demikian, angka tersebut masih 9,4 juta bpd di bawah tingkat sebelum perang.

IEA memperkirakan pasokan minyak global akan bertambah 7,5 juta bpd pada 2027 setelah mengalami kontraksi 3,7 juta bpd sepanjang tahun ini. Namun, proyeksi tersebut bergantung pada pulihnya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz.

"Eskalasi konflik pada 7-8 Juli membayangi prospek pasar dan dapat menggagalkan proyeksi yang memperkirakan pasar akan mengalami surplus pada tahun depan," tulis IEA dilansir dari Reuters.

Lembaga yang bermarkas di Paris tersebut menegaskan kesepakatan damai jangka panjang menjadi syarat utama agar pasar minyak dapat kembali normal.

Berdasarkan proyeksi IEA, pasokan minyak global diperkirakan melampaui permintaan sebesar 4,62 juta bpd pada 2027, berbalik dari defisit sekitar 860.000 bpd pada tahun ini. Proyeksi tersebut mengasumsikan produsen mampu mengaktifkan kembali ladang minyak dan kilang dapat memulihkan pengiriman produk secara normal.

Dari sisi permintaan, IEA memperkirakan konsumsi minyak global turun sekitar 1 juta bpd pada tahun ini sebelum kembali meningkat sekitar 2 juta bpd pada 2027.

Dalam jangka pendek, lembaga tersebut memperkirakan musim puncak konsumsi bahan bakar pada musim panas serta harga minyak yang lebih rendah akan mendorong konsumsi sekitar 8 juta bpd dibandingkan titik terendah pada Mei ketika krisis mencapai puncaknya.

Menurut IEA, harga minyak yang lebih murah serta membaiknya prospek ekonomi global turut menjadi faktor yang meningkatkan konsumsi minyak.

Sementara itu, IEA menilai aktivitas pengilangan dan pengiriman produk minyak pulih lebih lambat dibandingkan ekspor minyak mentah seusa Selat Hormuz kembali dibuka. Kondisi tersebut, ditambah tingginya permintaan musiman, memperketat pasokan bahan bakar olahan dan mendorong kenaikan margin kilang ke level tertinggi dalam empat tahun pada awal Juli.

IEA juga mencatat kekhawatiran pasar kini bergeser dari potensi kekurangan bahan bakar pesawat menjadi terbatasnya pasokan bensin dan solar.

Pasar solar di kawasan Atlantik mengalami pengetatan dalam beberapa pekan terakhir akibat terbatasnya pasokan dari Timur Tengah yang diperparah anjloknya ekspor Rusia setelah Ukraina meningkatkan serangan terhadap infrastruktur kilang minyak negara tersebut.

Di sisi lain, persediaan minyak global meningkat 21 juta barel pada Juni, menjadi kenaikan pertama dalam empat bulan terakhir. Sebelumnya, stok minyak dunia telah menyusut secara kumulatif sekitar 360 juta barel selama periode Maret hingga Mei.

Indonesia dan Maroko Perkuat Kerja Sama Perdagangan

Sabtu, 11 Juli 2026 02:45 WIB

Oleh : Eliana Zahra Devina, Editor : Seprianto

<https://rri.co.id/ekonomi/makro/2559552/indonesia-dan-maroko-perkuat-kerja-sama-perdagangan>

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya, Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania.

"Di dalam ASEAN, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga Maroko. Mengingat ukuran ekonomi kedua negara dan pasar saling melengkapi, kami meyakini masih ada ruang memperluas perdagangan investasi bilateral," ujar Roro di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Roro menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement Jaminan Produk Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institut Marocain de Normalisation Maroko. Menurutnya, MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia-Morocco Preferential Trade Agreement (PTA).

"Indonesia berharap dapat segera mengaktifkan kembali negosiasi tersebut. PTA dan MRA Jaminan Produk Halal memperkuat kepercayaan, mempererat kerja sama pelaku usaha, serta mendorong perdagangan bilateral berkembang," kata Roro.

Wamendag mengundang pelaku usaha Maroko berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026, 14–18 Oktober, di ICE BSD Tangerang. Pameran tersebut menjadi ajang promosi produk unggulan ekspor Indonesia sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai simpul perdagangan global.

Wakil Perdagangan Luar Negeri Maroko Omar Hejira menyambut baik penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara. Menurutnya, Maroko berharap perundingan perdagangan dimulai kembali awal 2027 serta mengundang pelaku usaha Indonesia menjajaki peluang bisnis.

"Kami mengharapkan perundingan perjanjian perdagangan dapat kembali dimulai awal tahun 2027. Kami mengundang Indonesia di Marrakesh, salah satu kota perdagangan besar, untuk melihat sendiri situasi Maroko sebagai gerbang ke Afrika," ujar Omar.

Perdagangan Indonesia dan Maroko terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat meningkat 33,04 persen dibandingkan 2024 sebelumnya.

Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 74,8 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Investasi langsung Maroko di Indonesia meningkat dari 1,4 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 5,4 juta dolar AS pada 2025.

Kadin Perkuat Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Sabtu, 11 Juli 2026 02:35 WIB

Oleh : Eliana Zahra Devina, Editor : Seprianto

<https://rri.co.id/ekonomi/makro/2559532/kadin-perkuat-diplomasi-ekonomi-di-tengah-ketidakpastian-global>

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan agenda Monthly Economic Diplomatic Breakfast digelar Kadin Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi. Menurut nya, forum tersebut dihadiri perwakilan 67 negara sahabat dan 34 duta besar.

"Hari ini saya menghadiri Kadin Indonesia Monthly Diplomatic, sebanyak 67 negara dan 34 duta besar hadir. Di mana agenda ini juga memperkuat diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian global," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Airlangga mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi dengan memperkuat rantai pasok, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global.

"Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi terutama terkait dengan supply chain. Dan arahan Pak Presiden kita perkuat dalam setiap ketidakpastian itu yang terkait dengan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Menurutnya, program tersebut mendukung hilirisasi ekosistem baterai untuk kendaraan listrik maupun battery storage system.

"Bapak Presiden mendorong dimulainya program 100 gigawatt berbasis solar. Untuk hilirisasi ekosistem baterai, baik untuk baterai kendaraan listrik maupun baterai storage system," ucap Airlangga.

Untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemerintah menyiapkan infrastruktur melalui pengembangan landing point fiber optik Batam-Singapura. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki landing point di Bitung yang dinilai berpotensi mendukung pengembangan data center.

"Terkait AI, kami menyiapkan infrastrukturnya, kita punya fiber optik, nantinya kita bekerja sama agar kita punya landing point ke beberapa negara. Seperti dengan Singapura untuk pengembangan landing point di Batam-Singapura," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan pemerintah juga menggandeng Arm Ltd untuk mendukung pengembangan industri semikonduktor nasional. Menurutnya, kerja sama tersebut ditujukan untuk melatih sekitar 15.000 teknisi dan engineer dalam ekosistem Arm.

"Untuk pengembangan semikonduktor, kami mengajak mitra Arm Ltd, yang menguasai hampir lebih 90 persen daripada pengembangan chip design. Dan ini didorong untuk melakukan training 15.000 teknisi maupun engineer dalam Arm ekosistem," kata Airlangga.

Pemerintah memperkuat kerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah terus mendorong proses akses Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Kemudian kerja sama dengan OECD, harapannya kita bisa mulai bahas penyelesaian ratifikasinya. Di mana saat ini untuk Eropa baru pertama kali diusulkan ratifikasi melalui versi bahasa Inggris saja," ucap Airlangga.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady mengatakan forum tersebut untuk menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan kepada para duta besar dan perwakilan Kadin daerah.

"Saya mewakili Kadin Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko untuk ambil inisiatif membuka kantor Menko untuk mengundang para dubes dan perwakilan Kadin daerah. Untuk bisa mendengar cerita mengenai Indonesia bahwa fundamentalnya itu adalah baik," ujar James.

Harga Cabai Rawit Tembus Rp 59.850 dan Telur Ayam Rp 28.950

Sabtu, 11 Juli 2026 09:47 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa | Editor: MBK

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3009850/harga-cabai-rawit-tembus-rp-59850-dan-telur-ayam-rp-28950>

Jakarta, Beritasatu.com – Harga cabai rawit merah yang dijual pedagang eceran secara nasional mencapai Rp 59.850 per kilogram (kg) pada Sabtu (11/7/2026). Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp 28.950 per kg berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia.

Berdasarkan data PIHPS, dilansir dari Antara, harga bawang merah tercatat Rp 45.650 per kg, sedangkan bawang putih mencapai Rp 44.550 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp 14.700 per kg dan beras kualitas bawah II Rp 14.550 per kg. Sementara itu, beras kualitas medium I dijual Rp 16.350 per kg dan beras kualitas medium II Rp 16.150 per kg.

Adapun beras kualitas super I tercatat Rp 17.650 per kg, sedangkan beras kualitas super II mencapai Rp 17.150 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar sebesar Rp 48.850 per kg, cabai merah keriting Rp 48.600 per kg, dan cabai rawit hijau Rp 50.350 per kg.

Selanjutnya, harga daging ayam ras segar tercatat Rp 37.000 per kg, daging sapi kualitas I Rp 150.550 per kg, dan daging sapi kualitas II Rp 141.950 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium mencapai Rp 20.300 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp 19.100 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp 20.550 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp 24.250 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp 23.400 per liter.

PHK Tinggi, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan

Sabtu, 11 Juli 2026 07:01 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi, Editor: HE

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3009785/phk-tinggi-kualitas-pertumbuhan-ekonomi-dipertanyakan>

Jakarta, Beritasatu.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas 5% dalam tiga tahun terakhir dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi masyarakat. Pasalnya, di tengah pertumbuhan yang stabil, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) justru terus meningkat dan jumlah kelas menengah terus menyusut.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 254.809 pekerja terkena PHK sepanjang 2023 hingga Mei 2026. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, sebanyak 64.855 pekerja terkena PHK. Angka tersebut naik menjadi 77.965 orang pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 88.519 orang pada 2025. Sementara sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 23.470 pekerja kembali kehilangan pekerjaan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas pertumbuhannya.

“Yang bermasalah adalah pertumbuhannya bisa diklaim tinggi, tetapi dari sisi kualitas. Kualitas itu apa? Satu, masih terjadi deindustrialisasi secara prematur,” ujar Bhima saat ditemui Beritasatu.com di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Bhima, deindustrialisasi prematur terjadi ketika sektor manufaktur kehilangan peran pentingnya sebelum mampu berkembang secara optimal. Akibatnya, kapasitas produksi melemah, penyerapan tenaga kerja berkurang, dan risiko PHK meningkat.

Selain masalah industri, Bhima menyoroti terus berkurangnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata.

“Basis industrinya semakin turun, tetapi juga dibarengi dengan merosotnya jumlah kelas menengah. Kelas menengah itu 10 tahun terakhir kita kehilangan 10 juta orang, dan 1 tahun terakhir itu kehilangan 1,1 juta orang kelas menengah,” ujarnya.

Menyusutnya jumlah kelas menengah berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Ketika kemampuan belanja melemah, permintaan terhadap berbagai produk dalam negeri ikut menurun.

“Jadi kalau dorongan dari daya beli kelas menengahnya melemah, maka imbasnya juga nanti kepada konsumsi produk-produk industri, terutama industri yang otomotif, padat karya, industri tekstil pakaian jadi,” katanya.

Bhima menjelaskan, sektor otomotif, tekstil, pakaian jadi, dan industri padat karya sangat bergantung pada konsumsi domestik. Apabila permintaan terus melemah, perusahaan berpotensi mengurangi produksi, menunda ekspansi, hingga melakukan PHK.

Hilirisasi Dinilai Belum Cukup Kuat

Bhima juga menilai program hilirisasi yang selama ini menjadi andalan pemerintah masih menghadapi tantangan karena terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.

Menurutnya, hilirisasi belum sepenuhnya mampu membangun industri bernilai tambah tinggi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong industrialisasi secara berkelanjutan.

Karena itu, Bhima meminta pemerintah menjalankan dua strategi secara bersamaan, yakni menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan memperkuat perlindungan terhadap industri dalam negeri.

“Jadi memang harus dilengkapi dua, menyelamatkan kelas menengah dengan perlindungan sosial dan proteksi yang lebih bagus, yang kedua adalah industrinya memang harus konsisten banget,” tutup Bhima.

PHK Tinggi, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan

Sabtu, 11 Juli 2026 07:01 WIB

Penulis: Addin Anugrah Siwi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3009785/phk-tinggi-kualitas-pertumbuhan-ekonomi-dipertanyakan>

Jakarta, Beritasatu.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas 5% dalam tiga tahun terakhir dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi masyarakat. Pasalnya, di tengah pertumbuhan yang stabil, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) justru terus meningkat dan jumlah kelas menengah terus menyusut.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 254.809 pekerja terkena PHK sepanjang 2023 hingga Mei 2026. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, sebanyak 64.855 pekerja terkena PHK. Angka tersebut naik menjadi 77.965 orang pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 88.519 orang pada 2025. Sementara sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 23.470 pekerja kembali kehilangan pekerjaan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas pertumbuhannya.

“Yang bermasalah adalah pertumbuhannya bisa diklaim tinggi, tetapi dari sisi kualitas. Kualitas itu apa? Satu, masih terjadi deindustrialisasi secara prematur,” ujar Bhima saat ditemui Beritasatu.com di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Bhima, deindustrialisasi prematur terjadi ketika sektor manufaktur kehilangan peran pentingnya sebelum mampu berkembang secara optimal. Akibatnya, kapasitas produksi melemah, penyerapan tenaga kerja berkurang, dan risiko PHK meningkat.

Selain masalah industri, Bhima menyoroti terus berkurangnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata.

“Basis industrinya semakin turun, tetapi juga dibarengi dengan merosotnya jumlah kelas menengah. Kelas menengah itu 10 tahun terakhir kita kehilangan 10 juta orang, dan 1 tahun terakhir itu kehilangan 1,1 juta orang kelas menengah,” ujarnya.

Menyusutnya jumlah kelas menengah berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Ketika kemampuan belanja melemah, permintaan terhadap berbagai produk dalam negeri ikut menurun.

“Jadi kalau dorongan dari daya beli kelas menengahnya melemah, maka imbasnya juga nanti kepada konsumsi produk-produk industri, terutama industri yang otomotif, padat karya, industri tekstil pakaian jadi,” katanya.

Bhima menjelaskan, sektor otomotif, tekstil, pakaian jadi, dan industri padat karya sangat bergantung pada konsumsi domestik. Apabila permintaan terus melemah, perusahaan berpotensi mengurangi produksi, menunda ekspansi, hingga melakukan PHK.

Hilirisasi Dinilai Belum Cukup Kuat

Bhima juga menilai program hilirisasi yang selama ini menjadi andalan pemerintah masih menghadapi tantangan karena terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.

Menurutnya, hilirisasi belum sepenuhnya mampu membangun industri bernilai tambah tinggi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong industrialisasi secara berkelanjutan.

Karena itu, Bhima meminta pemerintah menjalankan dua strategi secara bersamaan, yakni menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan memperkuat perlindungan terhadap industri dalam negeri.

“Jadi memang harus dilengkapi dua, menyelamatkan kelas menengah dengan perlindungan sosial dan proteksi yang lebih bagus, yang kedua adalah industrinya memang harus konsisten banget,” tutup Bhima.

Pemerintah targetkan 40 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi akhir 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 13:42 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/5645263/pemerintah-targetkan-40-ribu-kopdes-merah-putih-beroperasi-akhir-2026>

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) beroperasi hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik koperasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola KDMP agar mampu beroperasi secara profesional.

Ia menjelaskan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah menyiapkan manajer KDMP melalui pelatihan manajerial yang disusun secara terstruktur.

“Sehingga mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola koperasi secara profesional sejak mulai beroperasi,” ujar dia.

Menurut Farida, keberhasilan program KDMP tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan atau sarana pendukung, tetapi juga oleh kualitas pengelola yang menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan pembekalan bagi calon manajer agar memahami tata kelola koperasi, pengelolaan usaha, hingga aspek pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Pelatihan calon manajer koperasi berlangsung pada 17–31 Juli 2026.

Pelatihan tersebut diharapkan mampu menciptakan manajer koperasi yang profesional sehingga KDMP dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah terus mempercepat berbagai tahapan pelaksanaan program KDMP, mulai dari penyelesaian infrastruktur hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar target operasional 40.000 koperasi pada akhir 2026 dapat tercapai.

Menurut data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026, dari 35.870 titik pembangunan koperasi yang telah terverifikasi, sekitar 20 ribu unit saat ini sedang dalam pembangunan.

Sementara itu, sekitar 15.500 Kopdes Merah Putih telah rampung 100 persen.

Tak Sekadar Pameran, Gelar Produk Koperasi Jateng & UMKM Jadi Wadah Bangun Jejaring Usaha

Sabtu, 11 Juli 2026 16:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11446

SURAKARTA — Beragam produk unggulan koperasi dari berbagai daerah di Jawa Tengah dipamerkan dalam Gelar Produk Koperasi dan UMKM di Halaman Parkir Stadion Manahan, Kota Surakarta pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Mengusung semangat Hari Koperasi ke-79, pameran itu menjadi etalase bagi koperasi untuk memperkenalkan produknya sekaligus membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku usaha.

Pameran yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, itu berlangsung pada 11-12 Juli 2026. Acara ini menampilkan 37 stan dari 35 kabupaten/kota, Bulog, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Sekda menyampaikan, pameran ini menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan produk koperasi kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang bertemunya koperasi dari berbagai daerah untuk saling membangun jejaring usaha.

"Jadi, ini menampilkan aktivitas, produk-produk dari koperasi supaya dikenal. Mudah-mudahan dengan kumpul kayak gini, minimal orang melihat koperasi ini punya produk ini," katanya.

Ia menegaskan, Hari Koperasi ke-79 harus menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi yang kuat tidak dapat tumbuh sendiri, tetapi membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

"Harapannya, koperasi menjadi sokoguru perekonomian di Indonesia. Ekonomi kerakyatan inilah yang haru kita dorong terus," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sekda juga mengapresiasi keikutsertaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pameran tersebut. Menurutnya, kehadiran stan-stan KDMP menunjukkan bahwa koperasi yang baru dibentuk mulai menjalankan aktivitas usaha serta mampu menghasilkan produk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Desi Arijani, mengatakan bahwa pameran tersebut tidak semata-mata mengejar besarnya nilai transaksi. Lebih dari itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan koperasi kepada masyarakat, sekaligus memperluas kemitraan antarkoperasi.

"Harapannya, mereka bisa saling menjalin kemitraan," tuturnya.

Selain menghadirkan produk unggulan koperasi dari berbagai daerah, pameran juga diramaikan Gerakan Pangan Murah (GPM) hasil kolaborasi Bulog dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Surakarta.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah turut membuka layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat yang berkunjung.

Melalui pameran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal produk-produk koperasi lokal, sehingga koperasi memiliki pasar yang lebih luas serta mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

"Harapannya, mereka (koperasi) bisa tumbuh dan berkembang," ucap Plt Kadinkop UKM Jateng.

Berawal dari Garasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari Surakarta Omzetnya Tembus Ratusan Juta

Sabtu, 11 Juli 2026 19:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11447

SURAKARTA – Berawal dari sebuah garasi rumah, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta, berkembang menjadi salah satu contoh tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.

Koperasi yang mulai beroperasi pada September 2025 itu kini membukukan omzet lebih dari Rp300 juta dalam 6 bulan pertama 2026, dengan jumlah anggota meningkat dari 32 menjadi sekitar 130 orang.

Perkembangan itu dipamerkan dalam Gelar Produk Koperasi dan UMKM pada rangkaian Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Stadion Manahan, Surakarta pada Sabtu, 11 Juli 2026. Berbagai produk UMKM, kerajinan, hingga kebutuhan pokok dipamerkan sebagai bukti bahwa koperasi mulai menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Ketua KKMP Banjarsari, Budi Agung Setyowicoyo, mengatakan bahwa koperasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pelaku UMKM di daerah Banjarsari.

"Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta," katanya.

Ia mengatakan, KKMP Banjarsari tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai off taker (pembeli) produk-produk UMKM sekaligus hub/pusat distribusi sembako bagi masyarakat.

Sebagai off taker, koperasi menyerap sekaligus membantu memasarkan produk UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian pasar. Adapun sebagai hub, koperasi menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan menggandeng Bulog, ID Food, dan distributor lainnya agar pasokan lebih terjamin, rantai distribusi lebih pendek, serta harga lebih kompetitif bagi masyarakat.

"Kita berperan sebagai off taker dari Koperasi Merah Putih terhadap UMKM dan kita juga akan memerankan diri sebagai hub untuk produk-produk kebutuhan sembako bagi warga kita," ujarnya.

Dalam pameran tersebut, KKMP Banjarsari membawa berbagai produk UMKM, seperti batik, blangkon, tenun ikat, batik ciprat, ecoprint, dan aneka kerajinan tangan. Koperasi juga menjual beras SPHP, beras premium, serta berbagai merek minyak goreng.

Perjalanan koperasi itu terbilang singkat, tetapi pertumbuhannya cukup pesat. Setelah membukukan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp2 juta pada akhir 2025, omzetnya melonjak menjadi lebih dari Rp300 juta sepanjang Januari-Juni 2026.

"Saya meyakini ke depan, di akhir tahun kita akan meningkat tajam terkait dengan pembukuan SHU-nya," kata Budi.

Pertumbuhan tersebut diikuti bertambahnya jumlah anggota menjadi sekitar 130 orang. Mayoritas merupakan pelaku UMKM, mulai dari pedagang nasi goreng, penjual rice bowl, hingga pemilik toko kelontong.

Menurut Budi, kehadiran koperasi justru memperkuat usaha toko kelontong sebagai tempat memperoleh pasokan barang dengan harga yang lebih ekonomis.

Menariknya, seluruh aktivitas koperasi bermula dari garasi rumah ketua koperasi, sebelum akhirnya berpindah ke rumah dinas lurah yang tidak ditempati. Bagi para pengurus, manfaat untuk masyarakat jauh lebih penting daripada menunggu gedung permanen berdiri.

"Kami sepakat dengan pengurus dan seluruh anggota bahwa kita tidak akan menunggu gedungnya ada, karena masyarakat sudah menunggu kehadiran Koperasi Merah Putih," ujarnya.

Keberhasilan KKMP Banjarsari menjadi salah satu gambaran awal implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah didorong pemerintah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi

"Pemerintah Republik Indonesia punya gawe yang cukup besar, bagaimana menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dengan membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)," ucapnya saat memberikan sambutan pada Tasyakuran dan Pagelaran Seni Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jateng di Stadion Manahan, Surakarta.

Guna memastikan program tersebut berjalan secara berkelanjutan, bahkan Pemprov Jateng berupaya mengintegrasikan pendidikan perkoperasian ke dalam pembelajaran di sekolah.

Melalui Program Inseri Pendidikan Perkoperasian, Jawa Tengah menjadi provinsi pelopor yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan dengan sasaran sekitar 6,38 juta peserta didik, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB.

"Kita punya konsep untuk inseri pendidikan koperasi, karena apa? pemahaman terhadap konsep koperasi mungkin belum dipahami secara utuh," ujarnya

Sekda menyampaikan, Pemprov Jateng akan menjalankan program tersebut pada jenjang SMA, SMK, MA, dan SLB sesuai kewenangannya.

Selain itu, ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk berkolaborasi mengimplementasikan pendidikan koperasi pada jenjang SD dan SMP, sehingga pemahaman tentang koperasi dapat ditanamkan sejak usia dini dan menjadi fondasi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di masa depan.

"Sekali lagi dengan momentum peringatan ke-79 Hari Koperasi ini menjadi tonggak, mari kita bersama-sama berkolaborasi membangun Koperasi yang menjadi gawe besar dari Pemerintah Republik Indonesia," ucap Sekda.

Sebagai informasi di Jawa Tengah telah terbentuk 8.523 KDKMP, dengan 6.271 koperasi atau sekitar 73% sudah operasional, serta 3.950 gedung koperasi telah selesai dibangun. KDKMP di Jateng juga telah memiliki modal sebesar Rp34,21 miliar dengan lebih dari 200 ribu anggota.

Ketua The Fed Hadapi Ujian Perdana, Pasar Menanti Arah Suku Bunga AS

Minggu, 12 Juli 2026 16:30 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/ketua-the-fed-hadapi-ujian-perdana-pasar-menanti-arrah-suku-bunga-as>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pekan ini menjadi momen penting bagi pelaku pasar global. Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh akan menjalani kesaksian pertamanya di hadapan Kongres Amerika Serikat sejak resmi menjabat, bertepatan dengan rilis data inflasi yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga bank sentral AS.

Melansir Bloomberg (12/7), Warsh dijadwalkan memberikan keterangan di Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Selasa (15/7) waktu setempat, hanya beberapa jam setelah pemerintah merilis data inflasi konsumen (Consumer Price Index/CPI) Juni. Sehari kemudian, ia kembali bersaksi di Senat usai terbitnya data inflasi produsen (Producer Price Index/PPI). Kombinasi dua agenda tersebut diperkirakan menjadi fokus utama investor untuk mengukur apakah tekanan inflasi mulai mereda atau justru kembali menguat.

Survei Bloomberg menunjukkan inflasi AS diperkirakan melandai setelah harga-harga sempat melonjak pada Maret hingga Mei. Turunnya harga bensin diperkirakan mendorong indeks harga konsumen mencatat penurunan bulanan pertama sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020. Meski demikian, tekanan di tingkat produsen diperkirakan masih bertahan karena dampak kenaikan harga energi akibat konflik di Iran belum sepenuhnya hilang dari rantai pasok. Bahkan, inflasi inti produsen tahunan diproyeksikan meningkat menjadi 5,2% dari sebelumnya 4,9%.

Meski data inflasi menjadi perhatian utama, pelaku pasar belum melihat peluang besar bagi The Fed untuk segera menaikkan suku bunga. Bloomberg Economics memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga pada pertemuan Juli baru sekitar 24%. Menurut mereka, peluang tersebut baru akan meningkat apabila inflasi jauh lebih tinggi dari perkiraan dan Warsh menyampaikan sinyal kebijakan yang jauh lebih agresif. Skenario tersebut dinilai masih kecil kemungkinannya.

Selain Warsh, sejumlah pejabat The Fed juga akan tampil sepanjang pekan ini. Gubernur Christopher Waller, Presiden The Fed New York John Williams, Gubernur Lisa Cook, Wakil Ketua Philip Jefferson, Presiden The Fed Dallas Lorie Logan, serta Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid dijadwalkan menyampaikan pandangan mereka mengenai prospek ekonomi dan inflasi. Di sisi lain, Amerika Serikat juga akan merilis data penjualan ritel, produksi industri, pembangunan rumah baru, dan sentimen konsumen yang dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi ekonomi.

Di luar Amerika Serikat, perhatian investor juga mengarah ke Kanada. Bank of Canada diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,25% untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Bank sentral Kanada masih menghadapi dilema antara tekanan inflasi yang mereda akibat perlambatan perdagangan dengan Amerika Serikat dan kenaikan harga energi yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Sementara itu, Asia akan diramaikan oleh keputusan suku bunga Bank of Korea serta rilis produk domestik bruto (PDB) China kuartal II. Bank sentral Korea Selatan diperkirakan menaikkan suku bunga menjadi 2,75% seiring inflasi yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar won, dan kenaikan harga properti. Adapun ekonomi China diproyeksikan tumbuh 4,5% secara tahunan, lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Data tersebut diperkirakan kembali menunjukkan kontras antara kinerja ekspor yang masih kuat dengan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya, tercermin dari penjualan ritel yang diperkirakan kembali melemah pada Juni.

Di Eropa, pelaku pasar akan mencermati data pertumbuhan ekonomi Inggris, pidato Menteri Keuangan Rachel Reeves dan Gubernur Bank of England Andrew Bailey, serta sejumlah indikator ekonomi kawasan euro. Sementara di Amerika Latin, Argentina diperkirakan kembali mencatat perlambatan inflasi, sedangkan Brasil dan Peru akan merilis sejumlah data pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan bagi investor untuk menilai prospek kawasan tersebut.

Dengan padatnya agenda ekonomi dan bank sentral sepanjang pekan, pergerakan pasar keuangan global diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh apakah data inflasi AS benar-benar mengonfirmasi bahwa tekanan harga mulai mereda, atau justru memaksa The Fed mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama dari perkiraan.

UNESCO peringatkan penyusutan bantuan pendidikan dan meningkatnya beban utang.

Sabtu, 11 Juli 2026 12:50 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/5645225/unesco-peringatkan-penyusutan-bantuan-pendidikan-dan-meningkatnya-beban-utang>

PBB (ANTARA) - Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memperingatkan penyusutan bantuan pendidikan dan meningkatnya beban utang.

Penelitian baru-baru ini yang dirilis oleh UNESCO pada KTT Transformasi Pendidikan +4 (TES+4) menunjukkan sektor pendidikan menerima porsi yang semakin kecil dari bantuan pembangunan global. Bantuan untuk pendidikan hanya mencakup 7,5 persen dari total bantuan pembangunan resmi pada 2024, yang merupakan tingkat terendahnya dalam dua dekade terakhir.

UNESCO memperkirakan total bantuan global untuk pendidikan berpotensi merosot hingga 30 persen antara tahun 2023-2027. Negara-negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah ke bawah menghadapi kesenjangan pembiayaan pendidikan tahunan sebesar 97 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp18.090), yang diperkirakan akan semakin melebar.

Pada saat yang sama, meningkatnya beban utang memberikan tekanan yang semakin besar pada sistem pendidikan. Sebuah laporan terbaru UNESCO tentang utang dan pendidikan menemukan bahwa 113 negara, yang dihuni 6,1 miliar penduduk, menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang alih-alih untuk pendidikan.

Akibatnya, pengeluaran riil untuk pendidikan mengalami stagnasi atau penurunan di banyak negara, dengan konsekuensi jangka panjang terhadap akses, kualitas, dan kesetaraan.

"Pendidikan merupakan investasi paling strategis yang dapat dilakukan suatu negara, tetapi pendanaannya secara sistematis kurang memadai," kata Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enany, memperingatkan menurunnya bantuan pendidikan global berisiko memperpanjang siklus minimnya investasi, ketidaksetaraan, dan stagnasi pembangunan.

Guna membantu mengatasi tantangan tersebut, UNESCO kembali menyerukan skema debt-for-education swap, dan merilis panduan teknis untuk mendukung implementasinya.

Mekanisme ini akan memungkinkan negara-negara debitur untuk mengalihkan sebagian dana untuk pembayaran utang luar negeri mereka ke investasi pendidikan.

Temuan tersebut dirilis dalam KTT Transformasi Pendidikan +4, sebuah pertemuan lanjutan dari KTT Transformasi Pendidikan PBB yang bertujuan untuk memajukan upaya global dalam meningkatkan sistem pendidikan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 tentang pendidikan berkualitas.

Ekonom Soroti Paradoks APBN 2026: Utang Naik, Dana Masih Mengendap

Minggu, 12 Juli 2026 19:54 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-soroti-paradoks-apbn-2026-utang-naik-dana-masih-mengendap>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan outlook dari target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah langkah pemerintah melakukan frontloading pembiayaan utang secara agresif, pemerintah juga masih mencatat adanya Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi fiskal saat ini menunjukkan adanya paradoks dalam pengelolaan APBN. Di satu sisi, pemerintah mempercepat penarikan pembiayaan untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar, namun di sisi lain sebagian dana yang telah dihimpun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk belanja negara.

"Kalau melihat kondisi fiskal saat ini, ada satu paradoks yang perlu menjadi perhatian. Di satu sisi, pemerintah melakukan frontloading pembiayaan dengan cukup agresif. Namun di sisi lain, pemerintah juga mencatat SiLPA dalam jumlah besar," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (12/7).

Dalam outlook laporan Semester I-2026 yang disampaikan kepada DPR RI, pemerintah menaikkan target pembiayaan APBN 2026 menjadi Rp 734,3 triliun, dari target awal sebesar Rp 689,1 triliun. Dengan demikian, target pembiayaan meningkat menjadi sekitar 106,6% dari pagu awal.

Sementara itu, realisasi pembiayaan hingga Semester I-2026 telah mencapai Rp 452 triliun atau sekitar 65,6% dari target awal, ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pada saat bersamaan pemerintah masih mencatat SiLPA sekitar Rp 255,5 triliun. Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah menarik dana dalam jumlah besar, tetapi sebagian dana belum segera digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

"Dari perspektif pengelolaan fiskal, kondisi ini perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan biaya yang tidak perlu," katanya.

Yusuf menjelaskan, strategi frontloading sebenarnya merupakan kebijakan yang tepat dalam kondisi ketidakpastian global. Pemerintah perlu mengamankan kebutuhan pembiayaan lebih awal agar tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar keuangan pada akhir tahun.

Risiko seperti arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), konflik geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan membuat pemerintah perlu memiliki kepastian sumber pembiayaan.

Namun, menurut Yusuf, strategi tersebut tetap harus memperhitungkan biaya pendanaan. Pasalnya, pemerintah melakukan penarikan utang ketika imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berada pada level yang relatif tinggi.

"Jika dana yang sudah diperoleh belum segera digunakan, pemerintah tetap harus membayar bunga atas utang tersebut. Ini yang dalam pengelolaan utang disebut sebagai negative carry," jelasnya.

Negative carry terjadi ketika biaya yang harus dibayar pemerintah atas dana pinjaman lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh karena dana masih belum produktif.

Karena itu, Yusuf menilai tantangan utama pemerintah pada Semester II-2026 bukan lagi mempercepat penarikan utang, melainkan memastikan dana yang sudah tersedia dapat segera masuk ke perekonomian melalui percepatan belanja.

"Besarnya SiLPA menunjukkan persoalan saat ini lebih banyak berada pada sisi penyerapan anggaran, khususnya belanja investasi, dibandingkan sisi pembiayaan," ujar Yusuf.

Menurutnya, apabila realisasi belanja dapat dipercepat, manfaat ekonomi dari pembiayaan yang telah dihimpun pemerintah akan lebih cepat terasa. Selain itu, pemerintah juga dapat menekan biaya fiskal akibat dana yang terlalu lama mengendap.

Pemerintah Perlu Lebih Selektif Tarik Utang

Ke depan, Yusuf menilai pemerintah masih perlu melakukan frontloading pembiayaan, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif dan mengikuti kebutuhan kas riil.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu lagi melakukan penarikan utang secara agresif seperti pada Semester I karena kebutuhan pembiayaan utama sudah relatif lebih aman.

Selain mengandalkan penerbitan utang, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Menurut Yusuf, dalam kondisi biaya utang yang tinggi, pemanfaatan sebagian SAL dapat menjadi opsi yang lebih efisien dibandingkan menerbitkan utang baru dengan bunga mahal.

Meski demikian, penggunaan SAL tetap harus dilakukan secara hati-hati agar pemerintah tetap memiliki cadangan fiskal menghadapi risiko ke depan.

Yusuf menilai pemerintah tidak perlu mengalihkan seluruh kebutuhan pembiayaan ke global bond. Instrumen utang valuta asing tersebut tetap penting untuk diversifikasi sumber pendanaan, tetapi porsi perlu dijaga.

"Terlalu bergantung pada utang valuta asing justru meningkatkan risiko nilai tukar ketika rupiah masih berfluktuasi," katanya.

Menurut Yusuf, strategi pembiayaan yang lebih sehat adalah tetap menjadikan SBN berdenominasi rupiah sebagai sumber utama pembiayaan, dengan dukungan investor domestik sebagai penyangga pasar obligasi.

Instrumen seperti global bond maupun Panda Bond menurutnya dapat digunakan secara oportunistik ketika kondisi pasar mendukung, bukan menjadi sumber pembiayaan utama pemerintah.

Outlook Pembiayaan APBN 2026 Naik, Pemerintah Diminta Tetap Konservatif

Minggu, 12 Juli 2026 19:25 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/outlook-pembiayaan-apbn-2026-naik-pemerintah-diminta-tetap-konservatif>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memproyeksikan terjadi kenaikan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seiring perubahan belanja. Dalam outlook laporan Semester I 2026, pemerintah mengerek target pembiayaan menjadi Rp 734,3 triliun, naik dibandingkan pagu awal APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun.

Dengan demikian, target pembiayaan APBN 2026 meningkat menjadi sekitar 106,6% dari target awal. Sementara itu, hingga Semester I 2026, realisasi pembiayaan APBN telah mencapai Rp 452 triliun atau sekitar 65,6% dari pagu awal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peningkatan outlook pembiayaan tersebut tidak terlepas dari strategi pemerintah melakukan front loading pembiayaan di awal tahun untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya mengambil langkah tersebut karena khawatir kondisi pasar keuangan mengalami tekanan. Namun, perkembangan pasar obligasi yang tetap stabil membuat pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi ke depan.

"Itu strategi front loading tadinya, karena kita takut ketidakpastian di pasar. Tapi ternyata tidak, bond market tetap stabil, appetite ke surat utang kita tetap tinggi. Jadi ke depan kita bisa adjust," ujar Purbaya saat ditemui di DPR belum lama.

Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki ruang kas yang cukup besar melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak harus dilakukan secara agresif.

"Baru setengah semester, ada SAL sekitar Rp 255 triliun sekian. Itu kan belum habis sampai akhir tahun. Front loading dilakukan karena kita takut pasar goncang, ternyata tidak. Jadi itu hanya antisipasi saja," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto sebelumnya mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan strategi pembiayaan yang mengutamakan penerbitan dalam mata uang rupiah.

"Strateginya tahun ini akan mempertahankan komposisi itu. Keseluruhan pembiayaan APBN 2026 yang akan kita cari dalam rupiah sekitar 70%-75%, sedangkan sekitar 25%-30% dalam valas, baik melalui SBN valas maupun pinjaman valas," ujar Suminto,

Di sisi lain, pemerintah masih memiliki kuota penerbitan global bond sebesar US\$ 3 miliar. Pemerintah melihat peluang untuk memanfaatkan kuota tersebut melalui penerbitan Panda Bond di pasar China.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 552,1 triliun. Sementara itu, kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo pada tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, pemerintah perlu tetap menerapkan strategi pembiayaan yang konservatif atau berhati-hati, mengingat kondisi eksternal masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kondisi likuiditas domestik agar penerbitan utang tidak memberikan tekanan terhadap perekonomian.

"Pemerintah sebaiknya menggunakan strategi yang tetap konservatif mengingat kondisi eksternal masih volatil. Penarikan utang juga jangan sampai mengganggu likuiditas domestik yang ujungnya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi," ujar David kepada Kontan, Minggu (12/7).

David menjelaskan, strategi front loading sebenarnya tepat dilakukan apabila pemerintah memperkirakan suku bunga akan meningkat atau pasar keuangan berpotensi mengalami tekanan.

"Namun, karena Menkeu menyatakan kondisi pasar saat ini "sudah aman" dan kas internal (SiLPA) menumpuk, melanjutkan front loading yang agresif justru menjadi tidak efisien," ujar David.

Menurutnya, pemerintah tidak harus selalu memanfaatkan penerbitan surat utang global apabila kebutuhan pembiayaan masih dapat dipenuhi dari pasar domestik.

"Jika menerbitkan surat utang, tidak harus selalu global bond. Bisa dilakukan secara proporsional saja," katanya.

David menilai kuota global bond sebesar US\$ 3 miliar sebaiknya digunakan sebagai opsi cadangan atau penerbitan oportunistik (opportunistic issuing). Pemerintah dapat masuk ke pasar global ketika kondisi mendukung, terutama saat sentimen investor membaik dan tingkat imbal hasil obligasi internasional lebih rendah.

Menurutnya, pembiayaan APBN tetap perlu bertumpu pada instrumen berdenominasi rupiah di pasar domestik. Strategi tersebut penting untuk menjaga risiko nilai tukar agar tidak meningkat.

"Pembiayaan tetap bertumpu pada instrumen rupiah di pasar domestik untuk menjaga agar risiko kurs tidak meningkat," pungkas David.

Prabowo: Kopdes Merah Putih Akan Salurkan Kredit Super Mikro dengan Bunga 8%

Minggu, 12 Juli 2026 19:21 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-kopdes-merah-putih-akan-salurkan-kredit-super-mikro-dengan-bunga-8>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk menyalurkan kredit skala mikro dengan bunga menarik.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa KDKMP nantinya tidak hanya akan berperan sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya bersumber dari simpanan anggota, tetapi juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan super mikro.

"Koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjem kredit yang murah, kredit mikro dan kredit super mikro," ujar Prabowo.

Ia mengatakan bahwa salah satu fasilitas pembiayaan yang akan tersedia di KDKMP adalah kredit tanpa agunan Mekaar. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga sebesar 8 persen per tahun.

"Yang tadinya bunganya 22 persen, saya turunkan jadi 8 persen. Dibandingkan dengan 22 persen, lumayan 8 persen, betul tidak?" lanjut dia.

Selain menyediakan akses pembiayaan, Prabowo menjelaskan bahwa KDKMP akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.

Berbagai fasilitas akan tersedia dalam satu lokasi, mulai dari toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat-obatan generik dengan harga lebih terjangkau, pusat logistik, gudang penyimpanan, hingga gudang pendingin untuk menjaga kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas lainnya agar tidak cepat rusak.

Prabowo juga menegaskan bahwa KDKMP akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Menurutnya, seluruh barang subsidi harus diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan.

"KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi," pungkask dia.

Prabowo Beberkan Alasan Program KDMP Harus Capai 81.000 Dalam Waktu Singkat

Minggu, 12 Juli 2026 18:54 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-beberkan-alasan-program-kdmp-harus-capai-81000-dalam-waktu-singkat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasannya untuk mempercepat pembangunan koperasi Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup sekitar 81.000 desa.

Menurut Prabowo, percepatan ini perlu dilakukan karena kondisi perekonomian masyarakat di tingkat desa sudah dalam posisi mendesak dan membutuhkan penanganan taktis.

"Kita bisa laksanakan dengan cara-cara biasa tapi rakyat yang susah mereka memerlukan tindakan cepat. Kita tidak bisa dengan cara-cara biasa, kita harus berpikir cerdas dan praktis," ujar Presiden Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).

Prabowo mengungkapkan, dalam proses perumusan kebijakan, dirinya sempat menerima masukan dari para penasihat agar program ini dijalankan secara bertahap melalui prosedur birokrasi konvensional.

Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan naskah akademis yang panjang hingga pembuatan proyek percontohan (pilot project) di ratusan desa terlebih dahulu. Namun, dirinya mengakui menolak skema perlahan tersebut karena dinilai tidak efisien secara waktu dan berpotensi membiarkan jutaan rakyat desa larut dalam kesulitan ekonomi terlalu lama.

"Naskah akademis itu biasanya delapan bulan rapat sini rapat situ nanti kita bikin pilot projects itu dua tahun habis itu kita coba 100 desa dulu. Dan kita ada 81.000 desa, rakyat itu harus nunggu delapan tahun? Saya tidak mau," tegas Presiden.

Menurut Prabowo urgensi utama mempercepat target operasional koperasi desa ini adalah untuk memutus mata rantai ketergantungan modal petani dan nelayan dari cengkraman lintah darat.

Selain itu, penetapan target agresif ini diperlukan agar fungsi koperasi sebagai pelaksana tunggal penyaluran barang penugasan subsidi pemerintah bisa langsung berjalan serentak secara nasional.

Menurut Prabowo, kebijakan ini sekaligus mengikis inefisiensi logistik dan menekan angka penyelundupan komoditas ke luar negeri.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa keputusannya untuk langsung mengejar target skala besar ini merupakan bentuk tanggung jawab langsung kepada rakyat.

"Saya bertanggung jawab kepada rakyat saya, saya memilih jalan yang berani, jalan yang besar tapi terukur dan terjangkau oleh kita, dan itu yang sedang kita laksanakan," imbuhnya.

Walau begitu, Prabowo meminta kepada Kementerian Koperasi untuk tidak berkecil hati jika pada tahap awal realisasi operasional baru menyentuh angka ribuan unit.

Prabowo meyakini penetapan target agresif ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa akan jauh lebih cepat tercapai ketimbang tanpa target yang jelas.

"Perjalanan 1.000 km dimulai dari 1 langkah, tidak masalah. Dalam waktu dekat mungkin jadi 5.000, insyaallah kita akan sampai tujuan kita. Kalau target kita 1,5 tahun gapapa kita bisa nyusul. Tapi kalau kita tidak punya target, gak sampe-sampe," tutup Prabowo.

Aset Valas Jadi Penopang Cadangan Devisa, Lebih Likuid untuk Stabilitas Ekonomi

Minggu, 12 Juli 2026 18:43 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/aset-valas-jadi-penopang-cadangan-devisa-lebih-likuid-untuk-stabilitas-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan struktur cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026 menunjukkan peningkatan peran foreign currency reserves atau aset valuta asing.

Meski sejumlah komponen lain dalam cadangan devisa mengalami penurunan, kenaikan aset valas dinilai menjadi faktor positif karena merupakan komponen yang paling likuid dan dapat digunakan secara cepat untuk mendukung stabilitas ekonomi.

Official reserve assets merupakan aset cadangan resmi yang dimiliki dan dikelola Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Komponen ini terdiri atas cadangan valuta asing, posisi cadangan di Dana Moneter Internasional (IMF), Special Drawing Rights (SDR), emas moneter, serta aset cadangan lainnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, official reserve assets pada Juni 2026 tercatat sebesar US\$ 145,59 miliar, meningkat dari US\$ 144,89 miliar pada Mei 2026. Kenaikan tersebut terutama berasal dari foreign currency reserves yang meningkat menjadi US\$ 125,00 miliar dari sebelumnya US\$ 122,87 miliar.

Sementara itu, beberapa komponen lain mengalami penurunan. Posisi cadangan di IMF turun menjadi US\$ 1,075 miliar dari US\$ 1,083 miliar. Nilai SDR juga menurun menjadi US\$ 7,514 miliar dari US\$ 7,573 miliar.

Komponen emas moneter juga turun cukup besar menjadi US\$ 11,285 miliar dari sebelumnya US\$ 12,659 miliar. Adapun aset cadangan lainnya turun menjadi US\$ 710 juta dari US\$ 712,68 juta.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menilai, perubahan komposisi tersebut tidak menunjukkan adanya pelemahan kualitas cadangan devisa. Menurutnya, penurunan beberapa komponen lebih banyak dipengaruhi oleh faktor valuasi, terutama pada emas dan SDR.

David menjelaskan, komponen SDR dan posisi cadangan di IMF relatif stabil. Perubahan nilainya lebih dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang yang menjadi dasar perhitungan SDR.

"Komponen SDR dan reserve position di IMF sebetulnya relatif konstan. Pelemahannya karena memang dolar AS sedikit menguat terhadap SDR," ujar David kepada Kontan, Minggu (12/7/2026).

Sementara penurunan emas moneter, menurut David, terjadi karena koreksi harga emas dunia pada Juni 2026. Padahal, dalam dua tahun terakhir, kenaikan harga emas menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong peningkatan nilai cadangan devisa Indonesia.

"Yang mengalami penurunan dalam adalah emas, dan itu pun disebabkan oleh turunnya harga emas di bulan Juni yang cukup dalam, karena memang kira-kira dua tahun terakhir harga emas menjadi salah satu yang mendorong cadangan devisa meningkat," katanya.

Menurut David, komponen-komponen seperti emas, SDR, dan posisi cadangan di IMF lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan valuasi sehingga tidak terlalu mengganggu kondisi cadangan devisa secara keseluruhan.

Sebaliknya, komponen yang lebih penting untuk diperhatikan adalah foreign currency reserves karena memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan komponen cadangan devisa lainnya.

"Yang lebih penting adalah posisi foreign currency reserves, yang naik karena arus masuk asing via SRBI," jelas David.

Dengan meningkatnya porsi aset valas, menurut David, Bank Indonesia memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah maupun menghadapi tekanan eksternal.

Ada Kopdes, Prabowo Klaim Perputaran Ekonomi Desa Bakal Mencapai Rp 233 Triliun

Minggu, 12 Juli 2026 17:57 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ada-kopdes-prabowo-klaim-perputaran-ekonomi-desa-bakal-mencapai-rp-233-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut berdampak pada perputaran ekonomi desa.

Menurutnya pemerintah telah menghitung perputaran uang di desa bisa mencapai Rp 233 triliun setiap tahun jika program ini berjalan secara masif.

"Ada Rp 233 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa nanti," ujar Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).

Presiden menambahkan, masifnya likuiditas di tingkat desa ini juga akan berdampak berantai pada produktivitas para pekerja sektor pertanian, peternakan, hingga kelautan.

Pemerintah menargetkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan bagi para produsen di tingkat hilir dalam waktu dekat.

"Akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat Rp 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan," tegas Presiden.

Menurut Kepala Negara, skema baru ini dirancang untuk membalikkan arah perputaran kekayaan nasional yang selama ini dinilai terlalu berpusat di kota besar atau bahkan mengalir ke luar negeri.

Prabowo menyayangkan inefisiensi ekonomi masa lalu yang dipengaruhi oleh paham neoliberal, sehingga kekayaan daerah terus tersedot ke pusat.

Melalui KDKMP, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri.

"Kita akan balikkan. Kalau selama ini kekayaan Indonesia disedot, ekonomi kita akan kembalikan, akan turun ke rakyat. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten," jelasnya.

Guna mencapai target peredaran dana tersebut, KDKMP nantinya diwajibkan menjadi agregator tunggal dan pelayanan terintegrasi bagi seluruh kebutuhan logistik warga desa.

Koperasi desa ini akan memegang peran vital mulai dari penyediaan toko sembako, gerai mikro kredit, apotek desa, hingga penyaluran seluruh komoditas barang bersubsidi.

Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi pihak ketiga atau spekulan yang menyalahgunakan barang penugasan pemerintah yang ditujukan bagi rakyat miskin.

Seluruh sistem distribusi pupuk bersubsidi, tabung gas, hingga bahan pangan pokok wajib dialirkan dan dikelola langsung oleh ekosistem koperasi desa.

"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui KDKMP. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya dia (yang berhak) yang menerima," tutup Prabowo.

Indef: Tambahan TKD Rp 13,3 Triliun Belum Mampu Atasi Tekanan Fiskal Daerah

Minggu, 12 Juli 2026 15:07 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/indef-tambahan-tkd-rp-133-triliun-belum-mampu-atasi-tekanan-fiskal-daerah>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tambahan pagu alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp 13,3 triliun dinilai belum mampu mengatasi tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Meski kenaikan tersebut meningkatkan pagu TKD menjadi Rp 706,3 triliun, kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan dinilai masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan pagu indikatif TKD 2026 dari Rp 693 triliun menjadi Rp 706,3 triliun atau bertambah sekitar Rp 13,3 triliun. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sejumlah kebutuhan prioritas, antara lain penanganan bencana di Sumatera, penambahan dana otonomi khusus Papua, serta dana infrastruktur khusus.

Namun demikian, alokasi tersebut masih berada di bawah besaran TKD tahun 2025 yang mencapai Rp 849 triliun. Artinya, meski ada penambahan, total anggaran transfer ke daerah masih lebih rendah sekitar Rp 142,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai tambahan pagu TKD tersebut memang memberikan ruang fiskal yang lebih baik dibandingkan rancangan awal, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemerintah daerah.

"Tambahan pagu TKD sebesar Rp 13,3 triliun memang memberikan ruang fiskal yang lebih baik dibandingkan rancangan sebelumnya, tetapi secara substansi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah," ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (12/7/2026).

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan yang bersifat spesifik seperti penanganan bencana, dana otonomi khusus Papua, dan infrastruktur tertentu. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik, pembangunan ekonomi, serta program prioritas di daerah masih relatif terbatas.

"Apalagi jika dibandingkan dengan alokasi TKD 2025 yang lebih tinggi, kapasitas fiskal daerah secara agregat masih mengalami tekanan," imbuhnya.

Rizal menilai keterbatasan ruang fiskal daerah dapat berdampak terhadap perlambatan aktivitas ekonomi, terutama di luar Pulau Jawa yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, belanja pemerintah daerah merupakan salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ketika ruang belanja menyempit, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga belanja yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap konsumsi dan investasi juga berpotensi melambat.

Ia mengatakan, akibat penyempitan ruang fiskal tersebut, kesenjangan pembangunan antardaerah dapat semakin lebar apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja dan sumber pendapatan daerah.

Karena itu, Rizal menilai solusi tidak cukup hanya dengan menambah nominal TKD. Pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran daerah agar setiap tambahan transfer mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan insentif berbasis kinerja kepada pemerintah daerah, memperluas skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur, serta memastikan alokasi transfer difokuskan pada program-program yang memiliki dampak ekonomi tinggi.

"Dengan demikian, setiap tambahan anggaran mampu menghasilkan efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Rizal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menaikkan pagu alokasi anggaran TKD untuk mendukung sejumlah kebutuhan prioritas di daerah, mulai dari penanganan bencana di Sumatera hingga penambahan dana otonomi khusus Papua serta dana infrastruktur khusus.

Selain itu, peningkatan pagu TKD tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan kebutuhan pendanaan bagi program-program prioritas dapat terpenuhi.

Adapun sampai dengan semester I-2026, Kementerian Keuangan sudah mencairkan TKD sebesar Rp 397,4 triliun atau 51,6% dari pagu awal APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Ruang Fiskal Daerah Sempit Berpotensi Hambat Pembangunan

Minggu, 12 Juli 2026 12:04 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ruang-fiskal-daerah-sempit-berpotensi-hambat-pembangunan>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kondisi keuangan pemerintah daerah (pemda) pada 2026 berada dalam tekanan akibat menyempitnya ruang fiskal. Salah satu penyebabnya adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) di tengah meningkatnya beban belanja yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD dalam APBN 2026 mencapai Rp 693 triliun, lebih rendah dari 2025 sebesar Rp 849 triliun.

CORE menjelaskan pemerintah daerah kini harus menanggung penuh gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski kebijakan pengangkatannya diputuskan dan didorong oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, alokasi TKD justru dipangkas cukup dalam.

“Kombinasi ini menyempitkan ruang fiskal daerah secara drastis di tengah beban belanja yang membesar,” mengutip postingan akun Instagram resmi CORE Indoensia @core_indoensia, Minggu (12/7/2026).

CORE menilai ketika ruang fiskal semakin sempit, belanja pembangunan seperti jalan, irigasi, dan sekolah berpotensi menjadi pos yang pertama dikorbankan. Hal ini karena belanja pegawai relatif lebih terlindungi lantaran bersifat wajib.

Padahal, belanja modal merupakan penggerak utama efek pengganda terhadap perekonomian. Karena itu, pemangkasannya dinilai tidak hanya berdampak pada tertundanya pembangunan, tetapi juga dapat menjalar ke perekonomian lokal.

Berdasarkan ilustrasi yang disusun CORE terhadap enam daerah, penurunan TKD diikuti tekanan terhadap belanja modal di sejumlah daerah. Di Konawe misalnya, TKD turun 15,9%, sementara di Bima turun 9,5%, Siak turun 10,2%, Pati turun 25,4%, Wonogiri turun 55%, dan Halmahera Utara turun 4,2%.

CORE juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemangkasan TKD yang dilakukan secara masif di berbagai daerah. Menurut lembaga tersebut, evaluasi harus mempertimbangkan kinerja birokrasi, kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah, kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta struktur ekonomi masing-masing daerah.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar dampak negatif pemangkasan TKD terhadap pembangunan jangka menengah dapat diminimalkan sedini mungkin.

Selain itu, CORE mencatat pemangkasan TKD juga terjadi di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera pada akhir 2025, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Padahal, daerah-daerah tersebut masih membutuhkan anggaran pemulihan pascabencana.

Menurut CORE, kondisi tersebut memperlihatkan kebijakan pemangkasan TKD belum sepenuhnya didasarkan pada penilaian yang rinci terhadap kebutuhan pembangunan dan karakteristik masing-masing daerah.

Dalam kajian tersebut, CORE juga mendorong reformasi sistem desentralisasi fiskal agar transfer ke daerah menjadi lebih adil, stabil, dan berbasis kebutuhan riil serta kapasitas fiskal masing-masing daerah. Reformasi juga perlu disertai penguatan PAD, pembenahan Dana Bagi Hasil (DBH), tata kelola yang lebih independen, serta peningkatan partisipasi publik.

Adapun rekomendasi yang disampaikan CORE meliputi, pertama penyempurnaan formula Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan biaya riil pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), menjaga stabilitas dana transfer ke daerah.

Kedua, mestabilkan dana transfer. Menurut CORE jangka porsinya dan atransfer ke daerah dalam aturan yang mengikat dan berlaku beberapa tahun serta disesuaikan secara proporsional dengan kondisi penerimaan pusat.

Ketiga, mengalirkan dana program nasional melalui transfer. Salurkan sebagian dana program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Dana Desa Merah Putih melalui mekanisme transfer spesifik (DAU/DBH) yang ditetapkan berdasarkan performa hibah berbasis, sehingga kapasitas fiskal daerah bertambah tanpa memaksa daerah memangkas belanja lain atau menaikkan pajak yang berisiko secara sosial.

Keempat, mengembalikan orkestrasi pembangunan sebagai dasar penyusunan anggaran. CORE menilai, reformasi hubungan penguatan kembali sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi perlu dilakukan.

Kelima, mereformasi DBH dan perpajakan daerah agar lebih adil dan organik. CORE mendorong pemerintah mengoptimalkan DBH Khusus bagi daerah pengolah lokasi smelter dan hirilisasi agar nilai tambah nikel, bauksit, atau mineral lain yang diproses di wilayah tersebut sebagian besar dinikmati daerah, bukan sekedar royalty mentah yang mengalir deras ke pusat.

Restitusi Pajak Turun 31,5% Jadi Rp 171,2 Triliun di Semester I-2026, Pertanda Apa?

Minggu, 12 Juli 2026 06:49 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/restitusi-pajak-turun-315-jadi-rp-1712-triliun-di-semester-i-2026-pertanda-apa>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak turun di semester I 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi restitusi pajak hingga akhir Juni 2026 atau semester I-2026 mencapai Rp 171,2 triliun. Nilai tersebut turun 31,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebut, penurunan restitusi terjadi pada dua jenis pajak utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri.

"Secara total, realisasi restitusi sampai dengan Juni 2026 adalah Rp 171,2 triliun atau turun 31,5% dibanding tahun lalu," ujar Inge kepada Kontan.co.id, Kamis (9/7/2026).

Inge memerinci, realisasi restitusi untuk jenis pajak PPh Badan tercatat sebesar Rp 41,5 triliun atau turun 40% dibandingkan tahun lalu.

Sedangkan jenis pajak PPN Dalam Negeri realisasi restitusinya sebesar Rp 124 triliun atau turun 29,7% dibanding tahun lalu.

Sementara itu, restitusi untuk kelompok jenis pajak lainnya tercatat naik. Hingga Juni 2026, realisasinya mencapai Rp 5,7 triliun atau meningkat 26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, total restitusi yang telah dibayarkan DJP sepanjang semester I 2026 mencapai Rp 171,2 triliun.

Menahan Pencairan Restitusi

Sebelumnya, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan restitusi pajak ini mengindikasikan bahwa DJP mulai melakukan penahanan pencairan restitusi pajak.

Menurutnya, kebijakan menahan restitusi hanya memperbaiki arus kas pemerintah untuk sementara waktu, tetapi kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi pada tahun berikutnya.

"Kondisi sekarang pun begitu, wajib pajak yang restitusinya ditahan, dijanjikan tahun depan. Makanya, saya menyebut jika strategi ini bukan solusi namun bom waktu," kata Fajry.

Sementara itu, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengaku masih menerima banyak laporan dari komunitas konsultan pajak mengenai lambatnya pencairan di lapangan.

Menurutnya, terdapat wajib pajak yang telah menyelesaikan pemeriksaan maupun memenangkan sengketa di Pengadilan Pajak, tetapi dana restitusinya belum juga ditransfer.

"Ada yang sudah selesai pemeriksaan, tapi transfer ke rekening wajib pajak ditahan entah sampai kapan. Ada juga yang sudah selesai banding di Pengadilan Pajak dan wajib pajak menang, seharusnya restitusi, tetapi masih tertahan tanpa kepastian ditransfer," ungkap Raden.

Pemerintah Memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 12 Juli 2026 11:15 WITA

<https://www.suaradewata.com/berita/202405216139/pemerintah-memperkuat-kawasan-ekonomi-khusus-kek-untuk-mencapai-target-pertumbuhan-ekonomi%7D>

Jakarta - Pemerintah mempercepat dan memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Strategi ini mencakup ekspansi KEK manufaktur yang sudah ada, pengembangan KEK baru, integrasi KEK dengan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta transformasi KEK menjadi pusat riset dan pengembangan talenta global.

Untuk mencapai target tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (2/7).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Moegiarso menyampaikan berbagai langkah strategis Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan efisiensi logistik nasional, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional sebagai upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan. Efisiensi biaya logistik akan

berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional," ujar Susiwiwiono.

Selain itu Susiwiwiono juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.

Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Selain itu Pemerintah juga memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan kualitas dmencapai, memperkuat investasi dan pembiayaan serta kapasitas SDM di tiap-tiap sektor.

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus menempatkan daerah sebagai aktor utama. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan nasional, khususnya terkait investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan logistik dan konektivitas.

"Pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah," tegas Hemas.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sejalan dengan itu, KEK diharapkan terus menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Berawal dari Garasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari Kini Tembus Omzet Ratusan Juta

Minggu, 12 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/berawal-dari-garasi-koperasi-kelurahan-merah-putih-banjarsari-kini-tembus-omzet-ratusan-juta/>

SURAKARTA – Berawal dari sebuah garasi rumah, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta, berkembang menjadi salah satu contoh tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.

Baru beroperasi sejak September 2025, koperasi tersebut kini membukukan omzet lebih dari Rp300 juta dalam enam bulan pertama 2026, dengan jumlah anggota meningkat dari 32 menjadi sekitar 130 orang.

Perkembangan itu dipamerkan dalam Gelar Produk Koperasi dan UMKM pada rangkaian Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (11/7/2026).. Beragam produk UMKM, kerajinan, hingga kebutuhan pokok dipamerkan, sebagai bukti koperasi mulai menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Ketua KKMP Banjarsari, Budi Agung Setyowicoyo, mengatakan koperasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pelaku UMKM di wilayah Banjarsari.

“Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta,” katanya.

Menurut Budi, KKMP Banjarsari tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai off taker (pembeli) bagi produk-produk UMKM, sekaligus hub distribusi sembako bagi masyarakat.

Sebagai off taker, koperasi menyerap sekaligus membantu memasarkan produk UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian pasar. Adapun sebagai hub, koperasi menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan menggandeng Bulog, ID Food, dan distributor lainnya, agar pasokan lebih terjamin, rantai distribusi lebih pendek, dan harga lebih kompetitif bagi masyarakat.

“Kita berperan sebagai off taker dari Koperasi Merah Putih terhadap UMKM, dan kita juga akan memerankan diri sebagai hub, untuk produk-produk kebutuhan sembako bagi warga kita,” ujarnya.

Dalam pameran tersebut, KKMP Banjarsari membawa berbagai produk UMKM, seperti batik, blangkon, tenun ikat, batik ciprat, ecoprint, dan aneka kerajinan tangan. Koperasi juga menjual beras SPHP, beras premium, serta berbagai merek minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perjalanan koperasi itu terbilang singkat, tetapi pertumbuhannya cukup pesat. Setelah membukukan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp2 juta pada akhir 2025, omzetnya melonjak menjadi lebih dari Rp300 juta sepanjang Januari hingga Juni 2026.

“Saya meyakini ke depan, dari di akhir tahun kita akan meningkat tajam terkait dengan pembukuan SHU-nya,” kata Budi.

Pertumbuhan tersebut diikuti bertambahnya jumlah anggota menjadi sekitar 130 orang. Mayoritas merupakan pelaku UMKM, mulai dari pedagang nasi goreng, penjual rice bowl, hingga pemilik toko kelontong.

Menurut Budi, kehadiran koperasi justru memperkuat usaha toko kelontong, karena menjadi tempat memperoleh pasokan barang dengan harga yang lebih baik.

Menariknya, seluruh aktivitas koperasi bermula dari garasi rumah ketua koperasi, sebelum akhirnya berpindah ke rumah dinas lurah yang tidak ditempati. Bagi pengurus, manfaat bagi masyarakat jauh lebih penting daripada menunggu gedung permanen berdiri.

“Kami sepakat dengan pengurus dan seluruh anggota, bahwa kita tidak akan menunggu gedungnya ada. Karena masyarakat sudah menunggu kehadiran Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Keberhasilan KKMP Banjarsari menjadi salah satu gambaran awal implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang tengah didorong pemerintah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

“Pemerintah Republik Indonesia punya gawe yang cukup besar, bagaimana menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dengan membangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” kata Sumarno saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, memberikan sambutan pada Tasyakuran dan Pagelaran Seni Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jateng, di Stadion Manahan, Surakarta.

Untuk memastikan program tersebut berkelanjutan, Pemprov Jateng melakukan langkah yang tidak banyak dilakukan daerah lain, yakni mengintegrasikan pendidikan perkoperasian ke dalam pembelajaran di sekolah.

Melalui Program Inseri Pendidikan Perkoperasian, Jawa Tengah menjadi provinsi pelopor yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan dengan sasaran sekitar 6,38 juta peserta didik mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB.

“Kita punya konsep untuk inseri pendidikan koperasi, karena apa? pemahaman terhadap konsep koperasi mungkin belum dipahami secara utuh,” ujarnya.

Menurut Sumarno, Pemprov Jateng akan menjalankan program tersebut pada jenjang SMA, SMK, MA, dan SLB sesuai kewenangannya.

Di juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota berkolaborasi mengimplementasikan pendidikan koperasi pada jenjang SD dan SMP, sehingga pemahaman tentang koperasi dapat ditanamkan sejak usia dini dan menjadi fondasi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di masa depan.

“Dan sekali lagi dengan momentum peringatan ke-79 Hari Koperasi ini menjadi tonggak mari kita bersama-sama berkolaborasi, membangun Koperasi yang menjadi gawe besar dari Pemerintah Republik Indonesia,” tutup Sumarno.

Untuk diketahui, di Jawa Tengah telah terbentuk 8.523 KDKMP, dengan 6.271 koperasi atau sekitar 73% sudah operasional, serta 3.950 gedung koperasi telah selesai dibangun. KDKMP di Jateng juga telah memiliki modal sebesar Rp34,21 miliar dengan lebih dari 200 ribu anggota. (Humas Jateng)*ul

Ekonomi Blora Tumbuh 5,49 Persen, Bupati Ungkap Sederet Kemajuan Daerah

Minggu, 12 Juli 2026

Jurnalis: Eko Wicaksono, Editor: Tia

<https://harianmuria.com/blora/ekonomi-blora-tumbuh-549-persen-bupati-ungkap-sederet-kemajuan-daerah/>

BLORA, Harianmuria.com – Bupati Arief Rohman mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora mencapai 5,49 persen. Dengan capaian ini Blora menempati beberapa posisi unggulan untuk sejumlah komoditas.

Salah satunya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Blora kini menjadi daerah dengan populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah. Hal ini ia sampaikan saat konferensi pers pada Sabtu sore, 11 Juli 2026.

“Sementara itu sektor tanaman pangan, Blora menjadi penghasil jagung terbesar kedua serta masuk enam besar daerah penghasil padi di Provinsi Jateng,” kata dia.

Tidak hanya ekonomi, pembangunan infrastruktur juga terus menunjukkan kemajuan. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Blora kini telah mencapai sekitar 70 persen.

“Jalan Tunjungan-Japah sekarang sudah bagus dan mulus. Ini berkat dukungan pemerintah pusat melalui dana Inpres dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Harapan kami sebelum masa jabatan berakhir, jalan di Kabupaten Blora bisa tuntas 100 persen,” ujarnya.

Bupati Arief mengajak kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader PKK, Karang Taruna, RT/RW, hingga kader Posyandu untuk melanjutkan pendidikan melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Semarang (UNNES).

“Tahun ini program RPL dibuka lagi dengan kuota 230 mahasiswa. Ini kesempatan besar bagi para pegiat desa untuk meningkatkan kapasitas diri,” kata Arief.

Bupati juga menginformasikan, hingga kini hampir 1.000 warga Blora telah menempuh pendidikan tinggi melalui berbagai program kerja sama dengan UNNES.

Menurutnya pembangunan fisik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung kualitas SDM yang memadai. Karena itu, ia menegaskan pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Blora.

“Kalau SDM maju, pelayanan publik di desa juga akan semakin baik. Ini yang terus kami dorong,” ujarnya.

Hari Koperasi ke-79, Sekda Sumarno Serukan Kebangkitan Koperasi di Jawa Tengah

Minggu, 12 Juli 2026 14:00 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/hari-koperasi-ke-79-sekda-sumarno-serukan-kebangkitan-koperasi-di-jawa-tengah>

Ribuan pegiat koperasi memadati Stadion Manahan untuk menyuarakan semangat kebangkitan koperasi. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengajak seluruh pihak bergotong royong menguatkan ekonomi kerakyatan.

Semangat Hari Koperasi ke-79 terasa kuat di kawasan Stadion Manahan saat ribuan pegiat koperasi dari berbagai daerah berkumpul mengikuti Runwalk UMKM sebagai simbol kebersamaan membangun ekonomi berbasis koperasi.

Kegiatan yang digelar Minggu (12/7/2026) itu diikuti sekitar 2.000 peserta dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka berasal dari dinas koperasi dan UKM, koperasi swasta, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Runwalk menempuh rute sepanjang 2,7 kilometer mengelilingi kawasan Stadion Manahan. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antargerakan koperasi di Jawa Tengah.

Kegiatan dilepas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskan upaya pemerintah membangkitkan koperasi.

Menurut Sumarno, Hari Koperasi ke-79 harus menjadi titik balik lahirnya koperasi yang semakin kuat, sehat, profesional, dan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

"Mudah-mudahan dengan kita memperingati ke-79 ini menjadi momentum awal kita bersama-sama membangun koperasi yang kuat, koperasi yang benar-benar menyejahterakan para anggota," kata Sumarno didampingi Wali Kota Surakarta Respati Ardianto.

Ia menegaskan keberhasilan membangun koperasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, akademisi, pelaku koperasi, hingga masyarakat harus bergerak bersama agar koperasi semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat.

"Pemerintah lagi pengen menghidupkan koperasi. Mari kita sengkuyung bareng-bareng. Koperasi tidak bisa berkembang tanpa dukungan dari semua pihak," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Arijani, mengatakan Runwalk UMKM menjadi penutup seluruh rangkaian Hari Koperasi ke-79 yang sebelumnya diisi pameran produk koperasi dan UMKM, sarasehan, tirakatan, serta gelar budaya. Ia berharap sinergi yang telah terbangun mampu mempercepat transformasi koperasi menjadi lebih adaptif, profesional, dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Tengah. "Kami berharap sinergi pemerintah dan gerakan koperasi akan terus terjalin demi mewujudkan perekonomian Jawa Tengah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya," pungkasnya.

Warsh dan Inflasi AS akan Tentukan Arah Suku Bunga The Fed Juli

Senin, 13 Juli 2026 10:00 WIB

Matthew Boesler dan Craig Stirling - Bloomberg News

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114777/warsh-dan-inflasi-as-akan-tentukan-arah-suku-bunga-the-fed-juli>

Bloomberg, Kevin Warsh bersiap melakukan kemunculan pertamanya di hadapan Kongres AS sebagai Gubernur Federal Reserve (The Fed). Dalam kesaksian yang berlangsung selama dua hari tersebut, ia akan membedah data inflasi terbaru Amerika Serikat bersama para anggota dewan.

Dengar pendapat dengan Komite Layanan Keuangan DPR AS dijadwalkan memulai prosesnya pada Selasa (14/7) pukul 10.00 waktu Washington, yang didahului oleh rilis data indeks harga konsumen (IHK) bulan Juni oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS). Selanjutnya pada hari Rabu, sesaat setelah BLS merilis data indeks harga produsen (IHP), Warsh akan memberikan kesaksian di hadapan komite Senat.

Para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memproyeksikan kedua laporan tersebut akan menunjukkan sedikit pelonggaran, menyusul lonjakan harga-harga yang sempat terjadi sepanjang Maret hingga Mei.

Penurunan harga bensin baru-baru ini kemungkinan membantu menekan IHK, yang berpotensi mencatat penurunan bulanan pertamanya sejak awal pandemi pada tahun 2020. Kendati demikian, IHP diperkirakan justru menunjukkan tekanan inflasi di tingkat hulu yang terus meningkat, seiring dampak guncangan energi akibat perang Iran yang masih menjalar ke sistem perekonomian. Para ekonom memperkirakan perubahan 12 bulanan pada indikator inti—yang mengecualikan sektor pangan dan energi—akan mempercepat laju ke posisi 5,2% dari sebelumnya 4,9%.

Sejumlah pejabat The Fed lainnya juga dijadwalkan berbicara pada pekan ini, menjadi sinyal bahwa periode "senyap" yang sempat menyelimuti bank sentral setelah Warsh menjabat kini mulai berakhir.

Beberapa agenda penting di antaranya adalah pidato Deputy Gubernur The Fed Christopher Waller pada hari Senin; pernyataan dari Gubernur The Fed New York John Williams dan Deputy Gubernur The Fed Lisa Cook pada hari Rabu; serta pidato dari Wakil Gubernur The Fed Philip Jefferson, Gubernur The Fed Dallas Lorie Logan, dan Gubernur The Fed Kansas City Jeff Schmid pada hari Kamis.

Melengkapi kalender ekonomi AS, akan ada pembaruan data penjualan ritel pada hari Kamis, disusul rilis data produksi industri, pembangunan rumah baru (housing starts), dan sentimen konsumen pada hari Jumat.

Di Kanada pada hari Rabu, para pejabat bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan mereka di level 2,25% untuk keenam kalinya berturut-turut. Bank of Canada terus berupaya menyeimbangkan tekanan turun terhadap inflasi akibat kemelut perdagangan dengan AS, melawan momentum kenaikan harga yang dipicu oleh konflik Timur Tengah.

Lonjakan harga gas telah mendorong inflasi utama ke angka 3,2%, meskipun indikator inti tetap terkendali.

Data penjualan rumah yang ada (existing home sales) dan pembangunan rumah baru untuk bulan Juni kemungkinan menunjukkan perbaikan berkelanjutan, memperpanjang fase pemulihan bertahap setelah periode pelemahan yang berkepanjangan. Terlepas dari kontraksi dua kuartal berturut-turut, data terbaru mengindikasikan adanya pemulihan di kuartal kedua.

Di wilayah lain, potensi kenaikan suku bunga di Korea Selatan, data pertumbuhan ekonomi di China, serta pidato tahunan Mansion House di Inggris menjadi beberapa sorotan utama dunia.

Kawasan Asia

Sorotan utama di Asia tertuju pada keputusan kebijakan Bank of Korea. Sejak mengambil alih kepemimpinan pada April lalu, Gubernur Shin Hyun Song telah memperingatkan bahwa faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi yang solid, pelemahan mata uang won, serta lonjakan harga rumah semuanya mengarah pada pengetatan kebijakan moneter. Para ekonom memperkirakan ia akan merealisasikan pernyataannya tersebut pada hari Kamis dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 2,75%.

Rilis data utama regional akan hadir pada hari Rabu melalui produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua China. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat menjadi 4,5% secara tahunan (year-on-year), yang menyeret tingkat pertumbuhan tahun berjalan (year-to-date) ke angka 4,8%.

Angka-angka ini berpotensi mempertegas jarak pemisah antara performa ekspor yang solid dengan kelesuan permintaan domestik. Terkait hal tersebut, penjualan ritel China yang dirilis pada hari yang sama diperkirakan kembali merosot pada bulan Juni, setelah pada Mei lalu mencatat penurunan untuk pertama kalinya sejak tahun 2022.

Negara lain yang juga akan merilis angka PDB pada pekan ini adalah Singapura, di mana pertumbuhannya diperkirakan sedikit melambat, serta Malaysia.

India akan memperbarui tren harga dengan merilis indeks harga konsumen (IHK) bulan Juni pada hari Senin. Indikator tersebut diproyeksikan melonjak ke posisi 4,3%, yang akan menjadi laju tercepat sejak tahun 2024. Angka itu sejatinya masih di bawah target Bank Sentral India sebesar 5,1% untuk tahun fiskal ini, namun berpotensi memicu komentar yang lebih hawkish saat bank sentral menetapkan kebijakan berikutnya pada 5 Agustus mendatang.

Australia merilis sepasang indikator sentimen; Indeks Kepercayaan Konsumen Westpac baru-baru ini merosot ke level terendah dalam dua tahun, sementara angka kepercayaan bisnis NAB diperkirakan tetap negatif untuk bulan kelima berturut-turut.

India akan merilis tingkat pengangguran bulan Juni pada hari Rabu, sedangkan data perdagangan luar negeri dijadwalkan rilis sepanjang pekan ini dari China, Singapura, dan India.

Europa, Timur Tengah, dan Afrika

Inggris akan menjadi pusat perhatian dengan rilis PDB bulanan pada hari Kamis yang kemungkinan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas, dibersamai oleh sejumlah kemunculan para pengambil kebijakan.

Menteri Keuangan Rachel Reeves akan menyampaikan apa yang kemungkinan menjadi pidato tahunan terakhirnya di Mansion House, London pada hari Selasa. Hal ini mengingat Andy Burnham tidak menunjukkan tendensi untuk mempertahankannya setelah penunjukannya yang kian dekat sebagai perdana menteri.

Gubernur Bank of England (BOE) Andrew Bailey akan berbicara pada acara yang sama, setelah sebelumnya memberikan kesaksian di hadapan Parlemen mengenai penilaian stabilitas keuangan terbaru dari lembaganya. Selain itu, kepala ekonom BOE Huw Pill dijadwalkan tampil pada hari Senin dan Rabu.

Inflasi Swiss diperkirakan jauh lebih lambat daripada inflasi di negara-negara Eropa lainnya. (Dok. Bloomberg News)

Di zona euro, masa tenang menjelang keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) berikutnya akan dimulai pada hari Kamis. Sebelum itu, jajaran pembicara yang akan tampil mencakup anggota Dewan Eksekutif Isabel Schnabel pada hari Senin dan Gubernur Bank Italia Fabio Panetta pada hari Rabu.

Data produksi industri zona euro untuk bulan Mei akan hadir pada hari Rabu, disusul oleh angka perdagangan dan laporan akhir inflasi pada hari-hari berikutnya.

Di Swiss, bank sentral pada hari Rabu akan menerbitkan rangkuman diskusi seputar keputusan kuartalan bulan Juni mereka. Sementara di Eropa Timur, inflasi Rumania pada hari Senin serta potensi pembahasan rancangan undang-undang anggaran di Bulgaria akan menjadi bagian dari sorotan utama.

Trump Berlakukan Lagi Blokade Iran, AS Kenakan Tarif Kargo 20% di Selat Hormuz

Senin, 13 Juli 2026 22:11 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/trump-berlakukan-lagi-blokade-iran-as-kenakan-tarif-kargo-20-di-selat-hormuz>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (13/7/2026) menyatakan bahwa Washington kembali memberlakukan blokade laut terhadap Iran dan akan mengenakan penggantian biaya sebesar 20% atas seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz.

Kebijakan tersebut diumumkan setelah Teheran mengklaim telah menutup jalur pelayaran strategis tersebut.

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka, terlepas dari sikap Iran.

"Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka, dengan atau tanpa Iran. Kami kembali memberlakukan BLOKADE TERHADAP IRAN," tulis Trump.

Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat berhak memperoleh kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut.

"Amerika Serikat akan mendapatkan penggantian biaya sebesar 20% dari seluruh kargo yang dikirim untuk menutupi setiap biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah dunia yang sangat bergejolak ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses penerapan kebijakan tersebut akan dimulai segera, meski belum menjelaskan lebih rinci mekanismenya.

AS Sebut Akan Menjadi "Malaikat Penjaga" Selat Hormuz

Sebelumnya, dalam wawancara melalui program "Fox & Friends" di Fox News, Trump mengemukakan gagasan bahwa AS kemungkinan akan mengambil alih pengelolaan Selat Hormuz dan menerima kompensasi dari negara-negara pengguna jalur tersebut.

"Kami akan menjaga selat itu dan kemungkinan akan mengelolanya. Kami akan menjadi penjaga selat tersebut. Mungkin kami akan menyebut diri kami sebagai malaikat penjaga selat. Dan kami seharusnya mendapatkan penggantian atas hal itu," kata Trump.

Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pasokan minyak dunia dan kini menjadi salah satu titik utama dalam konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Penutupan efektif jalur tersebut oleh Iran telah mendorong kenaikan harga energi dan memicu kekhawatiran terhadap peningkatan inflasi global.

"Kami akan mendapatkan penggantian biaya karena negara-negara lain sangat kaya. Mereka berada di pihak kami, dan kami tidak bisa diharapkan melakukan semua ini secara cuma-cuma," lanjut Trump.

Iran Tetap Menutup Selat Hormuz

Setelah mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Sabtu (11/7/2026) menyusul insiden yang disebut sebagai pelayaran tanpa izin, pemerintah Iran pada Minggu (13/7) menyatakan bahwa jalur pelayaran itu masih ditutup sementara.

Teheran mengatakan izin pelayaran baru akan diberikan setelah kondisi "stabilitas dan ketenangan" kembali pulih.

Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Iran dan menuding negara tersebut berulang kali melanggar kesepakatan.

"Kami sebenarnya sudah memiliki kesepakatan. Kesepakatan itu sudah selesai, tetapi kemudian mereka melanggarnya. Mereka selalu melanggar. Kami sudah membuat 10 kesepakatan dengan mereka, sehingga kami akan mengambil tindakan yang sangat keras," ujar Trump.

Di sisi lain, Garda Revolusi Iran pada Senin memperingatkan bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan lalu lintas pelayaran normal di Selat Hormuz adalah dengan menghentikan intervensi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Dalam pernyataannya, Garda Revolusi Iran menyebut bahwa "campur tangan yang terus berlanjut dapat memicu insiden yang lebih besar di sektor minyak dan gas global."

Serangan Rudal dan Drone Memanas

Pasukan Amerika Serikat dan Iran saling meluncurkan serangan rudal serta drone sepanjang akhir pekan hingga Senin. Teheran mengklaim telah menyerang fasilitas militer AS di kawasan Teluk dan tetap mempertahankan penutupan Selat Hormuz, yang pada akhirnya mendorong harga minyak dunia naik.

Rangkaian serangan terbaru ini menandai eskalasi tajam, baik dari sisi intensitas maupun cakupan geografis, dibandingkan sepekan terakhir.

Perkembangan tersebut juga memunculkan keraguan terhadap efektivitas perjanjian sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani bulan lalu. Kesepakatan itu sebelumnya bertujuan membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan permusuhan selama kedua negara menjalani negosiasi lanjutan selama 60 hari.

Menteri Perdagangan India Mengklaim Perundingan Dagang AS-India Berjalan Lancar

Senin, 13 Juli 2026 20:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/menteri-perdagangan-india-mengklaim-perundingan-dagang-as-india-berjalan-lancar>

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. India menyatakan pembicaraan perdagangan antara India dan AS berjalan lancar dan New Delhi tidak melihat tantangan apa pun dalam menyelesaikan kesepakatan dengan sukses.

"Kerangka kesepakatan sudah siap. Kapan pun waktunya tepat, kesepakatan itu akan ditandatangani," kata Menteri Perdagangan Rajesh Agravaw dalam konferensi pers, Senin (13/7/2026) seperti dilansir Reuters.

Pada bulan Februari, kedua pihak sepakat untuk mengenakan tarif 18% pada barang-barang India sebagai imbalan atas penurunan hambatan perdagangan oleh New Delhi dan pembelian lebih banyak barang Amerika.

Namun, kesepakatan akhir telah dibayangi oleh putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif global besar-besaran Presiden Donald Trump.

"Kami siap untuk menandatangani, tetapi kesepakatan adalah tentang keunggulan komparatif. Preferensi ini dibandingkan dengan beberapa pesaing dan negara," kata Agravaw.

Ia menambahkan bahwa keunggulan tersebut sedang distrukturkan.

Setelah perintah pengadilan, sebagian besar barang dari India saat ini menghadapi tarif 10% dari AS, seperti kebanyakan negara. Pemerintahan Trump diperkirakan akan memperkenalkan tarif yang lebih tinggi bulan ini melalui penyelidikan terhadap kelebihan kapasitas industri.

Washington telah mengusulkan tarif baru hingga 12,5% pada puluhan negara, termasuk India, atas tuduhan bahwa mereka gagal mengekang perdagangan barang yang diproduksi dengan kerja paksa.

"Tidak ada hal negatif, tidak ada perbedaan antara India dan AS," kata Agravaw.

China Akan Dorong Konsumsi, Targetkan Penjualan Ritel US\$ 8,85 Triliun pada 2030

Senin, 13 Juli 2026 17:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-akan-dorong-konsumsi-targetkan-penjualan-ritel-us-885-triliun-pada-2030>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China menargetkan penjualan ritel sekitar 60 triliun yuan (US\$ 8,85 triliun) pada tahun 2030 di bawah rencana lima tahun untuk memperluas konsumsi, sambil berjanji untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Mengutip Reuters, Senin (13/7/2026), rencana tersebut, yang disetujui oleh Dewan Negara dan dirilis pada hari Senin, memuat janji pemerintah China untuk meningkatkan konsumsi jasa di berbagai bidang

termasuk perawatan lansia, perawatan anak, perawatan kesehatan, budaya, pariwisata, olahraga, dan pendidikan.

Rencana tersebut juga menyerukan peningkatan pengeluaran terkait pariwisata, perluasan kebijakan bebas visa ke lebih banyak negara, dan lebih banyak penerbangan internasional langsung ke Eropa, AS, dan negara-negara yang berpartisipasi dalam Inisiatif Belt and Road.

China bertujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga secara signifikan dan memperkuat peran konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah rencana lima tahun pertama negara tersebut yang didedikasikan untuk meningkatkan konsumsi.

Beijing akan mempromosikan model konsumsi baru termasuk konsumsi digital, konsumsi berbasis AI, konsumsi hijau, pengeluaran berbasis pengalaman, dan konsumsi masuk.

Rencana tersebut juga menyoroti perlunya meningkatkan daya beli rumah tangga melalui peningkatan lapangan kerja, upah yang lebih tinggi, pendapatan properti yang lebih besar, peningkatan jaminan sosial, dan layanan publik yang lebih baik.

China berjanji untuk menghapus "langkah-langkah pembatasan yang tidak masuk akal" di berbagai bidang seperti pembelian mobil, perumahan, dan persetujuan untuk acara hiburan, menurut rencana tersebut.

Kebijakan fiskal dan keuangan harus lebih menekankan pada manfaat langsung bagi konsumen, pengeluaran untuk kesejahteraan, dan infrastruktur terkait konsumsi, kata rencana tersebut.

(\$1 = 6,7803 yuan China)

Pertumbuhan PDB Tiongkok Diperkirakan Melambat, Pasar Menanti Stimulus Baru

Senin, 13 Juli 2026 15:38 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-pdb-tiongkok-diperkirakan-melambat-pasar-menanti-stimulus-baru>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat pada kuartal II-2026 setelah mencatat awal tahun yang cukup solid. Lemahnya permintaan domestik diperkirakan mengimbangi dorongan dari ekspor yang tetap tangguh di tengah gejolak harga minyak global, sehingga memunculkan ekspektasi pasar terhadap stimulus kebijakan baru.

Pemerintah China saat ini menghadapi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang semakin dalam. Di satu sisi, produksi industri tetap kuat berkat meningkatnya ekspor yang didorong perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Namun, di sisi lain, konsumsi dan investasi swasta terus melemah akibat krisis berkepanjangan di sektor properti serta volatilitas harga minyak dunia.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters terhadap 54 ekonom, produk domestik bruto (PDB) China diperkirakan tumbuh 4,5% secara tahunan pada periode April-Juni 2026. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 5,0% pada kuartal pertama tahun ini.

Proyeksi tersebut juga lebih rendah dibandingkan perkiraan pertumbuhan sebesar 4,7% dalam survei Reuters pada April lalu, sekaligus berada di batas bawah target pertumbuhan ekonomi tahunan pemerintah China yang berada di kisaran 4,5%–5%.

Analisis Goldman Sachs menilai pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu kini semakin tidak merata.

"Pertumbuhan ekonomi menjadi semakin timpang. Ekspor masih menopang aktivitas ekonomi secara keseluruhan, tetapi permintaan domestik melemah secara signifikan," tulis analisis Goldman Sachs dalam sebuah catatan riset.

Mereka menambahkan, "Selain itu, dorongan dari ekspor belum mampu diterjemahkan menjadi pasar tenaga kerja yang lebih kuat maupun peningkatan keuntungan yang berarti, sehingga manfaat dari permintaan eksternal terhadap pertumbuhan domestik masih terbatas."

Data ekspor China yang akan dirilis pada Selasa (14/7) diperkirakan masih menunjukkan pertumbuhan yang solid, meski sedikit melambat pada Juni. Kinerja tersebut ditopang oleh percepatan pengiriman barang ke Amerika Serikat menjelang kemungkinan penerapan tarif baru, meningkatnya permintaan terkait industri AI, serta strategi perusahaan yang bersaing melalui harga untuk menarik konsumen yang semakin sensitif terhadap biaya.

Pelaku pasar kini menaruh perhatian pada pertemuan Politburo China yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli. Pertemuan tersebut diperkirakan akan memberikan petunjuk mengenai kemungkinan stimulus baru yang dapat menentukan arah kebijakan ekonomi hingga akhir tahun.

Meski demikian, para analis memperkirakan Beijing tidak akan mengambil langkah agresif selama perlambatan ekonomi tidak semakin tajam. Ketahanan sektor ekspor dan fokus pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas produksi demi menekan deflasi menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan hasil survei Reuters, pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan naik tipis menjadi 4,6% pada kuartal III sebelum kembali melambat menjadi 4,5% pada kuartal IV 2026.

Secara keseluruhan, ekonomi China diperkirakan tumbuh 4,6% sepanjang 2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,0% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut diperkirakan kembali melandai menjadi 4,4% pada 2027.

Secara kuartalan, ekonomi China diperkirakan tumbuh 0,9% pada kuartal II-2026, melambat dibandingkan ekspansi 1,3% pada kuartal pertama.

Pemerintah China dijadwalkan merilis data resmi PDB kuartal II beserta data penjualan ritel, produksi industri, dan investasi Juni pada 15 Juli mendatang.

Stimulus Fiskal Diperkirakan Menjadi Andalan

Analisis memperkirakan pemerintah China akan lebih mengandalkan kebijakan fiskal untuk meredakan perlambatan ekonomi lebih lanjut. Sementara itu, ruang gerak bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter dinilai semakin terbatas meskipun harga minyak dunia mulai turun.

Pemerintah diperkirakan akan mempercepat belanja fiskal setelah perlambatan pada kuartal kedua, yang terjadi setelah dukungan besar-besaran digelontorkan pada awal tahun. Beijing telah menetapkan defisit anggaran sekitar 4% dari PDB pada 2026 dan menyiapkan penerbitan obligasi dalam jumlah besar guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Dalam catatannya, Capital Economics memperkirakan pertumbuhan ekonomi China akan membaik pada paruh kedua tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi China seharusnya meningkat pada paruh kedua tahun ini seiring meningkatnya dukungan fiskal. Namun, kelebihan kapasitas domestik akan tetap mengakar sehingga ekonomi China masih bergantung pada ekspor sebagai mesin pertumbuhan," tulis Capital Economics.

Survei Reuters juga menunjukkan bahwa para ekonom memperkirakan bank sentral China akan mempertahankan suku bunga kebijakan utamanya, yakni suku bunga reverse repo tujuh hari, hingga akhir 2026.

Selain itu, rasio cadangan wajib minimum perbankan diperkirakan tetap bertahan pada kuartal III sebelum berpotensi dipangkas sebesar 20 basis poin pada kuartal IV.

Bank sentral China telah mempertahankan suku bunga acuan dan rasio cadangan wajib minimum sejak Mei 2025. Otoritas moneter lebih memilih memanfaatkan operasi likuiditas jangka pendek untuk menjaga kondisi pendanaan tetap mendukung, sembari melakukan reformasi kerangka kebijakan moneter dan memperkuat transmisi kebijakan.

Sementara itu, para analis memperkirakan inflasi konsumen China hanya mencapai 1,2% sepanjang tahun ini, lebih rendah dibandingkan target pemerintah sekitar 2%. Inflasi diperkirakan bertahan di level yang sama pada 2027.

Anggaran Korea Selatan Cetak Rekor! Tembus 800 Triliun Won di 2027

Senin, 13 Juli 2026 13:47 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/anggaran-korea-selatan-cetak-rekor-tembus-800-triliun-won-di-2027>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan mengumumkan rancangan anggaran belanja untuk tahun fiskal 2027 mencapai 800 triliun won atau setara US\$ 530,97 miliar, yang merupakan rekor terbesar sepanjang masa. Hal ini didukung oleh pendapatan pajak yang lebih kuat dari industri chip AI yang sedang booming.

Menteri Anggaran Korea Selatan Park Hong-keun, dalam pertemuan strategi fiskal nasional, mengatakan rencana pengeluaran akan dibiayai melalui penerimaan pajak yang lebih tinggi dan pemotongan pengeluaran. Anggaran yang diusulkan dibandingkan dengan rencana pengeluaran di tahun 2026 yang sebesar 727,9 triliun won, tidak termasuk anggaran tambahan.

Pemerintah mengatakan tiga "proyek besar" — investasi dalam chip, pusat data AI, dan AI fisik — akan menerima prioritas fiskal utama, menambahkan bahwa pemerintah akan mengamankan kapasitas pendanaan melalui restrukturisasi besar-besaran program pengeluaran yang ada, daripada hanya mengandalkan peningkatan pendapatan pajak.

Presiden Lee Jae Myung mengatakan, pemerintah akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk memastikan investasi perusahaan berjalan sesuai jadwal.

"Pendapatan pajak tambahan yang masuk saat ini merupakan sumber daya berharga yang akan digunakan pada saat emas ketika dominasi AI global akan ditentukan," kata Lee.

Menteri Anggaran Park mengatakan, pemerintah akan berupaya merestrukturisasi pengeluaran sekitar 50 triliun won, dua kali lipat dari tahun sebelumnya, melalui peninjauan pengeluaran diskresioner dan wajib serta pemotongan program yang berkinerja buruk.

Korea Selatan berencana meluncurkan Dana Respons Masa Depan sebagai platform investasi strategis, dengan menyisihkan pendapatan pajak yang melebihi tren jangka panjang dan menginvestasikannya di empat bidang: pemuda, mesin pertumbuhan, daerah, dan talenta, kata pemerintah.

Rupiah Anjlok ke Level Terendah dalam Satu Bulan, Ini Sentimen yang Menyeretnya

Senin, 13 Juli 2026 13:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupee-anjlok-ke-level-terendah-dalam-satu-bulan-ini-sentimen-yang-menyeretnya>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. Rupiah India turun ke level terlemahnya dalam lebih dari sebulan pada hari ini, karena Timur Tengah kembali membara dan klaim Iran untuk menutup Selat Hormuz yang penting membuat harga minyak melonjak.

Bank-bank milik negara terlihat menawarkan dolar, kemungkinan besar atas nama Reserve Bank India, kata empat traders kepada Reuters. Intervensi yang mungkin dilakukan membantu membatasi penurunan mata uang tersebut hingga mendekati 95,7875 per dolar, yang merupakan level terlemah sejak 4 Juni 2026.

Pada pukul 11:30 WIB, rupiah berada di 95,76, turun hampir 0,5%, sejalan dengan pelemahan mata uang regional.

"Pasar sebagian besar telah menghilangkan risiko eskalasi parah di Teluk, namun jika hal tersebut kembali terjadi, USD/INR dapat menguji level 96,50 dan di atasnya," kata seorang traders di sebuah bank asing.

Meskipun RBI kemungkinan akan terus melakukan intervensi untuk mengekang volatilitas, pergeseran faktor fundamental kemungkinan besar akan berarti bahwa RBI tidak akan mengikat mata uangnya ke level tertentu, tambah pedagang tersebut.

Pasukan AS dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran, dan Teheran menargetkan fasilitas AS di negara-negara Teluk pada hari Minggu. Minggu lalu, Presiden AS Trump mengatakan dia menganggap gencatan senjata sementara telah berakhir, dan tetap membiarkan pintu terbuka untuk perundingan lebih lanjut.

"Saat orang mengira ketidakpastian di Timur Tengah sudah memudar, AS dan Iran menarik Anda kembali. Penutupan Selat Hormuz menyoroti bagaimana konflik ini belum terselesaikan, dan gangguan pasokan yang sedang berlangsung merupakan sebuah masalah," kata HSBC dalam sebuah catatan.

Gangguan ini menimbulkan kekhawatiran bagi importir energi utama seperti India, dan kenaikan harga minyak yang berkelanjutan dapat memicu arus keluar portofolio, sehingga menambah tekanan baru pada rupiah.

Data perdagangan barang dagangan dan inflasi konsumen India bulan Juni akan menjadi fokus hari ini. Data inflasi dapat membentuk ekspektasi terhadap kebijakan moneter, sementara data perdagangan mungkin memberikan petunjuk tentang dampak perubahan harga minyak terhadap transaksi berjalan.

Dana Pensiun Jepang Diminta Tambah Investasi Domestik Memicu Reaksi Pasar Keuangan

Senin, 13 Juli 2026 13:09 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/dana-pensiun-jepang-diminta-tambah-investasi-domestik-memicu-reaksi-pasar-keuangan>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang belum memiliki rencana untuk segera mengubah komposisi investasi dana pensiun negara, termasuk Government Pension Investment Fund (GPIF). Namun, pemerintah sedang mencari cara agar dana pensiun tersebut dapat meningkatkan investasi pada aset-aset domestik Jepang dengan memanfaatkan ruang fleksibilitas yang sudah tersedia dalam aturan investasi saat ini.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama pada Jumat lalu mengatakan pemerintah akan mencari langkah untuk mendorong dana pensiun, termasuk GPIF, agar melakukan investasi yang jauh lebih besar pada aset keuangan Jepang. Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian dari pasar keuangan karena investor memperkirakan dana dalam jumlah besar dapat dialihkan ke pasar domestik melalui GPIF, yang merupakan dana pensiun terbesar di dunia.

Hingga Maret lalu, GPIF tercatat mengelola aset senilai sekitar 293,6 triliun yen atau sekitar US\$ 1,81 triliun. Pernyataan Katayama membuat nilai tukar yen menguat dan harga obligasi Jepang meningkat karena pasar menilai peningkatan investasi domestik dapat memperkuat permintaan terhadap aset Jepang.

Namun, dua sumber yang mengetahui pembahasan pemerintah mengatakan langkah tersebut tidak akan langsung menyebabkan perubahan pada target investasi jangka menengah GPIF. Pemerintah hanya mempertimbangkan peningkatan investasi dalam batas yang masih diperbolehkan oleh aturan portofolio yang berlaku.

“Reaksi pasar jauh lebih besar dari yang kami perkirakan,” kata salah satu sumber. Ia menjelaskan bahwa pernyataan Katayama tidak bermaksud menunjukkan adanya perubahan segera terhadap alokasi investasi GPIF. Kedua sumber tersebut meminta identitas mereka tidak disebutkan karena isu ini masih sensitif.

Komentar Katayama muncul setelah rancangan kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya memicu tekanan terhadap yen dan obligasi Jepang. Pasar sempat menilai pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang cenderung mendukung kebijakan moneter longgar akan mendorong bank sentral Jepang untuk menunda kenaikan suku bunga. Kekhawatiran tersebut kemudian membuat pemerintah berupaya memperbaiki bahasa dalam rancangan kebijakan ekonomi guna meredakan gejolak pasar.

GPIF sendiri memiliki mandat untuk mengelola dana hanya demi kepentingan penerima manfaat pensiun dan tidak dapat menggunakan asetnya sebagai alat untuk menjalankan tujuan kebijakan pemerintah. Dalam rencana pengelolaan jangka menengah saat ini, GPIF membagi investasinya secara merata, yaitu masing-masing 25% untuk obligasi domestik Jepang, obligasi asing, saham domestik Jepang, dan saham asing.

Untuk investasi obligasi domestik, GPIF memiliki ruang penyimpangan sekitar enam poin persentase dari target alokasi tersebut. Salah satu sumber pemerintah mengatakan tidak menutup kemungkinan GPIF meningkatkan porsi investasi pada obligasi domestik selama masih berada dalam batas yang diperbolehkan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan investasi dana pensiun harus dilakukan secara hati-hati. Bahkan perubahan yang masih berada dalam batas fleksibilitas tetap membutuhkan alasan yang kuat dan pertimbangan matang.

Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif dari Nomura Research Institute, mengatakan pemerintah memang dapat mendorong GPIF untuk meningkatkan investasi domestik tanpa harus mengubah strategi dasar portofolionya. Menurutnya, kenaikan suku bunga jangka panjang membuat obligasi pemerintah Jepang kini menjadi aset aman yang lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Pengawasan terhadap GPIF berada di bawah Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang. Kementerian tersebut menolak memberikan komentar ketika ditanya apakah pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan terhadap alokasi investasi GPIF.

S&P Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1% pada 2026

Senin, 13 Juli 2026 21:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114866/s-p-proyeksi-ekonomi-indonesia-tumbuh-5-1-pada-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard and Poor's atau S&P Global Ratings memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia akan tumbuh 5,1% pada 2026. Hal ini dipicu kinerja ekonomi dapat melambat pada kuartal-kuartal berikutnya karena ketidakpastian eksternal yang berkelanjutan dan suku bunga domestik yang lebih tinggi.

"Kami memperkirakan pertumbuhan rata-rata 4,9% per tahun dari tahun 2026 hingga 2029," demikian tercantum dalam laporan S&P, dikutip Senin (13/7/2026).

Dalam laporan S&P disebutkan, pendapatan rata-rata di Indonesia tetap lebih rendah dibanding sebagian besar negara berperingkat investasi lainnya, tetapi meningkat lebih cepat. PDB per kapita dapat mencapai US\$5.200 tahun ini, hanya naik sedikit dari US\$5.100 pada tahun 2025 dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nominal yang diperkirakan sebesar 8,3%.

"Hal ini terutama disebabkan oleh depresiasi rupiah," demikian tertulis dalam laporan.

Terlepas dari pergerakan nilai tukar, pertumbuhan tren Indonesia sebesar 3,9% akan lebih baik daripada sebagian besar ekonomi dengan tingkat pendapatan yang serupa.

S&P meyakini bahwa lembaga politik dan kebijakan di Indonesia secara umum stabil dan bebas dari tantangan terhadap legitimasinya. Para pembuat kebijakan Indonesia terus memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keuangan.

Selama bertahun-tahun, mereka telah berupaya meningkatkan transparansi melalui interaksi dan berbagi informasi secara teratur dengan pelaku pasar keuangan. Lembaga tersebut juga fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan bila diperlukan, seperti melakukan pemangkasan belanja negara besar-besaran untuk menjaga defisit di bawah ambang batas 3% pada tahun ini.

S&P mempertahankan sovereign credit rating Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook untuk peringkat jangka panjang tetap stabil.

Menurut S&P Global Ratings, pelemahan posisi fiskal dan eksternal Indonesia yang disebabkan karena tingginya ongkos energi, suku bunga yang lebih tinggi dan pelemahan nilai tukar bersifat sementara.

Lembaga rating itu memperkirakan Indonesia dapat meredam dampak kenaikan harga komoditas tersebut lewat pengurangan belanja pemerintah.

DJP: Tiap Ekonomi RI Tumbuh 1%, Setoran Pajak Bisa Naik 2,25%

Senin, 13 Juli 2026 18:32 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114879/djp-tiap-ekonomi-ri-tumbuh-1-setoran-pajak-bisa-naik-2-25/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengeklaim kualitas penerimaan pajak pada paruh pertama atau semester I-2026 semakin membaik. Hal itu tercermin dari meningkatnya tax buoyancy Indonesia menjadi 2,25.

Tax Buoyancy merupakan suatu indikator untuk mengukur respons penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kondisi itu dinilai menunjukkan kemampuan penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tax buoyancy pada semester I-2026 mencapai 2,25. Artinya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak sekitar 2,25%.

"Tax buoyancy-nya juga membaik, di semester I 2026 ini tax buoyancy kita tercatat di angka 2,25%. Artinya di setiap 1% dari pertumbuhan ekonomi, kita mampu menghasilkan sekitar 2,25% tambahan penerimaan pajak," kata Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026, Senin (13/7/2026).

Bimo menegaskan peningkatan penerimaan pajak saat ini tidak berasal dari kebijakan yang bersifat insidental atau luar biasa, seperti program pengungkapan sukarela (PPS) yang pernah diterapkan pemerintah. Jika tanpa PPS, tax buoyancy pada 2022 hanya sebesar 1,91%.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kapasitas pemungutan pajak mulai terlepas dari ketergantungan terhadap siklus harga komoditas global. Bimo menjelaskan, kondisi tersebut terjadi di tengah normalisasi harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia.

Dia mencontohkan harga batu bara kini berada di kisaran US\$134 per ton, sementara harga komoditas lain seperti minyak mentah, nikel, hingga bijih besi juga mengalami moderasi sekitar 21% hingga 34%.

"Artinya kapasitas perpajakan kita, Ditjen Pajak hari ini, itu sudah mulai terlepas, sudah bisa mulai terlepas dari fragility ketergantungan terhadap harga komoditas," ujarnya.

Dia menegaskan peningkatan penerimaan pajak tersebut juga bukan didorong oleh kebijakan luar biasa (game changer) seperti program pengungkapan sukarela yang pernah diterapkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Sebaliknya, kenaikan penerimaan disebut berasal dari peningkatan kinerja internal Ditjen Pajak melalui penguatan pengawasan, digitalisasi administrasi perpajakan, hingga perluasan basis pajak.

"Ini memang murni dari mesin internal kita yang bekerja lebih kencang, bekerja lebih berintegritas, dan bekerja lebih bisa menjangkau dari yang tidak terjangkau," tutur Bimo.

Dalam paparannya, Bimo juga melaporkan penerimaan pajak bersih secara kumulatif pada semester I-2026 tumbuh 24,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kenaikan penerimaan di hampir seluruh jenis pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan deposit PPh Badan tercatat tumbuh 28,6%, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melonjak 42,2%. Adapun jenis pajak lainnya, seperti PPh Orang Pribadi, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 juga mengalami pertumbuhan pada kisaran 13% hingga 22%.

Menurut dia, tren tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 yang diperkirakan berada di kisaran 5,3%, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perpajakan tanpa perubahan kebijakan tarif maupun jenis pajak.

Upaya Dirjen Pajak Optimalkan Setoran PPN Saat Ekonomi Melambat

Senin, 13 Juli 2026 15:20 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114843/upaya-dirjen-pajak-optimalkan-setoran-ppn-saat-ekonomi-melambat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) mengaku bakal mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), meskipun ekonomi tengah mengalami perlambatan.

Secara bersamaan, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan PPN di sejumlah sektor sudah tumbuh positif. Padahal sejumlah indikator ekonomi mengalami perlambatan.

Berdasarkan data, sejumlah indikator menunjukkan pelemahan seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun menjadi 117,8 pada Juni dari posisi Mei di level 120,9. Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan yang sudah terlihat dalam tiga bulan terakhir secara beruntun, sekaligus menjadi level terendah sejak September 2025.

Dalam kaitan itu, Ditjen Pajak mencatat realisasi PPN dan PPnBM sampai semester I-2026 tercatat Rp380 triliun atau melonjak 42,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi, persinya baru 38% dari total target penerimaan PPN dan PPnBM sepanjang 2026 yang dipatok sebesar Rp995,28 triliun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026.

Merespons hal itu, Bimo mengatakan pihaknya salah satunya mengupayakan interoperabilitas data. Menurutnya, peningkatan penerimaan PPN cukup signifikan khususnya PPN dalam negeri maupun impor.

Interoperabilitas data ialah kemampuan berbagai sistem, aplikasi, atau perangkat teknologi untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan secara efektif, tanpa campur tangan pengguna.

“Artinya dari sisi aplikasi pajak digital coretax pun bisa memonitor sebenarnya seperti apa. Tetapi tentu kita tidak akan memaksakan ketika kondisi ekonomi sedang ada perlambatan,” kata Bimo ditemui di kantornya, Senin (13/7/2026).

“Tapi ceteris paribus di kondisi yang sekarang, mesin-mesin kami optimalkan. Kalau ditanya perluasan basis pajak setidaknya 143.000 dari perluasan basis pajak yang baru.”

Di sisi lain, Bimo menyebut terdapat potensi penerimaan dari sejumlah sektor lain yang tengah mengalami peningkatan. Di antaranya seperti pembelian beberapa bahan baku impor di industri tekstil, industri petrokimia, hingga industri pakan ternak.

“Saya lihat semuanya bagus dari sisi input PPN impor. Jadi kami berharap dengan adanya input yang bagus, maka produksinya [sektor] juga bakal bagus di periode ke-2, kuartal ke-III dan ke-IV, 2026,” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), IKK April 2026 memang berada di level optimistis sebesar 123,0, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 122,9. Akan tetapi, angka tersebut mulai turun pada Mei 2026 yang berada pada level 120,9. Kemudian pada Juni 2026 kembali turun di angka 117,8.

Tak hanya itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga ikut turun menjadi 109,2 dari 112,2. Sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) melemah jadi 126,4 dari posisi sebelumnya 129,7.

Hasil survei ini menggambarkan bahwa masyarakat bukan hanya merasa kondisi ekonomi sekarang mulai kurang baik dibandingkan bulan sebelumnya, tapi juga mulai menurunkan ekspektasi terhadap perbaikan ekonomi dalam enam bulan mendatang.

Bahkan, penurunan persepsi kondisi saat ini lebih mengkhawatirkan sebab terjadi pada seluruh komponen. Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) turun menjadi 119,8 dari 123,2. Hal ini mencerminkan banyak rumah tangga yang merasa pendapatannya tak sebaik bulan sebelumnya.

Persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja juga melemah menjadi 101,8 dari posisi sebelumnya 105. Terbatasnya kondisi lapangan kerja telah membuat persepsi masyarakat mendekati batas pesimis di level 100.

Sementara itu, indeks pembelian barang tahan lama juga ikut turun menjadi 105,9 dari posisi sebelumnya 108,3. Indeks ini mencerminkan kondisi masyarakat yang mulai menunda pembelian barang bernilai besar seperti kendaraan, elektronik, maupun furnitur.

Pelemahan yang terjadi pada indeks pembelian barang tahan lama (durable goods) sejatinya layak mendapat perhatian khusus, terlebih di negara yang mengandalkan konsumsi dan daya beli sebagai roda penggerak perekonomiannya.

Dalam banyak siklus ekonomi, keputusan membeli durable goods ini merupakan indikator dini perubahan perilaku konsumsi rumah tangga.

Ketika konsumen mulai menunda pembelian aset bernilai besar, hal tersebut biasanya mencerminkan meningkatnya kehati-hatian terhadap kondisi pendapatan maupun ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) RI, perubahan perilaku ini menjadi sinyal penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi di semester kedua tahun ini.

Definisi Nilai Tukar Rupiah & Faktor Penggeraknya

Senin, 13 Juli 2026 13:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114812/definisi-nilai-tukar-rupiah-faktor-penggeraknya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdiam di level psikologis Rp18.000-an/US\$ sejak sepekan terakhir. Pada perdagangan spot awal pekan ini, Senin (13/7/2026), rupiah melemah 0,11% ke level Rp18.075/US\$.

Tak lama berselang, rupiah kembali melanjutkan pelemahan 0,19% ke posisi Rp18.089/US\$ pada 09.02 WIB pagi ini. Secara teknikal, di tengah tekanan yang saling berkelindan, rupiah diperkirakan masih bergerak dengan bias melemah, menuju target pelemahan Rp18.100/US\$ sampai dengan menembus Rp18.150/US\$.

Tim riset Bloomberg Technoz menjelaskan pelemahan yang terjadi di pasar valuta asing Asia dipicu oleh kembali meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah setelah AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan. Hal ini mendorong investor memburu aset-aset safe haven.

Bagi Indonesia, dolar AS yang menguat menekan nilai tukar rupiah. Tak hanya itu, lonjakan harga minyak berpotensi memperbesar kebutuhan devisa untuk impor energi mengingat Indonesia masih berstatus sebagai net importir minyak. Terlebih, saat ini Indonesia juga masih terbebani oleh twin deficit yang terjadi pada neraca pembayaran dan fiskal.

Definisi Rupiah

Bagi masyarakat awam, tak sulit memahami definisi nilai tukar rupiah. Dalam gambaran besar, rupiah menguat jika pasokan dolar AS ke Indonesia lebih besar dibanding permintaan dolar AS. Sebaliknya, rupiah melemah kalau permintaan dolar AS lebih besar daripada pasokannya.

Permintaan dolar biasanya datang dari impor, pembayaran utang luar negeri, kebutuhan dividen, pembelian aset luar negeri, dan orang yang mencari perlindungan ketika pasar sedang panik.

Sementara itu, Pasokan dolar datang dari ekspor, investasi asing langsung, turis asing, pinjaman luar negeri, penerbitan surat utang valuta asing, serta investor asing yang membeli Surat Berharga Negara (SBN), saham, atau instrumen Bank Indonesia (BI).

"Jadi, rupiah bukan hanya soal BI, tetapi hasil tarik-menarik antara perdagangan, arus modal, harga komoditas, suku bunga global, kepercayaan pasar, dan kebijakan domestik," ujar Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, dikutip Senin (13/7/2026).

Faktor Penggerak Rupiah

Josua menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menggerakkan nilai tukar rupiah. Berikut keterangannya:

1. Faktor pertama adalah dolar AS. Ketika dolar AS menguat, hampir semua mata uang negara berkembang ikut tertekan, termasuk rupiah. Saat pasar global cemas karena ketegangan Timur Tengah, harga minyak naik, atau suku bunga Amerika Serikat diperkirakan bertahan tinggi, investor cenderung memilih dolar AS. Dolar AS kembali didukung oleh sikap bank sentral AS yang lebih tegas terhadap inflasi, sementara mata uang Asia ikut tertekan karena pasar memperkirakan suku bunga AS belum akan turun cepat.
2. Selisih imbal hasil antara aset rupiah dan aset dolar AS. Investor asing akan membeli SBN atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) kalau imbal hasilnya dianggap cukup menarik dibanding risiko rupiah. Karena itu, ketika imbal hasil obligasi AS tinggi, Indonesia harus

menawarkan imbal hasil rupiah yang lebih menarik agar dana asing tetap masuk. BI sudah menaikkan BI-Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 untuk memperkuat stabilisasi rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran. Namun, kebijakan ini ada biayanya yakni imbal hasil SBN naik, biaya dana perbankan berisiko meningkat, dan sektor riil bisa menghadapi kredit yang lebih mahal.

3. Arus modal asing. Rupiah biasanya lebih kuat ketika investor asing membeli SBN, saham, atau SRBI, dan melemah ketika mereka keluar. Namun kualitas arus modal juga penting. Data arus modal menunjukkan pada 2026 hingga Juni, investor asing masih keluar dari saham sebesar US\$4,19 miliar, sementara masuk ke SRBI sebesar US\$9,03 miliar dan SBN hanya US\$0,27 miliar. Ini berarti rupiah banyak ditopang oleh dana jangka pendek di instrumen BI, bukan sepenuhnya oleh kepercayaan jangka panjang ke pasar saham atau SBN.
4. Neraca perdagangan. Kalau ekspor lebih besar dari impor, pasokan dolar biasanya meningkat dan rupiah lebih terbantu. Sebaliknya, kalau impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor, kebutuhan dolar naik dan rupiah tertekan. Pada Mei 2026, Indonesia mencatat defisit perdagangan US\$1,16 miliar, defisit pertama dalam lebih dari enam tahun, karena impor naik 22,16% sementara ekspor turun 5,73%. Ini menjadi sinyal penting bahwa tekanan rupiah tidak hanya berasal dari pasar keuangan, tetapi juga dari kebutuhan dolar untuk membayar impor.
5. Harga komoditas, terutama minyak, batu bara, sawit, dan nikel. Indonesia diuntungkan ketika harga ekspor seperti batu bara, sawit, dan nikel naik karena penerimaan dolar bertambah. Tetapi Indonesia juga dirugikan ketika harga minyak naik karena impor energi dan subsidi energi ikut naik. Mata uang Asia melemah ketika harga minyak naik akibat ketegangan Timur Tengah, sementara sebagian besar negara Asia adalah pengimpor minyak. Untuk Indonesia, minyak yang mahal bisa menekan rupiah melalui dua jalur sekaligus: impor migas naik dan risiko fiskal membesar.
6. Inflasi. Pelemahan rupiah membuat barang impor, bahan baku, energi, obat-obatan, elektronik, dan komponen industri menjadi lebih mahal. Pada Juni 2026, inflasi Indonesia naik menjadi 3,34% secara tahunan, terutama karena tekanan biaya dari transportasi, BBM nonsubsidi, dan bahan baku impor akibat pelemahan rupiah. Jika pelemahan rupiah berlanjut, harga barang bisa naik lagi, daya beli turun, dan BI terdorong mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.
7. Kepercayaan terhadap kebijakan domestik. Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga arah kebijakan fiskal, transparansi pasar, kepastian aturan, dan konsistensi pemerintah. Karena itu, isu klasifikasi pasar oleh MSCI dan S&P Dow Jones menjadi penting. S&P Dow Jones memasukkan Indonesia dalam daftar pengawasan untuk kemungkinan penurunan status jika masalah transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar tidak membaik; setelah kabar itu, rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.011 dan imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 7,29%.
8. Cadangan devisa dan intervensi BI. Cadangan devisa adalah bantalan untuk menenangkan pasar ketika rupiah melemah terlalu cepat. Cadangan devisa Indonesia naik menjadi sekitar US\$145,9 miliar pada akhir Juni 2026 dari US\$144,9 miliar pada Mei, setara 5,5 bulan impor, masih jauh di atas standar aman internasional sekitar 3 bulan impor. Namun, cadangan devisa tetap diperkirakan berada di bawah tekanan karena BI masih perlu melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah dan pemerintah masih memiliki kewajiban pembayaran utang luar negeri.
9. Kondisi fiskal. APBN yang sehat dapat membantu rupiah karena pasar merasa pemerintah mampu mengelola defisit, subsidi, dan utang. PIER mencatat defisit APBN semester I 2026 masih terkendali di 0,76% PDB, lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya, didukung pertumbuhan penerimaan negara yang lebih kuat. Namun risiko tetap ada karena ketegangan Timur Tengah dapat melemahkan rupiah, menaikkan harga minyak, dan menekan asumsi APBN.

Josua mengibaratkan rupiah seperti tekanan air dalam pipa. Pasokan dolar adalah air yang masuk, sedangkan permintaan dolar adalah air yang keluar. Kalau ekspor, investasi, turis, dan arus modal

masuk deras, rupiah menguat. Sebaliknya, kalau impor, pembayaran utang, arus modal keluar, dan kepanikan pasar lebih deras, rupiah melemah.

Menurut dia, BI bisa membuka atau menutup katup melalui suku bunga, intervensi, dan SRBI, tetapi bank sentral tidak bisa sendirian mengubah arah air jika pipa dasarnya bocor dari defisit perdagangan, impor energi, atau kepercayaan investor yang melemah.

Ditjen Pajak Reaktifasi 143.449 WP Dormant, Raup Rp1,2 T

Senin, 13 Juli 2026 13:02 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114806/ditjen-pajak-reaktifasi-143-449-wp-dormant-raup-rp1-2-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan berhasil mengaktifkan kembali sebanyak 143.449 wajib pajak (WP) dormant sepanjang 2026. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas basis pajak (ekstensifikasi) tanpa menaikkan tarif maupun menambah jenis pajak baru.

Langkah ekstensifikasi tersebut terpantau berhasil menyumbang pundi-pundi penerimaan negara hingga Rp1,2 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengaktifan kembali wajib pajak yang selama ini tidak aktif merupakan hasil optimalisasi data dan sistem administrasi perpajakan yang kini semakin terintegrasi.

"Buktinya ekstensifikasi tahun 2026 dari hasil kinerja tahun 2025 laporan SPT perpajakan, ini Alhamdulillah gebrakan luar biasa, ada tambahan 143.449 wajib pajak baru. Jadi ini adalah jumlah daripada wajib pajak dormant, inaktif yang bisa kami hidupkan kembali kewajiban perpajakannya melalui sistem," kata Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026, Senin (13/7/2026).

Menurut dia, capaian tersebut bukan pencapaian yang biasa. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya Ditjen Pajak membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk mencapai jumlah wajib pajak aktif kembali yang setara.

Bimo mengungkapkan, dari aktivasi kembali 143.449 wajib pajak tersebut, Ditjen Pajak memperkirakan terdapat tambahan potensi penerimaan negara sekitar Rp1,2 triliun.

"Ini memang wajib pajak yang baru masuk ke sistem kita aktifkan kembali setelah sekian lama dormant," ujarnya.

Selain mengaktifkan kembali wajib pajak yang tidak aktif, Ditjen Pajak juga terus memperluas basis perpajakan dengan menjangkau sektor informal dan shadow economy yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah memastikan pelaku usaha yang bertransaksi melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ikut masuk dalam ekosistem perpajakan melalui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meski demikian, Bimo menegaskan pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro.

Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pungutan PPh, sedangkan pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 500 juta hingga Rp4,8 miliar tetap dikenai tarif PPh final sebesar 0,5%.

Menurut Bimo, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas basis pajak tanpa membebani pelaku usaha kecil, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan.

Ekonom: Pemerintah Perlu Pembiayaan Setara Demi Atasi Defisit

Senin, 13 Juli 2026 08:40 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/114766/ekonom-pemerintah-perlu-pembiayaan-setara-demi-atasi-defisit>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah baru saja menyampaikan outlook APBN 2026. Dalam outlook tersebut, pemerintah menyebut bahwa pendapatan Negara 2026 diperkirakan sebesar Rp3.208,1 triliun, atau 101,73% dari target APBN. Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,95% dari rencana.

Artinya, defisit 2026 diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun. Lebih lebar dari rencana APBN yang Rp689,1 triliun, dan rasio atas PDB pun menjadi 2,85% dari rencana 2,68%.

Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute, mengatakan pelebaran defisit tersebut harus diimbangi dengan pembiayaan anggaran dalam jumlah yang setara. Pembiayaan anggaran merupakan penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

“Dengan demikian, pembiayaan bisa bersifat pengeluaran atau pun penerimaan. Penerimaan terbesar selama ini berasal dari utang, yang disebut sebagai pembiayaan utang. Biasa disajikan secara neto, setelah memperhitungkan pelunasan pokok utang yang bersifat pengeluaran,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (13/7/2026).

Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan defisit sekaligus pembiayaan anggaran sebesar Rp689,15 triliun. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang neto sebesar Rp832,21 triliun yang bersifat penerimaan serta pembiayaan non-utang sebesar Rp143,06 triliun yang bersifat pengeluaran. Pembiayaan nonutang antara lain digunakan untuk pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman.

Kebutuhan Pembiayaan Utang Meningkat

Berdasarkan outlook APBN 2026, pemerintah memperkirakan defisit melebar menjadi Rp734,32 triliun sehingga kebutuhan pembiayaan anggaran ikut meningkat dengan nilai yang sama. Pembiayaan utang diproyeksikan naik menjadi Rp868,12 triliun, sedangkan pembiayaan nonutang turun tipis menjadi Rp133,8 triliun.

Awalil menilai komposisi pembiayaan tersebut menarik untuk dicermati. Di tengah kenaikan kebutuhan pembiayaan, pemerintah justru memperkirakan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto turun menjadi Rp736,57 triliun dari target APBN sebesar Rp799,53 triliun.

“Namun diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun,” katanya

Ia juga mencatat pemerintah tidak merinci nilai pelunasan pokok utang yang akan dibayarkan sepanjang 2026. Berdasarkan berbagai informasi mengenai utang yang jatuh tempo serta realisasi pada 2025, Awalil memperkirakan pelunasan pokok utang mencapai sekitar Rp900 triliun.

Dengan demikian, kebutuhan penarikan utang baru secara bruto diperkirakan mencapai sekitar Rp1.768 triliun.

Lebih lanjut, Awalil memperkirakan posisi utang pemerintah akan menembus Rp10.600 triliun pada akhir 2026 dari posisi Rp9.638 triliun per 31 Desember 2025. Proyeksi tersebut memperhitungkan pembiayaan utang neto sebesar Rp868 triliun serta pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir 2026 dibandingkan akhir 2025 yang diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp100 triliun.

“Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp10.600 triliun,” katanya.

Danantara Garap 26 Proyek Hilirisasi Senilai Rp 225 Triliun, Serap 37.833 Pekerja

Senin, 13 Juli 2026 20:04 WIB

Reporter: Arif Ferdianto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/danantara-garap-26-proyek-hilirisasi-senilai-rp-225-triliun-serap-37833-pekerja>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah mempercepat pengembangan 26 proyek hilirisasi di berbagai sektor komoditas dengan total nilai investasi mencapai Rp 225 triliun.

Langkah akselerasi investasi berskala besar tersebut ditargetkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, puluhan proyek hilirisasi yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia itu diproyeksikan dapat menyerap hingga 37.833 tenaga kerja.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa program hilirisasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Menurutnya, pengembangan industri hilir menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menekankan pentingnya penciptaan nilai tambah domestik agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak mengalir ke luar negeri.

“Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri,” dalam keterangan resmi, Senin (13/7/2026).

Secara rinci, proyek-proyek tersebut dibagi ke dalam dua tahap pengembangan. Fase I mencakup enam proyek prioritas yang tersebar di 13 lokasi dengan total investasi sebesar Rp 109 triliun. Tahap ini diperkirakan mampu menyerap 11.456 tenaga kerja.

Sementara itu, Fase II meliputi 10 proyek di 13 lokasi lainnya dengan nilai investasi mencapai Rp 116 triliun. Pada fase kedua ini, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 26.377 orang.

Portofolio hilirisasi yang dikembangkan BP BUMN dan Danantara mencakup berbagai sektor strategis. Di bidang pertambangan, proyek yang digarap meliputi pembangunan smelter aluminium, industri baja nirkarat, serta pengolahan tembaga.

Selain sektor pertambangan, investasi juga diarahkan ke sektor energi dan pangan. Sejumlah proyek yang masuk dalam daftar pengembangan antara lain pembangunan fasilitas bioavtur dan bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, hingga pengembangan peternakan ayam terintegrasi.

Depresiasi Rupiah Berdampak Ganda bagi APBN, Pemerintah Perlu Evaluasi Asumsi Makro

Senin, 13 Juli 2026 18:16 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/depresiasi-rupiah-berdampak-ganda-bagi-apbn-pemerintah-perlu-evaluasi-asumsi-makro>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah yang bertahan di atas level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai tidak hanya menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah pun dinilai perlu mengevaluasi asumsi makro, mulai dari nilai tukar hingga target pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak semata-mata dipicu oleh arus keluar modal asing, melainkan juga mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap prospek ekonomi domestik.

"Kalau melihat kondisi rupiah saat ini, persoalannya bukan sekadar soal Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga atau belum. Memang benar, kenaikan BI Rate seharusnya meningkatkan daya tarik aset rupiah, tetapi pasar tidak hanya melihat imbal hasil. Pasar juga menghitung risiko, baik risiko global maupun keyakinan terhadap prospek ekonomi domestik," ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (13/7/2026).

Di pasar spot, rupiah ditutup melemah ke level Rp 18.109 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS. Padahal, BI telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 basis poin (bps) untuk menjaga stabilitas rupiah.

Menurut Yusuf, kenaikan suku bunga belum cukup mengembalikan rupiah ke kisaran Rp 17.000 per dolar AS karena tekanan yang dihadapi lebih kompleks. Arus modal asing yang masuk saat ini lebih banyak mengalir ke instrumen pendapatan tetap seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara investor asing masih terus melepas kepemilikannya di pasar saham.

"Ini perlu dibaca dengan hati-hati karena kualitas kedua arus modal tersebut berbeda. Dana yang masuk ke SRBI lebih bersifat jangka pendek dan sensitif terhadap perubahan sentimen. Sementara keluarnya investor dari saham menunjukkan ada kekhawatiran yang lebih struktural terhadap prospek pertumbuhan dan kinerja perusahaan domestik," jelasnya.

Yusuf menambahkan, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, kebijakan moneter bank sentral AS yang belum sepenuhnya longgar, hingga kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik. Sebagai negara importir minyak,

pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor energi dan memberi tekanan pada neraca eksternal Indonesia.

Depresiasi Rupiah Berdampak Ganda

Yusuf menilai pemerintah perlu lebih terbuka menyesuaikan asumsi makro APBN 2026, terutama asumsi nilai tukar yang dinilai sudah tertinggal dari kondisi pasar.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif terhadap APBN. Menurutny, depresiasi rupiah memberikan konsekuensi ganda bagi keuangan negara.

Di satu sisi, pelemahan kurs akan meningkatkan beban pembayaran utang dalam valuta asing serta biaya impor energi. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas yang berorientasi ekspor.

"Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah apakah tekanan tersebut mulai mengganggu batas aman fiskal, terutama terhadap defisit anggaran dan kemampuan pemerintah membiayai program prioritas," katanya.

Selain asumsi nilai tukar, Yusuf justru menilai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 lebih mendesak untuk dievaluasi.

Target pertumbuhan sebesar 5,4% dinilai membutuhkan kondisi ekonomi yang sangat ideal, sementara sejumlah indikator menunjukkan pelemahan, mulai dari konsumsi rumah tangga, kepercayaan konsumen, hingga aktivitas manufaktur.

"Jika pertumbuhan ternyata tidak mencapai target, dampaknya akan langsung terasa pada penerimaan negara," ujarnya.

Karena itu, Yusuf mendorong pemerintah melakukan stress test terhadap berbagai asumsi APBN 2026, terutama terkait subsidi energi, penerimaan negara, serta target pertumbuhan ekonomi.

"Yang perlu dijaga bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi kredibilitas kebijakan. Mempertahankan asumsi yang sudah terlalu jauh dari realitas justru bisa menjadi risiko tersendiri bagi kepercayaan pasar. Dalam kondisi seperti ini, revisi yang berbasis data bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kehati-hatian fiskal," pungkasnya.

Senada dengan itu, kajian CORE Indonesia edisi Juli 2026 menunjukkan tekanan di pasar keuangan domestik masih cukup besar. Sepanjang Juni 2026, investor asing mencatatkan net sell di pasar saham sebesar Rp 23,19 triliun, terbesar sepanjang tahun ini.

Meski di saat yang sama investor asing membukukan net buy SBN sebesar Rp 22,42 triliun dan menambah kepemilikan SRBI sebesar Rp 21,62 triliun, CORE menilai stabilisasi rupiah masih rapuh karena bergantung pada instrumen berimbal hasil tinggi.

Menurut CORE, arus keluar investor dari pasar saham mencerminkan persoalan kepercayaan yang bersifat struktural sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan kenaikan suku bunga.

Defisit APBN 2026 Melebar, Utang Pemerintah Diproyeksi Makin Menggunung

Senin, 13 Juli 2026 15:50 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbn-2026-melebar-utang-pemerintah-diproyeksi-makin-menggunung>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun atau mencapai 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut lebih besar dari rencana dalam APBN yang mencapai Rp 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Merupakan rasio tertinggi, kecuali saat pandemi tahun 2020 dan 2021.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky membeberkan, untuk mengatasi defisit diperlukan pembiayaan dengan nilai setara, yang disebut sebagai item pembiayaan anggaran. Ia menyebut, pembiayaan anggaran didefinisikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

“Dengan demikian, pembiayaan bisa bersifat pengeluaran atau pun penerimaan. Penerimaan terbesar selama ini berasal dari utang, yang disebut sebagai pembiayaan utang. Biasa disajikan secara neto, setelah memperhitungkan pelunasan pokok utang yang bersifat pengeluaran,” tutur Awalil dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Adapun APBN 2026 menetapkan defisit dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 689,15 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang (neto) sebesar Rp 832,21 triliun yang bersifat penerimaan, dan pembiayaan non utang sebesar Rp 143,06 triliun yang bersifat pengeluaran. Pembiayaan non utang antara lain pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman.

Sementara itu, Outlook pemerintah memperkirakan pelebaran defisit menjadi Rp734,32 triliun, dan menambah pembiayaan anggaran dengan nilai serupa. Pembiayaan utang meningkat menjadi Rp868,12 triliun. Pembiayaan non utang sedikit menurun menjadi Rp133,8 triliun.

Awalil juga menyoroti terkait proyeksi pembiayaan utang melalui SBN (neto) yang justru lebih sedikit dari rencana semula, yakni menjadi Rp 736,57 triliun dari rencana Rp 799,53 triliun. Namun diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun.

Ia melihat, dalam laporan pemerintah tidak menyajikan nilai pelunasan pokok utang yang akan dibayar selama setahun 2026. Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025, diperkirakan sekitar Rp900 triliun. Dengan demikian, kebutuhan penarikan utang baru bruto akan mencapai kisaran Rp 1.768 triliun.

Disisi lain, ia mencatat posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.638 triliun. Sementara itu, outlook pembiayaan utang neto APBN 2026 sebesar Rp 868 triliun. Pelemahan kurs per 31 Desember 2026 atas 31 Desember 2025 diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp100 triliun.

“Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp 10.600 triliun,” tandasnya.

Cadangan Devisa Naik, Arus Dana Asing Jadi Penopang Utama

Senin, 13 Juli 2026 05:41 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-naik-arus-dana-asing-jadi-penopang-utama>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cadangan devisa Indonesia kembali mencatat kenaikan pada Juni 2026. Namun, kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata.

Hampir seluruh komponen penyusun cadangan devisa justru mengalami penurunan. Kenaikan hanya ditopang oleh lonjakan aset valuta asing (valas), yang sekaligus memperkuat likuiditas cadangan devisa nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi official reserve assets meningkat menjadi US\$ 145,59 miliar pada Juni 2026 dari US\$ 144,89 miliar pada Mei.

Kenaikan ini sepenuhnya berasal dari aset valuta asing yang naik menjadi US\$ 125 miliar, dibandingkan US\$ 122,87 miliar pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, hampir seluruh komponen cadangan devisa lainnya mengalami penurunan. Posisi cadangan di Dana Moneter Internasional (IMF) turun menjadi US\$ 1,075 miliar. Nilai Special Drawing Rights (SDR) juga menyusut menjadi US\$ 7,514 miliar.

Penurunan paling tajam terjadi pada emas moneter yang merosot menjadi US\$ 11,285 miliar dari sebelumnya US\$ 12,659 miliar. Sementara itu, aset cadangan lainnya turun tipis menjadi US\$ 710 juta.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai perubahan komposisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan cadangan devisa pada Juni terutama berasal dari masuknya devisa ke instrumen yang paling likuid, yakni aset valuta asing.

Menurut Josua, tambahan cadangan devisa didorong oleh penerimaan pemerintah, derasnya aliran dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta hasil penerbitan obligasi global Danantara.

Ia mencatat arus masuk dana asing ke SBN mencapai sekitar US\$ 1,26 miliar, sedangkan investasi ke SRBI mencapai US\$ 3,74 miliar.

"Meski demikian, kenaikan cadangan devisa tetap terbatas karena masih ada pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan intervensi BI di pasar valas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Josua.

Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual menilai penurunan nilai emas moneter, SDR, maupun posisi cadangan di IMF lebih dipengaruhi faktor valuasi dibandingkan pelemahan fundamental cadangan devisa.

Menurut David, koreksi harga emas dunia sepanjang Juni menjadi penyebab utama turunnya nilai emas moneter. Sementara itu, penurunan SDR terjadi seiring penguatan dolar AS terhadap mata uang penyusunnya.

Meski komposisi cadangan devisa berubah, David dan Josua menilai meningkatnya porsi aset valuta asing justru memperkuat kualitas likuiditas cadangan devisa.

Sebagai aset yang paling mudah dicairkan, cadangan valas memberikan ruang lebih besar bagi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri, serta meredam gejolak di pasar keuangan.

Namun, Josua mengingatkan bahwa dalam jangka menengah struktur cadangan devisa perlu semakin sehat dan tidak bergantung pada arus modal portofolio jangka pendek.

Menurutnya, penguatan cadangan devisa idealnya lebih banyak ditopang oleh surplus perdagangan, devisa hasil ekspor, investasi langsung, serta penerimaan dari sektor jasa.

PAD Retribusi Pasar di Batang semester I Rp2,6 miliar

Senin, 13 Juli 2026 22:22 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/638371/pad-retribusi-pasar-di-batang-semester-i-rp26-miliar>

Batang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyebutkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Retribusi Pasar selama semester I 2026 mencapai Rp2,6 miliar atau 39 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,7 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Wahyu Budi Santosa di Batang, Senin, mengatakan bahwa realisasi penerimaan Retribusi Pasar hingga akhir Juni 2026 hampir menyentuh target semester I.

"Target sampai semester pertama ya harusnya kan 40 persen. Akan tetapi, hingga per 31 Juni 2026 tercatat baru 39 persen," katanya.

Menurut dia, pihaknya terus memacu untuk memenuhi target pendapatan asli daerah tahunan ini meski sempat meleset tipis akibat dinamika pasar modern dan perubahan perilaku belanja masyarakat.

"Akan tetapi, kami optimistis angka tersebut akan terus merangkak naik. Keterlambatan realisasi PAD tersebut hanya masalah pencatatan waktu saja," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan target total PAD 2026 dari retribusi pasar pada 14 pasar sebesar Rp6,1 miliar yang tersebar di 15 kecamatan.

Untuk mengejar target PAD 2026 dari Retribusi Pasar sebesar Rp6,1 miliar tersebut di era digital, kata dia, bukan hal yang mudah.

"Kami tidak menampik adanya kendala nyata yang dihadapi para petugas di lapangan terutama terkait penurunan daya beli masyarakat.

Pasar tradisional kini tak lagi menjadi pilihan tunggal bagi warga untuk berbelanja kebutuhan pokok," katanya.

Menurut dia, kendati pasar tradisional mulai tersisih oleh kepraktisan opsi lain, pihaknya melakukan langkah rekonsiliasi dan koordinasi intensif terus digalakkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Tentu tetap berusaha semaksimal mungkin untuk optimalisasi pendapatan. Nah, ini rekonsiliasi pendapatan terus dengan para demang-demang (kepala pasar), insya Allah nanti on progress," katanya.

Wali kota: Koperasi penggerak ekonomi masyarakat

Senin, 13 Juli 2026 17:04 WIB

Pewarta: M. Hari Atmoko, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/638345/wali-kota-koperasi-penggerak-ekonomi-masyarakat>

Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi kesempatan baik untuk mengingatkan pentingnya peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Selamat Hari Koperasi Nasional, semoga koperasi terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar," kata dia dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Senin.

Peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 di Kota Magelang ditandai dengan kegiatan senam bersama diikuti ratusan warga bersama aparat sipil negara (ASN) pemkot setempat di Alun-Alun Kota Magelang, Minggu (12/7).

Kegiatan berlangsung meriah di sela penyelenggaraan Magelang Fair 2026 itu, antara lain dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Menteri Koperasi Rulli Nuryanto dan seluruh jajaran Pemkot Magelang.

Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh warga meneriakkan yel-yel "Koperasi berjaya, Indonesia berjaya" yang disambut meriah peserta senam.

Kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama diikuti ratusan peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga ASN.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Menteri Koperasi Rulli Nuryanto menjelaskan di tengah dinamika ekonomi global, koperasi harus semakin sehat, profesional, adaptif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

"Kekuatan koperasi tetap bertumpu pada kepercayaan, partisipasi anggota, dan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa," ungkapnya.

Ia menjelaskan koperasi masa kini harus mampu bertransformasi menjadi koperasi digital, yakni koperasi yang memanfaatkan teknologi informasi, terhubung dengan sistem pembayaran modern, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Pemerintah terus menyempurnakan berbagai kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Efek Booming AI, Ekspor-Import China Melonjak Lampau Prediksi

Selasa, 14 Juli 2026 11:30 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/114936/efek-booming-ai-ekspor-import-china-melonjak-lampau-prediksi/2>

Bloomberg, Laju pertumbuhan ekspor dan impor China melesat melampaui seluruh prediksi pada bulan Juni. Kenaikan drastis ini dipicu oleh lonjakan harga cip serta tingginya permintaan global terhadap perangkat keras yang dibutuhkan untuk menyokong pusat data kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang kini tengah mendongkrak perdagangan di seluruh kawasan Asia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai pada hari Selasa (14/7), nilai ekspor China meroket 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencatatkan kenaikan tertinggi dalam empat bulan terakhir, sekaligus jauh lebih baik daripada proyeksi kenaikan 19% oleh para ekonom yang disurvei Bloomberg.

Sementara itu, nilai impor melonjak dengan laju tercepat dalam lima tahun terakhir setelah mencatatkan kenaikan sebesar 36%. Performa ini meninggalkan surplus perdagangan sebesar US\$125,6 miliar—menjadi rekor surplus terbesar kedua sepanjang sejarah.

Perlombaan global untuk membangun infrastruktur AI telah memicu siklus pertumbuhan baru bagi para eksportir, setelah menciptakan kelangkaan historis pada sektor semikonduktor dan produk elektronik lainnya. Harga cip bahkan dilaporkan telah melonjak hingga 700% selama setahun terakhir, yang secara otomatis ikut mendongkrak kinerja perdagangan negara-negara produsen mulai dari Korea Selatan hingga Taiwan.

Fenomena ini sukses melindungi China dari dampak perang yang berkecamuk di Timur Tengah selama berbulan-bulan. Padahal di sisi lain, rapuhnya kondisi domestik kemungkinan besar telah memperlambat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua China hingga mendekati batas bawah dari target resmi pemerintah, yakni di kisaran 4,5% hingga 5%.

Namun, lonjakan ekspor yang digerakkan oleh sektor AI ini membuat struktur perekonomian China menjadi tidak seimbang, sehingga rentan terhadap potensi penurunan permintaan global di masa mendatang. Di dalam negeri sendiri, adopsi teknologi ini justru menambah tekanan baru pada pasar tenaga kerja mereka yang sudah tergolong rapuh.

Kekhawatiran mengenai keberlanjutan dari tren booming teknologi ini telah memicu aksi jual massal saham secara berulang di Korea Selatan baru-baru ini. Salah satu raksasa produsen cip, SK Hynix Inc, bahkan melihat harga sahamnya anjlok hingga mencetak rekor penurunan 15% pada hari Senin lalu. Di sisi lain, nilai ekspor Korea Selatan ke China tercatat meroket 92% pada bulan Juni dibanding tahun lalu, yang menjadi laju tercepat mereka sejak tahun 2010.

Bersamaan dengan kembali memuncaknya ketegangan yang melibatkan Iran, para investor dan ekonom kini juga tengah mencermati pergerakan angka impor minyak mentah China.

Negara ini mulai memainkan peran yang kian vital dalam menyeimbangkan pasar minyak global. China tercatat telah memangkas pembelian minyak dari luar negeri secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir sejak perang dimulai. Kendati demikian, para analis memperkirakan volume impor minyak mentah China akan segera pulih seiring langkah otoritas setempat yang bersiap kembali melakukan penimbunan stok strategis pada akhir tahun ini.

Ekonomi Singapura Q2-2026 Tumbuh 5,7%, Tersendat Tensi Geopolitik

Selasa, 14 Juli 2026 09:10 WIB

Isabelle Chong

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114917/ekonomi-singapura-q2-2026-tumbuh-5-7-tersendat-tensi-geopolitik/2>

Bloomberg, Perekonomian Singapura mencatatkan pertumbuhan yang melambat seiring berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Situasi tersebut mulai menahan laju lonjakan ekspor yang

sebelumnya sempat terdorong oleh tren booming teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Berdasarkan rilis estimasi awal dari Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) pada hari Selasa (14/7), produk domestik bruto (PDB) Singapura tumbuh 5,7% pada kuartal kedua dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dari capaian kuartal sebelumnya (Januari-Maret) yang direvisi menjadi sebesar 6,3%, namun masih sedikit di atas estimasi median survei Bloomberg sebesar 5,5%.

Perlambatan ini mengindikasikan bahwa tingginya permintaan terhadap produk elektronik berbasis AI tampaknya belum cukup kuat untuk sepenuhnya melindungi perekonomian Singapura dari ketidakpastian geopolitik global yang meningkat. Meskipun ekspor produk elektronik sempat melonjak hampir dua kali lipat pada Mei lalu dibanding tahun sebelumnya, konflik yang kembali membara di Timur Tengah kini mulai membayangi prospek perdagangan dan investasi negara tersebut.

Menurut data MTI, sektor manufaktur menjadi satu-satunya sektor yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan secara tahunan (year-on-year) pada kuartal ini. Sementara itu, sektor konstruksi serta seluruh sektor jasa dilaporkan bergerak melambat.

Jika dilihat berdasarkan basis kuartalan yang disesuaikan secara musiman, ekonomi Singapura tumbuh 1,1%, sedikit di bawah estimasi median jajak pendapat Bloomberg yang memproyeksikan angka 1,3%.

Sebelumnya pada bulan Juni, Perdana Menteri Lawrence Wong telah memperingatkan bahwa perekonomian negara tersebut belum merasakan dampak sepenuhnya dari perang, dan ketidakpastian masih menyelimuti prospek pertumbuhan serta inflasi nasional. Kenaikan harga energi global juga diperkirakan mulai membebani sektor rumah tangga, di mana tarif listrik bersiap naik hingga mencetak rekor sebesar 17% pada kuartal ketiga.

Pada Mei lalu, pihak MTI menyatakan bahwa mereka memproyeksikan PDB sepanjang tahun ini akan berekspansi di kisaran 2% hingga 4%, turun dari capaian tahun lalu sebesar 5%. Adapun angka final untuk pertumbuhan ekonomi kuartal kedua dijadwalkan rilis pada Agustus mendatang.

Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan menentukan arah kebijakan moneternya paling lambat pada 31 Juli. Sebagian besar ekonom memproyeksikan bank sentral akan mempertahankan kebijakan saat ini, menyusul rilis data inflasi bulan Mei yang cenderung jinak.

Waller The Fed Sinyalkan Kenaikan Suku Bunga Jika Inflasi Tinggi

Selasa, 14 Juli 2026 07:20 WIB

Maria Eloisa Capurro

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114902/waller-the-fed-sinyalkan-kenaikan-suku-bunga-jika-inflasi-tinggi/2>

Bloomberg, Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller menyatakan bahwa para pembuat kebijakan mungkin perlu menaikkan suku bunga dalam waktu dekat jika inflasi inti terus menunjukkan tekanan harga yang luas.

“Jika kita kembali mendapati angka inflasi inti yang tinggi pekan ini, maka FOMC perlu mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter dalam waktu dekat,” ujar Waller pada Senin (13/7), merujuk pada komite penetapan suku bunga bank sentral, dalam sambutan tertulisnya untuk sebuah acara di New York.

Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) AS dijadwalkan akan merilis data terbaru mengenai indeks harga konsumen (IHK) pada hari Selasa.

Waller menekankan bahwa kondisi ekonomi saat ini sebenarnya berada dalam posisi yang baik, dengan pasar tenaga kerja yang tampak stabil serta permintaan konsumen yang tetap tangguh. Kendati demikian, ia menyebut kebijakan moneter kini tengah berada di "persimpangan jalan" akibat tekanan inflasi yang didorong oleh faktor tarif, harga energi, serta pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Bagaimanapun Anda menganalisisnya, atau indikator apa pun yang ingin Anda gunakan, inflasi tahun ini tetap naik," tegas Waller. "Pada titik ini, saya merasa khawatir dengan laju inflasi inti yang masih tinggi."

Ia menunjuk pada indikator inflasi pilihan The Fed yang mengecualikan komponen pangan dan energi yang fluktuatif. Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti tercatat menyentuh angka 3,4% dalam basis tahunan hingga Mei lalu. Laju inflasi ini, menurut Waller, sudah mulai merangkak naik sejak Januari—sebelum perang AS-Iran pecah—dan "terus bergerak naik secara stabil."

Pada bulan lalu, para pembuat kebijakan sepakat secara bulat untuk mempertahankan suku bunga acuan mereka. Walau demikian, risalah pertemuan tersebut menunjukkan adanya beberapa pejabat yang melihat urgensi untuk menaikkan suku bunga. Dalam proyeksi ekonomi terbaru, separuh dari 18 pembuat kebijakan memproyeksikan setidaknya ada kenaikan seperempat poin persentase pada suatu waktu di tahun ini.

Di sisi lain, Gubernur The Fed Kevin Warsh memilih menolak memberikan proyeksi suku bunga dan menghindari komentar terperinci mengenai kondisi ekonomi, meskipun ia dijadwalkan akan tampil memberikan kesaksian di hadapan anggota dewan pekan ini.

Gelombang serangan baru antara AS dan Iran telah mengerek harga energi menjadi lebih tinggi, walaupun harga minyak dunia saat ini masih berada jauh di bawah level puncaknya pada bulan Maret dan April lalu. Berdasarkan survei ekonom oleh Bloomberg, Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam data yang dirilis hari Selasa diperkirakan melambat ke angka 3,8% secara tahunan hingga Juni, turun dari posisi 4,2% di bulan Mei.

"Saya akan sangat senang melihat angka inflasi inti yang lebih rendah. Namun, berkaca pada eskalasinya sepanjang paruh pertama tahun ini, saya perlu melihat data yang lebih rendah selama beberapa bulan berturut-turut untuk merasa yakin bahwa inflasi telah bergerak ke arah yang benar," kata Waller.

Ia menambahkan bahwa ekspektasi terhadap penurunan inflasi tersebut masih masuk akal untuk terjadi. Jika skenario itu terwujud, Waller menyatakan akan mendukung opsi untuk terus mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil.

Lebih lanjut, Waller menyoroti pentingnya menghindari pengulangan kesalahan dari guncangan inflasi akibat pandemi pada kurun waktu 2021 dan 2022. Kala itu, Federal Open Market Committee (FOMC) menuai banyak kritik karena dinilai terlalu lama menunda kenaikan suku bunga. Namun, sang gubernur menambahkan bahwa situasi kali ini berbeda dengan periode tersebut; pasar tenaga kerja saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda keketatan dan ekspektasi inflasi jangka panjang masih tetap terjaga dengan baik. Meski demikian, kenaikan inflasi inti yang persisten dapat menjadi sinyal bahwa tekanan harga mulai menyebar luas ke seluruh lini perekonomian.

"FOMC harus siap untuk memperketat kebijakan moneter guna mencegah terulangnya episode inflasi tahun 2021 hingga 2022," pungkasnya.

Trump Minta Tarif 20% untuk Kargo di Selat Hormuz

Selasa, 14 Juli 2026 06:00 WIB

Jennifer A. Dlouhy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114895/trump-minta-tarif-20-untuk-kargo-di-selat-hormuz/2>

Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negaranya akan kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal Iran yang melintasi Selat Hormuz serta meminta penggantian biaya sebesar 20% atas seluruh kargo lain yang dikirim melalui jalur pelayaran tersebut.

Pengumuman Trump pada Senin (13/7), yang menyatakan AS akan menjadi "penjaga" (guardian) Selat Hormuz, memperuncing perselisihan antara Washington dan Teheran mengenai status jalur pelayaran strategis yang menjadi pusat konflik kedua negara.

Melalui media sosial, Trump mengatakan Selat Hormuz "akan tetap terbuka, dengan atau tanpa Iran." Menurutnya, kapal-kapal Iran akan dilarang memasuki maupun meninggalkan selat tersebut, sementara kapal dari negara lain tetap diizinkan melintas. Namun, demi "keadilan", AS akan menerima penggantian biaya sebesar 20% atas seluruh kargo yang dikirim melalui Selat Hormuz.

Komentar Trump mendorong harga minyak melanjutkan penguatan hingga mencapai level tertinggi pada sesi perdagangan, sementara pasar saham dan obligasi melemah.

Trump mengatakan proses penyusunan dan implementasi rencana tersebut akan segera dimulai. Namun, Gedung Putih belum memberikan rincian mengenai mekanisme penerapan kebijakan itu maupun apakah usulan tersebut telah disampaikan kepada sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk.

Pemberlakuan kembali blokade terhadap kapal-kapal Iran berpotensi mendorong Teheran meningkatkan serangan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz, melanjutkan pola aksi saling balas yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Iran memandang setiap upaya yang menantang kewenangannya di Selat Hormuz sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan damai sementara dengan AS. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Teheran berkewajiban mengatur agar kapal-kapal dapat melintas dengan aman. Meski demikian, Iran tetap bersikeras bahwa kapal harus memperoleh izin dan mengikuti jalur pelayaran yang telah ditetapkan.

Sebelumnya pada Senin, pemerintah Iran menyatakan kesepakatan dengan AS "tidak diragukan lagi telah memasuki fase krisis" dan menegaskan tidak akan mematuhi ketentuan perjanjian selama pihak lain dianggap melanggar komitmennya.

"Setidaknya secara retorika, Trump tampaknya sedang mencoba memainkan Iran dengan strategi yang sama," kata Holly Dagres, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy. "Namun, Iran tentu tidak akan dengan mudah melepaskan Selat Hormuz."

Pernyataan terbaru Trump menunjukkan posisinya yang semakin sulit, hanya tiga pekan setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Iran. Kesepakatan tersebut sempat menghasilkan gencatan senjata dan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, sehingga menurunkan harga minyak dan memunculkan harapan penurunan harga bensin menjelang pemilu paruh waktu AS pada November.

Namun, dengan kembali pecahnya konflik bersenjata dan Iran yang terus menegaskan klaimnya atas Selat Hormuz, Trump kini berupaya mendapatkan kembali posisi tawar.

Risiko Harga

Langkah tersebut juga berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar. Dengan harga minyak saat ini, pungutan sebesar 20% diperkirakan setara US\$32 juta atau sekitar Rp578 miliar (dengan asumsi kurs Rp18.069/US\$) untuk setiap very large crude carrier (VLCC) yang mengangkut muatan penuh. Nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan pungutan yang sebelumnya dikenakan Iran, yang menurut sejumlah sumber mencapai US\$2 juta atau sekitar Rp36,1 miliar per pelayaran.

Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan energi dan komoditas global. Sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari, sekitar seperlima pasokan minyak dunia dikirim melalui jalur tersebut. Upaya Iran menutup Selat Hormuz selama perang sempat mendorong kenaikan harga energi global dan memicu tekanan politik terhadap Trump.

Kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran sebelumnya mengatur bahwa kapal-kapal komersial dapat melintasi Selat Hormuz tanpa dikenakan pungutan selama masa negosiasi 60 hari. Saat itu, Trump menyambut baik kesepakatan tersebut dengan menyebutnya berpotensi menurunkan harga bensin dan mendukung perekonomian AS.

Berbagai negara serta pelaku industri yang bergantung pada jalur pelayaran Selat Hormuz menegaskan akses terhadap selat tersebut harus tetap terbuka tanpa pungutan maupun biaya layanan maritim. Sejumlah pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, sebelumnya juga menegaskan Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi seluruh negara.

Namun, Trump mengubah sikapnya pada Senin ketika mengatakan kepada Fox News bahwa AS berhak memperoleh kompensasi karena telah membantu menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Menurutnya, selama ini negara-negara lain yang menikmati seluruh keuntungan dari jalur tersebut. Sikap itu berpotensi memicu ketegangan dengan sekutu AS di kawasan Teluk yang bergantung pada ekspor energi melalui Selat Hormuz.

"Kami menjaganya tanpa memperoleh apa pun. Sekarang kami akan menjaganya dan kami akan dibayar untuk itu, dalam jumlah besar," kata Trump. "Kami hanya ingin mendapat penggantian karena melakukan semua ini dan menempatkan warga kami dalam bahaya."

Sebelumnya dalam konflik tersebut, Trump sempat mengusulkan agar AS dan Iran sama-sama memperoleh kompensasi dari kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz.

Hambatan Rencana

Meski demikian, rencana Trump diperkirakan menghadapi berbagai hambatan hukum dan operasional apabila benar-benar diterapkan.

Berdasarkan hukum internasional, kapal pada umumnya memiliki hak untuk melintas di jalur pelayaran internasional tanpa dikenakan biaya oleh negara pantai. Pungutan hanya dapat dikenakan atas layanan tertentu yang diberikan kepada kapal secara individual.

Dalam beberapa pekan terakhir, militer AS mengawal kapal tanker minyak dan kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz dengan dukungan angkatan laut dan kekuatan udara. Langkah tersebut bertujuan mengarahkan pelayaran melalui jalur selatan yang lebih jauh dari pantai Iran, meski Teheran tetap mengklaim menguasai jalur tersebut.

Namun, sejumlah analis menilai AS memerlukan operasi militer yang jauh lebih besar, termasuk pengerahan pasukan darat, apabila ingin benar-benar mengendalikan Selat Hormuz. Hingga kini, Trump belum menunjukkan keinginan untuk mengambil langkah tersebut.

Langkah lain pemerintahan Trump untuk melindungi pelayaran di Selat Hormuz juga belum sepenuhnya terealisasi. Pada Maret lalu, Trump memerintahkan US International Development Finance

Corporation (DFC) menyediakan asuransi risiko politik dan jaminan bagi perdagangan maritim di kawasan tersebut.

Meski DFC kemudian mengumumkan fasilitas reasuransi senilai US\$40 miliar atau sekitar Rp722,8 triliun yang didukung mitra swasta, belum diketahui apakah fasilitas tersebut telah digunakan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku pelayaran.

Inflasi AS Melambat Juni, Tapi Risiko Kenaikan Suku Bunga The Fed Membayangi

Selasa, 14 Juli 2026 11:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-as-melambat-juni-tapi-risiko-kenaikan-suku-bunga-the-fed-membayangi>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat pada Juni, namun penurunan tersebut kemungkinan belum cukup untuk memberikan banyak kelegaan bagi rumah tangga maupun menghapus peluang kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) tahun ini, di tengah konflik di Timur Tengah yang masih belum terselesaikan.

Perlambatan yang diperkirakan terjadi pada Indeks Harga Konsumen alias Consumer Price Index (CPI) terutama disebabkan oleh penurunan harga bensin setelah sebelumnya mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun. Penurunan tersebut terjadi setelah gencatan senjata rapuh antara AS dan Iran sempat berlaku pada bulan lalu.

Namun, kesepakatan tersebut runtuh pekan lalu setelah kapal tanker komersial mendapat serangan di Selat Hormuz, yang kemudian memicu aksi militer antara Amerika Serikat dan Iran. Akibatnya, harga bensin kembali meningkat. Data kelompok advokasi pengendara AAA menunjukkan harga bensin rata-rata nasional naik menjadi US\$ 3,87 per galon pada Senin, dari US\$ 3,80 per galon sepekan sebelumnya.

Presiden AS Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan kembali blokade terhadap aktivitas pelayaran Iran di Selat Hormuz, jalur penting bagi pasokan minyak global yang kini menjadi salah satu pusat konflik.

"Tingkat tekanan hanya turun dari 10 menjadi 9. Konsumen masih menghadapi banyak tekanan," ujar Brian Bethune, profesor ekonomi di Boston College. "Kita belum sepenuhnya keluar dari masalah."

Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) diperkirakan melaporkan pada Selasa bahwa CPI meningkat 3,8% secara tahunan pada Juni, berdasarkan survei Reuters terhadap para ekonom.

Perkiraan analisis berada dalam rentang 3,6% hingga 4,0%. Sebelumnya, CPI melonjak 4,2% pada Mei, menjadi kenaikan tahunan terbesar sejak April 2023, yang dinilai sejumlah ekonom kemungkinan merupakan puncak inflasi.

The Fed menggunakan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) sebagai acuan target inflasi sebesar 2%. Inflasi AS terakhir berada di bawah level tersebut pada awal 2021.

Risalah rapat The Fed pada 16–17 Juni yang dirilis pekan lalu menunjukkan meningkatnya kekhawatiran para pejabat bank sentral terhadap inflasi. Dalam pertemuan tersebut, The Fed

mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%–3,75%, meskipun proyeksi terbaru menunjukkan meningkatnya pandangan bahwa kenaikan suku bunga masih mungkin terjadi pada 2026.

Pasar keuangan memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan kebijakan 15–16 September mencapai sekitar 50,8%, berdasarkan alat FedWatch milik CME.

Harga konsumen secara bulanan diperkirakan turun 0,1% pada Juni, yang akan menjadi penurunan bulanan pertama sejak Mei 2020, setelah sebelumnya naik 0,5% pada Mei.

"Dengan tingkat harga saat ini yang masih terus terakumulasi, meskipun sejumlah toko bahan makanan mulai menawarkan potongan harga untuk menarik konsumen kembali, kemungkinan besar tagihan keseluruhan masyarakat tidak akan turun banyak karena masih ada faktor biaya lainnya," ujar Diane Swonk, kepala ekonom KPMG.

Menurut data Administrasi Informasi Energi AS (EIA), harga bensin rata-rata turun menjadi US\$ 4,18 per galon pada Mei dari US\$ 4,61 per galon, yang merupakan level tertinggi sejak Juli 2022. Namun, harga tersebut masih jauh di atas level sebelum perang.

Keringanan dari penurunan harga bahan bakar diperkirakan akan tertutupi oleh kenaikan harga makanan yang mulai meningkat setelah hanya naik tipis pada Mei.

Konflik AS-Israel dengan Iran telah mendorong kenaikan harga pupuk dan biaya distribusi. Ditambah dengan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah AS, situasi tersebut berpotensi mendorong harga pangan lebih tinggi hingga akhir tahun ini dan memasuki 2027, menurut para ekonom.

Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang bergejolak, core CPI diperkirakan meningkat 2,8% secara tahunan pada Juni, setelah naik 2,9% pada Mei.

Secara bulanan, inflasi inti diperkirakan meningkat 0,2%, sama seperti kenaikan pada Mei.

Sebagian ekonom menilai kenaikan moderat inflasi inti sebagai sinyal positif. Meskipun konflik baru antara AS dan Iran kembali mendorong harga minyak, level tersebut masih berada di bawah harga pada akhir April dan awal Mei.

"Yang paling penting bagi pejabat The Fed adalah inflasi inti karena indikator tersebut tidak secara langsung dipengaruhi harga minyak," kata Andrew Hollenhorst, kepala ekonom AS di Citigroup.

Menurutnya, salah satu kekhawatiran sebelumnya adalah kenaikan biaya energi akan merambat ke inflasi inti. Namun, selain kenaikan harga tiket pesawat yang kemungkinan bersifat sementara, kenaikan harga minyak belum memberikan dampak signifikan terhadap inflasi inti.

Namun, sejumlah ekonom lain tetap berhati-hati. Mereka menilai kenaikan inflasi inti yang masih moderat menunjukkan adanya tekanan harga mendasar yang sulit turun, sehingga peluang kenaikan suku bunga tahun ini tetap terbuka. Mereka menyoroti harga input yang masih tinggi serta waktu pengiriman pemasok yang lebih panjang dalam survei bisnis.

Data harga produsen juga menunjukkan potensi kenaikan harga masih berlanjut.

Pada Juni, inflasi inti bulanan diperkirakan terdorong oleh kenaikan harga jasa, kamar hotel dan motel yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA, serta pemulihan harga asuransi kendaraan setelah turun tajam pada Mei.

Kenaikan moderat juga diperkirakan terjadi pada harga tiket pesawat dan sewa rumah. Sementara itu, inflasi barang inti kemungkinan tidak berubah secara bulanan. Para ekonom memperkirakan kenaikan harga produk Apple yang terjadi pada akhir Juni baru akan tercermin dalam data Juli.

Dampak kenaikan tarif impor dinilai mulai berkurang, meskipun harga pakaian kemungkinan meningkat dan harga perabot rumah tangga mulai pulih.

"Laporan CPI Juni kemungkinan tidak akan secara tegas menentukan apakah The Fed akan memperketat kebijakan tahun ini atau tidak," ujar Samuel Tombs, kepala ekonom AS di Pantheon Macroeconomics.

Korea Selatan Kerek Proyeksi Ekonomi Jadi 3% di 2026, Terkuat Sejak 2021

Selasa, 14 Juli 2026 10:43 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/korea-selatan-kerek-proyeksi-ekonomi-jadi-3-di-2026-terkuat-sejak-2021>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 menjadi 3% berkat booming semikonduktor global. Selain itu, pemerintah berjanji untuk segera memajukan investasi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja ekonomi.

Dalam rencana kebijakan ekonomi setengah tahunan yang dirilis sebelumnya, Kementerian Keuangan Korea Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 3,0%, terkuat sejak 2021 dan naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,0% serta laju ekonomi di tahun 2025 sebesar 1,1%.

Kementerian mengatakan, bakal mendorong kebijakan yang ditujukan pada tiga tujuan utama, termasuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi menjadi 3% dari perkiraan di bawah 2%.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan mempercepat tiga "proyek mega" yang diumumkan bulan lalu yang mencakup investasi semikonduktor, pusat data AI, dan investasi fisik AI, kata kementerian tersebut.

Awal pekan ini, Korea Selatan mengatakan akan meningkatkan anggaran belanja di 2027 setidaknya 10% menjadi lebih dari 800 triliun won atau setara US\$ 532,73 miliar, dengan memprioritaskan proyek-proyek besar dan mendapatkan dukungan dari peningkatan pendapatan pajak dari sektor semikonduktor.

"Meskipun indikator ekonomi yang kuat, seperti ekspor, yang didorong oleh booming semikonduktor jelas merupakan faktor peluang, masih ada tugas yang perlu diatasi oleh ekonomi kita," kata Wakil Menteri Keuangan Lee Hyoung-il.

Ekonomi terbesar keempat di Asia ini mencatatkan pertumbuhan terkuatnya dalam hampir enam tahun pada kuartal lalu, didorong oleh booming ekspor chip di tengah lonjakan investasi AI global.

Kementerian juga menetapkan target untuk menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu dari empat eksportir terbesar di dunia dan meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita menjadi US\$ 50.000, dari perkiraan US\$ 40.000 di tahun ini. Saat ini negara tersebut termasuk di antara lima eksportir terbesar di dunia.

Kementerian berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi yang terus tinggi, mata uang yang lemah, dan imbal hasil obligasi yang tinggi terkait dengan konflik Timur Tengah, termasuk pembatasan harga bahan bakar, pelanggaran regulasi valuta asing yang diperpanjang, dan pinjaman kebijakan berbiaya rendah pada paruh kedua tahun ini.

Inflasi Korea Selatan diperkirakan mencapai 2,6% untuk tahun 2026, naik dari 2,1% yang terlihat pada Januari lalu, di tengah harga minyak yang tinggi. Itu akan lebih cepat dari laju 2,1% pada tahun 2025 dan tercepat sejak tahun 2023.

Untuk tahun 2027, kementerian memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2% dan inflasi sebesar 2,2%.

Ekspor China pada Juni Melonjak Melampaui Perkiraan Terlecut Ledakan AI

Selasa, 14 Juli 2026 10:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-china-pada-juni-melonjak-melampaui-perkiraan-terlecut-ledakan-ai>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pertumbuhan ekspor China melampaui perkiraan pada bulan Juni 2026 karena permintaan yang kuat untuk semikonduktor. Ditambah lonjakan pengiriman barang oleh produsen ke Amerika Serikat (AS) menjelang potensi tarif baru.

Lonjakan ekspor China ini mengimbangi kekhawatiran yang lebih luas tentang perang Iran dan melemahnya permintaan global.

Kinerja perdagangan yang lebih kuat dari perkiraan menunjukkan bahwa produsen China terus mempertahankan penjualan meskipun pertumbuhan melambat di negara-negara ekonomi utama dan ketidakpastian mengenai hubungan perdagangan dengan AS.

Permintaan yang kuat untuk produk teknologi terkait kecerdasan buatan (AI), pengiriman awal ke AS, dan penetapan harga agresif oleh eksportir China membantu mendukung penjualan di luar negeri.

Seperti dikutip Reuters, Selasa (14/7/2026), ekspor China naik 27% secara tahunan dalam nilai dolar AS pada Juni 2026. Ini merupakan kinerja terbaik China dalam empat bulan, melampaui kenaikan 19,4% pada bulan April dan kenaikan 18,2% yang diperkirakan oleh para ekonom.

Sementara, impor China melonjak 36%, dibandingkan dengan kenaikan 27,4% pada bulan sebelumnya, tertinggi dalam 5 tahun. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan sebesar 24% untuk bulan Juni.

Investasi AI global memberikan bantalan penting bagi para produsen di ekonomi China senilai US\$ 20 triliun, bahkan ketika gangguan dari konflik Timur Tengah dan penurunan pasar properti yang berkepanjangan terus membebani pertumbuhan secara keseluruhan.

Data aktivitas manufaktur terpisah untuk bulan Juni, yang dirilis akhir bulan lalu, menunjukkan permintaan luar negeri mulai pulih, tetapi harga di tingkat pabrik terus turun karena perusahaan memangkas harga untuk mendapatkan bisnis dari pelanggan yang tertekan oleh biaya energi yang lebih tinggi terkait dengan konflik Iran.

Eksportir China mendapat dorongan karena pengecer AS mempercepat pemesanan hingga empat hingga enam minggu untuk menambah stok menjelang penjualan Black Friday dan Natal, sebelum kenaikan tarif yang diperkirakan akan terjadi akhir tahun ini. Namun, ketidakpastian tetap tinggi setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada bulan Mei gagal memberikan terobosan yang diharapkan banyak orang.

Ekspor yang kuat membantu mendorong perekonomian melampaui ekspektasi pada kuartal pertama, tetapi momentum tersebut telah mendingin, memperkuat kekhawatiran para ekonom bahwa permintaan

domestik yang lemah membuat China rentan jika kondisi eksternal melunak, sehingga meningkatkan prospek dukungan kebijakan lebih lanjut.

China akan menerbitkan angka produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi untuk kuartal kedua pada hari Rabu besok.

Surplus perdagangan China mencapai US\$ 125,6 miliar pada bulan Juni 2026, naik dari US\$ 105,4 miliar pada bulan sebelumnya.

Ekspor China Melonjak 27% pada Juni 2026, Permintaan AI dan AS Jadi Penopang Utama

Selasa, 14 Juli 2026 10:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-china-melonjak-27-pada-juni-2026-permintaan-ai-dan-as-jadi-penopang-utama>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pertumbuhan ekspor China pada Juni melampaui perkiraan analis, didorong oleh kuatnya permintaan semikonduktor serta percepatan pengiriman barang ke Amerika Serikat menjelang potensi penerapan tarif baru. Faktor tersebut berhasil mengimbangi kekhawatiran yang lebih luas terkait konflik Iran dan melemahnya permintaan global.

Kinerja perdagangan yang lebih baik dari perkiraan ini menunjukkan bahwa produsen China masih mampu mempertahankan penjualan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama dan ketidakpastian hubungan dagang dengan Washington.

Tingginya permintaan terhadap produk teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), percepatan pengiriman barang ke AS, serta strategi penetapan harga yang agresif dari eksportir China menjadi penopang utama ekspor.

Berdasarkan data bea cukai yang dirilis Selasa, nilai ekspor China dalam denominasi dolar AS meningkat 27% secara tahunan (year-on-year) pada Juni. Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam empat bulan terakhir, melampaui kenaikan 19,4% pada April dan jauh di atas proyeksi ekonom sebesar 18,2%.

Sementara itu, impor China melonjak 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, lebih tinggi dari pertumbuhan 27,4% pada bulan sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, para ekonom memperkirakan impor hanya akan tumbuh sekitar 24%.

Investasi global di sektor kecerdasan buatan (AI) menjadi penopang penting bagi sektor manufaktur di ekonomi China yang bernilai sekitar US\$20 triliun, meskipun gangguan akibat konflik di Timur Tengah dan krisis berkepanjangan di sektor properti masih membebani pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Data aktivitas manufaktur untuk Juni yang dirilis pada akhir bulan lalu juga menunjukkan bahwa permintaan luar negeri mulai pulih. Namun, harga di tingkat pabrik masih terus mengalami penurunan karena perusahaan memangkas harga untuk memenangkan persaingan di tengah pelanggan yang menghadapi kenaikan biaya energi akibat konflik Iran.

Ekspor China juga mendapat dorongan karena peritel Amerika Serikat mempercepat pemesanan barang sekitar empat hingga enam minggu lebih awal guna mengamankan stok untuk musim belanja Black Friday dan Natal, sebelum tarif impor baru diperkirakan diberlakukan pada akhir tahun ini.

Meski demikian, ketidakpastian masih tinggi setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing pada Mei lalu belum menghasilkan terobosan signifikan dalam hubungan dagang kedua negara.

Kinerja ekspor yang kuat sempat mendorong pertumbuhan ekonomi China melampaui ekspektasi pada kuartal pertama. Namun, momentum tersebut mulai melambat dalam beberapa bulan terakhir, memperkuat kekhawatiran para ekonom bahwa lemahnya permintaan domestik membuat ekonomi China rentan apabila kondisi eksternal memburuk. Situasi ini meningkatkan peluang pemerintah mengeluarkan stimulus atau dukungan kebijakan tambahan.

China dijadwalkan merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II pada Rabu. Sementara itu, surplus perdagangan China tercatat sebesar US\$ 125,6 miliar pada Juni, meningkat dari US\$ 105,4 miliar pada bulan sebelumnya.

Dolar AS Stabil Selasa (14/7) Pagi Jelang Data Inflasi AS, Yen Masih Tertekan

Selasa, 14 Juli 2026 08:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-stabil-selasa-147-pagi-jelang-data-inflasi-as-yen-masih-tertekan>

KONTAN.CO.ID - Dolar AS bergerak stabil pada perdagangan Selasa (14/7/2026) menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang menjadi perhatian utama pasar.

Sementara itu, yen Jepang tetap berada di bawah tekanan di tengah kewaspadaan pelaku pasar terhadap kemungkinan intervensi pemerintah Jepang serta perkembangan terkait alokasi dana pensiun negara.

Melansir Reuters, Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama termasuk yen dan euro, tercatat datar di level 101,27.

Pelaku pasar kini menanti serangkaian data penting AS, dimulai dari indeks harga konsumen (CPI) Juni yang akan dirilis Selasa, disusul indeks harga produsen (PPI) pada Rabu.

Selain itu, Ketua Federal Reserve Kevin Warsh juga dijadwalkan menyampaikan kesaksian semesterannya di hadapan Kongres AS.

Di sisi geopolitik, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat.

Presiden Donald Trump pada Senin mengatakan Washington kembali memberlakukan blokade laut terhadap Iran dan akan memastikan Selat Hormuz tetap terbuka dengan mekanisme tertentu setelah terjadinya serangan rudal dan drone terbaru antara kedua negara.

Pasukan AS dan Iran saling melancarkan serangan rudal serta drone dalam skala besar sepanjang akhir pekan. Teheran menyerang fasilitas AS di sejumlah negara kawasan Teluk pada Minggu dan menyatakan kembali menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi perdagangan energi dunia.

Ketegangan tersebut mendorong lonjakan harga minyak. Pada Senin, harga minyak melonjak lebih dari 9% dan mencapai level tertinggi dalam satu bulan.

Pada perdagangan Selasa pagi, kontrak minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) kembali menguat lebih dari 2% ke level tertinggi sejak pertengahan Juni.

Di pasar valuta asing, euro stabil di US\$ 1,1383 per dolar AS, sementara pound sterling diperdagangkan pada US\$ 1,3347.

Peluang Kenaikan Suku Bunga Fed Menguat

Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan, suku bunga mungkin perlu dinaikkan dalam waktu dekat jika data menunjukkan inflasi masih jauh di atas target bank sentral sebesar 2%.

Kepala Strategi Valas National Australia Bank, Ray Attrill mengatakan, data inflasi inti (core CPI) sebesar 0,3% atau lebih pada Juni dapat menjadi sinyal bahwa indikator inflasi pilihan Fed, yakni core PCE, juga akan tumbuh setidaknya 0,3%.

"Hal itu bisa menjadi pemicu bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga secepatnya pada pertemuan Juli," kata Attrill dalam sebuah podcast.

Berdasarkan median proyeksi ekonom, inflasi inti AS pada Juni diperkirakan naik 0,2% secara bulanan.

Data LSEG menunjukkan kontrak berjangka suku bunga Fed saat ini mencerminkan ekspektasi kenaikan suku bunga sekitar 30 basis poin sepanjang tahun ini.

Yen Kembali Mendekati Zona Intervensi

Yen Jepang diperdagangkan relatif stabil di level 162,40 per dolar AS. Posisi tersebut kembali membuat pasar waspada terhadap kemungkinan intervensi otoritas Jepang karena mata uang Negeri Sakura masih berada di sekitar level terlemah dalam empat dekade.

Kepala Strategi Pasar Ebury Matthew Ryan menilai, pemerintah Jepang tampaknya sedikit melonggarkan toleransinya terhadap pelemahan yen, meskipun tetap siaga.

"Otoritas Jepang masih sangat waspada dan mengindikasikan bahwa intervensi yang lebih agresif masih mungkin dilakukan jika terjadi pergerakan ekstrem lebih lanjut," ujar Ryan.

Yen melemah terhadap dolar pada Senin setelah Reuters melaporkan bahwa pemerintah Jepang belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk mengubah alokasi aset dana pensiun negara.

Kabar tersebut meredam harapan pasar terhadap dukungan tambahan bagi aset domestik Jepang.

Sebelumnya pada Jumat, yen dan obligasi Jepang sempat menguat setelah Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan pemerintah akan mencari cara untuk mendorong dana pensiun, termasuk Government Pension Investment Fund (GPIF), meningkatkan investasi pada aset keuangan domestik.

Sementara itu, dolar Australia diperdagangkan di US\$ 0,6915, sedangkan dolar Selandia Baru (kiwi) naik 0,24% menjadi US\$ 0,5762 per dolar AS.

Di pasar kripto, bitcoin naik 0,23% ke level US\$ 62.293,66 dan ether menguat 0,56% menjadi US\$ 1.775,54.

Rupiah Betah Melemah di Rp18.000/US\$, DPR Bakal Tagih Janji BI

Selasa, 14 Juli 2026 19:50 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115028/rupiah-betah-melemah-di-rp18-000-us-dpr-bakal-tagih-janji-bi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun akan menagih janji pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) ihwal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dijanjikan kembali menguat Juli-Agustus 2026 setelah mengalami pelemahan beberapa bulan berturut-turut.

Rupiah menutup perdagangan Selasa (14/7/2026) di level Rp18.092/US\$, di tengah penguatan dolar AS yang sedikit terpankas. Indeks dolar AS melemah terbatas 0,05% ke posisi 101,18.

“Kalau kemudian tidak bisa mengarah ke sana [penguatan rupiah], BI harus bisa menjelaskan bahwa BI sudah melakukan langkah-langkah yang memadai dalam rangka menjaga stabilisasi itu,” kata Misbakhun ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026) petang.

Bagaimanapun, dia menilai bank sentral perlu diberi kesempatan untuk berupaya menjaga stabilisasi rupiah agar kembali sesuai patokan asumsi makro APBN 2026 yang berada di rentang Rp16.200/US\$ - Rp16.800/US\$.

Menurutnya, pelemahan rupiah sangat berdampak terhadap impor khususnya yang berkaitan dengan bahan baku industri karena terdapat selisih kurs.

“Dampak selisih kurs ini kan memberikan dampak inflatoir terhadap barang-barang industri yang berbahan baku impor,” ujarnya.

Di sisi lain, dia meyakini pemerintah sudah berkoordinasi dengan BI mengenai rupiah yang terus melemah bahkan bertengger di posisi Rp18.000/US\$ dalam beberapa pekan terakhir.

“Karena Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin menjaga tidak menaikkan harga BBM [subsidi] itu sangat luar biasa menjaga inflasi kita, menjaga daya beli kita, daya beli masyarakat tentunya dan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan BI selalu berusaha ingin tetap menjaga stabilitas makroekonomi,” jelas Misbakhun.

Dalam kaitan itu, Politikus Partai Golkar itu tidak menampik sikap pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi akan berdampak terhadap belanja pemerintah yang membengkak.

Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan tambahan belanja sebesar Rp132 triliun hingga akhir tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah yang membengkak imbas harga minyak dunia melambung.

Purbaya merevisi postur APBN 2026 lantaran target belanja naik 2,6% sehingga mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% hingga akhir tahun.

“Ya pasti, menimbulkan resiko belanja APBN yang menggunakan denominasi valas pasti akan mengalami tekanan dan penyesuaian. Bahkan saya dengar sudah mulai ada beberapa meminta eskalasi harga. Nah ini kan yang harus di, kita harus hati-hati menjaganya,” terang Misbakhun.

Rupiah Dijanjikan Menguat Juli 2026

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali menguat mulai Juli-Agustus 2026 setelah mengalami pelemahan beberapa bulan berturut-turut.

Perry menyebut kala itu nilai tukar rupiah secara year to date sudah di angka Rp16.900/US\$. Dia meyakini rupiah akan kembali menguat seperti dalam rentang asumsi makro yakni Rp16.200/US\$ - Rp16.800/US\$.

Dia menjelaskan rupiah yang terus melemah saat ini merupakan faktor musiman lantaran pada April, Mei dan Juni terdapat permintaan yang tinggi terhadap valuta asing serta pembayaran dividen dan utang.

“Sehingga kenapa meyakini nanti insya Allah ada pengalaman dari kami. Kebetulan saya tidak ingin sombong, kebetulan saya memang hidup dari krisis ke krisis. 1997-1998 juga saya ikut di sana, 2008 global seperti itu, taper tantrum juga seperti itu, Covid juga begitu, memang tekanan-tekanan nilai tukar itu umumnya kalau Juli, Agustus, dan semuanya itu akan menguat,” jelas Perry dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (18/5/2026).

Di sisi lain, dia menyebut pelemahan rupiah terjadi karena faktor global dan juga faktor domestik. Perry mencontohkan pada Februari tahun lalu terdapat pengumuman kebijakan tarif resiprokal sehingga nilai tukar rupiah mencapai Rp17.000/US\$ namun tidak lama kemudian kembali menguat.

“Nah, sekarang Februari tahun ini, terus ada perang Timur Tengah, sehingga menunjukkan risiko geopolitiknya tinggi banget. Yaitu tercermin kenapa CDS kita naik, itu risiko. Itu memang globalnya, saya tidak ingin menyalahkan global, ini semua negara menghadapi itu, global,” ujarnya.

Purbaya Yakin Arus Modal Masuk & Rupiah Menguat Pasca-Rating S&P

Selasa, 14 Juli 2026 17:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115012/purbaya-yakin-arus-modal-masuk-rupiah-menguat-pasca-rating-s-p/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan kembali menguat, seiring keputusan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit utang Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal.

"Sekarang sudah jelas gangguannya apa. Selama ini yang ditakutkan, kita tidak bisa mengelola fiskal," kata Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026).

Tak hanya itu, Purbaya menyebut hasil assesment S&P juga akan mendorong kepercayaan investor dan kembali menarik arus modal mengalir deras (inflow) ke pasar RI. Purbaya juga mengajak investor domestik maupun asing untuk melihat kembali peluang investasi di Indonesia.

"Investor akan balik ke sini secara bertahap. Kalau [investor] yang pintar, masuk cepat. Ini menunjukkan bahwa yang diragukan banyak orang, yaitu kita tidak bisa mengimplementasikan kebijakan fiskal dengan baik, itu salah," ujarnya.

Menurut Purbaya, penilaian S&P menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal pemerintah selama ini berjalan dalam koridor yang tepat. Dia meyakini, keputusan tersebut akan mengurangi kekhawatiran pasar terkait risiko penurunan peringkat utang Indonesia (downgrade) yang sebelumnya sempat mencuat.

"Ini menunjukkan bahwa fiskal kita amat baik. Asesmen S&P memperlihatkan bahwa pemerintah menjalankan fiskal dengan tepat, prudent, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi," tutur Purbaya.

Dia mengatakan penilaian S&P merupakan pengakuan internasional terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal, di tengah berbagai kekhawatiran pasar mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Purbaya mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir Indonesia sempat menghadapi tekanan sentimen negatif dari pasar karena muncul kekhawatiran terkait potensi penurunan peringkat kredit. Namun, hasil penilaian S&P dinilai menjadi konfirmasi bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal dan memperbaiki berbagai sisi yang masih mengalami inefisiensi. Menurutnya, kebijakan fiskal tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan melalui evaluasi dan pembahasan secara berkala.

"Kami selalu serius, selalu diskusi, dan selalu menilai ke mana kebijakan fiskal kita. Kelemahannya di mana, diperbaikinya di mana," jelasnya.

Sebelumnya, S&P Global memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp17.700/US\$ pada 2026.

Walaupun lebih rendah dari posisi kurs rupiah pada perdagangan hari ini (13/7/2026), Rp18.092/US\$, proyeksi tersebut lebih tinggi dari rentang target pemerintah di Rp16.200/US\$ hingga Rp16.800/US\$.

Risiko Masih Membayangi

Selanjutnya, pada 2027, S&P memperkirakan rupiah kembali menguat di level Rp17.500/US\$.

Di sisi lain, S&P mengingatkan cepatnya perubahan kebijakan dan ketidakpastian implementasi masih dapat memengaruhi kepercayaan investor serta memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun pasar keuangan.

Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I-2026, didorong meningkatnya konsumsi saat libur panjang dan percepatan realisasi belanja pemerintah. Namun, di saat yang sama pasar keuangan mengalami gejolak signifikan.

Sepanjang semester I-2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kehilangan lebih dari 30% kapitalisasi pasarnya, sedangkan rupiah melemah sekitar 7% terhadap dolar AS.

Menurut S&P, perbedaan kinerja antara sektor riil dan pasar keuangan mencerminkan tingginya ketidakpastian, baik dari faktor global maupun domestik. Di tingkat global, meskipun dampak tarif Amerika Serikat mulai mereda, konflik di Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz menghadirkan risiko baru terhadap kawasan.

Menakar Ketangguhan Ekonomi RI pada Semester I-2026

Selasa, 14 Juli 2026 14:44 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114970/menakar-ketangguhan-ekonomi-ri-pada-semester-i-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Di balik ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mulai demam, terbatuk-batuk, dan menunjukkan gejala kehilangan sebagian tenaga.

Sejumlah indikator ekonomi terbaru mengisyaratkan adanya perlambatan ekonomi. Pemicunya bukan cuma akibat tekanan eksternal seperti pelemahan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, tetapi juga ada indikasi mulai melemahnya permintaan domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan.

Kontraksi Manufaktur

Sinyal pertama datang dari sektor manufaktur. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,9 jauh di bawah ambang batas 50 yang memisahkan fase ekspansi dan kontraksi.

Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri sedang mengalami penyusutan, tercermin dari menurunnya produksi, pesanan baru, hingga tingkat utilisasi kapasitas pabrik. Pelemahan ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap produk manufaktur, baik dari pasar domestik maupun ekspor, tidak lagi sekuat beberapa bulan sebelumnya.

Hal ini diamini oleh sejumlah data yang menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi terjadi pada hampir semua negara. Baru-baru ini, Asian Development Bank (ADB) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara menjadi sebesar 4,5% dari sebelumnya sebesar 4,6%.

Tak cuma ASEAN, pertumbuhan ekonomi negara Asia Tenggara berkembang (Developing Southeast Asia) juga direvisi menjadi 4,6% pada 2026 dan dipertahankan sebesar 4,8% pada 2027.

Menurut ADB, Konflik di Timur Tengah telah melemahkan permintaan eksternal, meningkatkan ketidakpastian global, mengganggu rantai pasok, serta mendorong kenaikan biaya input dan harga komoditas.

Hal tersebut menyebabkan aktivitas manufaktur di berbagai negara juga masih berada dalam tekanan akibat permintaan yang melemah, tingginya suku bunga, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Bagi dunia usaha, kontraksi PMI dilatarbelakangi oleh penurunan pesanan, dan perusahaan meresponsnya dengan menahan pembelian bahan baku, mengurangi jam operasional, menunda investasi, hingga lebih selektif dalam merekrut tenaga kerja.

Bahkan, di tengah kondisi seperti ini, perusahaan juga berpotensi melakukan efisiensi untuk menjaga margin keuntungannya. Alhasil, pelemahan di sektor manufaktur dapat menjalar ke sektor lain lewat penurunan pendapatan pekerja, investasi, hingga konsumsi rumah tangga.

Keyakinan Konsumen Memudar

Gejala tersebut juga mulai terasa dari sisi konsumen. Indeks keyakinan konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia (BI) tercatat turun menjadi 117,8 pada Juni, lebih rendah dibandingkan 120,9 pada Mei, sekaligus menandai level terendah sejak September 2025. Meski masih berada di level optimis 100, tren penurunannya perlu mendapat perhatian sebab mencerminkan bahwa masyarakat semakin berhati-hati dalam memandang kondisi ekonomi.

Gejala ini diperparah dengan terjadinya penurunan pada kedua komponen utama. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini juga turun menjadi 109,2 dari sebelumnya 112,2. Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini semakin memburuk.

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen juga turun menjadi 126,4 dari 129,7. Penurunan tersebut mencerminkan memburuknya pandangan masyarakat terhadap prospek pendapatan, lapangan kerja, aktivitas usaha, hingga kemampuan membeli barang tahan lama dalam enam bulan mendatang.

Perubahan persepsi tersebut umumnya menjadi sinyal awal sebelum konsumsi benar-benar melemah. Rumah tangga cenderung menahan pembelian barang bernilai besar ketika merasa prospek ekonomi tidak lagi sebaik sebelumnya.

Kehati-hatian konsumen itu telah tercermin pada data penjualan ritel yang juga berkontraksi 4,4% pada Juni secara tahunan. Penurunan tersebut jauh lebih dalam dari kontraksi bulan Mei yang sebesar 3,9%.

Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat sebesar 223,4, turun dibanding April yang sebesar 226,9, atau berkurang 3,5 poin. Bank Indonesia memperkirakan IPR kembali turun menjadi 221,6 pada Juni, sehingga dalam dua bulan indeks telah menyusut 5,3 poin atau sekitar 2,3% dari posisi April.

Yang lebih mengkhawatirkan, pelemahan tak cuma terjadi pada satu kelompok barang, tetapi hampir merata pada berbagai kategori kelompok barang, bahkan yang bersifat kebutuhan dasar. Seperti, makanan dan minuman, pakaian, bahan bakar, alat komunikasi, hingga kebutuhan budaya dan rekreasi.

Kontraksi yang terjadi pada hampir semua kelompok barang itu menunjukkan pelemahan konsumsi tak lagi bersifat musiman, tapi malah mencerminkan adanya perlambatan daya beli masyarakat secara luas.

Padahal, seperti diketahui, bahwa konsumsi rumah tangga selama ini jadi penyeimbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan melemahnya konsumsi dan daya beli, mesin utama pertumbuhan ekonomi otomatis ikut melambat.

Tekanan Inflasi Menguat

Perlambatan ini juga terjadi saat tekanan harga belum mereda. Inflasi Juni tercatat berada di level 3,38%, relatif tinggi dibandingkan titik tengah sasaran BI. Dalam kondisi normal, pelemahan yang terjadi pada konsumsi biasanya diikuti dengan penurunan tekanan inflasi karena permintaan masyarakat berkurang.

Namun, inflasi yang datang kali ini bersumber dari sisi penawaran. Kenaikan harga energi akibat tensi geopolitik di Timur Tengah, gangguan produksi pangan karena faktor cuaca dan ancaman El Nino, dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berkepanjangan, membuat biaya impor jadi naik dan akhirnya membuat harga tetap melambung.

Dengan kata lain, tekanan inflasi yang terjadi saat ini bukan berasal dari konsumsi yang terlalu kuat (demand-pull inflation), melainkan meningkatnya biaya produksi dan distribusi (cost-push inflation).

Seluruh indikator tersebut menyampaikan pesan yang sama. Ekonomi Indonesia belum memasuki fase krisis, tetapi jelas sedang kehilangan momentum. Optimisme konsumen mulai terkikis, aktivitas industri melemah, dan belanja masyarakat tidak lagi sekuat sebelumnya.

Indikator ekonomi pada periode akhir paruh pertama tahun ini menunjukkan pudarnya keyakinan konsumen di tengah ketidakpastian pendapatan, tingginya suku bunga dan melambungnya biaya hidup.

Dengan kondisi saat ini, tantangan terbesar pemerintah dan otoritas moneter ke depan bukan sekadar menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tapi juga memulihkan kepercayaan pelaku usaha serta daya beli masyarakat.

Sebab tanpa konsumsi yang kembali bergairah, akan semakin sulit menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang diharapkan di tengah ketidakpastian global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Purbaya: Posisi Utang RI Masih Jauh di Bawah Batas Maksimal

Selasa, 14 Juli 2026 14:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114960/purbaya-posisi-utang-ri-masih-jauh-di-bawah-batas-maksimal/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PAN mengenai rasio utang tahun 2025 yang mencapai 40,54% terhadap PDB serta strategi pengelolaan utang ke depan.

“Pemerintah menegaskan bahwa meskipun rasio utang meningkat dari 39,81% [terhadap] PDB pada tahun 2024 menjadi 40,54% PDB pada tahun 2025, posisi tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,” kata Purbaya

Dengan demikian, Purbaya memastikan bahwa saat ini kondisi APBN tetap aman dan terkendali. Sementara itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan strategi untuk pengelolaan utang.

Strategi pengelolaan utang ke depan, kata Purbaya akan bertumpu pada empat pilar utama, yaitu konsolidasi fiskal secara bertahap untuk memperkuat keseimbangan primer menuju kondisi positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja negara, serta pengelolaan portofolio utang secara aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman.

“Melalui strategi tersebut, pemerintah optimistis rasio utang dapat dikendalikan secara bertahap dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung agenda pembangunan nasional,” kata Purbaya.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang kurang efektif di tahun 2025. Hal ini dilontarkan Didik dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke -24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026.

Dalam sidang tersebut, Ia menyoroti mengenai realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai 92%, sementara realisasi Belanja Negara mencapai 94%. Selanjutnya, Ia juga menyoroti besaran defisit sebesar 2,81% dari PDB, lebih besar dibandingkan target APBN 2025 yaitu 2,53% dari PDB.

“Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara sehingga defisit bertambah Rp54 triliun suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” kata Didik dalam rapat Paripurna, Selasa (7/7/2026).

Dalam pemaparannya, Didik juga menyebut bahwa rasio utang terhadap PDB pada 2025 meningkat menjadi 40,5%, dari 39,8% pada 2024. Sepanjang 2025, pemerintah menambah utang sebesar Rp846 triliun, sehingga total utang pemerintah mencapai Rp9.658 triliun pada akhir tahun.

Sebagai informasi, Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard and Poor's atau S&P Global Ratings memperkirakan utang bersih pemerintah umum (net general government debt) akan meningkat sekitar 2,9% dari PDB setiap tahun selama periode 2026–2029.

Sementara itu, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara (interest-to-revenue ratio) diperkirakan masih berada di atas 15% pada 2026–2027, sebelum kembali turun di bawah 15% seiring penurunan suku bunga dan meningkatnya pertumbuhan penerimaan negara.

“Berdasarkan asumsi tersebut, utang bersih pemerintah umum diperkirakan meningkat menjadi 37,4% dari PDB pada akhir 2029, dari 36,4% pada 2024,” kata S&P dalam laporannya, dikutip Selasa (14/7/2026).

Lembaga pemeringkat global tersebut juga memperkirakan kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) pemerintah yang berasal dari sistem keuangan akan tetap terbatas.

“Penilaian ini didasarkan pada asesmen kami terhadap risiko industri perbankan Indonesia yang berada pada level '5' serta ukuran neraca sektor perbankan yang masih di bawah 60% dari PDB,” kata S&P.

S&P Proyeksi Utang Pemerintah di Akhir 2029 Capai 37,4% PDB

Selasa, 14 Juli 2026 12:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/114946/s-p-proyeksi-utang-pemerintah-di-akhir-2029-capai-37-4-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard and Poor's atau S&P Global Ratings memperkirakan utang bersih pemerintah umum (net general government debt) akan meningkat sekitar 2,9% dari PDB setiap tahun selama periode 2026–2029.

Sementara itu, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara (interest-to-revenue ratio) diperkirakan masih berada di atas 15% pada 2026–2027, sebelum kembali turun di bawah 15% seiring penurunan suku bunga dan meningkatnya pertumbuhan penerimaan negara.

“Berdasarkan asumsi tersebut, utang bersih pemerintah umum diperkirakan meningkat menjadi 37,4% dari PDB pada akhir 2029, dari 36,4% pada 2024,” kata S&P dalam laporannya, dikutip Selasa (14/7/2026).

Lembaga pemeringkat global tersebut juga memperkirakan kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) pemerintah yang berasal dari sistem keuangan akan tetap terbatas.

“Penilaian ini didasarkan pada asesmen kami terhadap risiko industri perbankan Indonesia yang berada pada level '5' serta ukuran neraca sektor perbankan yang masih di bawah 60% dari PDB,” kata S&P.

Selain itu S&P memperkirakan kewajiban kontinjensi yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetap terbatas. Oleh karena itu, S&P tidak mengonsolidasikan utang BUMN maupun Danantara ke dalam utang pemerintah, mengingat adanya kemungkinan kewajiban tersebut beralih menjadi beban pemerintah relatif rendah.

Selain itu, dengan melemahnya rupiah, S&P memperkirakan defisit transaksi berjalan (current account deficit) akan melebar menjadi 2,1% dari PDB pada 2026 setelah neraca perdagangan barang berbalik mengalami defisit pada Mei 2026.

S&P juga mencatat, kenaikan biaya impor serta intervensi Bank Indonesia untuk menopang nilai tukar rupiah turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal bruto (gross external financing needs).

S&P memproyeksikan rasio kebutuhan pembiayaan eksternal bruto terhadap total penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa yang dapat digunakan meningkat menjadi 98,9% pada 2026, dari 92,9% pada 2025.

Meski demikian, S&P memperkirakan rasio tersebut akan membaik secara bertahap hingga mencapai sekitar 96,1% pada 2029, didukung oleh keberlanjutan kebijakan hilirisasi pemerintah serta berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan ekspor.

“Kami memperkirakan utang luar negeri bersih (narrow net external debt) akan rata-rata mencapai 69,1% dari penerimaan transaksi berjalan selama periode 2026–2029. Sejak 2022, utang luar negeri bruto telah menurun secara signifikan seiring pelunasan bersih utang luar negeri oleh sektor nonpemerintah di tengah tingginya suku bunga global dan menguatnya dolar Amerika Serikat,” kata S&P.

S&P juga menyoroti mengenai Bank Indonesia yang masih memiliki portofolio surat utang pemerintah dalam jumlah yang cukup besar di neracanya.

“Sebagian kondisi ini merupakan warisan dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia pada masa pandemi. Meskipun sebagian surat utang tersebut akan jatuh tempo dalam tiga tahun mendatang, kami tidak memperkirakan Bank Indonesia akan mengurangi ukuran neracanya secara signifikan,” kata lembaga tersebut.

S&P menilai Bank sentral justru terus meningkatkan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi operasi moneter berbasis pasar untuk menjaga kecukupan likuiditas dan menarik kembali aliran modal asing.

Rollover Utang Jadi Jurus Pemerintah Kelola Utang Jatuh Tempo

Selasa, 14 Juli 2026 14:57 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/rollover-utang-jadi-jurus-pemerintah-kelola-utang-jatuh-tempo>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo tetap berjalan lancar dan sesuai rencana. Pemerintah mengandalkan strategi pengelolaan utang melalui mekanisme rollover untuk menjaga kesinambungan pembiayaan sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pemerintah terus melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif, termasuk dengan melakukan pembiayaan kembali terhadap utang yang jatuh tempo.

"On track, kita kan rollover-nya keras," ujar Suminto saat ditemui di DPR, Selasa (14/7/2026).

Menurut Suminto, kenaikan posisi utang pemerintah tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa pemerintah kesulitan membayar kewajibannya. Ia menilai, pengelolaan utang harus dilihat dari strategi pembiayaan secara keseluruhan, termasuk bagaimana pemerintah mengatur jatuh tempo dan kebutuhan pembiayaan.

"Ya enggak lah. Jadi kayak yang jatuh tempo enggak dibayar, gitu kesannya," katanya.

Sebelumnya, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memperkirakan posisi utang pemerintah dapat mencapai sekitar Rp 10.600 triliun pada akhir 2026. Proyeksi tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah akibat pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Namun, Suminto membantah proyeksi tersebut dan menegaskan pemerintah masih akan merilis data resmi posisi utang per akhir Juni 2026 setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto (PDB) kuartal II-2026 pada 5 Agustus mendatang.

"Kita kan meng-update setiap tiga bulan. Nanti begitu keluar data GDP (PDB kuartal II) pada 5 Agustus, langsung kita keluarkan posisi utang per Juni," ujar Suminto.

Hingga Maret 2026, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.920 triliun atau setara 40,75% terhadap PDB.

Bukan Dampak Pelemahan Rupiah

Selain memastikan pembayaran utang tetap berjalan, Suminto juga menepis anggapan bahwa kenaikan utang terutama dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan, dampak depresiasi rupiah terhadap total utang pemerintah relatif terbatas karena sekitar 72% portofolio utang pemerintah masih berdenominasi rupiah.

"Enggak. Kan 72% utang kita dalam rupiah," ujarnya.

Meski demikian, Suminto mengakui utang dalam denominasi valuta asing (valas) tetap mengalami dampak ketika nilai tukarnya dikonversikan ke rupiah.

"Dalam konteks ekuivalen ke rupiah tentu ada efeknya. Tapi kan enggak besar banget," kata Suminto.

Ia menambahkan, dampak pelemahan kurs terhadap total portofolio utang pemerintah masih jauh di bawah 10%. Menurutnya, pemerintah tetap menjaga risiko utang melalui strategi pengelolaan portofolio, termasuk menjaga komposisi mata uang dan mengatur profil jatuh tempo.

Utang Jatuh Tempo Pemerintah Membengkak pada 2026, Tembus Rp 749,2 Triliun

Selasa, 14 Juli 2026 09:50 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-jatuh-tempo-pemerintah-membengkak-pada-2026-tembus-rp-7492-triliun>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban utang jatuh tempo pemerintah pada 2026 diproyeksikan meningkat signifikan, bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dihimpun KONTAN, total surat utang negara (SUN) yang akan jatuh tempo sepanjang 2026 mencapai Rp 749,23 triliun, naik sekitar 24,3% dibandingkan 2025 yang sebesar Rp 602,84 triliun.

Jika ditinjau berdasarkan profil jatuh tempo, beban pembayaran utang pada 2026 tidak tersebar merata sepanjang tahun, melainkan terkonsentrasi pada beberapa bulan tertentu. Pada awal tahun, nilai utang yang jatuh tempo masih relatif rendah, yakni Rp 6,55 triliun pada Januari, Rp 44,10 triliun pada Februari, dan Rp 24,35 triliun pada Maret.

Memasuki April, nilai jatuh tempo melonjak tajam menjadi Rp 138,95 triliun, atau lebih dari sebelas kali lipat dibandingkan April 2025 yang hanya sebesar Rp 12,17 triliun. Setelah itu, beban pembayaran kembali menurun pada Mei menjadi Rp 5,50 triliun dan Juni sebesar Rp 6,45 triliun.

Namun, tekanan pembayaran mencapai puncaknya pada Juli 2026 dengan nilai utang jatuh tempo sebesar Rp 194,51 triliun. Angka tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun dan meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan Juli 2025 yang hanya mencapai Rp 9,65 triliun.

Pada paruh kedua tahun, utang yang jatuh tempo tercatat sebesar Rp 29,27 triliun pada Agustus, sebelum kembali melonjak menjadi Rp 165,87 triliun pada September. Selanjutnya, nilai jatuh tempo turun menjadi Rp 29,13 triliun pada Oktober dan Rp 24,31 triliun pada November, kemudian kembali meningkat menjadi Rp 80,24 triliun pada Desember.

Sebagai perbandingan, profil jatuh tempo pada 2025 lebih banyak terkonsentrasi pada pertengahan tahun. Nilai utang yang jatuh tempo terbesar terjadi pada Agustus sebesar Rp 177,50 triliun, disusul Juni sebesar Rp 147,66 triliun dan Oktober sebesar Rp 102,12 triliun. Sementara itu, beban jatuh tempo pada 2027 diperkirakan mulai menurun menjadi Rp 672,29 triliun. Meski demikian, beberapa bulan masih mencatat nilai yang cukup besar, antara lain April sebesar Rp 127,01 triliun, Mei Rp 120,43 triliun, Desember Rp 112,39 triliun, dan Januari Rp 104,44 triliun.

Peringkat Utang Indonesia Aman, Tapi S&P Soroti Risiko Ini

Selasa, 14 Juli 2026 06:55 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-utang-indonesia-aman-tapi-sp-soroti-risiko-ini>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. S&P Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB dan jangka pendek A-2.

Meski demikian, menurutnya, penjelasan S&P menunjukkan lembaga pemeringkat tersebut masih cukup pesimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal itu tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 2029 yang diperkirakan berada di bawah 5%, jauh dari target mendekati 8%.

Selain itu, S&P juga memberikan sejumlah catatan terkait posisi utang pemerintah serta beban pembayaran bunga utang terhadap PDB.

Di tengah proyeksi tersebut, S&P memperkirakan utang pemerintah akan meningkat sebesar 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun pada 2026 hingga 2029.

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (13/7/2026), S&P mengatakan, rasio bunga terhadap pendapatan dapat tetap di atas 15% pada tahun 2026-2027, sebelum turun kembali di bawah 15% seiring penurunan suku bunga dan peningkatan pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan asumsi di atas, utang pemerintah umum bersih dapat meningkat menjadi 37,4% dari PDB pada akhir tahun 2029 dari 36,4% pada tahun 2024.

Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Myrdal Gunarto mengatakan, keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia beserta outlook stabil merupakan kabar baik dan menjadi pencapaian positif bagi pemerintah.

“Ini yang menjadi perhatian, karena mereka sebenarnya juga mengkhawatirkan dari aspek kesehatan fiskal kita,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (13/7/2026).

Ia bilang, penilaian S&P saat ini perlu diterima sebagai bagian dari evaluasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, apabila ke depan perekonomian terbukti semakin solid, pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan per kapita naik, rasio fiskal tetap sehat, produktivitas pajak membaik, serta

pemerintah mampu mengelola defisit fiskal dengan baik, maka S&P berpeluang memberikan penilaian yang lebih positif.

Ia juga meyakini prospek peringkat maupun outlook Indonesia dapat ditingkatkan apabila ketahanan ekonomi terhadap berbagai tekanan global juga semakin kuat.

Myrdal menambahkan, keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia dapat menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan domestik. Menurutnya, pasar obligasi pemerintah berpotensi tetap terjaga dengan imbal hasil (yield) yang masih menarik di mata investor meskipun terjadi kenaikan.

Kondisi tersebut juga dinilai dapat menjadi katalis positif bagi pasar obligasi dan mendorong arus modal asing (capital inflow) ke Indonesia. Dampak lanjutan dari sentimen tersebut, lanjutnya, diharapkan juga dapat menopang kinerja pasar saham maupun nilai tukar rupiah, selama tekanan global tidak terus meningkat.

Lebih lanjut, Myrdal memperkirakan, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) untuk tenor 10 tahun masih akan di level 6,84%, dengan proyeksi defisit APBN mencapai 2,9% pada tahun ini.

Dengan proyeksi tersebut maka skenario dampak dari perang di Iran-Israel tidak semasif pada periode bulan Maret sampai Juni.

“Jadi, walaupun ada perang, selat Hormuz masih terbuka, harga minyak juga terjaga, tidak lagi mengalami lonjakan gila-gilaan seperti Maret sampai Juni lalu,” terangnya.

Luas Tembakau Capai 7.440 Hektare, Perputaran Uang Diperkirakan Sentuh Rp455 Miliar

Selasa, 14 Juli 2026

Penulis: Mifta Rembang, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/luas-tembakau-capai-7-440-hektare-perputaran-uang-diperkirakan-sentuh-rp455-miliar/>

REMBANG – Musim tanam tembakau tahun ini, membawa optimisme bagi petani di Kabupaten Rembang. Cuaca yang mendukung, membuat prospek produksi tembakau dinilai cukup menjanjikan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto menyebut, luas tanam tembakau yang telah tercatat hingga semester I 2026 mencapai 7.440 hektare. Sebagian besar merupakan kemitraan dengan perusahaan rokok, menggunakan varietas Muri.

“Tahun ini, petani tembakau terlihat semringah, karena cuaca sangat mendukung. Luas tanam sementara mencapai 7.440 hektare,” ujarnya, saat ditemui di kantornya, Senin (13/7/2026).

Agus menjelaskan, produktivitas tembakau kemitraan rata-rata berkisar 1,5 hingga 2 ton per hektare dengan harga jual sekitar Rp35 ribu per kilogram. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai ekonomi yang berputar selama satu musim tanam diperkirakan sangat besar.

“Kalkulasi selama sekitar enam bulan proses produksi tembakau ini menghasilkan perputaran uang sekitar Rp455 miliar. Hampir setengah triliun rupiah beredar pada musim tembakau,” jelasnya.

Menurutnya, sektor tembakau menjadi salah satu penggerak utama ekonomi pedesaan di Kabupaten Rembang. Namun demikian, petani masih menghadapi persoalan kenaikan harga pupuk ZA dan ZK, yang tidak termasuk dalam skema pupuk subsidi.

Untuk membantu petani, pihaknya mengalokasikan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp2,3 miliar untuk pengadaan pupuk. Bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan pada pertengahan Juli 2026.

“Kami berharap, pupuk ZA sebanyak 223 ton segera bisa diterima kelompok tani, dan dimanfaatkan untuk mendukung produksi tembakau tahun ini,” pungkasnya.

Magelang Fair 2026 Raup Omzet Rp3,17 Miliar, Lebih dari 54 Ribu Pengunjung Hadir

Selasa, 14 Juli 2026

Penulis: Prokopim, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/magelang-fair-2026-raup-omzet-rp317-miliar-lebih-dari-54-ribu-pengunjung-hadir/>

KOTA MAGELANG – Magelang Fair 2026 resmi ditutup di Alun-Alun Kota Magelang pada Minggu (12/7/2026). Selama penyelenggaraannya, ajang promosi produk unggulan daerah tersebut berhasil menarik 54.385 pengunjung dan membukukan omzet transaksi sebesar Rp3,17 miliar, menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Penutupan Magelang Fair berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang memadati kawasan Alun-Alun Kota Magelang hingga malam hari. Selama kegiatan berlangsung, Magelang Fair menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM, industri kreatif, serta berbagai produk unggulan daerah yang mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang, Saifullah, menyampaikan, penyelenggaraan Magelang Fair 2026 memberikan hasil yang mengembirakan.

“Selama pelaksanaan Magelang Fair 2026, jumlah pengunjung mencapai 54.385 orang dengan total omzet transaksi sebesar Rp3.170.225.000,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal sekaligus menunjukkan potensi UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Wakil Wali Kota Magelang, Sri Harso, berharap keberhasilan Magelang Fair dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya berharap kita dapat menjadikan hasil yang diperoleh selama Magelang Fair ini sebagai modal untuk melangkah lebih jauh agar terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menumbuhkan optimisme sehingga Kota Magelang mampu menjadi kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Keberhasilan penyelenggaraan Magelang Fair 2026 diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui kolaborasi tersebut, Kota Magelang diharapkan terus meningkatkan daya saing sebagai kota perdagangan dan jasa.

IOA Global Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Jateng, dari Investasi Hingga Pendidikan Vokasi

Selasa, 14 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/iaa-global-jajaki-kerja-sama-dengan-pemprov-jateng-dari-investasi-hingga-pendidikan-vokasi/>

SEMARANG – Perusahaan nirlaba Impact of Asia Limited (IOA) Global Pte Ltd Singapura, menjajaki kerja sama jangka panjang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kolaborasi tersebut tidak hanya menyasar investasi manufaktur berteknologi tinggi, tetapi juga pendidikan vokasi, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Executive Chairman IOA Global Pte Ltd, Daryl Tan Chen Ming, mengatakan, kunjungan delegasinya ke Jawa Tengah merupakan langkah awal, untuk memetakan potensi kerja sama dengan jaringan mitra di Fujian dan Xiamen, China.

“Pertemuan ini masih merupakan kunjungan awal. Nantinya, mitra-mitra kami akan datang pada Oktober, sehingga kita bisa memfinalisasi apa saja yang perlu dikerjakan bersama,” kata Daryl, saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di kantornya, Selasa (14/7/2026).

Salah satu mitra yang akan dibawa, merupakan perusahaan manufaktur sepatu berteknologi tinggi dari China yang serius menjajaki pembangunan fasilitas produksi di Jawa Tengah.

Selain itu, IOA juga berencana membawa investor dari China dan sejumlah negara di Eropa, untuk melihat potensi lokasi, dukungan pemerintah, kesiapan tenaga kerja, serta kebutuhan spesifik investasi.

“Ini merupakan komitmen dan proyek jangka panjang yang sedang kami jajaki. Bukan hanya dalam investasi, tetapi juga pendidikan,” kata Daryl.

Menurutnya, Fujian memiliki banyak industri manufaktur berteknologi tinggi yang dapat dikembangkan di Jawa Tengah, sekaligus memperkuat kompetensi tenaga kerja. Salah satu gagasan utamanya, membangun fasilitas manufaktur milik investor Fujian di Jawa Tengah.

Kerja sama juga akan diarahkan pada pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia. Generasi muda Jawa Tengah berpeluang mengikuti pendidikan atau pelatihan di China, sementara tenaga ahli dari China dapat datang untuk memberikan pelatihan teknologi baru.

Daryl menyebut, keluarganya telah mengembangkan sekitar 120 sekolah dan perguruan tinggi di Xiamen, selama lebih dari satu abad. Pengalaman tersebut membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah, melalui pertukaran mahasiswa, dosen, informasi, pengetahuan, dan tenaga ahli.

“Saya kira kerja sama pendidikan, akan membawa kedua wilayah ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan ini juga merupakan rencana jangka panjang, yang bisa dilakukan oleh kedua wilayah,” katanya.

Daryl menilai Jawa Tengah memiliki modal kuat sebagai lokasi investasi, karena didukung infrastruktur, kawasan industri, dan ekosistem usaha yang telah berkembang.

Chief Executive IOA Global Pte Ltd, Razali Ramli, menambahkan, Jawa Tengah mempunyai kedekatan budaya dengan masyarakat dan pelaku usaha dari Fujian. Banyak pengusaha asal Fujian juga telah memiliki jaringan usaha di wilayah tersebut.

“Karena itu, saya rasa budayanya memiliki banyak persamaan. Jadi, lebih mudah bagi masyarakat ataupun pengusaha dari Provinsi Fujian untuk datang ke sini, karena terdapat elemen-elemen yang lebih mereka pahami dibandingkan daerah lain di Indonesia,” kata Razali.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, pemerintah daerah siap memberikan kepastian, keamanan, pendampingan, serta mengawal proses perizinan calon investor. Pemprov Jateng juga menawarkan sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan perusahaan.

Menurut Luthfi, industri padat karya menjadi salah satu prioritas, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kesiapan sumber daya manusia didukung hampir 1.500 sekolah vokasi, politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK), yang diarahkan agar terhubung dengan kebutuhan perusahaan.

“BLK kita ini untuk menjamin keterampilan tenaga kerja, agar bisa diterima di perusahaan,” ujar dia.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, total investasi Singapura selama 2022 hingga Triwulan I 2026 mencapai Rp32,158 triliun. Capaian tersebut menempatkan Singapura sebagai investor terbesar kedua di Jawa Tengah. Khusus pada Triwulan I 2026, Singapura menjadi kontributor terbesar penanaman modal asing dengan nilai Rp3,333 triliun, atau sekitar 25,8 persen dari total investasi asing. (Humas Jateng)*ul

Dua Tahun Didampingi Pemprov Jateng, Desa Ayamputih Kebumen Mulai Lepas dari Jerat Kemiskinan

Selasa, 14 Juli 2026 19:07 WIB

Anggraini S

<https://www.rmoljawatengah.id/dua-tahun-didampingi-pemprov-jateng-desa-ayamputih-kebumen-mulai-lepas-dari-jerat-kemiskinan>

Pendampingan intensif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, selama dua tahun mulai membuahkan hasil. Berbagai program lintas sektor yang digulirkan sejak 2025 mampu menggerakkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.

Perkembangan tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri Festival Pangan di Desa Ayamputih. Kegiatan itu menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan Program Desa Dampingan yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jawa Tengah.

Taj Yasin mengatakan, Program Desa Dampingan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan melalui pendampingan yang terintegrasi.

"Ini adalah bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Dampingan. OPD mendampingi mulai dari UMKM, kelompok usaha, baik perorangan maupun kelompok," kata Taj Yasin, Selasa 14 Juli 2026.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pendampingan dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan.

Ia mengapresiasi peran Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah yang berhasil memfasilitasi kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelola peternakan ayam petelur dengan PT Jateng Agro Berdikari (JTAB).

Kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak lokal, sekaligus mendukung program pemenuhan gizi di Jawa Tengah.

"Kita pastikan apa yang diarahkan Pak Gubernur, SPPG Jawa Tengah harus beli telur dari Jawa Tengah, harus beli ayam dari Jawa Tengah supaya masyarakat kita bisa tumbuh bersama," tegas pria yang akrab disapa Gus yasin itu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan Desa Ayamputih mulai mendapatkan pendampingan sejak 2025 sebagai bagian dari program percepatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.

Selama tahun 2025, desa tersebut menerima bantuan senilai Rp492,81 juta yang berasal dari kolaborasi berbagai OPD, Baznas, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Bantuan tersebut meliputi subsidi pangan dan energi bagi keluarga miskin, rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sanitasi, bantuan modal usaha, penyediaan bibit tanaman produktif, hingga edukasi konsumsi pangan bergizi.

Program itu kemudian dilanjutkan pada 2026 dengan cakupan yang lebih luas. Pemerintah memberikan dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kelompok usaha bersama, budidaya bebek petelur, pembangunan sembilan jamban keluarga, serta rehabilitasi lima unit RTLH dengan nilai mencapai Rp100 juta.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara BUMDes Desa Ayamputih dan PT Jateng Agro Berdikari untuk menjamin keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di desa tersebut.

Dalam Festival Pangan tersebut, tidak hanya menjadi ajang penyerahan bantuan, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan publik bagi masyarakat.

Warga dapat memanfaatkan Gerakan Pangan Murah, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan, Samsat Keliling, hingga konsultasi perizinan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar UMKM pangan lokal sebagai upaya memperluas akses pemasaran produk masyarakat.

Kepala Desa Ayamputih, Saudi, mengatakan berbagai program yang masuk ke desanya mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui program RTLH, pengembangan sektor peternakan dan pariwisata juga berhasil membuka peluang kerja baru bagi warga.

"Di kandang ayam petelur saja sudah mempekerjakan enam orang. Kami juga mengembangkan objek wisata Pantai Happy yang membuka kesempatan kerja bagi sekitar 25 warga, terutama pemuda desa, melalui usaha kuliner dan pengelolaan parkir," ujarnya.

Saudi berharap pendampingan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut sehingga mampu melahirkan lebih banyak kegiatan ekonomi produktif.

Ekonomi China Q2-2026 Tumbuh 4,3%, Terendah dalam 3 Tahun

Rabu, 15 Juli 2026 10:40 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/115066/ekonomi-china-q2-2026-tumbuh-4-3-terendah-dalam-3-tahun/2>

Bloomberg, Pertumbuhan ekonomi China melambat lebih besar dari perkiraan pada kuartal kedua tahun ini, hingga menyentuh level terlemahnya dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Kondisi ini kini mengalihkan perhatian publik pada langkah taktis apa yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan selanjutnya demi memastikan target pertumbuhan tahunan mereka tetap tercapai.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional (NBS) pada hari Rabu (15/7), Produk Domestik Bruto (PDB) China tumbuh 4,3% secara tahunan (year-on-year). Angka ini berada di bawah batas bawah target resmi pemerintah tahun ini yang dipatok di kisaran 4,5% hingga 5%. Capaian tersebut juga lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan sebesar 4,5% oleh para ekonom yang disurvei Bloomberg, serta melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal pertama yang sempat menyentuh 5%.

“Perekonomian berjalan dalam rentang yang wajar,” tulis pihak NBS dalam pernyataan resminya. “Terdapat banyak ketidakstabilan dan ketidakpastian di tingkat eksternal, sementara ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan domestik terpantau sangat menonjol.”

Besarnya perlambatan tersebut diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Politbiro Partai Komunis China yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Para pejabat diperkirakan akan mempertimbangkan percepatan belanja pemerintah dan peningkatan investasi proyek infrastruktur setelah pemangkasan pengeluaran dalam beberapa bulan terakhir menahan laju pertumbuhan ekonomi yang sempat menguat di awal tahun.

Reaksi pasar terhadap data tersebut relatif terbatas. Yuan offshore masih mempertahankan penguatan 0,1% pada perdagangan pagi, sementara imbal hasil obligasi pemerintah China tenor 10 tahun stabil di level 1,73%.

Data terbaru juga menunjukkan investasi aset tetap (fixed-asset investment/FAI) turun 5,7% pada semester pertama dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut lebih dalam dari perkiraan analis dan memburuk dibandingkan kontraksi 4,1% yang tercatat pada lima bulan pertama tahun ini.

Di sisi lain, penjualan ritel secara tak terduga tumbuh 1% setelah turun 0,6% pada Mei. Produksi industri melampaui perkiraan dengan kenaikan 5,3%, sementara tingkat pengangguran perkotaan berdasarkan survei turun menjadi 5% dari sebelumnya 5,1% pada Mei.

Penurunan penjualan sejumlah barang seperti peralatan rumah tangga juga mulai mereda selama festival belanja daring pertengahan tahun "618", menurut sejumlah ekonom di China.

Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi terbesar kedua di dunia itu semakin meningkat sejak April, ketika pertumbuhan mulai melemah dan menjadi semakin tidak seimbang. Meskipun lonjakan harga energi akibat perang di Iran membantu mengangkat China dari tekanan deflasi yang telah berlangsung bertahun-tahun, keyakinan konsumen dan pelaku usaha masih lemah.

Sementara itu, ekspor China melonjak ke rekor tertinggi dan produksi manufaktur tetap kuat, terutama berkat pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) secara global. Namun, ketegangan perdagangan di berbagai negara masih membayangi prospek ekonomi yang kini semakin bergantung pada penjualan ke luar negeri. Risiko yang muncul adalah manfaat dari ledakan tersebut hanya terkonsentrasi di beberapa sektor, seperti manufaktur elektronik, tanpa mengalir ke perekonomian secara lebih luas.

Penurunan tajam investasi aset tetap selama setahun terakhir juga memicu kekhawatiran di China.

David Li Daokui, ekonom terkemuka sekaligus penasihat pemerintah, mengatakan dalam sebuah pidato awal bulan ini bahwa sebelum pelemahan terbaru, indikator tersebut hanya pernah mengalami kontraksi pada 1961 dan 1967. Menurutnya, besarnya penurunan yang terjadi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Kontraksi investasi inilah yang menjadi penyebab lemahnya PDB pada kuartal kedua," ujar Raymond Yeung, Kepala Ekonom Greater China di Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "China masih memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini, idealnya sebelum akhir kuartal ketiga. Pertemuan Politburo pada Juli kini menjadi agenda yang paling kami cermati."

Warsh The Fed: Penurunan Inflasi AS Bukan Tanda Tugas Selesai

Rabu, 15 Juli 2026 06:07 WIB

Enda Curran dan Maria Eloisa Capurro

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115031/warsh-the-fed-penurunan-inflasi-as-bukan-tanda-tugas-selesai/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh menyatakan bahwa melandainya inflasi pada bulan Juni bukan berarti tugas bank sentral telah selesai. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia juga memberikan sinyal mengenai bagaimana bank sentral kemungkinan harus merespons situasi ekonomi ke depan.

Sepanjang tiga jam memberikan kesaksian di hadapan Kongres pada hari Selasa (14/7), para anggota dewan mencecar Warsh tentang bagaimana ia berencana memenuhi janji berulangnya untuk memulihkan stabilitas harga, setelah The Fed selama bertahun-tahun gagal mencapai target inflasi 2%.

Meskipun pemimpin baru The Fed tersebut menahan diri untuk tidak memberikan sinyal pengetatan kebijakan moneter dalam waktu dekat, ia memperjelas bahwa opsi untuk meredam inflasi mencakup instrumen suku bunga.

"Kami memiliki instrumen untuk melakukannya," ujar Warsh. "Pada periode mendatang, saya akan meminta rekan-rekan kami untuk melakukan berdiskusi secara serius mengenai sejauh mana dan kapan waktu yang tepat bagi kami untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut," tambahnya, merujuk pada perangkat kebijakan moneter The Fed.

Sejumlah ekonom menilai pernyataan tersebut tidak menunjukkan akan adanya kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, ucapan itu menjadi momen terdekat bagi Gubernur The Fed yang baru tersebut untuk menyatakan secara terbuka bahwa kebijakan moneter kemungkinan perlu diperketat.

"Ini mungkin momen terdekat bagi Warsh untuk mengakui bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi yang terus-menerus tinggi, tanpa memberikan sinyal kenaikan secara eksplisit," kata Olu Sonola, kepala ekonomi AS di Fitch Ratings.

Dalam sebuah catatan kepada para kliennya, para ekonom di Goldman Sachs menilai bahwa pernyataan Warsh tersebut merepresentasikan "sinyal-sinyal mengenai pandangannya dalam merespons inflasi tinggi yang disebabkan oleh guncangan pasokan."

Tanpa Panduan Kebijakan

Warsh diangkat menjadi Gubernur The Fed oleh Donald Trump, yang selama bertahun-tahun mendorong agar biaya pinjaman diturunkan. Sejak mulai menjabat pada Mei, Warsh berjanji menghapus sistem penyampaian sinyal arah suku bunga bank sentral ke depan, yang dikenal sebagai forward guidance. Ia dan sejumlah pejabat lain mengkritik praktik tersebut karena dinilai membatasi ruang gerak pembuat kebijakan ketika kondisi ekonomi berubah.

Karena itu, Warsh sebelumnya selalu menghindari pembahasan mengenai langkah yang akan diambil jika inflasi tidak kunjung mereda, meskipun beberapa pejabat The Fed lainnya secara terbuka telah membahas kemungkinan kenaikan suku bunga.

Namun, tidak semua pihak menilai komentar terbaru Warsh membawa sinyal baru.

Ekonom senior pada era pemerintahan Barack Obama yang kini menjadi profesor di Harvard Kennedy School of Government, Jason Furman, mengatakan Warsh tetap konsisten dan tidak memberikan panduan kebijakan baru dalam kesaksiannya.

"Siapa pun yang merasa mendengar petunjuk mengenai rencana kebijakannya di masa depan kemungkinan telah salah menafsirkan," kata Furman. "Saya tidak akan mengambil kesimpulan apa pun dari pernyataannya saat ini karena saya rasa ia sendiri belum memutuskan langkah yang akan diambil."

Pelaku pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga pada Juli setelah data inflasi yang dirilis lebih awal pada Selasa menunjukkan harga konsumen di Amerika Serikat turun pada Juni untuk pertama kalinya dalam enam tahun. Penurunan itu terjadi ketika perang antara Amerika Serikat dan Iran sempat mereda, meski konflik kembali memanas setelahnya. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan komponen pangan dan energi tercatat tidak berubah.

"Data IHK membuat kesaksian Warsh menjadi jauh lebih mudah," kata Kepala Riset Valuta Asing G10 di Standard Chartered Bank, Steven Englander.

Meski data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan mengurangi tekanan terhadap Warsh selama sidang, para anggota Kongres tetap mempertanyakan strategi The Fed untuk mengembalikan inflasi ke target.

Warsh mengakui data inflasi Juni lebih baik dari yang diperkirakan, tetapi menurutnya masih terlalu dini untuk merasa puas.

"Saya tidak akan datang ke sini lalu mengatakan bahwa tugas kami sudah selesai," kata Warsh. "Yang bisa saya katakan adalah masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Nada keseluruhan pernyataan Warsh menunjukkan kecenderungan sikap yang lebih hawkish, kata Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic. Menurutnya, komentar tersebut mengindikasikan bahwa "jika inflasi tetap tinggi dalam waktu lama, ia bisa mendukung kenaikan suku bunga pada suatu saat."

Dalam kesempatan tersebut, Warsh juga memaparkan agenda yang lebih luas untuk merombak The Fed. Ia berjanji akan menghadirkan "perubahan rezim" melalui pembentukan lima satuan tugas baru yang akan meninjau dan berpotensi mereformasi berbagai aspek utama dalam proses pengambilan kebijakan bank sentral.

Sambil menegaskan komitmennya menjaga independensi bank sentral, Warsh mengatakan bahwa ia akan menjauhkan politik dari The Fed dan tidak akan ragu mengambil kebijakan yang memang dibutuhkan oleh perekonomian.

"Tugas kami, dan komitmen saya kepada Anda, adalah mengatasi harga-harga yang terus bertahan tinggi agar kembali normal," kata Warsh.

Inflasi AS Turun untuk Pertama Kali dalam 6 Tahun Terakhir

Rabu, 15 Juli 2026 05:20 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115029/inflasi-as-turun-untuk-pertama-kali-dalam-6-tahun-terakhir/2>

Bloomberg, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Amerika Serikat (AS) mencatatkan penurunan pada bulan Juni untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir. Di saat yang sama, indikator utama inflasi inti terpantau tidak banyak berubah, sehingga sedikit meredakan tekanan bagi bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga acuan.

Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) yang dirilis hari Selasa (14/7), IHK AS turun 0,4% dibandingkan bulan Mei. Penurunan ini utamanya dipicu oleh kejatuhan harga bensin tertajam sejak tahun 2022. Jika mengesampingkan komponen makanan dan energi, indeks inflasi inti tercatat flat atau tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya.

Laporan ini mengindikasikan bahwa kemerosotan harga bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) pada bulan Juni telah memberikan sedikit napas lega bagi konsumen, seiring mulai pudarnya dampak guncangan energi akibat perang Iran. Para pejabat The Fed kemungkinan besar akan menyambut positif data ini menjelang pertemuan kebijakan moneter akhir bulan nanti. Kendati demikian, kembali melonjaknya harga minyak mentah di tengah perseteruan baru antara AS dan Iran berisiko memperpanjang dampak inflasi dari konflik tersebut.

Meskipun angka inflasi bulanan relatif terkendali, indikator tahunan menunjukkan bahwa laju inflasi AS masih berada di level yang tinggi. Inflasi umum tercatat naik 3,5% secara tahunan (year-on-year), sementara inflasi inti berada 2,6% lebih tinggi.

“Pelemahan inflasi ini kemungkinan besar hanya bersifat sementara dan diperkirakan akan memudar paling cepat pada laporan bulan depan,” ujar Omair Sharif, presiden dari Inflation Insights LLC. “Ini adalah kabar baik bagi The Fed, namun perjuangan mengendalikan inflasi masih jauh dari kata selesai.”

Menyusul rilis laporan tersebut, indeks saham S&P 500 terpantau menguat sementara imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury) bergerak turun. Para investor juga mulai mengurangi spekulasi mereka terkait adanya kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Juli ini. Di sisi lain, Gubernur The Fed Kevin Warsh menyatakan dalam naskah pidato persiapannya sebelum memberikan kesaksian di hadapan Kongres pada hari Selasa bahwa bank sentral “tidak memiliki toleransi” terhadap inflasi yang terus-menerus tinggi.

Indikator sektor jasa yang dipantau ketat oleh The Fed—yang mengecualikan biaya perumahan dan energi—turun sebesar 0,2%, menyamai penurunan terdalam sejak awal pandemi. Penurunan ini didorong oleh merosotnya premi asuransi kendaraan bermotor, yang juga mencatat penurunan tertajam sejak 2020, serta sektor jasa komunikasi.

Laju IHK inti juga tertahan oleh penurunan bulanan pada harga barang-barang konsumsi, termasuk pakaian dan mobil bekas.

Harga bensin terpankask hampir 10%, tarif sewa tempat tinggal naik tipis, dan harga bahan makanan meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut yang dipicu oleh kenaikan harga daging sapi, telur, serta produk susu. Sementara itu, tarif hotel mencatatkan penurunan tertajam dalam lebih dari setahun terakhir setelah sempat naik selama empat bulan berturut-turut. Di sisi lain, harga makanan di restoran hanya mengalami kenaikan tipis.

Harga perangkat lunak (software) komputer dan aksesorisnya melonjak 2,3% dalam sebulan, atau mencetak rekor lonjakan 17,4% dibandingkan tahun lalu. Adapun risalah pertemuan The Fed periode 16-17 Juni yang dirilis pekan lalu merefleksikan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pembuat kebijakan terhadap inflasi. Mereka mengantisipasi skenario di mana inflasi tetap tinggi akibat kuatnya permintaan berbasis kecerdasan buatan (AI), konflik Timur Tengah, serta kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

Dalam laporan terpisah pada hari Selasa, data inflasi tersebut dikombinasikan dengan data upah terbaru. Berkat penurunan harga bensin, rata-rata pendapatan per jam riil warga AS akhirnya naik 0,1% secara tahunan, setelah sempat mencatatkan penurunan pada dua bulan sebelumnya.

Kombinasi antara tingginya harga-harga kebutuhan dan melambatnya pertumbuhan upah selama ini terus menekan anggaran rumah tangga masyarakat AS menjelang pemilu sela (midterm elections) bulan November mendatang. Tekanan ini terjadi di saat indeks sentimen konsumen dari University of Michigan baru saja mulai pulih dari level terendah sepanjang sejarah.

Indikator inflasi pilihan The Fed, yaitu indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), tidak memberikan bobot yang terlalu besar pada komponen sewa rumah jika dibandingkan dengan IHK. Data indeks harga produsen (IHP) yang dirilis pada hari Rabu akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kategori-kategori tambahan yang akan langsung memengaruhi indeks PCE yang dirilis akhir bulan ini.

Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa tingginya biaya pupuk dan transportasi memerlukan waktu lebih lama untuk merembet ke harga pangan dan barang konsumsi, mengingat dampak penuh dari perang belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, ketegangan yang baru-baru ini kembali memanas di Timur Tengah dapat memberikan tekanan tambahan pada harga-harga dalam beberapa bulan ke depan.

“Dengan munculnya kembali kendala pada rantai pasok, saya menilai hal ini akan menciptakan masalah inflasi pada akhir tahun ini, atau mungkin awal tahun depan,” ujar Pooja Sriram, ekonom senior AS di Barclays. “Jadi, meskipun tahun 2026 mungkin tidak akan terlalu merasakan dampaknya, saya pikir ini menimbulkan risiko untuk tahun 2027, terutama pada inflasi inti jika kita mempertimbangkan efek rambatannya.”

Inflasi AS Melemah, Bursa Asia Diproyeksi Bakal Naik Hari Ini

Rabu, 15 Juli 2026 06:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115033/inflasi-as-melemah-bursa-asia-diproyeksi-bakal-naik-hari-ini/2>

Bloomberg, Saham-saham di negara-negara Asia diprediksi akan mencatatkan kenaikan untuk hari kedua berturut-turut pasca perlambatan inflasi AS, sehingga pada waktu sebelumnya telah memicu reli di Wall Street. Dukungan data IHK kemudian meredakan kekhawatiran terkait kenaikan suku bunga Federal Reserve yang akan segera terjadi. Harga minyak melanjutkan kenaikannya.

Pada beberapa bursa utama, seperti di Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Hong Kong, mengindikasikan pembukaan yang lebih tinggi pada Rabu. Raihan di AS menunjukkan hasil positif setelah S&P 500 melanjutkan kenaikan bulan ini. Di awal musim laporan keuangan, para perbankan besar mencatatkan hasil solid.

Kenaikan harga saham produsen chip menopang Nasdaq 100 dengan catatan +1,1%, meskipun International Business Machines Corp. (IBM) anjlok 25% akibat penjualan yang tidak mencapai target.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik tipis pada awal perdagangan Asia setelah AS menyatakan telah melanjutkan blokade laut terhadap kapal-kapal yang melintasi pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Pasukan AS juga melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran.

Harga minyak naik ke level tertinggi dalam sebulan pada hari Selasa seiring para pedagang mencerna perubahan sikap Presiden AS Donald Trump terkait pembayaran kargo di Selat Hormuz, serta semakin banyaknya kapal di perairan tersebut yang menjadi sasaran tembakan Iran.

Sementara,, data inflasi AS pada rilis Selasa waktu setempat sedikit meredakan kekhawatiran akan kembalinya kenaikan harga minyak. Surat utang pemerintah AS menguat, sehingga menyebabkan imbal hasil anjlok karena para pedagang melepaskan spekulasi bahwa The Fed dapat mulai menaikkan suku bunga secepatnya bulan ini. Indeks kekuatan dolar mengalami hari terburuknya dalam hampir dua pekan.

Harga konsumen turun pada Juni untuk pertama kalinya dalam enam tahun, sementara indikator utama inflasi inti relatif stabil. Para pejabat The Fed kemungkinan akan menyambut baik data ini menjelang rapat mereka mendatang, meskipun ketegangan di Teluk Persia berisiko memperpanjang dampak konflik tersebut.

“Indeks Harga Konsumen yang lebih rendah dari perkiraan merupakan kelegaan besar,” kata Tiffany Wilding dari Pacific Investment Management Co. Walau “laporan ini tidak akan sepenuhnya menafikan tema mengenai pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut, namun seharusnya secara efektif menghilangkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Juli dari pertimbangan.”

Dalam pernyataannya di hadapan anggota parlemen AS, Gubernur The Fed baru Kevin Warsh mengatakan, pejabat bank sentral tidak akan mentolerir inflasi tinggi. Warsh lantas menegaskan kembali janji untuk mengendalikan kenaikan harga.

IHK boleh jadi mengurangi tekanan pada The Fed untuk segera menaikkan suku bunga, namun ketegangan di Iran berarti prospek kenaikan suku bunga masih jauh dari berakhir, urai Kay Haigh dari Goldman Sachs Asset Management.

Walaupun masih ada kemungkinan suku bunga tetap tidak berubah tahun ini, eskalasi kembali konflik tersebut telah mempersempit peluang tersebut, kata Haigh. “Laporan ini memberikan ruang kelegaan, bukan sinyal bahwa semuanya sudah aman, meskipun inflasi telah mereda, inflasi belum hilang,” kata Bret Kenwell dari eToro.

Inflasi AS Melandai, Wall Street Ditutup Menghijau

Rabu, 15 Juli 2026 05:40 WIB

Joel Leon

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115030/inflasi-as-melandai-wall-street-ditutup-menghijau/2>

Bloomberg, Bursa saham Amerika Serikat (AS) berada di zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa (14/7). Hal ini terjadi setelah rilis data terbaru yang menunjukkan penurunan indeks harga konsumen (IHK), sekaligus meredakan tekanan bagi bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) untuk mengerek suku bunga.

Indeks S&P 500 ditutup menguat 0,4% di New York, membalikkan koreksi tajam yang terjadi pada hari Senin. Sementara itu, indeks Nasdaq 100 melonjak 1,1% menyusul pulihnya saham-saham raksasa

cip memori asal Korea Selatan, di mana penguatan saham SK Hynix Inc dan Samsung Electronics Co turut memberikan sentimen positif bagi emiten sejenis di bursa saham AS.

IHK AS merosot pada bulan Juni untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir, sementara indikator utama untuk inflasi inti terpantau tidak banyak berubah. Para investor kini tengah mengalihkan fokus mereka pada rilis data indeks harga produsen (IHP) yang dijadwalkan keluar pada hari Rabu.

"Pasar memang mengantisipasi angka inflasi yang lebih jinak, dan hasil yang keluar ternyata sedikit lebih rendah dari ekspektasi pasar," ujar Subadra Rajappa, kepala riset AS di Societe Generale. "Menurut saya, fokus saya akan lebih tertuju pada rilis IHP besok yang nantinya akan memengaruhi angka PCE inti akhir bulan ini, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai indikator inflasi favorit The Fed, yaitu PCE inti."

Laporan IHK kali ini dinilai jauh lebih baik daripada perkiraan awal, menurut penuturan Bill Adams, kepala ekonom AS di Fifth Third Commercial Bank.

"Laporan ini kemungkinan memberi ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada pertemuan berikutnya," ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa prospek inflasi pada Juli masih kurang menjanjikan karena kenaikan harga bensin.

"Perlambatan inflasi pada Juni sangat menggembirakan karena terjadi setelah pembaruan komponen biaya tempat tinggal dalam IHK pada April, yang melengkapi data survei yang sempat hilang akibat penutupan pemerintah tahun lalu dan sebelumnya membuat inflasi sektor perumahan terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya pada akhir 2025 hingga awal 2026," katanya.

Pelaku pasar juga mencermati kesaksian Gubernur The Fed Kevin Warsh di hadapan anggota Kongres. Warsh menegaskan bahwa bank sentral tidak memiliki toleransi terhadap inflasi yang tinggi dan kembali menekankan komitmennya untuk mengendalikan kenaikan harga yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir. Pernyataan tersebut disiapkan sebelum data inflasi terbaru diumumkan.

Dari sisi geopolitik, Donald Trump membatalkan rencananya mengenakan biaya sebesar 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz setelah mendapat desakan dari sekutu AS di kawasan Teluk agar kebijakan tersebut dibatalkan.

Sementara itu, kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran praktis telah runtuh. Pasukan AS kembali memberlakukan blokade laut dan meluncurkan serangan udara baru, sementara Teheran menyerang lebih banyak kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi tersebut mendorong harga minyak Brent melonjak hingga US\$85,40 per barel.

Di sektor perbankan, saham JPMorgan Chase & Co naik 2,5% setelah membukukan laba kuartalan tertinggi sepanjang sejarah, didorong kinerja perdagangan saham yang melampaui ekspektasi analis. Sebaliknya, saham Citigroup Inc dan Wells Fargo & Co melemah setelah merilis laporan keuangan, sedangkan saham Bank of America Corp naik 1,9%. Saham Goldman Sachs Group Inc melonjak 9% setelah pendapatan dari perdagangan saham pada kuartal kedua melampaui perkiraan pasar.

Di luar sektor perbankan, saham International Business Machines Corp (IBM) anjlok 25% setelah melaporkan penjualan kuartalan sementara yang berada di bawah ekspektasi analis.

"Musim laporan keuangan diawali dengan sangat baik," kata Kepala Investasi Navellier & Associates, Louis Navellier.

Di antara pergerakan saham individual lainnya, Lucid Group Inc merosot 16% hingga ditutup pada level terendah sepanjang sejarah. Produsen kendaraan listrik itu menunjuk penasihat restrukturisasi untuk memperbaiki kondisi bisnisnya yang sedang terpuruk, sekaligus membantah rumor bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan kebangkrutan.

IMF Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Rabu, 15 Juli 2026 21:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-ingatkan-pemerintah-jaga-stabilitas-harga-di-tengah-ketidakpastian-ekonomi-global>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara untuk menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter guna mempertahankan stabilitas harga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Direktur Strategi IMF yang baru, Christian Mumssen, menilai perekonomian dunia saat ini menghadapi serangkaian guncangan besar yang terjadi secara beruntun dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai tantangan tersebut mencakup pandemi Covid-19, krisis biaya hidup, ketegangan perdagangan, hingga konflik yang berlangsung di Ukraina dan Timur Tengah.

"Secara teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan keuangan digital berkembang dengan kecepatan yang hanya sedikit dari kita perkirakan sebelumnya. Sementara itu, dari sisi geopolitik, tatanan global pascaperang mulai bergeser menuju dunia yang lebih terfragmentasi dan multipolar," ujar Mumssen dalam sebuah acara yang digelar Atlantic Council di Washington, Rabu (15/7/2026).

Ia menambahkan bahwa perekonomian global sejauh ini mampu menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah berbagai tekanan tersebut. Namun, skala perubahan yang sedang berlangsung menciptakan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi.

"Perekonomian global telah terbukti sangat tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika ini. Namun, besarnya perubahan yang sedang terjadi menciptakan tingkat ketidakpastian yang luar biasa tinggi, dan kita harus siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga," katanya.

Menurut Mumssen, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pengelolaan keuangan publik dan utang, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Ia memperingatkan bahwa stabilitas harga berpotensi terganggu akibat gangguan pasokan yang semakin sering terjadi.

Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat ketahanan terhadap guncangan rantai pasok dan meningkatnya ketegangan politik global, sekaligus mengelola risiko ketidakpastian yang muncul.

Mumssen juga menekankan pentingnya merespons perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, termasuk memastikan transformasi kecerdasan buatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menurut dia, perbedaan utama dalam kondisi keuangan global saat ini adalah berbagai transformasi besar terjadi secara bersamaan, mulai dari perubahan teknologi hingga pergeseran geopolitik.

Mumssen pun mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama dengan IMF dalam mencari solusi atas berbagai tantangan tersebut.

"Permasalahannya adalah, ketika tantangan struktural berskala besar dan revolusi teknologi baru justru membutuhkan kerja sama internasional yang lebih erat, sistem tata kelola global malah semakin terfragmentasi," ujar Mumssen.

Inflasi AS Melandai, Begini Nasib Rupiah di Luar Negeri

Rabu, 15 Juli 2026 08:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115047/inflasi-as-melandai-begini-nasib-rupiah-di-luar-negeri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pelemahan rupiah di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) sedikit terpankaskan menjadi 0,17% di Rp18.129/US\$ pada 07:40 WIB, setelah tadi pagi pada 06:00 WIB sempat bertengger di Rp18.271/US\$.

Volatilitas rupiah pagi ini disebabkan oleh melonjaknya harga minyak mentah yang kembali naik 1,39% menjadi US\$85,9 per barel, menyusul ketidakpastian yang masih melanda Timur Tengah dengan kembalinya Amerika Serikat (AS) dan Iran bersitegang. Kondisi tersebut meningkatkan kembali kekhawatiran akan gangguan pasokan yang dapat menyebabkan inflasi.

Meski begitu, sebagian mata uang kawasan hari ini bergerak menguat. Di pasar yang sudah buka, terlihat ringgit memimpin penguatan bersama baht Thailand, yen Jepang, dolar Singapura, yuan China dan yuan offshore. Sebaliknya, won Korea Selatan kembali melemah.

Penguatan sebagian mata uang kawasan ditopang oleh berkurangnya ekspektasi terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) Fed Funds Rate (FFR) pada Juli, setelah data inflasi yang dirilis Selasa waktu setempat menunjukkan perlambatan pada Juni, untuk kali pertama dalam enam tahun. Perlambatan terhadap inflasi AS jadi angin segar bagi aset di Asia.

Ketua The Fed, Kevin Warsh mengakui bahwa data inflasi Juni lebih baik dari ekspektasi, tetapi menurutnya perjuangan masih panjang. "Saya tidak datang ke sini dan mengatakan misi telah selesai, yang bisa saya katakan adalah masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan," ujar Warsh dalam rapat bersama Kongres, seperti dikutip Bloomberg News.

Di tengah kesaksian tersebut, Warsh menyiratkan nada hawkish meski tidak diungkap secara eksplisit. Warsh menegaskan bahwa salah satu opsi untuk mengendalikan inflasi adalah melalui suku bunga.

Pasar menilai Warsh belum cukup kuat untuk mengubah ekspektasi kebijakan dalam waktu dekat. Setelah data inflasi dirilis, pelaku pasar memang memangkas peluang kenaikan FFR pada pertemuan Juli dan kembali memperkirakan siklus pengetatan moneter akan berlangsung lebih berhati-hati.

Ekspektasi tersebut membuat yield obligasi pemerintah AS cenderung stabil, dan indeks dolar AS kehilangan sebagian penguatannya, berada di level 100,88.

Bagi rupiah, kondisi ini dapat jadi sentimen positif. Tekanan dolar AS berkurang, berpotensi membawa mata uang negara berkembang kembali menguat, termasuk rupiah. Namun, ruang penguatan rupiah bukan tanpa batas. Pasar masih akan mencermati sikap Warsh yang belum sepenuhnya menutup peluang pengetatan kebijakan jika inflasi kembali naik.

Penguatan mata uang kawasan termasuk rupiah ke depan, tak cuma ditentukan oleh meredanya ekspektasi kenaikan FFR, tapi juga konsistensi penurunan inflasi AS. Jika tekanan harga kembali naik lantaran harga energi melonjak atau ada gangguan rantai pasok global seperti sebelumnya, maka peluang pelonggaran moneter menjadi tertunda. Skenario ini berpotensi mendorong dolar AS kembali kuat dan menekan mata uang Asia, termasuk rupiah.

Di dalam negeri, ruang penguatan rupiah juga akan ditentukan oleh ketahanan fundamental ekonomi domestik, mengingat sejumlah indikator masih menunjukkan perlambatan sehingga belum cukup kuat untuk menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Per Akhir Mei, Utang Luar Negeri Indonesia Rp8.043,2 Triliun

Rabu, 15 Juli 2026 10:29 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115070/per-akhir-mei-utang-luar-negeri-indonesia-rp8-043-2-triliun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) merilis data Utang Luar Negeri (ULN) per akhir Mei. Terjadi kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, meski secara umum masih terjaga.

Pada Rabu (15/7/2026), BI mengumumkan ULN Indonesia per akhir Mei ada di US\$ 444,4 miliar. Dengan asumsi kurs US\$ 1 sama dengan Rp 18.099 sebagaimana Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) 14 Juli, maka ULN Indonesia setara Rp 8.043,2 triliun.

ULN Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan posisi April yang sebesar US\$ 439,8 miliar. Pertumbuhan ULN pada Mei adalah 2,1% year-on-year (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan April yaitu 2% yoy.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," sebut laporan BI.

Posisi ULN pemerintah pada Mei sebesar US\$ 217,3 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7%. ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,5%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Adapun ULN swasta pada Mei tercatat sebesar US\$ 195,9 miliar atau mengalami kontraksi 0,1% yoy. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9% pada Mei dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," imbuh laporan BI.

Rupiah Ditutup Menguat, Terbaik di Asia

Rabu, 15 Juli 2026 15:29 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115146/rupiah-ditutup-menguat-terbaik-di-asia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Rabu (15/7/2026) dengan penguatan paling tajam di antara mata uang Asia sebesar 0,14% ke posisi Rp18.067/US\$.

Penguatan terhadap rupiah ditopang oleh meredanya sentimen eksternal dengan terpankasnya ekspektasi pelaku pasar terhadap langkah hawkish bank sentral Amerika Serikat (AS) dengan data inflasi AS yang melandai. Di samping, sentimen positif dari disematkannya label BBB yang termasuk layak investasi (investment grade) dengan prospek stabil dari S&P Global Ratings untuk pasar obligasi Indonesia.

Sebagian mata uang Asia menguat. Selain rupiah, peso Filipina juga menguat bersama yuan China, yuan offshore, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia yang lebih terbatas.

Sebaliknya, baht Thailand mencatat pelemahan 0,24%, disusul won Korea Selatan, dolar Taiwan, rupee India dan dolar Hong Kong, juga yen Jepang yang lebih terbatas.

Penguatan yang terjadi pada yuan disokong oleh bank sentral China, People's Bank of China (PBOC) yang menaikkan referensi harian mata uang tersebut dengan kenaikan terbatas. Akan tetapi, ekonomi China tumbuh lebih lambat dari perkiraan dan mencatat laju pertumbuhan terlemah dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Sementara penguatan terhadap rupiah tertopang oleh aliran dana masuk ke pasar obligasi, setelah S&P Global Ratings mengklasifikasikan pasar surat utang ke dalam prospek stabil.

Melansir data Bloomberg, yield tenor 1 tahun tercatat turun 5,7 bps ke 7,14%, disusul tenor 2 tahun ikut turun 5,8 bps menjadi 7,2%. Begitu juga tenor 5 tahun mengalami penurunan yield 2,9 bps jadi 7,2%, dan tenor 10 tahun turun 1,8 bps jadi 7,24%.

Di satu sisi, hari ini juga Bank Indonesia (BI) kembali menggelar operasi moneter dalam bentuk lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan mengantongi Rp15 triliun. Penawaran yang masuk dalam lelang ini juga tercatat naik 0,66% dari lelang sebelumnya menjadi Rp30,66 triliun dari posisi sebelumnya Rp30,46 triliun.

Meski demikian, penguatan rupiah masih menghadapi sejumlah tantangan. Perlambatan ekonomi China berpotensi menekan prospek ekspor Indonesia, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

Di sisi lain, arah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat serta dinamika geopolitik global masih berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan internasional

Dengan begitu, apresiasi rupiah kali ini lebih tepat dibaca sebagai hasil kombinasi membaiknya sentimen global dan tetap terjaganya kredibilitas kebijakan domestik, bukan sebagai sinyal bahwa tekanan terhadap nilai tukar yang telah sepenuhnya berakhir.

Utang Luar Negeri: Pemerintah & BI Agresif, Swasta Menahan Diri

Rabu, 15 Juli 2026 16:36 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115147/utang-luar-negeri-pemerintah-bi-agresif-swasta-menahan-diri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) pada Mei 2026 mencapai US\$444,4 miliar, meningkat 2,1% dari posisi periode sama tahun lalu di US\$435,33 miliar. Jika menggunakan kurs JISDOR Selasa (14/7/2026), utang itu setara dengan Rp8.043,2 triliun.

Kenaikan ini menggambarkan bahwa pembiayaan dari luar negeri masih jadi salah satu penyangga aktivitas ekonomi domestik. Namun, kenaikan ULN edisi Mei masih belum mencerminkan meningkatnya optimisme dunia usaha, sebab peran pemerintah masih terlihat lebih besar dalam menopang perekonomian, kala sektor swasta masih bersikap hati-hati.

Hal ini terlihat dari kontributor kenaikan ULN yang berasal dari pemerintah yang mencatatkan pertumbuhan 3,7%, menjadi US\$217,3 miliar, sementara itu posisi ULN Bank Indonesia juga terkerek naik menjadi US\$31,14 miliar.

Sebaliknya, ULN swasta masih mengalami kontraksi 0,1% menjadi US\$195,9 miliar, meskipun penurunannya lebih kecil daripada kontraksi 0,5% pada April 2026. Dengan kata lain, pembiayaan luar negeri Indonesia masih berasal dari sektor publik, bukan dari aktivitas investasi sektor swasta.

Peningkatan ULN kali ini masih didorong oleh meningkatnya aliran dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Hal tersebut menunjukkan pemerintah masih mengandalkan pembiayaan melalui pasar obligasi global untuk mendukung kebutuhan APBN dan menjaga keberlanjutan program prioritas.

Sementara itu, kenaikan ULN Bank Indonesia (BI) sejalan dengan meningkatnya kepemilikan investor asing terhadap instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dari data ULN tercatat, posisi utang BI naik sekitar US\$1,6 miliar atau 5,42% dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi US\$31,14 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi BI yang menarik lebih banyak dana asing ke instrumen SRBI sebagai bagian dari operasi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sepanjang kuartal I hingga kuartal II 2026, tekanan terhadap rupiah akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian global membuat BI harus melakukan intervensi lebih intensif. Salah satu caranya adalah meningkatkan daya tarik SRBI melalui kenaikan imbal hasil. Bahkan pada lelang hari ini (15/7/2026), yield SRBI tenor 12 bulan telah mencapai sekitar 7,66%.

Di satu sisi, strategi ini berhasil menjaga arus modal asing tetap masuk sehingga membantu stabilitas rupiah. Namun di sisi lain, tingginya yield tersebut juga mencerminkan biaya stabilisasi yang semakin mahal, karena bank sentral harus menawarkan premi yang lebih tinggi agar investor tetap berkenan menempatkan dananya di aset berdenominasi rupiah.

Jika pemerintah semakin agresif berutang, sektor swasta mengambil langkah sebaliknya. Kontraksi ULN swasta yang masih berlanjut menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan sepertinya belum memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk meningkatkan pembiayaan baru. Kontraksi terutama berasal dari kelompok financial corporation alias lembaga keuangan yang masih mengalami penurunan ULN sebesar 0,8%, meski jauh membaik dari posisi April yang mengalami kontraksi 5%.

Di sisi lain, komposisi ULN swasta masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan. Namun dominasi sektor-sektor tersebut belum diikuti oleh leverage perusahaan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa korporasi sepertinya masih lebih memilih memperkuat posisi neraca dan menjaga likuiditas ketimbang mengambil risiko dalam melakukan ekspansi investasi baru.

Situasi ini memang sejalan dengan prospek permintaan domestik yang belum cukup kuat, di tengah biaya pendanaan yang masih relatif tinggi dengan kenaikan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75%.

Komposisi Utang

Jika dilihat, struktur ULN Indonesia masih bisa dikatakan cukup sehat. Sekitar 84,3% setara dengan US\$372,81 miliar merupakan utang berdurasi jangka panjang. Sehingga, risiko pembiayaan ulang lebih rendah. Selain itu, baik pemerintah maupun sektor swasta jadi punya ruang lebih longgar untuk mengelola arus kas pembayaran pokok utang.

Selain itu, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih berada di kisaran 29,9% jauh di bawah banyak negara berkembang lainnya. Hal ini menunjukkan posisi Indonesia dalam hal keberlanjutan utang masih relatif terjaga.

Dari sisi pemanfaatannya, struktur utang pemerintah bisa dikatakan masih relatif produktif. Sebanyak 22% dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara, 20,6% digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, kemudian diikuti oleh sektor pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi 11,5%, dan transportasi serta perdagangan sebesar 8,5%.

Setidaknya, komposisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang masih dipakai untuk mendukung pembangunan manusia yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka lebih panjang.

Laporan Keuangan Kemenkeu 2025 Raih Opini WTP dari BPK

Rabu, 15 Juli 2026 17:35 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/115014/laporan-keuangan-kemenkeu-2025-raih-opini-wtp-dari-bpk/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 Tahun 2025. Opini ini yang ke-15 kali berturut-turut diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

Penyusunan laporan keuangan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan setiap menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran maupun pengguna barang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kementerian/lembaga.

“Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola Kemenkeu dengan kompleksitas dan nilai transaksi sangat material yang tersebar di 14 unit eselon I dengan 871 satker termasuk 7 satuan kerja Badan Layanan Umum,” kata Purbaya, Rabu (15/7/2026).

Secara lengkap, Laporan Keuangan BA 015 Tahun 2025 terdiri atas lima komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh komponen tersebut disusun secara andal, akurat, transparan, dan relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Purbaya menyebutkan lima program utama yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, serta Program Dukungan Manajemen.

Capaian tersebut antara lain tercermin pada terjaganya rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam batas aman sebesar 2,81%, rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 11,55%, Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara yang mencapai 95,12, serta rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51% yang menunjukkan rasio berada dalam batas aman.

Di sisi pelayanan publik, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan juga tetap terjaga pada level 4,7, mencerminkan kualitas layanan Kementerian Keuangan yang terus dipertahankan.

Menutup paparannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR untuk sinergi yang selama ini telah terjalin baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Ekonom: Penguatan PNBP Ditopang Penerimaan Sumber Daya Alam

Rabu, 15 Juli 2026 18:50 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115158/ekonom-penguatan-pnbp-ditopang-penerimaan-sumber-daya-alam/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksi hingga akhir tahun 2026 mendatang realisasi pendapatan negara bisa mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.

Penerimaan tersebut berasal dari perpajakan diproyeksi mencapai Rp2.631,4 triliun atau hanya sebesar 97,7% dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, target kepabeanan serta cukai sebesar Rp320,6 triliun atau 95,4% dari target.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru akan menjadi penopang dengan target penerimaan dari pos ini yang diproyeksikan mencapai Rp575,1 triliun atau 125,2% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kini, PNBP memang menjadi bantalan utama pendapatan negara. Apalagi, pada semester I-2026, realisasinya mencapai sekitar Rp271 triliun atau 59% dari target APBN dan tumbuh 21,6% secara tahunan.

“Penguatan ini terutama ditopang penerimaan sumber daya alam, PNBP kementerian/lembaga, dan badan layanan umum. PNBP migas sendiri mencapai Rp60,7 triliun atau tumbuh 24,3%, didukung kenaikan ICP [Indonesian Crude Price], lifting gas, dan pelemahan rupiah,” kata Rizal kepada Bloomberg Technoz, Rabu (15/7/2026).

Meski demikian, menurut Rizal ketergantungan terhadap PNBPN ini tetap perlu dibaca secara hati-hati karena penerimaan ini sangat sensitif terhadap harga komoditas, lifting migas, kurs, dan kebijakan pengelolaan SDA.

Apalagi saat ini meski pendapatan negara mencatatkan kenaikan, tetapi belanja naik lebih cepat menjadi Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu, sehingga defisit melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB.

“Artinya, PNBPN membantu menjaga APBN dalam jangka pendek, tetapi tidak boleh menggantikan kebutuhan memperkuat basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan membangun sumber penerimaan yang lebih stabil serta berkelanjutan,” katanya.

Utang Luar Negeri Swasta Susut Jadi US\$ 193,2 Miliar, Didominasi Sektor Ini

Rabu, 15 Juli 2026 12:21 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-swasta-susut-jadi-us-1932-miliar-didominasi-sektor-ini>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta masih melanjutkan kontraksi.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mencatat, ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar US\$ 193,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% year on year (yoy), meski lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4% yoy.

“Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations),” tutur Denny dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Adapun ULN kelompok peminjam lembaga keuangan secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalan, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8% terhadap total ULN swasta.

ULN Pemerintah Bertambah Capai US\$ 217,3 Triliun di Mei 2026, BI Ungkap Pendorongnya

Rabu, 15 Juli 2026 10:43 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/uln-pemerintah-bertambah-capai-us-2173-triliun-di-mei-2026-bi-ungkap-pendorongnya>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah mencapai US\$ 217,3 miliar pada Mei 2026, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% year on year (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso membeberkan, perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

Denny menambahkan, melihat kondisi utang tersebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN,” tutur Denny dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0% dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 20,6%, Jasa Pendidikan 16,2%, Konstruksi 11,5%, serta Transportasi dan Perdagangan 8,5%.

Adapun hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.

Lebih lanjut, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Denny.

Target Pertumbuhan Ekonomi RI Kian Berat, Laju PDB Diproyeksi Melambat

Rabu, 15 Juli 2026 05:31 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/target-pertumbuhan-ekonomi-ri-kian-berat-laju-pdb-diproyeksi-melambat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah semakin berat untuk dicapai.

Sejumlah lembaga internasional dan pelaku pasar kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia masih akan bertahan di kisaran 5% dalam beberapa tahun ke depan, bahkan cenderung melambat setelah 2026.

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings dalam laporan terbarunya memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia tumbuh 5,1% pada 2026.

Namun, pada periode 2027-2029, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat dengan rata-rata hanya 4,9% per tahun.

Menurut S&P, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh belanja fiskal pemerintah dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara serta nilai ekspor.

Pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor mineral dan sumber daya alam juga dinilai dapat memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah.

Meski begitu, S&P mengingatkan perubahan kebijakan yang berlangsung cepat serta ketidakpastian implementasinya berisiko mengganggu kepercayaan investor.

Kondisi tersebut dapat memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun pasar keuangan domestik.

Dalam laporannya, S&P mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% secara tahunan pada kuartal I-2026. Kenaikan itu terutama didorong oleh peningkatan belanja selama musim liburan dan pencairan anggaran pemerintah yang lebih besar.

Namun, perbaikan di sektor riil tersebut belum tercermin di pasar keuangan. Sepanjang semester I-2026, kapitalisasi pasar saham Indonesia tercatat menyusut lebih dari 30%, sementara nilai tukar rupiah melemah sekitar 7% terhadap dolar AS.

Menurut S&P, perbedaan kinerja tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian, baik dari faktor global maupun domestik.

Proyeksi S&P sejalan dengan pandangan sejumlah lembaga internasional lainnya. International Monetary Fund (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026 dan meningkat tipis menjadi 5,1% pada 2027.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) masih memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% pada 2026, sama seperti proyeksi yang dirilis pada April lalu.

Di sisi lain, Mirae Asset Sekuritas Indonesia justru merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mirae kini memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8% pada 2026 dan 4,9% pada 2027, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya masing-masing sebesar 5% dan 5,1%.

Rangkaian proyeksi tersebut menunjukkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan masih tertahan di kisaran 5%, sehingga target pertumbuhan yang lebih tinggi akan membutuhkan dorongan baru di tengah ketidakpastian global dan domestik.

Taj Yasin Dorong TMMD Jangkau Desa Terpencil, Buka Akses dan Peluang Ekonomi

Kamis, 15 Juli 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/taj-yasin-dorong-tmmd-jangkau-desa-terpencil-buka-akses-dan-peluang-ekonomi/>

CILACAP — Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengarahkan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), terus menjangkau desa-desa terpencil. Melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat, TMMD diharapkan menghadirkan peluang ekonomi baru bagi warga.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menjadi Inspektur Upacara Pembukaan TMMD Reguler ke-129 dan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026, di Lapangan Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Rabu (15/7/2026). Program tersebut dilaksanakan serentak di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah hingga 13 Agustus 2026.

Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu, lokasi pelaksanaan TMMD dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.

“TMMD kita laksanakan di daerah-daerah yang memang masih membutuhkan, daerah terpencil yang aksesnya masih kurang. Yang dibangun adalah jalan ekonomi di pedesaan untuk para petani,” ujarnya.

Wagub menegaskan, pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar membangun fasilitas fisik, melainkan menghadirkan negara hingga ke pelosok.

“Ini bentuk kehadiran pemerintah. Kehadiran TNI, Polri, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten, benar-benar harus dirasakan masyarakat,” katanya.

Tahun ini, TMMD digelar serentak di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan desa, sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Semoga masyarakat benar-benar merasakan makna kemerdekaan, melalui pembangunan yang nyata,” ucapnya.

Dalam amanatnya, Gus Yasin mengatakan, TMMD telah menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat selama lebih dari empat dekade. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai mampu mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah yang terisolasi, tertinggal, maupun kawasan perkotaan yang masih kumuh.

“Desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Ketika desa maju, masyarakat menjadi lebih sejahtera,” beber wagub.

Dia menjelaskan, pelaksanaan TMMD 2026 didukung sinergi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah kabupaten/ kota, dengan dukungan anggaran Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp33,2 miliar.

Gus Yasin juga meminta pemerintah daerah dan Satgas TMMD mengintegrasikan berbagai program prioritas selama pelaksanaan kegiatan, mulai dari ketahanan pangan, pertanian terpadu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan penurunan stunting, penguatan posyandu, penanaman pohon, hingga rehabilitasi tempat ibadah.

Menurutnya, TMMD juga menjadi sarana membangun kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai kegiatan nonfisik.

“Kita tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga membangun mental masyarakat. Ketahanan keluarga harus diperkuat,” tegasnya.

Komandan Kodim 0703/Cilacap Letkol Inf Aryudha Sakti mengatakan, Desa Bingkeng dipilih sebagai lokasi TMMD, karena masyarakat selama ini membutuhkan akses jalan yang lebih baik untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi.

“Wilayah Bingkeng menjadi prioritas karena masyarakat membutuhkan akses jalan. Dengan adanya TMMD, masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintah daerah maupun TNI,” ujarnya.

Di Desa Bingkeng, TMMD akan membangun jalan sepanjang 800 meter dengan lebar empat meter, talud sepanjang 120 meter, serta satu unit jembatan yang menghubungkan jalur ekonomi warga.

Selain itu, dilakukan rehabilitasi dua unit RTLH melalui dukungan CSR Baznas, serta penanaman 1.000 pohon.

Program tersebut juga dilengkapi berbagai kegiatan nonfisik, seperti pelayanan kesehatan, KB gratis, pengobatan gratis, pembuatan dokumen kependudukan, penyuluhan bela negara, pencegahan stunting dan pernikahan dini, ketahanan keluarga antinarkoba, pelatihan kewirausahaan, tata boga, hingga budidaya ikan.

Dandim mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD. Bahkan sebelum pembukaan, warga bersama personel TNI telah bergotong royong menyiapkan pekerjaan di lapangan.

Pada kesempatan itu, Wagub Taj Yasin juga menyerahkan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp22,731 miliar, untuk 215 titik kegiatan.

Selain itu diserahkan Bantuan Keuangan TMMD sebesar Rp984 juta untuk empat tahap pelaksanaan TMMD di Kabupaten Cilacap, serta Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk rehabilitasi RTLH senilai Rp5,14 miliar. (Humas Jateng)*ul

Wagub: TMMD percepat pembangunan desa dan akses ekonomi

Rabu, 15 Juli 2026 23:57 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/638633/wagub-tmmd-percepat-pembangunan-desa-dan-akses-ekonomi>

Cilacap (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa

sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.

Saat membuka TMMD Reguler Ke-129 dan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Rabu, ia mengatakan program yang digelar serentak di 35 kabupaten/kota hingga 13 Agustus 2026 tersebut menyasar wilayah yang masih membutuhkan akses pembangunan.

"TMMD kita laksanakan di daerah-daerah yang memang masih membutuhkan, daerah terpencil yang aksesnya masih kurang. Yang dibangun adalah jalan ekonomi di perdesaan untuk para petani," katanya.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar membangun jalan dan jembatan, tetapi juga menghadirkan negara melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok.

"Ini bentuk kehadiran pemerintah. Kehadiran TNI, Polri, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten benar-benar harus dirasakan masyarakat," katanya menegaskan.

Menurut dia, TMMD yang telah berlangsung lebih dari empat dekade menjadi bukti kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, daerah terisolasi, tertinggal, dan kawasan yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur.

Ia mengatakan desa merupakan fondasi pembangunan nasional sehingga kemajuan desa akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah dan Satgas TMMD mengintegrasikan berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, pertanian terpadu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan penurunan stunting, penguatan posyandu, penanaman pohon, hingga rehabilitasi tempat ibadah.

"Kita tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga membangun mental masyarakat. Ketahanan keluarga harus diperkuat," kata Taj Yasin.

Pelaksanaan TMMD tahun 2026 didukung sinergi TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan anggaran Pemprov Jateng sebesar Rp33,2 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menyerahkan bantuan keuangan sarana dan prasarana perdesaan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp22,731 miliar untuk 215 titik kegiatan, bantuan keuangan TMMD sebesar Rp984 juta untuk empat tahap pelaksanaan TMMD di Kabupaten Cilacap, serta bantuan keuangan pemerintah desa untuk rehabilitasi RTLH senilai Rp5,14 miliar.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0703/Cilacap Letnan Kolonel Infanteri Aryudha Sakti mengatakan Desa Bingkeng dipilih sebagai lokasi TMMD karena masyarakat membutuhkan akses jalan yang lebih baik untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Menurut dia, sasaran fisik TMMD di desa tersebut meliputi pembangunan jalan sepanjang 800 meter dengan lebar empat meter, talut sepanjang 120 meter, serta satu unit jembatan yang menghubungkan jalur ekonomi warga.

Selain itu, juga dilakukan rehabilitasi dua unit RTLH melalui dukungan CSR Baznas dan penanaman 1.000 pohon.

Program itu juga dilengkapi kegiatan nonfisik berupa pelayanan kesehatan, keluarga berencana (KB) gratis, pengobatan gratis, pembuatan dokumen kependudukan, penyuluhan bela negara, pencegahan

stunting dan pernikahan dini, ketahanan keluarga antinarkoba, pelatihan kewirausahaan, tata boga, serta budidaya ikan.

Aryudha mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bahkan sebelum pembukaan, warga bersama personel TNI telah bergotong royong menyiapkan berbagai pekerjaan sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Bank Jateng Bersinergi Dorong UMKM Magelang Naik Kelas

Rabu, 15 Juli 2026 15:32 WIB

<https://www.harianjogja.com/r-1263547/bank-jateng-bersinergi-dorong-umkm-magelang-naik-kelas>

MAGELANG – Bank Jateng menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam momentum Magelang Fair 2026, Bank Jateng bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (DPPKUM) Kota Magelang, serta berkolaborasi dengan perbankan dan KPP Pratama Magelang untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi para pelaku usaha lokal.

Langkah ini selaras dengan arahan Wali Kota Magelang saat membuka Magelang Fair 2026, yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan dan mendorong produk-produk lokal agar bisa "naik kelas." Melalui sinergi lintas sektor ini, Bank Jateng hadir secara aktif untuk membuka akses permodalan yang lebih luas, mudah, dan produktif bagi para pelaku usaha.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang, Bapak Dwi Andy Setiyawan, menyampaikan bahwa kehadiran Bank Jateng dalam sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada pelaku UMKM mengenai kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan baik modal kerja maupun investasi melalui kredit KUR.

Selain itu, kolaborasi bersama KPP Pratama Magelang juga menjadi sarana edukasi penting mengenai kepatuhan pajak yang berjalan beriringan dengan perkembangan usaha.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Analis Bank Jateng, Ibu Anneke Kristina, menekankan bahwa dukungan Bank Jateng kepada pelaku usaha tidak berhenti setelah proses pencairan modal selesai.

Bank Jateng berkomitmen untuk terus mendampingi dan menggandeng para pelaku UMKM binaan, salah satunya dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pameran strategis.

"Kami sangat senang dan bangga melihat UMKM bisa ikut berkembang bersama Bank Jateng. Selain fasilitas pembiayaan seperti KUR, kami juga memiliki banyak produk perbankan lainnya yang siap mendukung operasional dan kelancaran transaksi usaha para pelaku UMKM sehari-hari," ujar Ibu Anneke Kristina di sela-sela kegiatan.

Melalui edukasi dan pendampingan intensif di Magelang Fair 2026 ini, Bank Jateng berharap para pelaku UMKM di Kota Magelang tidak lagi menghadapi kendala dalam mengakses permodalan maupun teknologi transaksi.

Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Jateng siap menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan skala usaha masyarakat serta mempercepat akselerasi ekonomi daerah. (Advertorial)

MBG Jalan Lagi, Harga Daging Ayam di Pasar Banyumas Meroket

Rabu, 15 Jul 2026 12:35 WIB

Anang Firmansyah

<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8574972/mbg-jalan-lagi-harga-daging-ayam-di-pasar-banyumas-meroket>

Banyumas - Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang menyebut kenaikan harga dipicu karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir.

Pedagang ayam di Pasar Wage Purwokerto, Parti (56), mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp 35 ribu hingga Rp 36 ribu per kilogram. Padahal saat MBG libur, harga ayam berada di kisaran Rp 30 ribu per kilogram.

"Naik sejak Jumat minggu kemarin, naiknya enggak dikit-dikit, tapi langsung jebret ke Rp 36 ribu per kilogram. Bahkan kemarin sempat ke Rp 40 ribu terus turun. Padahal pas MBG libur harganya Rp 30 ribu," kata Parti saat ditemui wartawan di lapaknya, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena tingginya permintaan ayam untuk kebutuhan MBG. Meski begitu, sebagai pedagang kecil dia tidak ikut menjadi pemasok program tersebut.

"Mintanya banyak, jadinya barang atau ayamnya tinggal dikit. Sekarang buat saya sudah nutup setoran buat juragan sudah mending," ujarnya.

Parti mengaku dalam sehari hanya mampu menjual sekitar 15 kilogram ayam potong. Jumlah itu pun tidak menentu karena bergantung pada banyaknya pembeli yang datang ke pasar.

"Sehari tidak menentu, kadang besar kecilnya. Kadang orang belinya sekilo, dua kilo, kadang cuma seperempat. Saya bukan pedagang besar yang jualan dalam pesanan besar," terang dia.

Ia menuturkan berjualan ayam eceran memiliki risiko tersendiri karena dagangan harus habis dijual pada hari yang sama. Oleh karena itu, dirinya memilih tidak mengawetkan ayam menggunakan es.

"Kalau misal jualan hari ini ya harus habis. Karena saya tidak pernah mengawetkan ayam pakai es," jelasnya.

Keluhan serupa disampaikan pedagang ayam di Pasar Jatilawang, Muji Lestari. Ia menyebut harga ayam potong saat ini mencapai Rp 36 ribu per kilogram, naik Rp 4 ribu per kilogram saat MBG libur.

"Harga ayam saat ini adalah Rp 36 ribu, waktu libur MBG di angka Rp 32 ribu. MBG tidak beli di pedagang kecil, belinya di bos besar. Dulu pernah ada yang cari katanya buat ayam filet tapi cuma sekali," kata Muji.

Ia mengatakan harga ayam memang berfluktuasi. Harga terendah berada di kisaran Rp 30 ribu per kilogram, sedangkan pada kondisi tertentu dapat mencapai Rp 40 ribu per kilogram.

"Harga standar paling murah Rp 30 ribu, paling mahal Rp 40 ribu, kalau Lebaran Rp 45 ribu," katanya.

Dalam kondisi normal, Muji mengaku mampu menjual sekitar 20 kilogram ayam setiap hari. Saat pembeli sepi, penjualannya turun menjadi sekitar 15 kilogram per hari, sedangkan ketika ramai bisa mencapai 25 kilogram per hari.

Krisis Hormuz, Bos IEA Wanti-wanti Ekonomi Global dalam Bahaya

Kamis, 16 Juli 2026 14:50 WIB

Joe Carroll and David Gura

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115251/krisis-hormuz-bos-iea-wanti-wanti-ekonomi-global-dalam-bahaya/2>

Bloomberg, Ekonomi global akan menghadapi tantangan baru jika konflik yang menghambat Selat Hormuz tidak diselesaikan dalam hitungan minggu, kata Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol.

“Pasar sedang gelisah” dan bergulat dengan “ketidakpastian besar” karena eskalasi serangan dari kedua belah pihak yang mengancam akan mengganggu pengiriman minyak, pupuk, gas alam, dan kargo lainnya melalui jalur perairan utama tersebut, kata Birol dalam wawancara di sela-sela Forum Keamanan Aspen di Colorado pada Rabu.

Lalu lintas kapal yang terlihat melalui selat tersebut telah berkurang secara signifikan selama seminggu terakhir karena kapal-kapal diserang dan AS kembali memberlakukan blokade terhadap pelayaran Iran.

Muatan minyak Arab Saudi dari dalam Teluk Persia telah anjlok akibat serangan terhadap kapal tanker raksasa, sementara Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyatakan bahwa jalur air tersebut masih terlalu berbahaya bagi kapal komersial untuk melintas.

“Jika Selat Hormuz tetap tertutup, kita mungkin kembali menghadapi kesulitan bagi perekonomian global, termasuk di kawasan ini, negara-negara berkembang, dan Asia,” kata Birol. “Bukan hitungan bulan, melainkan hitungan minggu” setelah itu selat tersebut harus “sepenuhnya terbuka, tanpa syarat,” ujarnya.

Meski gangguan pada pasokan energi dan bahan baku dari Teluk Persia telah berdampak pada perekonomian negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang, negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan India jauh lebih rentan terhadap pemutusan pasokan tersebut, kata Birol.

KTT Trump-Xi September, AS Bakal Evaluasi Komitmen Dagang China

Kamis, 16 Juli 2026 12:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115240/ktt-trump-xi-september-as-bakal-evaluasi-komitmen-dagang-china/2>

Bloomberg, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS) Jamieson Greer meredam ekspektasi terkait agenda pertemuan puncak yang sangat dinantikan antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ia mengindikasikan bahwa pertemuan pada bulan September mendatang akan lebih difokuskan untuk mengevaluasi komitmen yang berjalan, alih-alih merumuskan kesepakatan dagang baru.

“Ini akan menjadi momen untuk melakukan evaluasi, menegaskan kembali hubungan, serta memastikan China mematuhi apa yang telah mereka sepakati,” ujar Greer dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television. “Itulah yang sebenarnya kami harapkan dari pertemuan ini.”

Utusan perdagangan AS tersebut menambahkan bahwa dirinya mengharapkan adanya penilaian mendalam terkait komitmen China untuk menunda pembatasan ekspor logam tanah jarang selama satu tahun. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tarif yang dicapai pada Oktober tahun lalu. Greer menyebut kepatuhan Beijing saat ini “belum sempurna”, namun kedua negara terus bekerja sama untuk menjembatani celah-celah kekurangan tersebut.

Berdasarkan laporan Bloomberg, jajaran pejabat di pemerintahan Trump sebenarnya mulai merasa frustrasi dengan kegagalan Beijing dalam mematuhi poin-poin kesepakatan yang dipahami oleh pihak Washington. Kendati demikian, Washington saat ini dinilai enggan menegur China secara terbuka di depan publik demi menghindari risiko terseretnya kembali kedua negara ke dalam pusaran perang dagang.

Sektor farmasi menjadi titik krusial lainnya yang memicu ketegangan. China merupakan pemasok utama untuk bahan aktif farmasi (API) serta bahan baku hulu yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi obat-obatan. Tercatat, hampir 700 jenis obat-obatan di AS menggunakan setidaknya satu bahan baku utama yang sumbernya hanya bisa didapatkan dari China.

Greer memaparkan bahwa saat ini sudah ada 17 perusahaan farmasi yang berkomitmen untuk memindahkan kembali basis manufaktur mereka ke wilayah AS.

“Kami sangat memikirkan hal ini,” ungkap Greer. “Ini benar-benar kritis karena pada akhirnya, jika Anda sampai kehilangan akses terhadap pasokan bahan baku dari China, hal itu dapat memicu tantangan yang sangat besar bagi basis manufaktur kami sendiri.”

Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Xi Jinping di AS sekitar tanggal 24 September, tepat beberapa pekan sebelum kesepakatan peredaan ketegangan dagang kedua negara berakhir. Pertemuan ini menyusul agenda KTT pada bulan Mei lalu yang menjadi upaya kedua belah pihak untuk menstabilkan hubungan bilateral.

Greer menegaskan bahwa "hasil utama yang wajib dicapai" dari pertemuan mendatang adalah menjaga stabilitas hubungan jangka panjang antara AS dan China.

“China merupakan tantangan besar bagi AS dalam banyak hal, namun kami ingin memastikan bahwa kami mampu menghadirkan stabilitas,” pungkasnya.

Negosiasi Buntu, AS Desak Vietnam Perketat Aturan Dagang

Kamis, 16 Juli 2026 10:30 WIB

Francesca Stevens dan Nguyen Dieu Tu Uyen

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115223/negosiasi-buntu-as-desak-vietnam-perketat-aturan-dagang/2>

Bloomberg, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mendesak Vietnam untuk mengambil tindakan lebih tegas terkait hambatan non-tarif, kerja sama keamanan ekonomi, serta perlindungan kekayaan intelektual (HAKI). Desakan ini mencuat di tengah alatnya proses kesepakatan dagang kedua negara yang hingga kini masih terus diperdebatkan setelah berbulan-bulan negosiasi berjalan.

“Jika kami berniat mengirimkan sebagian peralatan teknologi tinggi kami kepada mereka, mereka harus menyelaraskan aturan dengan kami terkait kontrol ekspor dan hal-hal lainnya,” ujar Jamieson Greer dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV di sela-sela forum Aspen Security Forum, hari Kamis (16/7).

“Kami ingin negara lain menghapus tarif, serta hambatan non-tarif yang selama ini membatasi ekspor barang dan jasa AS, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ekonomi,” tambah Greer. Sementara terkait standar kekayaan intelektual, ia menegaskan, “Aturan yang dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan kami, kami ingin mereka juga mematuhi.”

Sejumlah pejabat Vietnam dilaporkan tengah berada di Washington pekan ini untuk menjalani babak negosiasi berikutnya. Hanoi berupaya keras mengamankan kesepakatan dagang tersebut di tengah bergulirnya tiga penyelidikan sekaligus oleh pihak AS yang menargetkan praktik perdagangan negara itu.

Secara lebih luas, pemerintahan Donald Trump tengah berambisi untuk memperkecil defisit perdagangan AS dengan Vietnam yang telah mencapai US\$178 miliar. Di saat yang sama, Washington terus mendesak Hanoi untuk memperketat pengawasan terhadap barang-barang asal China yang sengaja dialihkan jalurnya melalui Vietnam.

“Ada praktik pengiriman ilegal murni di mana mereka mengirim barang (dari China) ke Vietnam, lalu menempelkan stiker 'Made-in-Vietnam' di sana,” ungkap Greer, mengulangi tuduhan yang kerap dilontarkan oleh pihak Washington. Bulan lalu, pemerintah Hanoi mengklaim bahwa pihaknya tengah memberantas praktik penipuan semacam itu.

Dalam laporan bulan April mengenai pelanggaran kekayaan intelektual, Vietnam menjadi negara pertama dalam 13 tahun terakhir yang masuk dalam daftar "Prioritas Negara Asing" (Priority Foreign Country)—sebuah status pelanggaran paling serius di bawah Undang-Undang Perdagangan AS. Negara ini juga menghadapi penyelidikan atas dugaan kelebihan kapasitas produksi, serta masuk dalam daftar 60 negara yang dinilai gagal menindak impor barang hasil kerja paksa.

Pihak Vietnam sendiri sebenarnya telah berupaya meredam kekhawatiran AS dengan menutup situs-situs pembajakan daring dan meningkatkan razia terhadap para penjual barang tiruan. Kendati demikian, tas desainer dan pakaian palsu terpantau masih marak dijual di pasar-pasar tradisional mereka, begitu pula dengan layanan streaming ilegal yang masih sangat mudah diakses. Pihak Hanoi juga membela rekam jejak mereka dalam mengatasi isu kerja paksa, sekaligus menolak temuan AS yang merekomendasikan penerapan tarif impor sebesar 12,5%.

Negosiasi dagang antara kedua negara tersebut saat ini berada dalam posisi buntu akibat tuntutan AS yang meminta aturan asal-usul barang (rules of origin) yang lebih ketat, serta tindakan yang lebih tegas untuk mencegah transit barang-barang China. Perbedaan pandangan terkait akses pasar dan hambatan non-tarif juga memperkeruh suasana. Sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat mengancam akan menjatuhkan tarif hingga 40% bagi barang-barang yang terbukti transit lewat negara ketiga (transshipped), meski definisi teknis mengenai hal tersebut belum diputuskan secara final.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah bertransformasi menjadi pusat manufaktur utama bagi sejumlah merek raksasa asal AS. Nike, misalnya, memproduksi lebih dari separuh produk sepatunya di Vietnam. Sementara itu, Apple juga berencana untuk mengembangkan kategori produk barunya di negara tersebut, termasuk rangkaian perangkat elektronik rumah tangga pintar mereka.

Gubernur The Fed Kevin Warsh Tegaskan Bebas dari Intervensi Trump

Kamis, 16 Juli 2026 08:00 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115205/gubernur-the-fed-kevin-warsh-tegaskan-bebas-dari-intervensi-trump/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump—yang selama ini gencar menuntut pemangkasan suku bunga AS—tidak pernah mencoba mengintervensi bank sentral. Ia juga menyatakan bahwa upaya intervensi semacam itu tidak akan pernah berhasil dilakukan.

“Saya tidak ingin membahas percakapan yang saya lakukan dengan presiden,” ujar Warsh pada hari Rabu (15/7), saat menjawab pertanyaan dalam sesi dengar pendapat dengan Komite Perbankan Senat mengenai apakah ia sempat berkomunikasi dengan Trump sejak memimpin The Fed.

“Saya akan menyampaikan apa yang telah saya katakan berulang kali kepada presiden dan kepada menteri keuangan: Mereka telah memilih orang yang independen untuk melakukan pekerjaan yang independen, dan itulah hal yang akan saya lakukan,” tegas Warsh.

Hanya berselang beberapa jam setelah komentar Warsh, Trump kembali menegaskan pandangannya terkait suku bunga acuan. “Saya ingin melihat suku bunga turun. Saya ingin negara kita memiliki tingkat suku bunga terendah di mana pun di dunia,” ujar Trump. Di saat yang sama, ketika ditanya dalam wawancara dengan Fox Business mengenai apakah ia memberikan ruang gerak bagi bos baru The Fed tersebut, Trump menjawab, “Ya, saya berikan—saya sangat menghormatinya.”

“Jangan lupa, dia juga memiliki jajaran anggota dewan,” tambah Trump. “Mungkin saja posisinya mereka bersikap tidak bersahabat.”

Dalam persidangan tersebut, saat didesak oleh Senator dari kubu Demokrat, Chris Van Hollen, Warsh menyatakan bahwa sang presiden “tidak pernah—baik sebelum saya menjabat posisi ini, maupun sebelum saya mengangkat sumpah jabatan—mencoba memengaruhi jalannya kebijakan moneter.” Ia menambahkan, “Dan jika dia mencoba melakukannya, saya akan tetap menundukkan kepala dan fokus menyelesaikan pekerjaan saya.”

Warsh juga menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti preseden atau aturan yang sudah berlaku sebelumnya terkait transparansi dalam mempublikasikan agenda kerja resminya.

Warsh ditunjuk langsung oleh Trump untuk mengisi posisi tertinggi di The Fed dan resmi menjabat pada bulan Mei lalu. Pada pertemuan kebijakan perdananya bulan lalu, bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan, menyusul tingginya tekanan harga yang dipicu oleh pecahnya perang di Iran.

Mengikuti Preseden

Dalam sidang tersebut, Van Hollen menyatakan berharap Warsh akan “mengikuti preseden.” Mantan Gubernur The Fed Jerome Powell, yang kini masih menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed, sebelumnya mengabaikan desakan Trump untuk memangkas suku bunga dan secara terbuka mengkritik upaya pemerintah memberikan tekanan politik kepada bank sentral.

Trump bulan lalu kembali menegaskan pandangannya bahwa “kita membutuhkan suku bunga yang rendah.”

Namun, para ekonom dan pelaku pasar memperkirakan The Fed justru mungkin perlu menaikkan suku bunga tahun ini seiring tekanan inflasi yang dipicu kenaikan harga energi dan pesatnya pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Inflasi IHP AS Juni Melandai, Tekanan Bagi The Fed Berkurang

Kamis, 16 Juli 2026 05:40 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115195/inflasi-ihp-as-juni-melandai-tekanan-bagi-the-fed-berkurang/2>

Bloomberg, Indikator utama untuk inflasi harga produsen di Amerika Serikat (AS) tercatat lebih rendah dari perkiraan pada bulan Juni. Data ini mengindikasikan bahwa tekanan harga di tingkat hulu sempat mereda tepat sebelum eskalasi terbaru pada perang Iran kembali memanas.

Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) yang dirilis hari Rabu (15/7), Indeks Harga Produsen (IHP) yang mengecualikan komponen makanan dan energi meningkat 4,7% secara tahunan (year-on-year). Angka ini berada di bawah perkiraan rata-rata dalam survei Bloomberg. Secara keseluruhan, perlambatan inflasi IHP ini sebagian besar didorong oleh anjloknya harga bensin sebesar 12%.

Laporan tersebut menunjukkan adanya pendinginan harga yang merata di beberapa kategori utama, yang dalam beberapa bulan terakhir sempat melonjak akibat dampak perang. Situasi ini kemungkinan besar memberikan ruang lebih bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menunda kenaikan suku bunga acuan—terlebih setelah laporan terpisah pada hari Selasa juga menunjukkan inflasi harga konsumen yang jinak di bulan Juni. Kendati demikian, dengan kembali memanasnya konflik di Timur Tengah, kondisi ini diperkirakan hanya akan berlangsung singkat.

Menyusul rilis laporan tersebut, kontrak berjangka (futures) indeks saham AS terpantau menguat sementara imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury) bergerak turun. Pergerakan ini terjadi seiring para investor yang mulai mengurangi spekulasi mereka terkait adanya kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Juli ini.

Di sisi lain, Gubernur The Fed Kevin Warsh dalam kesaksiannya di hadapan Kongres pada hari Selasa, telah mewanti-wanti agar semua pihak tidak terburu-buru menyatakan "tugas telah selesai" hanya karena adanya laporan yang menguntungkan pada harga konsumen tersebut.

Berdasarkan data hari Rabu, harga energi merosot 6,4% di bulan Juni dibandingkan bulan sebelumnya, sementara harga transportasi dan pergudangan juga mencatatkan penurunan. Meski demikian, tarif angkutan truk terpantau tetap tinggi akibat lonjakan biaya bahan bakar serta menyusutnya jumlah pengemudi di tengah kebijakan keras Donald Trump terhadap imigran.

Sementara itu, harga pangan mencatatkan penurunan untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir. Komponen ini umumnya terus menanjak sepanjang tahun akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari cuaca buruk, imbas perang, hingga pemberlakuan tarif dagang.

Beberapa komponen dalam IHP juga menjadi perhatian khusus bagi The Fed karena data tersebut akan dimasukkan ke dalam indikator inflasi favorit mereka, yaitu indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE). Hasil dari kategori-kategori tersebut terpantau variatif: tarif tiket pesawat melonjak 1,9%, namun biaya manajemen portofolio tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan bulan Mei.

Biro Analisis Ekonomi (BEA) dijadwalkan akan merilis data harga PCE bulan Juni, bersama dengan data pendapatan dan pengeluaran masyarakat pada tanggal 30 Juli mendatang.

Indikator tekanan inflasi pada tahap awal proses produksi—yakni harga barang-barang olahan untuk permintaan antara yang mengecualikan makanan dan energi—naik 0,6%, yang merupakan kenaikan terkecil sejak awal tahun. Sementara itu, harga resin dan bahan plastik yang menjadi bahan baku utama bagi berbagai macam barang konsumsi, mencatatkan penurunan untuk pertama kalinya di tahun 2026 ini.

Laporan ini juga menunjukkan adanya pelandaian pada dua sumber tekanan inflasi baru tahun ini, yaitu sektor pusat data (data center) dan produksi pertahanan. Harga komponen elektronik dan aksesorisnya turun untuk bulan kedua berturut-turut, sementara harga yang terkait dengan belanja pemerintah untuk sektor pertahanan merosot 2,2%.

Rincian dalam laporan IHP mengenai margin jasa perdagangan grosir dan eceran juga terus dicermati. Data ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan-perusahaan menyerap biaya terkait tarif dagang atau memilih melemparkannya langsung kepada konsumen. Pada bulan Juni, margin ini terpantau sedikit pulih setelah sempat mengalami penurunan besar di bulan Mei.

Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan banyak kebijakan tarif dagang Trump awal tahun ini, pemerintah AS dikabarkan tengah mencari cara lain untuk mengenakan pajak pada barang impor. AS baru-baru ini juga memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian perdagangan jangka panjang dengan Kanada dan Meksiko, dan memilih opsi peninjauan tahunan. Langkah ini dinilai dapat memicu ketidakpastian tambahan bagi dunia usaha dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam laporan terpisah pada hari Rabu, indeks kondisi bisnis umum untuk aktivitas pabrik dari Federal Reserve Bank of New York menunjukkan pemulihan pada bulan Juli. Kenaikan ini ditopang oleh meningkatnya pesanan baru dan pengiriman barang, serta indeks ketenagakerjaan yang melonjak ke level tertinggi sejak Desember 2022. Di sisi lain, indikator harga yang dibayarkan terpantau melandai namun tetap berada di level tinggi, sementara prospek untuk harga yang dibayarkan dan harga yang diterima terpantau menurun.

Geser Singapura, Hongkong Jadi Investor Terbesar Q2-2026

Kamis, 16 Juli 2026 19:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115322/geser-singapura-hongkong-jadi-investor-terbesar-q2-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan terjadi perubahan peta investasi asing pada kuartal II-2026. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Hong Kong menggeser Singapura sebagai sumber investasi asing terbesar ke Indonesia.

Rosan menjelaskan pergeseran tersebut sejalan dengan meningkatnya investasi dari China yang masuk melalui Hong Kong.

"Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, China investasinya lebih agresif melalui Hong Kong, sehingga tempat pertama dari investasi di kuartal kedua ini ditempati oleh Hong Kong," kata Rosan saat menyampaikan laporan realisasi investasi semester I-2026 di Istana Kepresidenan, Kamis (16/7/2026).

Dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, kata dia, Indonesia merupakan negara yang stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial. Ketika investor asing menanamkan modalnya dalam jangka panjang, maka faktor kuncinya adalah kestabilan negara.

“Jadi mereka juga ingin memastikan, ‘Oh kita investasi bukan jangka waktu 1, 2, 5, 10 tahun tapi sebisanya selamanya mungkin.’ Sehingga faktor kestabilan menjadi hal kunci utama,” ungkapnya.

Profil 3 Perusahaan Singapura Pembeli Listrik Hijau dari RI

Tak hanya itu, investor asing juga menilai ketika investasi di RI, maka tingkat pengembalian atau internal rate of return sangat dapat diterima. Kemudian Rosan juga menyebut bahwa investor asing menilai pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

Dia mencontohkan saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, investor memandang RI memberikan kepastian dari sisi perizinan.

“Itu sangat diapresiasi oleh para asosiasi di luar negeri dan di dalam negeri, dan juga para potensial investor dan investor yang sudah ada. Karena itu memberikan kepastian dari segi perizinan. ‘Oh sekarang kalau mereka apply izin A, mereka tahu misalnya di 10 hari ya 10 hari izinnya keluar,” jelas dia.

“Minta 15 hari ya 15 hari izinnya keluar. Karena sekarang kami di Menteri Investasi, kita kan sebetulnya sebagai window saja nih. Perizinan masuk ke kami, kami serahkan kepada kementerian A misalnya untuk diproses kemudian kembali ke kami baru kami keluarkan izinnya.”

Sepanjang April hingga Juni 2026, investasi dari Hong Kong mencapai US\$5,5 miliar. Posisi berikutnya ditempati Singapura sebesar US\$4,2 miliar, disusul China sebesar US\$1,7 miliar, Jepang US\$900 juta, dan Malaysia US\$700 juta.

Dia menambahkan, setelah lima negara tersebut, daftar investor terbesar masih diisi Korea Selatan, Belanda, dan sejumlah negara lainnya.

Realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 terjadi pertumbuhan realisasi investasi sebesar 7,2%.

Rosan memerinci, realisasi investasi terbagi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun (49,8%) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun (50,2%).

Sementara secara spasial realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp502,8 triliun (49,8%) atau terjadi pertumbuhan 7,7% secara tahunan. Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau tumbuh 6,7% secara tahunan.

Selanjutnya lima besar lokasi realisasi investasi secara keseluruhan antara PMA dan PMDN pada semester I-2026 adalah DKI Jakarta sebesar Rp173,6 triliun (17,2%), Jawa Barat sebesar Rp138,1 triliun (13,7%), Jawa Timur Rp72,7 triliun (7,2%); Sulawesi Tengah Rp68,7 triliun (6,8%); dan Banten Rp66,3 triliun (6,6%).

Ekonomi Inggris Tumbuh 0,1% pada Mei, Didorong Sektor Jasa

Kamis, 16 Juli 2026 13:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-inggris-tumbuh-01-pada-mei-didorong-sektor-jasa>.

KONTAN.CO.ID - LONDON. Ekonomi Inggris tumbuh 0,1% pada Mei, sesuai dengan perkiraan median dalam jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom, didukung pertumbuhan sektor jasa.

Mengutip Reuters, Kamis (16/7/2026), data resmi Kantor Statistik Nasional menunjukkan produksi industri dan konstruksi keduanya mengalami kontraksi selama Mei 2026.

Dalam tiga bulan hingga Mei, output ekonomi tumbuh sebesar 0,7%, sedikit melambat dari angka yang direvisi naik menjadi 0,8% dalam tiga bulan hingga April.

Baca Juga: Uber Merilis Tawaran Akuisisi Delivery Hero Senilai US\$ 14,8 Miliar

"Ekonomi mencatat pertumbuhan yang kuat dalam tiga bulan hingga Mei, meskipun lajunya sedikit melambat karena dua bulan terakhir menunjukkan gambaran yang lebih lemah," kata Liz McKeown, direktur statistik ekonomi ONS.

"Sektor jasa mendorong pertumbuhan selama tiga bulan tersebut dengan pemrograman komputer dan periklanan kembali memimpin, sementara industri farmasi yang seringkali fluktuatif juga berkinerja baik," tambahnya.

Potensi Pertumbuhan Ekonomi Jepang Bisa Ubah Strategi Investasi Dana Pensiun Negara

Kamis, 16 Juli 2026 11:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/potensi-pertumbuhan-ekonomi-jepang-bisa-ubah-strategi-investasi-dana-pensiun-negara>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang membuka peluang untuk meninjau kembali komposisi investasi dana pensiun negara seiring meningkatnya potensi pertumbuhan ekonomi akibat perubahan arah kebijakan pemerintah.

Namun, pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi keputusan investasi yang diambil pengelola dana pensiun.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi alokasi aset Government Pension Investment Fund (GPIF), dana pensiun terbesar di dunia.

"Potensi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi yang menjadi dasar dalam peninjauan portofolio dan alokasi aset," ujar Katayama dalam sidang parlemen, Kamis (16/7/2026).

Katayama menjelaskan GPIF secara rutin meninjau portofolio dan komposisi investasinya setiap tahun fiskal.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi, terutama ketika pemerintah tengah mendorong investasi sebagai motor utama pertumbuhan.

Pernyataan Katayama pada pekan lalu yang mendorong dana pensiun, termasuk GPIF, untuk meningkatkan investasi pada aset domestik sempat memicu penguatan yen dan obligasi pemerintah Jepang.

Meski demikian, sejumlah sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan Jepang belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk mengubah target alokasi aset dana pensiun negara.

Pemerintah hanya membuka peluang untuk mengoptimalkan investasi pada aset domestik dalam batas fleksibilitas yang telah ditetapkan.

Saat ini, GPIF membagi portofolionya secara seimbang, masing-masing 25% pada obligasi domestik, obligasi luar negeri, saham domestik, dan saham luar negeri.

Khusus untuk obligasi domestik, GPIF diperbolehkan melakukan penyesuaian hingga enam poin persentase dari target alokasi.

Katayama kembali menegaskan pemerintah akan terus mendorong investasi yang lebih besar pada aset keuangan Jepang, tetapi keputusan investasi tetap berada di tangan pengelola dana pensiun.

"Pemerintah tidak dapat mengintervensi atau memaksa dana pensiun untuk mengubah investasinya," tegasnya.

Dalam sidang yang sama, Katayama juga menyoroti pelemahan yen yang diperdagangkan di kisaran 162 yen per dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, penguatan daya saing ekonomi Jepang akan membantu menjaga kepercayaan terhadap mata uang yen.

Ia menambahkan pemerintah siap mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi pergerakan nilai tukar yang dinilai berlebihan atau mengganggu stabilitas pasar valuta asing.

Mata Uang Asia Bergerak Variatif, Rupiah Masih Jadi yang Terlemah Sepanjang 2026

Kamis, 16 Juli 2026 09:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-bergerak-variatif-rupiah-masih-jadi-yang-terlemah-sepanjang-2026>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang di kawasan Asia cenderung terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (16/7/2026) pagi.

Pelaku pasar masih mencermati perkembangan inflasi AS serta eskalasi konflik di Timur Tengah yang memengaruhi prospek kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Mengutip Reuters, hingga pukul 02.03 GMT, mayoritas mata uang Asia hanya bergerak tipis terhadap dolar AS.

Yen Jepang menguat 0,06% ke 162,09 per dolar AS, sementara dolar Taiwan naik 0,09% ke 32,160 per dolar AS.

Ringgit Malaysia juga menguat 0,12% ke 4,071 per dolar AS, yuan China naik tipis 0,01% ke 6,769 per dolar AS, dan peso Filipina menguat 0,02% ke 61,630 per dolar AS.

Sebaliknya, dolar Singapura melemah 0,05% ke 1,289 per dolar AS. Won Korea Selatan turun 0,06% ke 1.487,9 per dolar AS, baht Thailand melemah 0,13% ke 33,585 per dolar AS, sedangkan rupiah Indonesia turun tipis 0,03% ke Rp 18.065 per dolar AS.

Sementara itu, rupee India tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level 96,255 per dolar AS.

Rupiah masih mencatat pelemahan terdalam tahun ini

Secara kumulatif sejak awal tahun (year to date), rupiah masih menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar di antara mata uang utama Asia.

Nilai tukar rupiah telah melemah sekitar 7,72% dibandingkan posisi akhir 2025.

Di bawah rupiah, rupee India melemah 6,63%, baht Thailand turun 6,36%, peso Filipina melemah 4,59%, yen Jepang turun 3,36%, won Korea Selatan melemah 3,25%, dolar Taiwan turun 2,25%, ringgit Malaysia melemah 0,37%, dan dolar Singapura turun 0,26%.

Berbeda dengan mata uang lainnya, yuan China justru menjadi mata uang Asia yang mencatat penguatan terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, dengan kenaikan sekitar 3,23% dibandingkan posisi akhir 2025.

Bank Sentral Korea Selatan Naikkan Suku Bunga ke 2,75%, Sesuai Ekspektasi Pasar

Kamis, 16 Juli 2026 08:12 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-korea-selatan-naikkan-suku-bunga-ke-275-sesuai-ekspektasi-pasar>

KONTAN.CO.ID - Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea/BoK) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,75% pada Kamis (16/7/2026).

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan diambil untuk menopang nilai tukar won yang melemah serta menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Dewan Kebijakan Moneter Bank of Korea yang beranggotakan tujuh orang memutuskan menaikkan suku bunga repo tujuh hari sebesar 25 bps.

Keputusan tersebut telah diperkirakan oleh hampir seluruh ekonom yang disurvei Reuters. Dari 37 ekonom yang mengikuti jajak pendapat, hanya satu responden yang memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga.

Kenaikan suku bunga ini mencerminkan langkah tegas Bank of Korea dalam memperkuat stabilitas nilai tukar won yang berada di bawah tekanan sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi yang masih bertahan pada level tinggi.

Gubernur Bank of Korea Shin Hyun Song dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Kamis untuk menjelaskan lebih rinci alasan di balik keputusan kebijakan moneter tersebut serta pandangan bank sentral terhadap prospek ekonomi dan inflasi Korea Selatan.

Naik 6,9% YoY, Investasi Hilirisasi Semester I-2026 Capai Rp300 T

Kamis, 16 Juli 2026 18:20 WIB

Dovana Hasiana

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115317/naik-6-9-yoy-investasi-hilirisasi-semester-i-2026-capai-rp300-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menyebut bahwa realisasi investasi sebesar Rp 300,1 triliun atau naik sebesar 6,9% secara year-on-year.

Rosan mengatakan bahwa total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai sebesar 29,7%. Sebagai informasi, realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun.

Rosan menyebut hal ini memperlihatkan tren peningkatan yang cukup signifikan lantaran pada tahun 2023 yang lalu, kontribusi yang berasal dari sektor hilirisasi hanyalah sebesar 24 hingga 25% terhadap seluruh investasi

“Jadi trennya kita melihat hilirisasi ini ke depannya baik dalam negeri maupun luar negeri, kita ketahui ada beberapa proyek hilirisasi yang dikerjakan juga oleh Danantara sehingga akan meningkatkan peran dari investasi di hilirisasi yang memang pada saat ini masih didominasi oleh bidang mineral,” kata Rosan dalam Keterangan Pers Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kantor Presiden, Kamis (16/7/2026).

Kemudian, apabila melihat dari capaian kuartal II-2026 saja, realisasi hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik sebesar 5,7% secara yoy.

Rosan juga mengatakan bahwa saat ini kontributor utama investasi di bidang hilirisasi ini di semester I-2026 ini dipimpin oleh sektor mineral yakni sebesar Rp 206 triliun yang terutama disumbang oleh komoditas nikel, bauksit dan tembaga.

Sementara, kontribusi dari sektor perkebunan dan kehutanan mencapai Rp54,4 triliun yang disumbang dari komoditas kelapa sawit sebesar Rp29,5 triliun dan kayu log sebesar Rp16,3 triliun

Komoditas minyak dan gas bumi berkontribusi terhadap hilirisasi sebesar Rp35,4 triliun kemudian sektor perikanan dan kelautan 3,8 triliun.

“Jadi di mana nanti kita juga mendorong di segi bidang perkebunan dan kehutanan dan juga hilirisasi dari minyak dan gas bumi, termasuk perikanan dan kelautan,” tambahnya.

Apabila dilihat dari lokasinya, investasi hilirisasi yang berasal dari luar Jawa tercatat lebih besar yakni sebesar 75,7% atau senilai Rp227,3 triliun.

Sulawesi Tenggara menjadi kontributor investasi hilirisasi tertinggi sebesar Rp56,1 triliun disusul Maluku Utara dengan kontribusi sebesar Rp53,9 triliun. Sementara peringkat ketiga ditempati Jawa Barat dengan menyumbang investasi sebesar Rp25,8 triliun.

Capai 49,5% Target, Realisasi Investasi Paruh I 2026 Rp1.010 T

Kamis, 16 Juli 2026 16:30 WIB

Dovana Hasiana

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115304/capai-49-5-target-realisasi-investasi-paruh-i-2026-rp1-010-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani memaparkan bahwa realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun.

“Pada semester pertama, atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026, pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun, atau peningkatan 7,2% year-on-year,” kata Rosan dalam Keterangan Pers Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kantor Presiden, Kamis (16/7/2026).

Rosan menyebut bahwa hal tersebut masih sejalan dengan target investasi yang dibidik oleh pemerintah yakni sebesar Rp 2.041,3 triliun atau sebesar 49,5% dari total target tahunan.

Sementara itu, untuk triwulan pertama realisasi investasi mencapai Rp498,8 triliun atau 24,4% dari total target investasi, semenetara pada triwulan kedua, nilai investasi mencapai Rp 511,8 triliun atau 25,1% dari total target.

CEO Danantara tersebut menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja yang berasal dari investasi pada semester I-2026 tersebut mencapai 1.448.862 orang, dengan peningkatan sekitar peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Beber Alasan Kenaikan

Ia mengklaim bahwa peningkatan investasi tersebut terjadi berkat komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan para investor. Menurut Rosan, investor memahami adanya risiko yang mungkin terjadi dalam berinvestasi.

“Tetapi selama risiko itu adalah risiko yang mereka bilang itu terukur atau calculated risk, mereka bisa build in pada saat mereka investasi, risiko itu mereka masukkan, oh kemudian yield-nya atau keuntungan investasi yang mereka harapkan itu berapa besar,” sebutnya.

Rosan juga menyebut bahwa investor memandang Indonesia relatif lebih stabil apabila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia.

“[Stabil dari segi] pertumbuhan ekonomi, stabil juga dari segi politik dan sosialnya,” kata Rosan.

Apalagi menurutnya, investasi berbentuk Foreign Direct Investment bersifat jangka panjang, sehingga investor juga ingin memastikan bahwa stabilitas perekonomian dapat terjadi selama mungkin.

Kedua, Rosan menyebut bahwa investor melihat Indonesia memiliki tingkat pengembalian yang dapat diterima oleh investor asing dengan tingkat Internal Rate of Return (IRR) yang sesuai dengan harapan investor.

Ketiga Rosan menyebut bahwa investor mengetahui jika Indonesia memiliki upaya untuk meningkatkan iklim investasinya dengan beberapa hal yang dilakukan pemerintah.

Rosan menyontohkan pada bulan Oktober yang lalu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang mereduksi ketidakpastian bagi para investor terutama terkait dari segi perizinan.

“Dan itu sangat diapresiasi oleh para asosiasi di luar negeri dan di dalam negeri,” kata Rosan.

Tak Capai Target, Defisit APBN 2025 Capai 2,81%

Kamis, 16 Juli 2026 15:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115260/tak-capai-target-defisit-apbn-2025-capai-2-81/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sepanjang tahun 2025. Hal ini lebih lebar ketimbang target APBN melalui Perpres No 201 tahun 2024 yakni sebesar 2,53%.

Defisit tersebut tercermin dari selisih pendapatan yang sebesar Rp2.765,13 triliun dan belanja yang tercatat sebesar Rp3.621,31 triliun, sehingga dalam APBN 2025 defisit mencapai Rp670,34 miliar. Sebagai perbandingan, defisit APBN di tahun 2024 tercatat sebesar Rp509 miliar atau sekitar 2,37% terhadap PDB.

Sementara, defisit keseimbangan primer juga melonjak tajam ke angka negatif Rp155,94 triliun atau menyentuh 246,23% dari patokan awal.

“Untuk membiaya defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, di sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp742,73 triliun atau 120,54% terhadap target APBN 2025 yang hanya sebesar Rp 616,19 miliar.

Sebagai informasi, di tahun 2025, realisasi pendapatan negara dan hibah hanya menyentuh Rp2.765,13 triliun atau 92,01% dari target yang dipatok dalam APBN 2025 sebesar Rp3.005,12 triliun.

Hal ini utamanya disumbang oleh penerimaan perpajakan yang hanya terealisasi Rp2.218,17 triliun atau 89,05% dari target. Purbaya beralasan, upaya optimalisasi pendapatan negara sangat menantang akibat faktor eksternal dan internal.

"Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, tetapi juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke BP Danantara," jelas Purbaya.

Meskipun demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target dengan realisasi Rp541,53 triliun atau 105,43% dari target sebesar Rp513,63 triliun.

Lesunya penerimaan berdampak ke pengeluaran yakni realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.435,46 triliun atau 94,87% dari pagu APBN sebesar Rp3.621,31 triliun. Realisasi tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp849,04 triliun.

Kemenkeu Selektif Tambah Transfer ke Daerah, Jaga Celah Fiskal

Kamis, 16 Juli 2026 14:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115291/kemenkeu-selektif-tambah-transfer-ke-daerah-jaga-celah-fiskal/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan akan menyeleksi ketat tambahan transfer ke daerah (TKD) imbas sejumlah keluhan pemerintah daerah di Indonesia yang mengaku kekurangan dana untuk belanja pegawai.

Sejumlah daerah dilaporkan kesulitan untuk menggaji pegawai karena keterbatasan fiskal akibat penurunan alokasi dana TKD. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan ada 39 pemerintah daerah yang tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Saat ini kami juga melihat daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yang kami petakan satu per satu, mana daerah yang memang kesulitan cash. Dan memang ada rencana kita akan melakukan penambahan,” kata Suahasil dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Dia menyebut penyeleksian ketat tersebut masih berproses. Dia berharap tambahan TKD nantinya dapat menyelesaikan kesulitan di daerah khususnya mengenai belanja pegawai.

Akan tetapi, Suahasil belum bisa memerinci berapa jumlah tambahan TKD yang telah dianggarkan Kementerian Keuangan tersebut. Sejalan dengan hal itu, dia berharap ruang fiskal nantinya akan tetap terjaga.

“Ini tentu masih dalam proses, tapi kita berharap bahwa ini akan bisa mengurangi kesulitan yang ada, tapi akan lebih selektif. Jadi memang akan ada lebih selektif,” ucap Suahasil.

“Kita berharap nanti ketika kita melakukan ini, celah fiskal dan yang lainnya tetap menjadi perhatian.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan menambah TKD, terutama bagi daerah dengan belanja pegawai yang melebihi 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Purbaya, pemerintah akan melakukan relaksasi terhadap batas belanja pegawai yang kini dipatok pada batas 30% tersebut. Selain itu Purbaya menyebut bahwa pemerintah juga akan menganggarkan tambahan belanja ke daerah.

“Untuk daerah-daerah yang belanja pegawainya diatas 30% nanti ada yang signifikan kan, Nanti kan belanjanya, pembagiannya pasti kurang kan. Nanti Kementerian Dalam Negeri akan mengatur supaya ada belanja tambahan dari pusat di sana,” kata Purbaya ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, Purbaya belum mau menyebut nominal yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini.

“Kan belum selesai APBN ya. Nanti kementerian dalam negeri dan kita [Kemenkeu] mungkin akan berdiskusi ya,” sebut Purbaya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi TKD di sepanjang semester I-2026 sebesar Rp357,4 Triliun. Angka tersebut sudah mencapai 51,6% dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh APBN yakni sebesar Rp693 triliun.

Realisasi TKD pada semester I-2026 ini dipengaruhi oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan presentase yang lebih tinggi meski lebih rendah secara nominal, Realisasi Dana Alokasi Umum yang lebih tinggi, realisasi Dana Alokasi Khusus yang tinggi, realisasi dana desa dan realisasi transfer lainnya.

Kemenkeu mencatat terdapat penyesuaian pagu TKD pada APBN 2026 sebesar Rp13,3 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp693 triliun sehingga menjadi Rp706,3 triliun, termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatera dan tambahan dana otonomi khusus Papua.

Menguat 3 Hari Beruntun, Rupiah Kini di Bawah Rp18.000/US\$

Kamis, 16 Juli 2026 15:16 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115297/menguat-3-hari-beruntun-rupiah-kini-di-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan spot Kamis (16/7/2026) dengan penguatan 0,45% ke posisi Rp17.985/US\$, menggenapi apresiasi selama tiga hari beruntun.

Penguatan rupiah sejalan dengan pergerakan sebagian besar mata uang Asia. Won Korea Selatan menguat paling tajam 0,84%, disusul rupiah, lalu baht Thailand, ringgit Malaysia.

Sementara, penguatan terbatas terjadi pada yen Jepang, peso Filipina, dolar Singapura dan yuan China. Sebaliknya, hanya dolar Taiwan dan rupee India yang melemah, bersama dolar Hong Kong.

Penguatan rupiah hari ini tertopang berbagai sentimen positif. Pertama, S&P Ratings yang masih menyematkan label layak investasi (investment grade) BBB dengan prospek stabil.

Kedua, kabar bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat stabilisasi harga pangan dan menjaga laju inflasi sesuai target bank sentral di tengah ancaman gangguan pasokan akibat El-Nino, juga turut memberi angin segar bagi pergerakan rupiah siang ini.

Ketiga, adanya kabar bahwa realisasi investasi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 7,1% secara tahunan, mencapai Rp511,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp257,7 triliun.

Secara kumulatif, realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, naik 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan PMA sebesar Rp507,6 triliun.

Kombinasi sentimen domestik yang positif itu cukup memperkuat keyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini.

Keberlanjutan aliran investasi, terjaganya kredibilitas fiskal melalui peringkat utang yang tetap stabil, serta komitmen pemerintah menjaga inflasi menjadi faktor yang menopang permintaan terhadap aset domestik, termasuk rupiah.

Meski demikian, arah pergerakan rupiah ke depan sepertinya masih akan dipengaruhi dinamika eksternal, terutama ekspektasi kebijakan suku bunga Federal Reserve, pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS), serta perkembangan harga komoditas global.

Di tengah tekanan eksternal yang kemungkinan masih berlanjut dan berpotensi membatasi penguatan terhadap rupiah, perhatian investor sepertinya kini beralih pada agenda Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pekan depan.

Pasar akan mencermati apakah BI masih akan mempertahankan bias kebijakan moneter yang ketat, setelah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 basis poin (bps) hanya dalam sebulan.

Ekonom Wanti-wanti Soal Kenaikan Utang Luar Negeri RI

Kamis, 16 Juli 2026 12:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115237/ekonom-wanti-wanti-soal-kenaikan-utang-luar-negeri-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah ekonom mewanti-wanti rasio utang luar negeri (ULN) yang terus meningkat terhadap produk domestik bruto (PDB). Pasalnya peningkatan utang tersebut dihitung dalam dolar Amerika Serikat (AS).

Diketahui, rasio ULN Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 29,9% pada Mei dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN. Sementara pada April posisinya di 29,6% dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5%.

“Rasio utang luar negeri terhadap PDB yang berada di sekitar 29,9% juga perlu dibaca dengan hati-hati karena dihitung dalam dolar AS. Saat rupiah melemah, nilai PDB dalam dolar ikut turun sehingga rasio bisa naik meski tidak ada tambahan utang,” kata ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet ketika dihubungi, Kamis (16/7/2026).

“Karena itu saya lebih melihat indikator kemampuan membayar, seperti debt service ratio dan rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa, karena utang pada akhirnya dibayar dari arus kas, bukan dari besarnya PDB,” tambahnya.

Dalam kaitan itu, Yusuf menyoroti hal yang menjadi persoalan bukan pada besarnya utang, melainkan kapasitas fiskal. Saat tax ratio masih rendah, beban bunga terus meningkat. Jika penerimaan negara tidak tumbuh lebih cepat, maka ruang fiskal akan semakin sempit.

Karena itu, fokus pemerintah seharusnya memperkuat penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, menjaga disiplin fiskal agar kebutuhan utang baru tidak terus bertambah, serta mengelola profil jatuh tempo utang secara hati-hati.

Bagaimanapun, dia menilai posisi ULN Indonesia relatif masih berada dalam batas yang aman. Pertumbuhannya sekitar 2,1% secara tahunan sehingga belum menunjukkan ekspansi utang yang agresif.

Namun demikian, dia menyoroti komposisi ULN tersebut lantaran kenaikan utang terutama berasal dari sektor publik, sementara utang swasta justru terus menurun.

“Ini mencerminkan neraca korporasi yang lebih sehat, tetapi juga menunjukkan investasi swasta belum cukup kuat sehingga pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan,” terang Yusuf.

Menahan Laju Penerbitan Utang Baru

Dihubungi terpisah, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menganggap rasio utang RI di 2025 terhadap PDB yang masih sekitar 40% belum otomatis menjamin ruang fiskal tetap aman.

Menurutnya, risiko utama justru muncul dari biaya utang yang meningkat lebih cepat daripada penerimaan. Yield SBN tenor tiga sampai sepuluh tahun telah naik sekitar 66–96 basis poin sejak April,

rupiah melemah lebih dari 5%, dan beban bunga sudah berada di sekitar ambang 15% penerimaan yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat.

Dia menilai pemerintah perlu menahan laju penerbitan utang baru yang tidak mendukung kapasitas produksi, memperbaiki penerimaan pajak tanpa menekan kelompok berpendapatan rendah, dan menjaga defisit tetap kredibel.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Keuangan juga perlu melindungi belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, transfer ke daerah, serta perlindungan sosial dari pemotongan seragam.

Dia menegaskan, penyesuaian belanja harus menyasar subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek berdaya ungkit rendah, belanja birokrasi, dan program yang tumpang tindih. Pemerintah harus memperkuat manajemen jatuh tempo, melakukan prefunding secara terukur, dan menghindari konsentrasi refinancing pada tahun tertentu.

“Jika pemerintah terus membiarkan pembayaran bunga tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, APBN akan kehilangan fungsi pembangunan dan berubah menjadi mesin pembayaran kewajiban masa lalu,” jelasnya.

Seleksi Ketat Proyek

Syafruddin berpendapat prioritas utama pemerintah harus dimulai dari perluasan basis pajak dan seleksi ketat proyek yang dibiayai utang, karena dua kebijakan ini memperbaiki sisi pendapatan sekaligus kualitas penggunaan dana.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup memperpanjang tenor atau memperbesar investor domestik jika utang baru tetap membiayai proyek yang tidak menghasilkan pertumbuhan, devisa, efisiensi logistik, atau penerimaan negara.

Setiap proyek berbasis utang, kata dia, perlu melewati uji manfaat ekonomi, arus kas, risiko kurs, dampak fiskal, serta kemampuan membayar kembali secara langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membatasi utang valas yang tidak memiliki lindung nilai atau sumber penerimaan valas, terutama pada BUMN dan proyek strategis. Pendalaman basis investor domestik jangka panjang melalui dana pensiun, asuransi, dan investor ritel tetap penting agar pasar SBN tidak terlalu bergantung pada bank dan modal asing.

Dia menegaskan perpanjangan tenor dapat mengurangi risiko jatuh tempo, tetapi tenor panjang dengan kupon mahal hanya menunda tekanan jika penerimaan tidak membaik.

“Urutan kebijakan yang paling rasional ialah memperluas basis pajak, memperketat seleksi proyek, mengendalikan utang valas, memperbesar investor domestik jangka panjang, lalu mengoptimalkan tenor,” ucap dia.

“Pemerintah harus mengukur keberhasilan pengelolaan utang dari kemampuan utang tersebut menciptakan pertumbuhan dan pendapatan baru, bukan hanya dari keberhasilan menjaga rasio utang di bawah batas hukum.”

Diketahui, ULN Indonesia per akhir Mei ada di US\$444,4 miliar. Dengan asumsi kurs US\$1 sama dengan Rp18.099 sebagaimana Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) 14 Juli, maka ULN Indonesia setara Rp8.043,2 triliun.

ULN Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan posisi April yang sebesar US\$ 439,8 miliar. Pertumbuhan ULN pada Mei adalah 2,1% year-on-year (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan April yaitu 2% yoy.

Diwanti-wanti S&P

Persoalan utang juga mendapat perhatian dari S&P Global Ratings. Lembaga pemeringkat global tersebut memproyeksikan utang pemerintah naik sebesar 2,9% terhadap PDB setiap tahunnya selama 2026-2029.

Merespons proyeksi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak. Dia menilai prospek penerimaan pajak positif, lantaran dalam paruh pertama 2026 yang tumbuh 24,6% yoy.

"Itu prestasi yang luar biasa [penerimaan pajak]. Kalau saya perbaiki sampai akhir tahun, saya yakin ke depan pertumbuhan utang kita akan di bawah prediksi S&P," ungkap Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026).

Tak hanya itu, dia mengaku bakal menjaga tingkat level beban bunga utang pemerintah ke depan agar tidak meningkat agresif sejalan dengan kenaikan imbal hasil. Menurutnya, strategi yang akan ditempuh yakni diversifikasi pembiayaan utang salah satunya dengan denominasi renminbi yuan.

Strategi diversifikasi ini akan dilakukan melalui penerbitan SBN valuta asing (valas) berdenominasi yuan yakni Panda Bond. Obligasi ini awalnya direncanakan terbit awal Juli 2026 di daratan China, namun diundur hingga akhir Juli.

Kunci untuk menjawab kekhawatiran soal rasio pembayaran bunga utang pemerintah ke penerimaan terletak pada penerimaan. Dia mengklaim, saat ini level rasio tersebut masih berada sekitar 14% karena penerimaan daerah juga ikut dihitung.

Oleh sebab itu, tidak hanya mendorong penerimaan pajak di pusat, dia menyatakan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga penerimaan pemda turut terdongkrak

"Kita di bawah 14% kalau enggak salah. Batasnya 15%. Jadi aman, tetapi kami akan perhatikan itu dari waktu ke waktu. Yang jelas anggaran saya aman. Prospek ekonomi Indonesia bagus ke depan. Anda semua enggak usah takut. Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan baik," terang Purbaya.

Ekonomi Kuartal II-2026 Diprediksi Hanya Tumbuh 4,9%, Ini Alasannya

Kamis, 16 Juli 2026 20:33 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-kuartal-ii-2026-diprediksi-hanya-tumbuh-49-ini-alasannya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan investasi yang masih positif pada kuartal II-2026 dinilai belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pemerintah dinilai perlu untuk meningkatkan kualitas investasi yang masuk agar tidak hanya memperbesar nilai investasi, tetapi juga mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.

Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, realisasi investasi sebesar Rp 511,8 triliun pada kuartal II-2026 yang tumbuh 7,1% secara tahunan (year on year/yoy) tetap menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Realisasi investasi sebesar Rp 511,8 triliun pada kuartal II-2026 yang tumbuh 7,1% yoy tentu menjadi sinyal positif dan tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian

global. Namun, jika dicermati lebih dalam, kualitas pertumbuhan investasinya mulai menunjukkan perbedaan yang cukup jelas," ujar Faiz kepada Kontan, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, pertumbuhan investasi saat ini lebih banyak ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI), yang pada kuartal II-2026 tumbuh 27,5% secara tahunan. Sebaliknya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru berkontraksi 7,8% yoy, atau menjadi kontraksi pertama sejak kuartal I-2021.

Faiz menilai kondisi tersebut menunjukkan investor asing masih optimistis terhadap prospek jangka panjang Indonesia, khususnya pada sektor hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam. Namun di sisi lain, pelaku usaha domestik masih cenderung menahan ekspansi akibat lemahnya permintaan domestik, tingginya biaya pendanaan, serta ketidakpastian ekonomi.

Meski investasi diperkirakan masih memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2026, Irman menilai dampaknya belum cukup besar untuk menutupi perlambatan konsumsi rumah tangga maupun aktivitas sektor manufaktur.

"Karena itu, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 berada di kisaran 4,9% secara tahunan," katanya.

Faiz juga menyoroti kualitas investasi dari sisi penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, penyerapan 742.293 tenaga kerja dari realisasi investasi pada kuartal II-2026 memang merupakan perkembangan yang positif. Namun, pemerintah perlu mengarahkan investasi agar lebih banyak masuk ke sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Saat ini, investasi masih terkonsentrasi pada sektor logam dasar, pertambangan, dan hilirisasi mineral yang secara karakteristik merupakan sektor padat modal.

"Sektor-sektor tersebut penting untuk meningkatkan nilai tambah industri, daya saing, dan ekspor nasional, tetapi kemampuan menyerap tenaga kerjanya relatif lebih rendah dibandingkan sektor manufaktur padat karya maupun sektor jasa," ujarnya.

Menurut Irman, strategi hilirisasi tetap perlu dilanjutkan karena memberikan manfaat struktural bagi perekonomian nasional. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan upaya menarik investasi ke sektor-sektor padat karya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan lebih luas.

Ia menyebut sektor manufaktur, industri makanan dan minuman, tekstil, elektronik, hingga ekonomi digital memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, kemudahan berusaha, serta kepastian regulasi juga dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas investasi.

"Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas dan berkualitas sehingga tingkat pendapatan masyarakat dan daya beli dapat meningkat secara lebih stabil ke depan," pungkas Faiz.

Investasi Semester I-2026 Tembus Rp 1.010 Triliun, Serap 1,4 Juta Tenaga Kerja

Kamis, 16 Juli 2026 16:57 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/investasi-semester-i-2026-tembus-rp-1010-triliun-serap-14-juta-tenaga-kerja>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh 7,2% secara tahunan (year on year/yoy) dan telah mencapai 49,5% dari target investasi tahun ini sebesar Rp 2.041,5 triliun.

Meski masih mencatat pertumbuhan, laju investasi pada semester I-2026 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagai perbandingan, realisasi investasi pada semester I-2025 mencapai Rp 942,9 triliun atau tumbuh 13,6% secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, capaian tersebut sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk enam bulan pertama tahun ini.

"Dan ini sesuai dengan target kami, yaitu mencapai 49,5% dari total target dalam satu tahun," ujar Rosan dalam konferensi pers di Istana, Kamis (16/7/2026).

Menurut Rosan, capaian investasi yang hampir menyentuh separuh target tahunan menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia masih tetap terjaga. Hal ini terjadi di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh berbagai tantangan geopolitik dan geoekonomi.

"Di tengah masih adanya tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah komitmen para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment masih in line dengan target yang dicanangkan Bapak Presiden kepada kami untuk tahun 2026," katanya.

Berdasarkan sumber investasinya, realisasi investasi pada semester I-2026 ditopang secara berimbang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Realisasi PMA tercatat sebesar Rp 507,6 triliun atau berkontribusi 50,2% terhadap total investasi. Sementara itu, PMDN mencapai Rp 502,9 triliun dengan kontribusi sebesar 49,8%.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang semester I-2026, realisasi investasi berhasil menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya," tutur Rosan.

Pemerintah optimistis tren investasi akan terus berlanjut pada paruh kedua tahun ini sehingga target investasi sebesar Rp 2.041,5 triliun dapat tercapai hingga akhir 2026.

Investasi Asing ke RI Naik 17,3% Capai Rp 507,6 T, Singapura dan Hongkong Terbesar

Kamis, 16 Juli 2026 16:40 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/investasi-asing-ke-ri-naik-173-capai-rp-5076-t-singapura-dan-hongkong-terbesar>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia masih menggeliat di tengah ketidakpastian global. Sepanjang semester I-2026, realisasi investasi asing mencapai Rp 507,6 triliun atau naik 17,3% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada semester I-2025 yang sebesar Rp 432,6 triliun.

Nilai investasi asing tersebut menyumbang sekitar 50,2% dari total realisasi investasi nasional semester I-2026 yang mencapai Rp 1.010,6 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, derasnya arus investasi asing menunjukkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih tetap terjaga meski dunia masih menghadapi tantangan geopolitik dan geoeкономи.

"Di tengah masih adanya tantangan geopolitik maupun geoeкономи dunia, Alhamdulillah komitmen para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment masih in line dengan target yang dicanangkan Bapak Presiden kepada kami untuk tahun 2026," ujar Rosan dalam konferensi pers di Istana, Kamis (16/7/2026).

Secara sektoral, investasi asing paling besar mengalir ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya senilai Rp 135 triliun atau berkontribusi 26,6% terhadap total PMA semester I-2026. Posisi berikutnya ditempati sektor jasa lainnya sebesar Rp 56,2 triliun atau 11,1%, disusul sektor pertambangan Rp 34,9 triliun atau 6,9%.

Selanjutnya, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran mencatat realisasi investasi sebesar Rp 30,5 triliun atau sekitar 6% dari total PMA. Sementara sektor listrik, gas, dan air memperoleh investasi sebesar Rp 29,9 triliun atau berkontribusi 5,9%.

Dari sisi asal negara, Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia sepanjang semester I-2026 dengan nilai investasi mencapai US\$ 8,8 miliar. Posisi berikutnya ditempati Hong Kong sebesar US\$ 7,6 miliar, Republik Rakyat Tiongkok (China) US\$ 3,9 miliar, Jepang US\$ 1,9 miliar, serta Amerika Serikat US\$ 1,7 miliar.

Kelima negara tersebut menyumbang sekitar 77,8% dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia selama semester I-2026.

Adapun berdasarkan lokasi investasi, Jawa Barat menjadi tujuan utama investasi asing dengan realisasi mencapai Rp 84,9 triliun. Selanjutnya DKI Jakarta sebesar Rp 67,1 triliun, Sulawesi Rp 64,7 triliun, Maluku Utara Rp 61,8 triliun, dan Kepulauan Riau sebesar Rp 26,4 triliun.

Meski secara kumulatif semester I Singapura masih menjadi investor terbesar, Rosan mengungkapkan terjadi pergeseran pada kuartal II-2026. Hong Kong menjadi negara dengan nilai investasi terbesar pada periode tersebut.

"Di kuartal kedua investor terbesar kita justru adalah Hong Kong. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura," kata Rosan.

Khusus pada kuartal II-2026, investasi dari Hong Kong tercatat sebesar US\$ 5 miliar, melampaui Singapura yang sebesar US\$ 4,2 miliar. Selanjutnya disusul China sebesar US\$ 1,7 miliar, Jepang US\$ 0,9 miliar, dan Malaysia US\$ 0,7 miliar.

Penerimaan retribusi daerah di Kudus hingga Juni 2026 mencapai Rp165,72 miliar

Kamis, 16 Juli 2026 13:57 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/638695/penerimaan-retribusi-daerah-di-kudus-hingga-juni-2026-mencapai-rp16572-miliar>

Kudus (ANTARA) - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan dari retribusi daerah hingga Juni 2026 atau semester pertama tahun 2026 mencapai sebesar Rp165,72 miliar atau 47,07 persen dari target Rp352,1 miliar.

"Dengan realisasi hampir separuh dari target, kami optimistis pada akhir tahun bisa memenuhi target tahunan," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Kamis

Ia mengungkapkan penerimaan retribusi sebesar itu, berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dari pos penerimaan tersebut, kata dia, yang realisasinya terbesar dari pos retribusi jasa umum, disusul retribusi jasa usaha.

"Retribusi jasa umum realisasinya mencapai Rp158,25 miliar atau 47,5 persen dari target Rp333,18 miliar. Sedangkan Retribusi jasa usaha realisasinya mencapai Rp6,72 miliar atau 39,8 persen dari target Rp16,87 miliar," ujarnya.

Sementara untuk retribusi perizinan tertentu dari target sebesar Rp2,02 miliar, sedangkan realisasinya Rp755,26 juta atau 37,36 persen.

Retribusi jasa umum, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan, pelayanan parkir dan pasar.

Untuk retribusi jasa usaha, meliputi retribusi pelayanan tempat khusus parkir, tempat penginapan, pelayanan rumah potong potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produk usaha daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah.

Retribusi perizinan tertentu, meliputi retribusi persetujuan bangunan dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Pemprov Jateng Jadi Pilot Project LKPP untuk Pengadaan Berkelanjutan

Kamis, 16 Juli 2026

<https://joglojateng.com/2026/07/16/pemprov-jateng-jadi-pilot-project-lkpp-untuk-pengadaan-berkelanjutan/>

SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan (pilot project) penerapan pengadaan berkelanjutan. Penetapan ini secara resmi ditunjuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penunjukan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih ramah lingkungan. Sekaligus, menjadikannya sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyambut baik penunjukan Jawa Tengah sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan LKPP tersebut. Program ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, penetapan ini juga mendorong penggunaan produk yang ramah lingkungan dalam ruang lingkup pengadaan pemerintah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada LKPP yang sudah menunjuk Jawa Tengah untuk piloting pengadaan berkelanjutan,” kata Sumarno.

Hal itu disampaikannya di sela acara Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Hotel Aruss Semarang, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, konsep pengadaan berkelanjutan tidak lagi hanya berorientasi pada kualitas barang dan harga.

Tetapi, sistem ini juga sangat memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Dari sisi ekonomi, lanjut Sumarno, pengadaan pemerintah harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.

Khususnya para pelaku UMKM, agar bisa ikut berpartisipasi sebagai penyedia barang dan jasa. “Pengadaan harus melibatkan semua. Bagaimana mendorong ekonomi lokal, bagaimana mendorong UMKM agar terlibat di dalamnya,” jelas Sumarno.

“Kami bersyukur karena di Jawa Tengah pelaku ekonomi mayoritas adalah UMKM,” imbuhnya.

Selain aspek ekonomi, pengadaan berkelanjutan juga diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Utamanya melalui penggunaan barang dan jasa yang berkonsep ramah lingkungan.

“Terkait dengan pengadaan barang-barang yang ramah lingkungan, ini menjadi bagian dari upaya kita menjaga keberlanjutan. Baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan ke depan,” terangnya.

Sumarno juga berpesan kepada seluruh penyedia barang dan jasa di Jawa Tengah. Mereka diminta agar menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

Penyedia yang telah memperoleh pekerjaan juga diminta menjaga kualitas hasil pekerjaannya. Hal tersebut harus selalu dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Apabila sudah ditunjuk menjadi penyedia barang dan jasa, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jaga kualitasnya agar sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Lebih jauh, Sumarno berharap para penyedia mulai menyesuaikan diri dengan konsep pengadaan berkelanjutan ini. Baik melalui penyediaan produk yang ramah lingkungan maupun praktik usaha yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Dengan pengadaan berkelanjutan ini, teman-teman penyedia juga harus mulai masuk ke sana. Bagaimana bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan keberlanjutan,” harapnya.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Setyowati memberikan keterangan terkait hal ini. Ia mengatakan, Jawa Tengah dipilih karena memiliki nilai pengadaan yang besar.

Serta, adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan nilai belanja pengadaan yang tergolong tinggi.

Provinsi ini memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi sistem pengadaan pemerintah yang lebih berkelanjutan ke depannya. “Harapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan,” papar Dwi.

Dwi menambahkan, respons cepat Pemprov Jateng ketika diminta menjadi pilot project menunjukkan sebuah komitmen kuat. Terutama, untuk bersama-sama mengembangkan sistem pengadaan yang berorientasi pada pelestarian.

Ia menjelaskan, praktik pengadaan di Jawa Tengah saat ini telah mengarah pada prinsip-prinsip pengadaan hijau (green procurement). Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fungsional saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan.

Beberapa di antaranya dilakukan dengan memilih produk atau peralatan yang memiliki emisi lebih rendah. Serta, senantiasa memperhatikan aspek kelestarian ekosistem lingkungan.

“Praktik-praktik baik tersebut sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, ke depan tidak perlu memulai dari awal lagi untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Dwi, yang diperlukan adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, juga perlunya dukungan kebijakan daerah agar implementasinya semakin optimal.

Sebagai informasi, pada tahun ini LKPP menetapkan lima instansi sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan. Tiga di antaranya merupakan kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, dua pemerintah daerah yang dipilih secara khusus adalah Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat. (hms/rds)